Jenderal (Purn) H. Djoko Santoso

Menggagas Indonesia Masa Depan

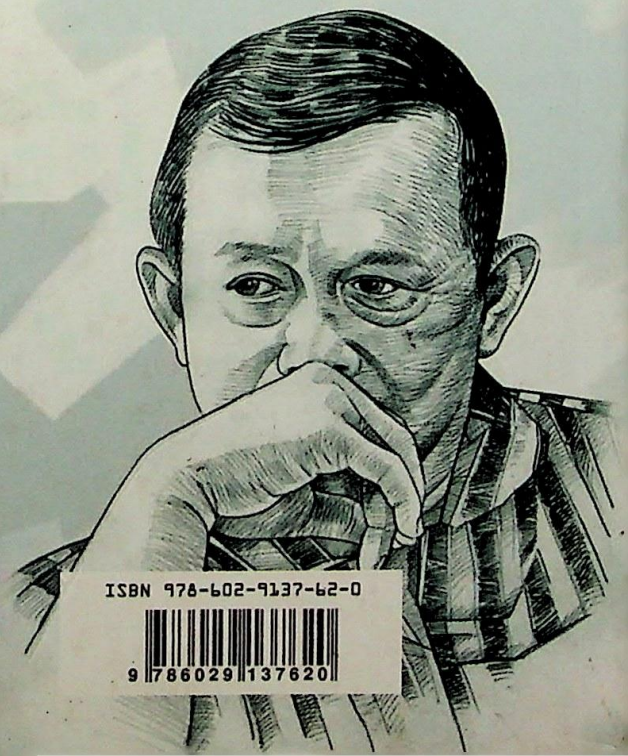


Menggagas Indonesia Masa Depan

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beraneka ragam masyarakat, suku bangsa, etnis atau kelompok sosial, kepercayaan, agama dan kebudayaan yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain.

Kondisi bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini menyebabkan beragam pula keinginan masing-masing individu. Orang-orang dari daerah yang berbeda dengan latar belakang berbeda, struktur sosial dan karakter yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda dengan cara berpikir dalam menghadapi hidup dan masalah mereka sendiri.

Namun, mereka menjadi sebuah bangsa oleh dua konsepsi kebangsaan yang disepakati, yakni konsep pluralitas dan konsep gotong royong.



Tebet Center 66

komodo books

ISBN 978-602-9137-62-0

9 786029 137620

mulai dengan "A" (Adil),
tera), dan "A" (Aman),
n pendekatan yang
n rakyat kini dan di masa
g, sejalan dengan format
hidupan sosial politik
s dan ditopang oleh
an kesejahteraan rakyat,
tai dengan penjagaan
terhadap kedua hal
Tanpa rasa aman dan
, maka keadilan dan
aan akan sangat sulit

n, pendekatan ASA yang
ngan cita-cita kemerdekaan
donesia, sebagaimana
dalam Pembukaan UUD
: "Indonesia yang merdeka,
dil, dan makmur". Karena
mencapai cita-cita yang
rlukan pemahaman dan
mana "rakyat sejahtera,
at". Untuk membangun
g kuat, rakyat harus
lan untuk mewujudkan
htera diperlukan negara
mampu melindungi rakyat.
wujudkan cita-cita bangsa
u pekerjaan yang mudah.
di era globalisasi saat
sa depan semakin berat
eks dalam setiap aspek
dari politik, ekonomi
ial budaya.

N. 15-03-14
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PENDIDIKAN AGRARIA

MENGGAGAS INDONESIA MASA DEPAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 44 :

Undang-undang No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebaimana dimaksud dengan ayat 1 (satu), dipidana sengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Jenderal (Purn) H. DJOKO SANTOSO

MENGGAGAS INDONESIA MASA DEPAN

MENGGAGAS INDONESIA MASA DEPAN

Jenderal (Purn) H. Djoko Santoso

Editor	: Agus Ismanto
	Joko Kanigoro
	Fitri Astuti Lestari
Penyelaras Akhir	: Prof. Dr. G. Ambar Wulan
Sampul & Layout	: Agus Sunarto
Team Materi	: Bakuh Prakoso
	Apiko Djoko Mulyono
	Prasetyo Pribadi

Cetakan Pertama, Januari 2014

Diterbitkan oleh **Tebet Center 66** bekerjasama dengan **Komodo Books**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All right reserved

ISBN : 978-602-9137-62-0

Dilarang mengutip, menerjemahkan, memfotokopi, dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi draft buku dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Pengantar

Ada tiga masalah besar yang tengah dihadapi Bangsa Indonesia saat ini. Yang pertama adalah semakin menipisnya sumber daya energi (SDE) yang dimiliki Indonesia. Akibatnya harga bahan bakar minyak (BBM) terus merangkak naik dan nilai subsidi terus bertambah. Subsidi terhadap ekonomi kita sudah sangat besar. Menurut BP Statistical Review 2013, rasio cadangan produksi Indonesia tahun ini tinggal 11 tahun, dengan posisi atau cadangan minyak yang tersisa mencapai 3,7 miliar barel, atau hanya mencapai 0,2% dari jumlah cadangan minyak di dunia saat ini.

Masalah kedua, jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga ledakan pertumbuhan tidak dapat dihindari. Dengan jumlah penduduk sebesar 237,6 juta jiwa tersebut, membuat Indonesia tetap bercokol sebagai negara berpenduduk terbanyak setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Sebenarnya jumlah penduduk yang besar bukanlah suatu masalah, sebab apabila semua penduduknya memiliki kualitas SDM yang baik maka justru akan memberikan kontribusi kepada negara. Semakin banyak pertumbuhan penduduk di Indonesia namun tidak sejalan dengan pertumbuhan pembangunan di Indonesia sendiri. Sehingga menambah tingkat kemiskinan di Indonesia.

Problematika ketiga atau yang terakhir adalah sistem pemerintahan yang lemah, sehingga tindak pidana korupsi terus terjadi dan membentuk negara yang boros dalam pengeluaran anggaran dan sumber daya yang dimiliki. Sistem pemerintahan yang inefisiensi memungkinkan terjadinya negara yang gagal

(*failed state*). Hal itu dapat dibandingkan dengan negara-negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, seperti; China yang lebih efisien 66 kali dari kita. India 70 kali lebih efisien dari kita. Karena itu, siapapun yang memerintah akan menghadapi masalah yang sama.

Indonesia perlu mencermati tantangan bangsa, baik di bidang politik maupun ekonomi. Kita melihat terjadi perubahan yang sangat cepat dalam perubahan dan peradaban. Tanda-tanda zaman telah terlihat. Sebuah fenomena ekonomi yang bergerak, Bangsa Indonesia sedang membangun peradaban baru.

Salah satu fenomena yang dihadapi Indonesia adalah dalam perubahan demografi. Di sejumlah negara besar seperti Jepang dan China, lebih dari separuh penduduknya akan mengalami penuaan. Hal ini merupakan fenomena, sedangkan di Asia, khususnya Indonesia mengalami demografi ganda. Ini adalah bonus kita memiliki manusia usia produktif.

Tetapi apakah usia produktif tersebut orang-orang yang berkualitas? Pertanyaannya apakah Indonesia siap menghadapi ekonomi global, jawabannya kita harus siap. Indonesia terus mengalami perkembangan terutama dalam sektor pendapatan yang saat ini telah mencapai 3.400 dolar perkapita. Pendapatan per kapita sebesar itu tentu saja masih terlalu kecil dan belum cukup untuk kebutuhan masyarakat kita.

Sementara itu berkaitan dengan demokrasi, di Indonesia belum menunjukkan ke arah konsolidasi. Demokrasi konsisten mengalami kemunduran. Karena demokrasi bukan sekadar alat mencapai prosedural. Seharusnya demokrasi merupakan tata nilai (*value*) yang mampu mengantarkan bangsa ini mencapai kesuksesannya. Dengan demikian, demokrasi tidak boleh

ditunggangi oleh oligarkhi yang bukan merupakan tujuan bangsa kita.

Problem Bangsa Indonesia saat ini cukup banyak, maka membutuhkan pemimpin yang amanah. Amanah rakyat menjadi unsur penting dalam kepemimpinan negara. Sementara yang menjadi masalah adalah rendahnya kepercayaan politik di Indonesia. Banyak masalah dihadapi akibat tingkat kepercayaan rakyat terhadap negara, persisnya lembaga eksekutif terus berkurang.

Masalah kepercayaan (*trust*), memang cukup relevan dengan situasi sekarang. Krisis kepemimpinan tengah dialami Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Indonesia hanya semata-mata menjadi arena pertarungan pemimpin-pemimpin yang cenderung mengandalkan popularitas daripada kompetensi.

Karena itu amanah merupakan elemen paling penting dalam hubungan apa saja, termasuk ranah politik. Kepercayaan rakyat untuk pemimpin tidak dapat dipaksakan. Kepercayaan hanya dapat diraih dan diperolehnya dengan menunjukkan kualitas dan kemampuan. Sehingga jika kepercayaan dikhianati akan membuat rakyat marah dan berpaling.

Pada situasi demikian, seorang pemimpin yang dibutuhkan adalah seorang yang mampu mempengaruhi pihak lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu, yang dapat saja ditentukan oleh si pemimpin sendiri atau ditentukan bersama. Seorang pemimpin nasional adalah seseorang yang mampu mempengaruhi rakyat sehingga dapat digerakkan dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam menerapkan pengaruh ini seorang pemimpin memerlukan suatu kekuasaan yang berakibat timbulnya kepatuhan atau ketaatan pada yang dipimpin dengan memanfaatkan potensi-

potensi yang ada padanya.

Bahkan dalam teori politik modern bahwa syarat umum itu seorang pemimpin dapat dirumuskan dalam tiga hal, yakni; akseptabilitas, kapabilitas, dan integritas. Akseptabilitas yang berarti adanya dukungan riil dari sekelompok masyarakat yang menghendaki orang tersebut menjadi pemimpin. Seseorang baru dianggap sah sebagai pemimpin jika ada yang menginginkan dan memilihnya menjadi pemimpin. Yang kemudian disebut sebagai legitimasi, yakni kelayakan seorang pemimpin untuk diakui dan diterima oleh orang-orang yang dipimpinnya melalui proses pemilihan yang berlangsung secara jujur dan adil.

Syarat kedua adalah kapabilitas. Jika akseptabilitas menyangkut keabsahan seorang sebagai pemimpin, maka kapabilitas menyangkut kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin tidak hanya cukup karena ada yang menghendaki menjadi pemimpin dan kemudian memilihnya sebagai pemimpin, tetapi harus dilengkapi dengan kemampuan yang memadai untuk mengelola berbagai sumber daya dari orang-orang yang dipimpinnya agar tidak sampai terjadi konflik satu sama lain. Kalaupun nantinya ada konflik, maka pemimpin itu harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengelola konflik itu bukan hanya agar konflik itu mereda dan tidak meluas menjadi konflik fisik apalagi sampai berdarah-darah, tetapi juga agar dari pengelolaan konflik itu lahir sebuah kesepakatan (*consensus*) yang disepakati bersama.

Syarat ketiga, integritas, tidak kalah pentingnya. Akseptabilitas dan kapabilitas hanya mungkin bisa menghasilkan 'produk' yang dirasakan orang-orang yang dipimpinnya jika dilengkapi oleh integritas. Kemampuan memimpin dan keabsahan menjalankan kepemimpinan tidak cukup berarti jika pimpinan itu tidak

memiliki integritas. Karena itu, integritas adalah komitmen moral untuk berpegang teguh dan mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama sekaligus kesediaan untuk tidak melakukan pelanggaran baik terhadap aturan main maupun terhadap norma-norma tak tertulis yang berlaku di masyarakat. Jika akseptabilitas menyangkut legitimasi dan kapabilitas berhubungan dengan kompetensi, maka integritas menyangkut konsistensi dalam memegang teguh aturan main dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Tanpa akseptabilitas, seorang pemimpin akan mudah dipertanyakan keabsahannya karena tidak memiliki legitimasi yang kuat. Sebaliknya tanpa kapabilitas, seorang pemimpin tidak mungkin bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik karena dia tidak dilengkapi dengan kompetensi. Namun akseptabilitas dan kapabilitas menjadi tidak ada gunanya jika tidak didukung oleh integritas. Tanpa integritas, seorang pemimpin akan mudah terjerumus dalam sikap sewenang-wenang dan cenderung mengabaikan aturan main dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan sendirinya berbagai bentuk penyelewengan moral akan mudah terjadi.

Rumusan syarat kepemimpinan yang mencakup akseptabilitas, kapabilitas, dan integritas tersebut diatas terletak pada pemimpin yang telah selesai dengan persoalan dirinya sendiri, artinya yang bersangkutan tidak sedang menghadapi persoalan pribadinya. Sebab jika masalahnya belum selesai maka ketiga hal tersebut tentunya akan menjadi penghambat dan menyulitkan kepemimpinannya.

Dalam buku **"Menggagas Indonesia Masa Depan"**, saya mencoba untuk memberikan pemikiran dan analisis tentang kepemimpinan nasional dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa

besar dimasa mendatang. Harapan saya buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dan upaya membayar hutang sejarah saya sebagai rakyat yang merintis karir militer mulai dari bawah hingga saya menduduki posisi yang tertinggi di TNI, sebagai Panglima TNI.

Seorang pemimpin, harus memiliki ketegasan dalam aturan main yang sudah diatur dalam konstitusi. Itu pandangan saya, seorang pemimpin harus memiliki komitmen untuk mengembalikan situasi keadilan, kesejahteraan dan keamanan. Kemudian yang perlu dilakukan adalah tindakan tegas menjalankannya. Apa yang sudah diamanatkan konstitusi harus kita lakukan dengan tegas.

Mudah-mudahan penerbitan buku ini dapat memberikan dorongan lahirnya pemikiran dan paradigma baru tentang kepemimpinan nasional dimasa mendatang. Agar bangsa kita memiliki kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, mandiri dan berdikari.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi terhadap penerbitan buku ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih.

Jakarta, Januari 2014

Jenderal (Purn) H. Djoko Santoso

Daftar Isi

Pengantar v

Daftar Isi xi

Pendahuluan 1

Bagian Pertama

ASA DAN RASA KEBANGSAAN

Bab 1

Dasar dan Pilar Kebangsaan Sebagai Karakter Bangsa ... 9

PENGANTAR 11

DASAR DAN PILAR KEBANGSAAN 12

IDEOLOGI BANGSA 16

KONSEP NEGARA KESATUAN 25

PRINSIP KEBHINEKAAN 28

Bab 2

Revitalisasi Budaya Bangsa 31

PENGANTAR 33

REVITALISASI BUDAYA SEBAGAI PROSES 35

PENGUATAN KEPRIBADIAN BANGSA 40

KEPRIBADIAN YANG BERKEBUDAYAAN 42



REVITALISASI BUDAYA: SUATU KEHARUSAN 45

REVITALISASI BUDAYA:
PENGUATAN BUDAYA LOKAL 48

Bab 3

Pluralisme Kebangsaan 51

PENGANTAR 53

PEMAHAMAN PLURALITAS KEBANGSAAN 55

KONSEP NASIONALISME 57

RASA PLURALITAS KEBANGSAAN 58

PLURALISME UNTUK INTEGRASI BANGSA 63

KULTUR BARU BANGSA INDONESIA 68

REDUPNYA PLURALISME 70

INDONESIA, MODEL PLURALISME
AGAMA DUNIA 72

MENANAMKAN PLURALITAS
LEWAT PENDIDIKAN 73

Bab 4

Mewujudkan Kemandirian Bangsa 79

PENGANTAR 81

KEBANGGAAN PRODUK DALAM NEGERI
DAN KEMANDIRIAN 83

GLOBALISASI DAN KEDAULATAN BANGSA 86

GLOBALISASI DAN SIKAP NASIONAL 88

MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA 91

KEBANGKITAN KEMANDIRIAN BANGSA.....94
UKURAN KEMANDIRIAN 98
TRISAKTI DAN KEMANDIRIAN BANGSA 100
KUBA ADOPSI TRI SAKTI 106
INTEGRITAS SEBAGAI ASPEK KEMANDIRIAN BANGSA 108

Bab 5

Nasionalisme sebagai Identitas Bangsa..... 111

PENGANTAR.....113
MEMAHAMI NASIONALISME.....115
MEMBANGKITKAN NASIONALISME.....121
NASIONALISME BARU.....123
ANTIKORUPSI, SIMBOL NASIONALISME BARU 125
SIKAP INKLUSIF SEBAGAI NASIONALISME BARU.....128
MEMPERKUAT IDENTITAS BANGSA DENGAN PENGUASAAN SEJARAH.....129

Bagian Kedua

SOSOK KEPEMIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN

Bab 6

Masalah Kepemimpinan Nasional Ke Depan..... 137

PENGANTAR.....139

MASALAH KEPEMIMPINAN MASA DEPAN 141
ORANG TERPILIH 143

Bab 7

Pemimpin Yang Mau Mendengar 147

PENGANTAR 149
BUDAYA KRITIK TERHADAP PEMIMPIN 151
PERAN BAWAHAN 153
PEMIMPIN NASIONAL KE DEPAN 155
KEPEMIMPINAN DEMOKRASI: MENDENGAR 156

Bab 8

Pemimpin Yang Jujur dan Bersih 161

PENGANTAR 163
PEMIMPIN YANG AMANAH 163
LANGKANYA PEMIMPIN YANG JUJUR 165
INDONESIA BUTUH PEMIMPIN JUJUR 169

Bab 9

Pemimpin Yang Kapabel dan Berkualitas 173

PENGANTAR 175
KAPABILITAS SEORANG PEMIMPIN 177
DUKUNGAN KAPABILITAS SISTEM POLITIK 178
PEMIMPIN BERKUALITAS 183
MODEL PEMIMPIN BERKUALITAS 184

MENCARI PEMIMPIN BERKUALITAS.....187

Bab 10

Pemimpin Yang Kuat dan Berani..... 189

PENGANTAR.....191

NEGARA YANG KUAT 193

KEPEMIMPINAN YANG KUAT 194

KEPEMIMPINAN KUAT BUKAN OTORITER.....198

PEMIMPIN YANG ASKETIS DAN BERANI 199

KEPEMIMPINAN KUAT BANGKITKAN MARTABAT BANGSA.....202

KASUS NEGARA LAIN 206

Bab 11

Pemimpin Yang Cerdas dan Efisien 213

PENGANTAR.....215

KEMAMPUAN BERPIKIR 222

PEMIMPIN CERDAS EMOSIONAL DAN SPIRITUAL.....225

PEMIMPIN YANG EFISIEN.....230

Bab 12

Pemimpin Yang Transformatif 235

PENGANTAR.....237

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF.....238

MENGGALI PEMIMPIN TRANSFORMATIF 242

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF:
INTEGRITAS MORAL ETIK 244

Bab 13

Pemimpin yang Telah Selesai dengan Persoalan Dirinya Sendiri 247

PENGANTAR 249
TIPE KEPEMIMPINAN BARU 250
TANTANGAN INDONESIA MASA DEPAN 251
UPAYA MEMIMPIN DIRI SENDIRI 253
PEMIMPIN DAMBAAN RAKYAT 255
PEMIMPIN HARUS MENGENDALIKAN DIRI 259
TELAH SELESAI DENGAN DIRI SENDIRI 261

Daftar Pustaka 263

Tentang Penulis 275



Pendahuluan

Pembangunan di negara-negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia, berlangsung setelah usai Perang Dunia II. Negara berkembang yang semula adalah negara bekas jajahan, saat itu mulai bangkit melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selanjutnya mereka menetapkan diri dan mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka (*independent nations*).

Realitas kebangkitan itu tidak sama antara satu dengan yang lain walaupun semuanya disponsori oleh hutang-hutang luar negeri dalam periode pembangunannya. Di Asia Tenggara, Singapura lebih dulu diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu dari *the Newly Industrializing Countries*. Namun, sebagian besar dari negara berkembang di Asia, hingga kini belum ada yang menyamai kemajuan negara-negara Barat yang mengklaim diri sebagai negara modern, kecuali empat negara yang disebut sebagai *the Newly Industrializing Countries*, yakni Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura.

Sementara itu, Indonesia sendiri telah mengawali dengan mengangkat isu pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera.

Namun demikian, bila kita kaji lebih mendalam, masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan *laten* hingga kini. Meskipun sejak reformasi, setiap pergantian kepemimpinan nasional, isu pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi agenda pertarungan kepentingan partai politik.

Kondisi ini, mendorong perlunya suatu terobosan berpikir

untuk keluar dari persoalan tersebut. Suatu bangunan harapan dalam rupa "ASA", yakni Adil, Sejahteran, dan Aman adalah landasan dasar bagi terobosan guna mewujudkan pemulihan masa depan rakyat. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat yang menopang kesejahteraan mereka, dan ini akan terwujud dengan hadirnya ketenangan lahir batin karena keamanan mereka terjaga.

Menurut Socrates, keadilan adalah keadaan dimana pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik. Bila para penguasa telah mematuhi dan mempraktekkan ketentuan-ketentuan hukum dan bila pemimpin negara bersikap ijaksana dan memberi contoh kehidupan yang baik. Maka, eadilan itu tercipta bilamana setiap warga sudah dapat merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka, membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur-struktur yang menyangkut bidang politik, ekonomi, hukum, budaya, pertahanan, dan keamanan memungkinkan pelaksanaan keadilan.

Dalam batang tubuh UUD'45 Pasal 33 dengan tegas diungkapkan dua ketentuan yang amat penting: suatu pembatasan hak milik pribadi mutlak terhadap alat-alat produksi dan suatu penetapan tujuan dan tanggung jawab usaha ekonomi yang harus dijamin oleh negara, ialah sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. Pernyataan dalam UUD'45 ini secara jelas dan dengan resmi menetapkan bahwa pembangunan ekonomi harus demi kesejahteraan rakyat.

Di tengah masyarakat Indonesia yang sedang berubah dimana kesejahteraan ditentukan atas ukuran individual yang ditandai oleh peningkatan pendapatan dan pemilikan, institusi kesejahteraan yang berbasis komunitas (*community welfare*) dalam beberapa

hal masih tampak di pedesaan maupun kampung pinggiran kota. Kerangka ini belum ditangkap oleh kerangka organisasi formal pelayanan kesejahteraan sosial (Narayan, 2007:141). Institusi itu antara lain adalah kematian, sakit, hajatan, dan berbagai bentuk kegiatan untuk kepentingan bersama yang dipikul secara bersama-sama. Perilaku sosial seperti ini juga diamanatkan oleh agama sebagai kepedulian terhadap kemanusiaan (Barusch, 2005:131).

Dapat dibayangkan seandainya kondisi seperti ini tidak ada di tengah krisis ekonomi, yang berakibat salah satunya rasionalisasi ketenagakerjaan di perusahaan besar, radikalisasi sosial yang mengakibatkan instabilitas sosial dan politik, ketika negara tidak mampu mengatasi pemutusan hubungan kerja. Keuntungan dari kondisi kehidupan masyarakat tradisional yang "guyub" masih mampu menjamin sanak keluarga untuk hidup bersama ketika ada pemutusan hubungan kerja. Mereka pulang ke desa masih disapa dan diterima untuk sementara waktu sebelum mendapat pekerjaan baru.

Negara Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju. Di samping itu, pengalaman empiris dari negara-negara lain menjadi *lesson learnt,* diantaranya Korea Selatan yang semula bangsa feodal dan tradisional yang sistem ekonomi, politik dan hukumnya runtuh akibat perang saudara di tahun 1950-1953 membutuhkan waktu 30 tahun untuk mampu menjadi negara modern dan sejahtera, terutama sejak pemerintahan Presiden Park Chung Hee. Dalam pencapaiannya ini, ia memperoleh penghormatan dunia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade.

Selanjutnya, rasa aman merupakan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan bagi terwujudnya kehidupan rakyat yang sejahtera. Munculnya berbagai teror terhadap tempat ibadah, kelompok

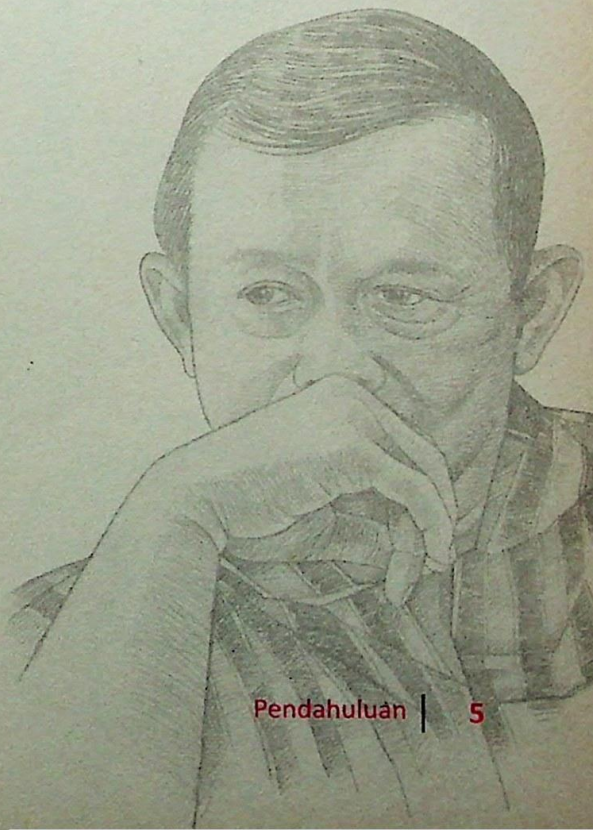
masyarakat dan individu serta konflik sosial, baik vertikal maupun horisontal, menuntut ketegasan negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dalam keadaan ini tugas yang diemban oleh pihak keamanan memang sangatlah strategis. Dengan kata lain, upaya menjaga keamanan harus segera disikapi untuk menjaga keutuhan bangsa dengan landasan hukum yang ada. Meskipun tugas dan tanggung jawab membuat situasi aman, tertib, serta damai bukan hanya ada di pundak aparat saja, melainkan seluruh elemen rakyat ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan bangsa ini.

"ASA", dimulai dengan "A" (Adil), "S" (Sejahtera), dan "A" (Aman), merupakan pendekatan yang dibutuhkan rakyat kini dan di masa mendatang, sejalan dengan format tatanan kehidupan sosial politik demokratis dan ditopang oleh peningkatan kesejahteraan rakyat, yang disertai dengan penjagaan keamanan terhadap kedua hal pertama. Tanpa rasa aman dan keamanan, maka keadilan dan kesejahteraan akan sangat sulit terwujud.

Kemudian, pendekatan ASA yang sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945: "Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur". Karena itu untuk mencapai cita-cita yang luhur diperlukan pemahaman dan kondisi dimana "rakyat sejahtera, negara kuat". Untuk membangun negara yang kuat, rakyat harus sejahtera dan untuk mewujudkan rakyat sejahtera diperlukan negara kuat yang mampu melindungi rakyat. Upaya mewujudkan cita-cita bangsa bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tantangan di era globalisasi saat ini dan masa depan semakin berat dan kompleks dalam setiap aspek kehidupan, dari politik, ekonomi sampai sosial budaya.

Di samping itu, reformasi belum berhasil sepenuhnya seperti

yang kita harapkan selama ini. Perlunya konsolidasi nasional, dengan menginventarisasi keberhasilan dan kekurangan kita selama ini, melakukan reorientasi untuk menentukan dimana saat kita ini berada dan merencanakan perjalanan bangsa ke depan untuk memproyeksikan masa depan Bangsa Indonesia secara lebih baik. *****



Bagian Pertama

ASA DAN RASA KEBANGSAAN



Dasar dan Pilar Kebangsaan Sebagai Karakter Bangsa

Bab 1

Djoko Santoso
for the People

Pudarnya nilai-nilai kemanusiaan, sikap toleransi, dan penghargaan terhadap sesama manusia menjadi salah satu bukti betapa bebasnya bangsa ini untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap komunitas lain yang dianggap berbeda dengan komunitasnya. Perbedaan yang sejatinya bisa menjadi berkah kehidupan dan perekat persatuan dalam ikatan kebangsaan seolah menjadi "kutukan" bagi bangsa yang ditakdirkan hidup dalam belantika pluralitas dan multikulturalitas kehidupan.



"Dasar negara, yakni dasar untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka, haruslah kokoh kuat sehingga tak mudah digoyahkan. Bahwa dasar negara itu hendaknya jiwa, pikiran-pikiran yang sedalam-dalamnya, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi." (Pidato **Bung Karno** pada saat sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945).

PENGANTAR

Namun fenomena yang terjadi kini adalah pudarnya nilai-nilai kemanusiaan, sikap toleransi, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Fenomena dari tindakan-tindakan kekerasan atas anak bangsa yang dianggap berbeda dengan komunitasnya. Perbedaan yang sejatinya adalah berkah kehidupan dan menjadi perekat persatuan dalam ikatan kebangsaan, yang ditakdirkan hidup dalam blantika pluralitas dan multikulturalitas kehidupan.

Oleh karena itu, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya tidak semudah dengan membalikkan kedua telapak tangan, apalagi di tengah kehidupan bangsa yang mengglobal seperti saat ini, berbagai macam tantangan datang silih berganti menerpa kehidupan bangsa kita yang baru berusia setengah abad lebih.

Proses mengindonesia tidak terjadi secara alamiah, tetapi melalui proses sejarah yang panjang untuk bebas dari penjajahan kolonialisme hingga terbentuknya suatu wilayah yang disebut nusantara. Secara historis, proses menuju persatuan bangsa telah dimulai sejak Kebangkitan Nasional pada awal abad-20 yang terus menguat sampat tercetusnya Sumpah Pemuda, dan berujung pada lahirnya NKRI.

Adapun "bangunan" nasionalisme yang dibutuhkan sebagai

perekat persatuan bangsa, mengacu pada pandangan Bung Karno, hanya mungkin terjadi melalui sebuah revolusi, yaitu revolusi kebangsaan yang dapat mempererat persatuan seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, kemerdekaan Indonesia adalah jembatan emas menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, sehingga bisa melakukan revolusi kebangsaan hingga menyentuh sendi-sendi kehidupan di masyarakat.

Kendala utama sebenarnya dalam merevitalisasi semangat nasionalisme di tengah-tengah Kebhinekaan Indonesia adalah terletak pada hegemoni politik kekuasaan, seperti yang dikatakan Antonio Gramsci (1997). Pertanyaannya, mungkinkah nasionalisme dapat dibangun dengan struktur bangsa Indonesia yang majemuk seperti Indonesia? Apa potensi yang mungkin dapat dikembangkan?

Kemajemukan bangsa Indonesia secara normatif tidak bisa diinterpretasi akan mengancam stabilitas sosial-politik Indonesia, bahkan dapat menjadi langkah primordial dalam menyatukan keragaman tersebut dalam satu komitmen untuk menjadi bangsa yang independen dan mandiri. Potensi yang mungkin dapat dikembangkan dengan kemajemukan bangsa Indonesia adalah terbangunnya masyarakat madani (*civil society*) sebagai pembentukan masyarakat yang demokratis.

DASAR DAN PILAR KEBANGSAAN

Eksistensi sebuah negara tidak terlepas dari pilar-pilar kebangsaan yang terbangun dari nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai kebangsaan Indonesia mengacu kepada 4 konsensus dasar bangsa, yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhineka Tunggal Ika. Pilar-pilar kebangsaan dalam

konteks Indonesia termaktub jelas dalam ideologi Pancasila yang inklusif dan UUD 1945 sebagai penjabaran dari ideologi negara. Itulah pilar-pilar sebagai panduan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai undang-undang dasar negara yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lima sila dalam Pancasila, sesungguhnya merupakan deklarasi dari karakter bangsa Indonesia. Penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara implementatif tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, meliputi nilai-nilai sila dari Pancasila, memiliki karakter kepejuangan, mengemban tugas melindungi bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kecerdasan, serta ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia, serta memiliki cita-cita bangsa yang mesti diwujudkan, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Konsep ideal karakter bangsa yang tertuang dalam Pancasila bersifat progresif dan dinamis. Nilai-nilai dalam Pancasila bisa diaktualisasikan sesuai dengan konteks jamannya. Namun proses aktualisasi tersebut harus tetap berpijak pada kerangka dasar kehidupan bernegara yang berketuhanan (religiusitas), berkeadilan, beradab, menghargai perbedaan tanpa terlepas dari roh persatuannya sebagai warga negara.

Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila sebagai sinergi budaya bangsa, membuktikan bahwa kita sebagai bangsa memiliki pijakan nilai-nilai universal yang sangat kuat dan sebanding dengan nilai-nilai budaya dunia global. Maka, menggali dan mengembangkan budaya kita dalam proses interaksi dengan budaya global menjadi sebuah keniscayaan untuk semakin memperkuat budaya kita sebagai bagian dari karakter bangsa dan

nilai-nilai kebangsaan.

Semangat atau paham kebangsaan kita bukan sesuatu yang ada begitu saja (*taken for granted*), pada suatu waktu dapat mengalami erosi, jika tidak dikembangkan sesuai dengan dinamika masyarakat dan kenegaraan Indonesia. Kegagalan kebangsaan bisa merupakan akibat dari kegagalan pembangunan ekonomi yang makin mendorong jurang perbedaan (*widening gap*) antara yang kaya dan miskin. Namun bisa pula kegagalan kebangsaan kita dari kelemahan integrasi sosial dan politik serta integrasi wilayah (teritorial).

Dalam kerangka pemikiran inilah, terletak pula penting dan strategisnya upaya menumbuhkan kembali dasar-dasar dan pilar-pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Sosialisasi dasar dan pilar kebangsaan merupakan peneguhan kembali semangat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjaga dan bersemangat Bhineka Tunggal Ika.

Dengan semangat menumbuhkan kembali dasar-dasar dan pilar-pilar tersebut, kita mengupayakan perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya mencegah kegagalan dinamika kebangsaan Indonesia itulah diperlukan strategi sosial budaya, dalam mengembangkan nilai solidaritas rakyat yang berkait atau berdampak terhadap dinamika ekonomi maupun politik. Dalam kerangka inilah kita melihat pentingnya semangat nilai gotong-royong sebagai modal sosial. Bahkan oleh Bung Karno gotong-royong yang dinamis merupakan nilai utama, nilai dasar membangun masyarakat, nilai dasar membangun bangsa dan negara. Gotong-royong hanya mungkin kalau ada

saling percaya, saling menerima dalam masyarakat. Dengan frasa yang agak berbeda, oleh Francis Fukuyama disebut sebagai modal sosial (*social capital*) dengan aspek kepercayaan (*trust*) antaranggota masyarakat sebagai intinya.

Modal sosial pada dasarnya merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Dalam pembangunan masyarakat ke depan aspek ini akan makin penting, melebihi pentingnya modal fisik, modal finansial, dan sebagainya. Modal sosial bukan hanya kualitas, ketrampilan, dan pengetahuan masyarakat, tetapi juga kemampuan masyarakat itu sendiri dalam melakukan asosiasi (hubungan) satu sama lainnya. Kemampuan sosial ini sangat penting, baik dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial politik dan eksistensi kehidupan sosial lainnya. Hal ini sangat bergantung pada suatu kondisi dimana komunitas itu mau saling berbagi, untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama. Dari nilai-nilai bersama ini akan tumbuh suatu nilai yang disebut sebagai kepercayaan (*trust*). Masyarakat tanpa mampu mengembangkan suatu *trust* hanya merupakan kumpulan berbagai kelompok bahkan hanya seperti kerumunan, tidak akan mampu membangun komunitas yang integratif.

Oleh karena itu kebangsaan Indonesia yang menyatu (*unified*) sekaligus mengandung kemajemukan (*pluralistik*). Walaupun pada awalnya integrasi ini lebih didorong oleh penyatuan administrasi penjajahan, tetapi kemudian juga berkembang solidaritas, kepercayaan antara masyarakat Indonesia sehingga lahirlah kebangsaan Indonesia dengan tonggak historis Sumpah Pemuda atau dapat disebut sebagai Sumpah Bangsa, 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu ada yang menyebut bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terbayang

saja (*imagined community*) mengingat pluralitas bangsa Indonesia, satu bangsa yang utuh hanya seolah-olah ada. Kita sebagai bangsa lahir dan berkembang dari suatu pernyataan (sumpah) bersama, oleh karena itu ketika kita mulai membuat pernyataan berbeda dari semangat kebersamaan sebagai bangsa, maka lambat laun dapat menggerogoti semangat nasional, semangat kebangsaan, semangat persatuan Indonesia.

IDEOLOGI BANGSA

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang lahir dari proses perdebatan yang cukup panjang, lahir pada saat bangsa ini belum menemukan titik pijaknya dalam melangkah mengisi kemerdekaan yang baru didapatkan. Tentu saja tidak mudah merumuskan sebuah pemahaman bersama, diantara sejumlah perbedaan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia, baik budaya, etnis, suku, agama, dan lain-lain menuju satu konsensus bersama.

Namun suatu bangsa akan kehilangan bahkan tidak akan berkembang bila mereka tidak memiliki landasan ideologi bagi penguatan karakter kebangsaannya. Bangunan ideologi tersebut haruslah mampu mempertemukan titik persamaan dari sekian perbedaan dan memantapkan, serta menghargai keberadaan dari pluralitas yang ada. Lahirnya Pancasila menjawab kegelisahan hati warga negara yang pada gilirannya adalah sebagai sumber inspirasi untuk seluruh kerangka pemikiran kebangsaan dalam menjalankan fungsi kenegaraannya.

Dalam masyarakat multikultur, perbedaan sikap, karakter, dan cara pandang menjadi unsur utama bangunan tata sistem sosial, terutama pada level kebudayaan yang menjadi ekspresi nilai masyarakat setempat. Hal tersebut bisa diterjemahkan melalui

deskripsi simbol-simbol kebudayaan, sebagai bentuk komunikasi sosial yang berkembang satu alur dengan proses eksperimentasi sosiologis dalam memahami dialektika perubahan jaman.

Pada sisi yang lain, formulasi kultur juga akan senantiasa mengalami reproduksi sekaligus reformulasi guna menegaskan eksistensi personal maupun kelompok masyarakat, sebagai wujud kontekstualisasinya dengan keberadaan entitas kebudayaan yang berbeda. Namun tesis perubahan masyarakat, tidak selalu linier dengan kehendak pelaku tindakan sosial dalam upaya melakukan suatu perubahan sesuai proyeksi yang dirumuskan, karena urgensi pertumbuhan pada hakikatnya tidak terletak pada bentuk artifisial suatu simbol kebudayaan, namun lebih pada pandangan nilai atau sistem nilai yang dikembangkan. Dengan demikian, hal ini tidak hanya terkait soal perubahan, namun arah dari perubahan yang diinginkan bersama karena telah bersepakat dalam sebuah tekad hidup bersama.

Terdapat paling tidak dua *mainstream* pemikiran yang berkembang pada proses perumusan Pancasila ini, yakni *nasionalis kebangsaan* dan *keagamaan* (yang lebih menginginkan negara berbasis agama Islam). Dua kerangka ideologis inilah yang sangat kuat mewarnai konstelasi perdebatan menuju suatu rumusan kesepakatan. Tampak seakan paradigma keagamaan terpisah dan berposisi *vis a vis* dengan paradigma nasionalis, sementara tentu hal ini merupakan sebuah kekaburan dimensi pemahaman yang tidak komprehensif. Namun para pendahulu bangsa ini benar-benar tepat memaknai Islam dalam kesatuan dan akomodatifnya pada ide-ide kenegaraan-kebangsaan modern. Saat tersebut juga merupakan masa awal persentuhan secara vulgar tradisi Timur (tradisi agama) dan tradisi Barat dalam suatu dialog peradaban, sehingga memunculkan ide-ide modernisasi.

Pada prinsip dasarnya, seluruh ayat dalam Pancasila bertitik tolak pada dua pola hubungan yang utuh, ketuhanan dan kemanusiaan (*hablun minallah* dan *hablun minannas*). Prinsip ketuhanan mengandaikan terjalinnya keyakinan, tidak hanya individu tapi seluruh warga atas nama negara, terhadap hadirat Tuhan bagi seluruh manusia. Keyakinan ini sebenarnya tidaklah mengacu pada konsep teologis agama tertentu, namun merupakan simbol dan substansi dari keberadaan nilai-nilai agama di negeri ini, sehingga ia menjadi *common sense* (*kalimatun sawa'*), yaitu pandangan dan sikap bersama sebagai warga negara.

Berangkat dari pemahaman ini, tidak ada celah bagi negara ini untuk "diswastanisasi" oleh ideologi maupun paham keagamaan tertentu. Walaupun faktanya, telah cukup lama bermunculan di negeri ini, sebuah usaha-usaha yang dimotori oleh organisasi-organisasi keagaman tertentu dengan misi mengubah dasar negara ini menjadi negara agama. Perlu dipahami secara mendasar bahwa kepercayaan keagamaan telah menetap di tanah air, sebelum bersatunya nusantara ini menjadi negara-bangsa (*nation-state*). Sementara, tidak hanya satu kepercayaan keagamaan yang ada, namun amat beragam dengan aliran dan sekte yang juga sulit terhitung. Sementara yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan negara ini tidak satu golongan saja, akan tetapi semua komponen dengan satu perasaan, satu nasib, satu energi, dan satu tekad kemerdekaan. Lantas, pantaskah bila negara ini kemudian diklaim milik atau bahkan berdasarkan agama tertentu? Tentu tidak. Jikapun kita kembalikan hal ini kepada kaum muslim di Indonesia, untuk memilih format dasar negara yang diinginkan, mayoritas kaum muslim juga lebih memilih untuk hidup di negara dengan kerangka dasar kebangsaan. Tafsir yang beragam mengenai kehidupan sosial menjadi dasarnya. Nabi

Muhammad juga tidak pernah memerintahkan ummatnya untuk membuat negara Islam.

Pada sila-sila berikutnya, terkandung nilai-nilai keadaban, kemanusiaan, keadilan, persatuan, keharusan bermusyawarah dan pada gilirannya akan melahirkan tatanan kemasyarakatan yang adil dan kokoh. Arti dari semua ini, bahwa ideologi bangsa ini menarik garis-garis universalitas nilai-nilai utama kehidupan manusia, terlebih dalam konteks aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga justru tidak melawan dan menghambat esensi dari semangat kemajuan.

Kekhawatiran mengenai implikasi heterogenitas Bangsa Indonesia, semestinya tidak perlu menjadi persoalan yang krusial. Dalam konteks ini, kita masih mempunyai falsafah negara sebagai landasan yang sangat substansial, yakni Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara yang dapat meningkatkan faham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dari tahun 1926, yang disublimasikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tak salah ketika Bung Karno menyatakan bahwa "peradaban yang besar tidak akan pernah runtuh terkecuali ia merobek-robek dirinya sendiri" (*a great civilitizion never goes down, unless it destroy it self from within*).

Pada tahun 1945 ketika Perang Dunia II belum berakhir, Indonesia berada di ambang pintu gerbang kebangsaan. Semua orang umumnya sepakat bahwa Indonesia harus bebas dan merdeka. Waktu itu semua agama-agama yang ada di Indonesia; Hindu, Buddha, Islam dan Kristen, bekerjasama untuk membangun kemerdekaan Indonesia.

Mereka memusatkan perhatian pertama-tama pada prinsip-prinsip yang akan membimbing negara Indonesia yang baru itu,

dengan tujuan agar kebebasan beragama dan kesamaan hak serta kesamaan kesempatan untuk semua warga negara dijamin, tanpa membeda-bedakan kepercayaan ataupun keturunan. Tepatnya 1 Juni 1945, merupakan landasan sejarah kehidupan "pluralisme" di Indonesia. Tanggal itu Bung Karno mencetuskan Pancasila untuk pertama kalinya. Pancasila dirumuskan oleh Bung Karno dengan susunan sebagai berikut: *Pertama*, kebangsaan Indonesia (nasionalisme). *Kedua*, internasionalisme, atau perikemanusiaan. *Ketiga*, mufakat atau demokrasi. *Keempat*, kesejahteraan sosial, dan *kelima*, Ketuhanan. Pancasila ini dapat diperas menjadi tiga sila (trisila), yaitu: *Satu*, Socio-nationalism. *Dua*, Socio-democratie; dan *Tiga*, Ketuhanan.

Trisila itu disempurnakan oleh Soekarno dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, dan nilai Ketuhanan menjadi bagian sila pertama Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka terbentuklah pula sebuah negara yang bernama Negara Republik Indonesia. Segera setelah itu disusun pula sebuah Undang-Undang Dasar (UUD) yang dinamakan UUD 1945 yang di dalam pasal pembukaannya terdapat Pancasila, sebagai landasan ideal negara dan falsafah serta ideologi bangsa. Atas dasar Pancasila inilah lahirlah toleransi agama dalam negara yang baru dibentuk itu.

Siapakah Tuhan dalam sila Pancasila? Tuhan dari "Kami Bangsa Indonesia" yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Sehingga bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari suku Bangsa Minang, Jawa, Batak, Dayak, Ambon, Bugis dan lain-lainnya. Termasuk pula keturunan Tionghoa yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta beragam kepercayaan yang hidup dan terikat pada suatu daerah tertentu. Mereka yang pada waktu

proklamasi kemerdekaan dilakukan, merasakannya juga sebagai pernyataan kemerdekaan dirinya sendiri, yang ingin bersatu di dalam apa yang disebut "Kami Bangsa Indonesia"

Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak boleh mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, etnis, dan budaya. Melalui Pancasila seharusnya bisa ditemukan suatu keharmonisan antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar terhindar dari segala bentuk konflik yang hanya akan menjatuhkan martabat kemanusiaan itu. Dapat dikatakan bahwa secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekuensinya adalah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif, memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralis, tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

Disamping itu, nilai-nilai Pancasila diharapkan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Apabila ia menyatu dalam kehidupan setiap individu warga negara, maka Pancasila akan menjelma dalam wujud karakter bangsa. Apabila nilai-nilai tersebut tertanam dengan baik atau telah menjadi karakter mayoritas kepribadian bangsa Indonesia, maka setiap ada gejala disintegrasi bangsa, akan dengan mudah segera diantisipasi. Maka disinilah sesungguhnya urgensi pendidikan Pancasila bagi setiap anggota warga negara Indonesia baik yang masih berada di usia sekolah maupun yang bukan peserta didik lembaga pendidikan formal (sekolah).

Karakter bangsa Indonesia pada era awal kemerdekaan

terlihat cukup kuat. Hal itu tercermin dalam perilaku para pemimpin kita dahulu yang membuat bangsa Indonesia disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Karakter bangsa Indonesia saat ini nampak mengalami degradasi cukup signifikan. Antara pemimpin dengan yang dipimpin, berada dalam kondisi rapuh. Masing-masing tergoda oleh ragam kepentingan sesaat, yang menyebabkan wibawa bangsa dan negara Indonesia runtuh di mata dunia.

Karakter yang memudar itu tampak dalam kasus-kasus moral anak-anak bangsa - pemimpin maupun yang dipimpin - yang kerap terjadi di tanah air. Kasus korupsi, tawuran pelajar, mafia hukum, suap menyuap, konflik SARA, tindak asusila, dan lain-lain hampir selalu jadi berita yang memilukan hati. Kemerosotan moral anak-anak bangsa ini muncul akibat semakin lemahnya satu pilar pembangunan manusia seutuhnya: pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan, dan mengabaikan pendidikan karakter. Pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam pendidikan moral atau etika yang digali dari nilai-nilai Pancasila serta sumber-sumber ajaran moral dan etika lainnya, semakin tak bermakna akibat disuguhkan kepada anak didik hanya sebatas pengetahuan kognitif.

Pendidikan di Indonesia yang mengutamakan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan, dan mengabaikan pendidikan karakter, sudah saatnya harus dibenahi. Indonesia memerlukan pendidikan karakter agar tampil pribadi-pribadi unggul, kuat, dan tahan uji. Sudah waktunya pemerintah fokus pada bagaimana memperbaiki mutu pendidikan yang terfokus pada pembangunan karakter. Pemerintah perlu memperbaiki perpustakaan sekolah untuk meningkatkan budaya baca dengan menghadirkan

buku-buku bacaan berkualitas, tentang budaya bangsa yang mengajarkan nilai-nilai moral dan memberi banyak kesempatan untuk menghidupi nilai-nilai moral tersebut.

Peran guru di sini menjadi sangat penting dan strategis. Mereka adalah wajah pendidikan kita. Maka guru patut diberikan kedudukan terhormat, termasuk juga pemenuhan kebutuhannya, tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga guru-guru swasta. Meskipun sebenarnya pendidikan budaya dan karakter bangsa telah diimplementasikan di sekolah dan sudah menjadi satu kesatuan dari kurikulum pendidikan yang ada di sekolah. Namun ternyata akhir-akhir ini implementasinya menurun. Ini terbukti dengan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang menurunnya tata krama, etika, dan kreativitas karena melemahnya pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah.

Soal implementasi yang mulai mengendur bisa saja terjadi, tetapi masih banyak sekolah-sekolah yang mampu memadukan antara kegiatan belajar mengajar dengan implementasi dalam kehidupan sosial sehari-hari di sekolah. Oleh sebab itu perlu lebih terlihat lagi langkah konkret penerapan pendidikan karakter bangsa kepada peserta didik di sekolah.

Sesungguhnya nilai-nilai terkait dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa sudah ada sejak lama. Seperti kebiasaan mengucapkan salam kepada guru saat datang dan pulang dari sekolah, mengucapkan doa sebelum memulai pelajaran atau kegiatan yang menumbuhkan kecintaan kepada bangsa seperti Pramuka, kegiatan Paskibra dan lain-lain. Selain itu dalam penerapannya bukanlah pada teori, sebab itu pendidikan yang tersembunyi atau *hidden curriculum* dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan budaya dan karakter bangsa ini haruslah aplikatif, sehingga titik beratnya bukan pada teori.

Sekolah mulai dari taman anak-kanak sampai dengan perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai agen penyebar virus positif terhadap karakter dan budaya bangsa.

Setelah pendidikan nasional dianggap gagal dalam membentuk budi pekerti yang luhur, atau lebih tepatnya sekolah-sekolah belum seluruhnya berhasil melahirkan anak-anak yang berbudi pekerti luhur dengan nilai-nilai yang berderet-deret di atas, maka harus ada yang perlu diubah yaitu bagaimana pendekatan, metode, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Hal inilah yang sesungguhnya menentukan efektivitas dan efisiensi pembentukan kepribadian anak manusia.

Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah perubahan besar dalam proses pembelajaran budi pekerti di sekolah dengan konsep pendidikan holistik berbasis karakter. Pendidikan karakter adalah sebuah proses (usaha) untuk mengembangkan semua potensi anak menjadi manusia seutuhnya. Perkembangan anak harus seimbang, baik dari segi akademiknya maupun segi sosial dan emosinya. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari aktivitas belajar dengan cara membaca, menulis, menghapal, dan lain-lain sedangkan perbuatan, sikap, perilaku yang baik dapat diraih dengan selalu berlatih (*action*) dan selalu membiasakannya dalam setiap aktivitas sehari-hari.

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan karakter menjadi berbeda dengan pendidikan moral (budi pekerti) karena pendidikan budi pekerti hanya terfokus pada pengetahuan tentang moral (nilai-nilai luhur, yang hanya menekankan aspek

kognisi). Kurikulum pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian siswa yaitu pribadi yang bijaksana, terhormat dan bertanggung jawab yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata.

Maka, perlu adanya mimpi dan harapan besar bahwa suatu saat bangsa Indonesia akan berjaya sebagai bangsa yang berkarakter kuat. Kita harus mampu mengembalikan fungsi pendidikan, yaitu tidak untuk membangun kecerdasan intelektual saja, tetapi juga untuk menjadikan manusia Indonesia berkarakter mulia dan menjadikan pendidikan karakter sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Idealnya substansi pendidikan karakter bangsa, termuat dalam UU Diknas secara lebih dominan dan menjiwai aspek-aspek peraturan pendidikan yang lainnya.

KONSEP NEGARA KESATUAN

Salah satu agenda besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan, dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antara agama dan kerukunan hidup umat beragama.

Persoalan ini semakin krusial karena terdapat serangkaian kondisi sosial yang menyuburkan konflik, sehingga terganggu kebersamaan dalam membangun keadaan yang lebih dinamis dan kondusif. Demikian pula kerukunan yang dibangun selama bertahun-tahun, mengalami degradasi yang memprihatinkan, bahkan menimbulkan kecemasan terjadinya disintegrasi bangsa.

Gejala disintegrasi yang muncul akhir-akhir ini, salah satu

penyebabnya adalah sikap eksklusif terhadap pandangan ideologi dan keyakinan agama hingga akhirnya terjadi ketegangan. Ketegangan tersebut mengakibatkan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sikap menggelorakan fanatisme kelompok lewat kesukuan, kedaerahan, dan bahkan keagamaan, mengakibatkan terganggunya kerukunan berbangsa dan beragama.

Kenyataaan sosial tersebut disebabkan oleh erosi pamahaman warga negara Indonesia akan kemajemukan masyarakat (*pluralistic society*). Sebagian warga negara sudah mengabaikan terhadap pemahaman bahwa berbagai perbedaan bukan berarti itu menjadi jurang pemisah, tetapi menjadi kesatuan yang utuh. Oleh karenanya, menjadi sebuah keharusan saat ini adanya usaha untuk merevitalisasi kerukunan beragama sehingga tiap-tiap individu kembali menerima kenyataan bahwa keragaman, kemajemukan itu adalah suatu keniscayaan.

Bangsa ini harus memahami bahwa pluralisme bangsa sesungguhnya dapat dipandang sebagai suatu berkah atau rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kendati bisa juga menjadi sumber konflik dan perpecahan. Ketika bangsa ini sepakat pluralitas bangsa dipandang dari sudut positif yakni keberkahan atau rahmat dari Tuhan, maka ia bisa menjadi sumber kekuatan manakala potensi itu dapat dikembangkan ke arah percepatan pencapaian kesejahteraan dan persatuan.

Kebudayaan dalam suatu masyarakat dapat dipakai untuk memahami suatu agama, walaupun hanya dari tataran empirik atau dalam bentuk formalnya yang menggejala dalam masyarakat tersebut. Agama sebenarnya juga dapat berperan memberikan sumbangsih pemikiran bahwa perbedaan bisa menjadi rahmat dan kasih sayang antarsesama manusia.

Bagaimanapun pluralitas budaya dan agama justru meniscayakan suatu masyarakat yang bermartabat dan manusiawi dalam satu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berperadaban dan mempunyai masa kejayaan di masa lampau. Pada konteks awal NKRI lahir, kepentingan untuk merdeka tentu menjadi landasan utama pemersatu bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa konsep dan elemen dasar wawasan kebangsaan adalah kemajemukan (*pluralism*), toleransi, dan otonomi.

Mengacu pada ketiga konsep dan elemen dasar di atas, maka idealisme untuk mengintegrasikan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh dapat diaplikasikan. Secara kongkrit, wawasan kebangsaan (*nasionalisme*) dalam implementasinya, membutuhkan keteladanan dari berbagai pihak, terutama pemegang kekuasan (*the power holder*), yakni pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangkitkan semangat nasionalisme generasi muda agar nantinya tumbuh rasa syukur yang mendalam sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Secara empiris kelemahan mendasar bangsa Indonesia dalam membangun semangat nasionalisme adalah terletak pada orientasi pembangunan sebagai tujuan utama yang paling fundamental, bukan mengacu pada aplikasi instrumen pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat menuju kesejahteraan, sehingga menyebabkan wawasan kebangsaan mulai terkikis oleh mobilisasi pembangunan, yang secara faktual lebih mengarah pada sentralitas negara yang semakin mengemuka.

Tidak heran bila wawasan kebangsaan dan semangat pluralisme direduksi melalui politik homogenisasi demi

pembangunan. Artinya, politisasi atas pluralisme melalui politik homogenisasi, tentu saja menjadi kendala mendasar bagi tumbuhnya wawasan kebangsaan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, wawasan kebangsaan pada dasarnya merupakan siasat dalam menyongsong modernisasi dan mencakup penghayatan, serta pengalaman tiga elemenya yakni: rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Dalam konteks modern saat ini, semangat kebangsaan (*nasionalisme*) akan mampu menggerakkan semua individu, yang pada ujungnya mampu menempatkan negara dan bangsa pada *mainstream* dunia. Elemen itulah yang sanggup menarik benang merah kebangsaan di sepanjang jalan perubahan dan kemajemukan masyarakat.

Paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme dengan sikap mengacu dan menerima kemajemukan masyarakat itu bernilai positif, sebagai rahmat Tuhan kepada manusia. Hal tersebut akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan melalui pertukaran silang budaya yang beraneka ragam. Pluralisme merupakan suatu paham yang mampu mendorong pengayaan budaya bangsa atau dengan istilah "keindonesiaan" yang tiada lain adalah interaksi yang kaya (*resourceful*) dan dinamis, antara pelaku budaya beraneka ragam itu dalam satu *melting pot* (masyarakat heterogen yang semakin homogen) yang efektif.

PRINSIP KEBHINEKAAN

Begitu kayanya bangsa kita dengan suku, adat istiadat, budaya, bahasa, dan khasanah yang lain ini, apakah benar-benar menjadi sebuah kekuatan bangsa ataukah justru berbalik menjadi faktor pemicu timbulnya disintegrasi bangsa. Seperti apa yang telah diramalkan Samuel P. Huntington, keanekaragaman di

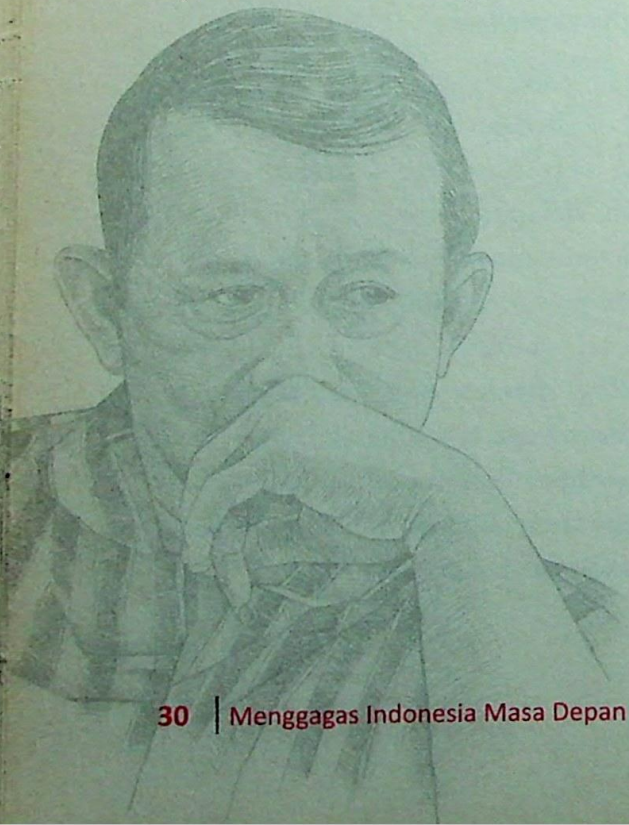
Indonesia ini harus kita waspadai karena telah banyak kejadian-kejadian yang menyulut kepada perpecahan, yang disebabkan adanya anggapan tentang keunggulan sebuah suku atau agama tertentu.

Paham kesukuan dan agama secara sempit juga telah menimpulkan konflik bahkan perpecahan. Seperti konflik di Aceh, Ambon, dan yang lainnya. Hal ini disadari betul oleh para bapak pendiri bangsa (*founding father*) kita, sehingga mereka merumuskan konsep multikulturalisme ini dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Sebuah konsep yang mengandung makna yang luar biasa. Baik makna secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, semboyan ini mampu mengangkat dan menunjukkan akan keanekaragaman bangsa kita. Bangsa yang multikultural dan beragam, akan tetapi bersatu dalam kesatuan yang kokoh. Selain itu, secara implisit Bhineka Tunggal Ika juga mampu memberikan semacam dorongan moral dan spiritual kepada bangsa Indonesia, khususnya pada masa awal pasca kemerdekaan untuk senantiasa bersatu melawan ketidakadilan para penjajah.

Lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan adanya perbedaan ini, namun sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Kerajaan Belanda. Sumpah Pemuda itu kemudian menjadi cikal bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Multikulturalisme ini juga tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, sebagaimana dapat dilihat, antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI. Betapa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme dan multikulturalisme, baik dalam konteks sosial maupun politik. Bahkan pencoretan "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta pun dapat dipahami dalam kontekss menghargai sebuah multikulturalisme dalam arti luas.

Setelah memahami nilai-nilai Pancasila, masih perlu ada tatanan serta sistem kehidupan bangsa Indonesia bagi terwujudnya nilai-nilai Pancasila tersebut. Misalnya dalam mengusahakan persatuan bangsa Indonesia, kita perlu menyusun dan mengatur interaksi antarwarga negara yang terdiri dari beraneka ragam suku, golongan, agama, serta budaya. Walaupun ragam perbedaan itu adalah realitas obyektif yang dimiliki bangsa Indonesia, kenyataannya kita mampu melahirkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap tanah air Indonesia.

Apabila nilai-nilai Pancasila itu pada realitasnya mampu memberikan kesejahteraan dan kesentosaan kehidupan berbangsa, maka otomatis nilai-nilai Pancasila tersebut akan menjadi daya tarik bangsa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun nilai-nilai Pancasila tampaknya masih terlalu awam dan abstrak untuk dapat ditangkap oleh bangsa Indonesia pada umumnya, sehingga perlu dijabarkan agar nilai tersebut aplikatif dalam kehidupan setiap individu bangsa Indonesia. ****



Revitalisasi Budaya Bangsa

Bab 2

Djoko Santoso
for the People

Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia



"Kebudayaan tidak bisa dilihat sebagai produk yang selesai. Artinya akan terus adanya perkembangan kebudayaan yang tidak hanya terdiri dari seni namun juga teknologi, bahasa, fashion maupun hasil pemikiran kreatif lainnya." (**Umar Khayam**)

PENGANTAR

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antarbangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan-keamanan, dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme suatu bangsa.

Adapun pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme:

Pertama, dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara yang meningkat.

Kedua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi yang menunjang kehidupan nasional bangsa.

Ketiga, dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin. Kita juga dapat mempelajari ilmu dan teknologi bangsa lain yang sudah maju untuk kepentingan kemajuan negara.

Selain ada aspek positif, globalisasi juga memiliki pengaruh negatif terhadap nilai-nilai nasionalisme, yaitu:

Pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisasi segala aspek kehidupan dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tesebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan terkikis hilang.

Kedua, globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri yang membanjiri pasar Indonesia. Lunturnya kecintaan terhadap produk dalam negeri, bisa berarti runtuh pula rasa

nasionalisme bangsa Indonesia.

Ketiga, budaya Barat yang jadi kiblat gaya hidup generasi muda sekarang menyebabkan bangsa ini kehilangan jati diri.

Keempat, munculnya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Efeknya terjadi pertentangan antara yang kaya dengan yang miskin, yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa.

Kelima, meningkatnya sikap individualistik yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli lagi dengan masa depan bangsa Indonesia.

Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan lunturnya rasa nasionalisme. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi maka akan menimbulkan dilematika. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

REVITALISASI BUDAYA SEBAGAI PROSES

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti revitalisasi sebagai proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata

vital mempunyai arti 'sangat penting' atau 'perlu sekali' (untuk kehidupan dan sebagainya). Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Sementara itu budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dari sini kebudayaan diartikan sebagai "hal-hal yang bersangkutan dangan budi atau akal". Menurut Clifford Geertz, kebudayaan (*culture*) sebagai sebuah pola makna atau ide–ide yang termuat dalam simbol–simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan.

Kebudayaan nasional secara mudah dimengerti sebagai kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Definisi kebudayaan nasional menurut TAP MPR No.II tahun 1998, yakni: Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia, dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berbudaya.

Disebutkan juga pada pasal selanjutnya bahwa kebudayaan nasional juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Tampaklah bahwa batasan kebudayaan nasional yang dirumuskan oleh pemerintah berorientasi pada pembangunan nasional yang dilandasi oleh semangat Pancasila.

Kebudayaan nasional dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah "puncak-puncak dari kebudayaan daerah". Kutipan pernyataan ini merujuk pada paham kesatuan yang semakin dimantapkan, sehingga ketunggalikaan makin lebih dirasakan daripada kebhinekaan. Wujudnya berupa negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, serta bahasa nasional. Definisi yang diberikan oleh Koentjaraningrat dapat dilihat dari pernyataannya: yang khas dan bermutu dari suku bangsa manapun asalnya, asal bisa mengidentifikasikan diri dan menimbulkan rasa bangga, itulah kebudayaan nasional. Pernyataan ini merujuk pada puncak-puncak kebudayaan daerah dan kebudayaan suku bangsa, yang bisa menimbulkan rasa bangga bagi orang Indonesia jika ditampilkan untuk mewakili identitas bersama.

Menurut anthropolog, Cateoa, berdasarkan wujudnya, budaya memiliki beberapa elemen atau komponen, yaitu:

Pertama, kebudayaan material adalah kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.

Kedua, kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

Ketiga, lembaga sosial adalah lembaga yang memberikan peran yang banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. Sistem sosial yang terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan

sosial masyarakat. Contoh, di Indonesia pada kota dan desa di beberapa wilayah, wanita tidak perlu sekolah yang tinggi apalagi bekerja pada satu instansi atau perusahaan. Tetapi di kota-kota besar pandangan tersebut justru terbalik.

Keempat, sistem kepercayaan adalah bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu, hal ini akan mempengaruhi sistem penilaian yang ada dalam masyarakat. Sistem keyakinan ini akan mempengaruhi dalam kebiasaan, bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara mereka berkonsumsi, sampai dengan cara bagaimana berkomunikasi.

Kelima, estetika adalah hal-hal yang berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, hikayat, drama, dan tari–tarian yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Seperti di Indonesia setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri. Nilai estetika ini perlu dipahami dalam segala peran, agar pesan yang akan kita sampaikan dapat mencapai tujuan dan efektif. Misalkan di beberapa wilayah dan bersifat kedaerahan, setiap akan membangun bagunan jenis apa saja harus meletakkan janur kuning dan buah-buahan, sebagai simbol yang maknanya disetiap daerah berbeda. Tetapi di kota besar seperti Jakarta sudah jarang terlihat atau bahkan hilang sama sekali.

Keenam, bahasa adalah alat pengantar dalam berkomunikasi, bahasa untuk setiap wilayah bagian dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sifat unik dan kompleks, yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Bahasa harus dipelajari dan dipahami agar komunikasi lebih baik dan efektif dengan memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain.

Dalam konsep yang paling dominan kebudayaan dapat dimaknai sebagai fenomena material, sehingga menurut paham ini, pemahaman dan pemaknaan kebudayaan lebih banyak dicermati sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1980 : 193). Sejalan dengan pengertian tersebut maka tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat akan terikat oleh kebudayaan yang terlihat wujudnya dalam berbagai pranata yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi tingkah laku manusia (Geertz, 1973).

Dengan demikian bisa dikatakan, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.

Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain, terlihat dalam definisi budaya: budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. "Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang, dan "kepatuhan kolektif" di Cina.

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis, yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka.

Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

PENGUATAN KEPRIBADIAN BANGSA

Dalam era globalisasi ini, bukan hanya perdagangan bebas saja yang diutamakan dan menjadi program kerja negara-negara di dunia ini, namun juga kebudayaan negara-negara kuat mengekor bahkan secara langsung bisa diterima di bumi pertiwi ini. Lalu bagaimana dan seperti apa kepribadian Indonesia saat ini?

Dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia yang memiliki adat ketimuran, rasa toleransi, ramah, sopan santun, saling menghargai, gotong royong, dan lain sebagainya, selalu menjadi dasar dalam hidup bermasyarakat. Sementara di Barat, orientasi berpikir mereka individualis, bermasyarakat atas dasar kegunaan. Itulah pandangan mereka yang telah terbentuk sejak dari migrasinya orang Inggris ke benua Amerika dan sejak zaman revolusi industri.

Pemikiran ini terbentuk karena proses kehidupan mereka yang selalu berpikir logis, bertahan (*struggle*) untuk hidup. Bagaimana tidak, ketika mereka berpindah ke tanah Amerika besar sekali perjuangan dan pengorbanan yang harus mereka lakukan demi mendapatkan kehidupan yang layak dibanding ketika hidup di

tanah asal (Inggris, Spanyol, Italia, dsb).

Di Indonesia itu tidak terjadi, alam yang kaya raya, subur makmur tak menjadikan masyarakatnya susah dan menderita. Bahkan sikap saling memberi merupakan sebuah kewajiban, namun karena sikap inilah ternyata kolonialisme, imperialisme dapat masuk dan mengubah pandangan hidup masyarakat Indonesia. Orang Portugis, Belanda, dan Spanyol sangat berpengaruh pada perubahan jatidiri bangsa ini, *direct rules* dan *indirect rules* yang ditanamkan bangsa Barat ini, mengubah pemikiran bangsa dan masyarakat Indonesia.

Kadang kita tidak meyadari bahwa sekarang ini masyarakat Indonesia menyeimbangkan gaya hidup serta menyadur pemikiran orang-orang Barat dalam artian meniru, bukan menjadikannya sebagai referensi. Jika kita bisa melihat esensi pemikiran masyarakat desa yang masih alami di Indonesia ini, mungkin kita akan sadar bahwa inilah kepribadian bangsa kita yang dulu menjadi ciri khas bangsa ini, yang cantik dengan adat ketimuran.

Perubahan kepribadian bukan hal yang dilarang, posisi serta jatidiri yang membentuk kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia dari dulu kala menjadi indikator dalam memilah dan memilih mana yang bisa kita pakai, intinya cocok atau tidak cocok dengan adat kita yaitu adat ketimuran.

Menyoal lebih dalam menuju kepribadian manusia tidak terlepas dari ilmu psikologi. Menurut David Cohen dari Oxford University dalam bukunya *"Melesatkan Otak Kiri Otak Kanan"*, teori kepribadian merupakan sebuah bidang psikologi yang telah terasimilasi ke dalam kebudayaan yang luas dan mendalam.

Hal ini berarti menegaskan bahwa kepribadian individu atau masyarakat sangat berpengaruh dalam lahirnya sebuah

kebudayaan manusia dan mendorong terbentuknya kepribadian umum suatu bangsa. Untuk memahami jati diri bangsa ini, tidak perlu seluruh masyarakat di negara ini sadar akan jati diri bangsa ini, mulailah dari diri kita sendiri, kenali kepribadian bangsa kita yang tercinta ini. Kita harus pandai dalam memfilter kebudayaan negara lain yang selama ini kita telan mentah-mentah, lalu kita pikirkan, apakah pantas jika kebudayaan Barat kita pakai dan dijadikan kepribadian baru bangsa ini, serta melupakan jati diri kita sebagai orang Timur yang penuh dengan rasa sopan santun. Harus dipahami adat-adat ketimuran kita yang beraneka ragam, namun saling menghargai dan satu visi, alangkah indahnya jika kita selalu berpegang teguh pada adat yang telah membentuk kepribadian bangsa ini.

Setiap negara memiliki kepribadian masing-masing. Melalui kepribadian tersebut sebuah negara dikenal luas. Kepribadian tersebut tidak akan lepas dari sejarah negara tersebut. Indonesia sendiri memiliki sebuah kepribadian yang menjadi ciri khas dari Indonesia yaitu, Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila justru telah dibicarakan bahkan sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui pembacaan Proklamasi oleh Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta. Hal itu membutuhkan proses pembahasan yang panjang sebelum akhirnya memperoleh keputusan final seperti teks Pancasila yang kita kenal saat ini.

KEPRIBADIAN YANG BERKEBUDAYAAN

Pancasila bisa dikatakan sebagai identitas bangsa Indonesia dan apabila setiap generasi memahami tidak hanya sekadar mengetahui kelima sila tersebut, maka berbagai dampak yang kurang baik yang muncul dari budaya luar sebagai efek globalisasi bisa dibentengi. Kendati budaya bangsa lain tidak selalu memiliki

efek buruk, namun Pancasila berfungsi sebagai tolok ukuran apakah budaya lain bisa diterima atau tidak dalam perikehidupan bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang anti budaya luar. Kenyataannya, bangsa Indonesia mampu menyerap budaya luar dengan baik. Misalnya terjadi apa yang disebut akulturasi. Misalnya musik dangdut yang merupakan seni budaya asli Indonesia, sedangkan musik jazz merupakan seni budaya dari luar, ketika digabungkan bisa menjadi seni budaya baru yang mengagumkan dan bisa diterima.

Kemudian budaya teknologi seperti telepon seluler, komputer, dan lainnya. Seperti yang kita ketahui budaya teknologi merupakan budaya yang cepat dalam perkembangannya. Telepon seluler yang mempercepat proses komunikasi dulunya hanya bisa digunakan untuk telepon, kemudian dalam perkembangannya bisa digunakan untuk saling mengirim pesan, bisa digunakan untuk mendengarkan musik, mengambil foto, bahkan terkoneksi dengan internet. Begitu pula dengan komputer yang selalu berkembang dari monitor tabung hingga LCD. Dan tentu saja teknologi internet yang juga terus berkembang. Tentu adanya budaya tersebut tidak bisa dicegah, namun bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang bermanfaat.

Misalnya dengan menggunakan komputer, kita bisa membuat tulisan mengenai budaya bangsa, menyampaikan pemikiran kita tentang berbagai hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian melalui internet tulisan tersebut bisa dipublikasikan, sehingga lebih banyak orang yang bisa membacanya. Apabila jiwa atau kepribadian bangsa yaitu Pancasila benar-benar dihayati dan dipahami, maka hal-hal yang ditulis atau dipublikasikan bukan hal-hal yang negatif.

Begitu pula perkembangan internet dengan hadirnya jejaring sosial seperti *twitter*, *facebook*, *blog* maupun berbagai situs informasi. Kita tidak mencegah hadirnya teknologi tersebut. Namun setidaknya tetap menggunakan teknologi tersebut dengan bijak tanpa meninggalkan identitas bangsa. Misalnya menyampaikan hal baik, *sharing* gambar yang baik, dan lainnya.

Bahkan gaya hidup seperti makan di restoran mewah atau cepat saji bisa juga ditiru bagaimana restoran cepat saji tersebut dalam melayani. Akhirnya bukan tidak mungkin akan hadir angkringan, warung makan Padang, warteg, tetapi dengan pelayanan ramah, pelayan yang mampu berbahasa asing, dan lainnya. Mereka tetap mempertahankan budaya yaitu masakan khas Indonesia seperti nasi Padang, nasi kucing, wedang jahe, dan lainnya dengan ciri khas Indonesia yaitu keramahan, namun didukung budaya luar yaitu penguasaan bahasa asing.

Budaya yang lahir dari komunitas global yang melibatkan berbagai negara juga tidak bisa kita cegah. Seperti yang disampaikan Umar Khayam bahwa kebudayaan tidak bisa dilihat sebagai produk yang selesai (Umar Khayam dalam Slamet, 1983 : 4). Artinya akan terus adanya perkembangan kebudayaan yang tidak hanya terdiri dari seni namun juga teknologi, bahasa, fashion, maupun hasil pemikiran kreatif lainnya.

Akhirnya Pancasila tidak hanya sekadar diketahui isinya namun juga dipahami apa maksudnya. Bahkan hal ini perlu diberikan sejak dini. Tidak hanya sekadar pembacaan teks Pancasila setiap upacara bendera pada hari Senin. Namun dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari perlu benar-benar diberikan agar benar-benar bisa dipahami dan akhirnya benar-benar diterapkan, karena Pancasilalah yang benar-benar akan membedakan Indonesia dengan negara lain.

Hal itu juga dipertegas dengan ajaran Trisakti Bung Karno butir ketiga, yakni kepribadian yang berkebudayaan. Soal kepribadian yang berkebudayaan ini penting kita tumbuhkembangkan agar kita tidak terombang-ambing oleh semua hal yang berbau asing. Kita punya kekayaan sosial dan budaya yang luar biasa kaya dan beragam, dan ini harus kita kembangkan dalam rangka mewujudkan kepribadian bangsa. Kita harus menjadi bangsa besar dan kuat, dengan terus mengembangkan kekayaan sosial budaya yang kita miliki.

Dasar kebudayaan yang berpijak pada kearifan leluhur dalam artian kearifan yang sudah menyejarah dalam rentang kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja menjadi penting tanpa perlu menjadi *xenophobia* (kebencian terhadap barang atau orang asing). Pembangunan kebudayaan yang berkepribadian ini untuk mendukung mental berani dan tidak *inlander* (menganggap setiap orang asing itu pasti selalu lebih hebat dibanding dengan sesama pribumi) di hadapan bangsa-bangsa lain.

Berkepribadian di bidang budaya juga dipahami sebagai wujud perilaku asah, asih, asuh, dan *tepa selira*. Maknanya adalah sikap saling memberitahu, saling memperhatikan, melakukan dengan senang hati, dan tidak semena-mena. Kepribadian ini adalah hal dasar yang harus diajarkan kepada masyarakat Indonesia sejak dini. Inilah perbedaannya bahwa saat ini sudah tidak ada lagi pendidikan budi pekerti. Padahal budi pekerti yang baik berdasarkan falsafah Pancasila ini menjadi pondasi masyarakat untuk bersatu.

REVITALISASI BUDAYA: SUATU KEHARUSAN

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya secara logis akan mengalami berbagai permasalahan, persentuhan

antarbudaya akan selalu terjadi karena permasalahan silang budaya selalu terkait erat dengan *cultural materialisme* yang mencermati budaya dari pola pikir dan tindakan dari kelompok sosial tertentu, dimana pola temperamen ini banyak ditentukan oleh faktor keturunan (*genetic*), ketubuhan (kedirian), dan hubungan sosial tertentu. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan menjadi acuan sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk individual yang tidak terlepas dari kaitannya pada kehidupan masyarakat dengan orientasi kebudayaannya yang khas, sehingga baik pelestarian maupun pengembangan nilai-nilai budaya merupakan proses yang bermatra individual, sosial, dan kultural sekaligus.

Dalam kenyataan, persentuhan nilai-nilai budaya sebagai manifestasi dinamika kebudayaan tidak selamanya berjalan secara mulus. Permasalahan silang budaya dalam masyarakat majemuk (heterogen) dan jamak (plural), seringkali bersumber dari masalah komunikasi, kesenjangan tingkat pengetahuan, status sosial, geografis, dan adat kebiasaan, menjadi kendala bagi tercapainya suatu konsensus yang perlu disepakati dan selanjutnya ditaati secara luas. Ditambah lagi dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, akan selalu mengalami perubahan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan.

Seharusnya kebudayaan yang dibangun sebuah bangsa adalah wujud nyata dari eksistensi bangsa yang bersangkutan. Semakin tinggi kebudayaan yang dibangun, semakin tinggi eksistensi bangsa tersebut di tengah-tengah bangsa di dunia. Kebudayaan nasional, yang merupakan warisan para leluhur adalah bukti eksistensi bangsa Indonesia. Kendati mengalami kemajuan, kebudayaan nasional kurang berkembang secara signifikan. Hal ini memang masih perlu dilakukan beberapa kajian.

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, jika sebuah

bangsa sudah menanggalkan budaya nasionalnya dan justru melestarikan budaya asing, maka bangsa itu bisa dikatakan sudah hilang kepribadian dan identitasnya. Untuk itu diperlukan suatu langkah yang konkret untuk mengurangi dampak dari globalisasi terhadap tergesernya nilai-nilai budaya nasional yang kita miliki.

Maka, revitalisasi budaya nusantara atau nasional tidak bisa dihindarkan bahkan wajib dilakukan. Kawasan pedesaan saat inipun tidak luput dari penggerusan budaya global. Kawasan kota saat ini tengah menjadi rebutan budaya ekonomi global, bertubi-tubi mendapat tekanan politik global. Akibat persaingan dan perebutan pasar serta perebutan sumber bahan baku, kawasan Asia khususnya Asia Tenggara, lebih khususnya kawasan nusantara, rakyat harus menanggung akibatnya: terus-menerus hidup di dalam kepulauan derita. Rakyat oleh para agen-agen perubahan global 'dipaksa' secara persuasif atau provokatif untuk menanggalkan seluruh atau separuh dari nilai-nilai budayanya untuk kemudian menjalani inisiasi 'modernisasi' agar 'kompatibel' dengan keadaan yang diharapkan oleh pihak asing.

Dampak kerusakan budaya yang terjadi sungguh sangat banyak dan mudah dilihat di setiap sudut kehidupan. Pelaku budaya kreatif berbasis kekhasan lokal, sebagai contoh, sekalipun mendapat berbagai bantuan dan pelatihan teknis, tetap terombang-ambing dan tetap terpuruk. Kalangan cerdik pandai yang telah bersusah payah mengkaji deretan judul buku lalu dituangkan dalam seminar, lokakarya, simposium, *pilot project*, kajian kritis, dengan tim peneliti baik tingkat lokal, interlokal sampai global, keterpurukan budaya tidak kunjung teratasi.

Revitalisasi budaya adalah revitalisasi manusia. Seluruh organ vital kemanusiaan (budaya) yang dibutuhkan untuk memuliakan hidup harus mendapat perhatian penuh. Ketertataan seluruh

budaya yakni sosial, politik, ekonomi, ilmu harus selalu terjalin sekalipun telah terjadi pembedaan secara institusional. Perbedaan fungsi harus terjaga sebagai pembangun konstruksi organik bukan dekonstruksi. Kenyataan kebudayaan asli bangsa Indonesia yang mengalami kemunduran secara signifikan, menyebabkan langkah revitalisasi budaya menjadi sangat vital dan mendesak.

Namun demikian, pemahaman pelaku gerakan revitalisasi pertama-tama harus menyadari dan mewaspadai, bahwasanya revitalisasi budaya nusantara bukan pekerjaan di ruang steril hampa udara. Potensi terjadinya hambatan dan kegagalan diakibatkan realitas bahwa kita adalah bagian dari kontributor keterpurukan yang terjadi, tentu sangat potensial dapat mencemari niat dan gagasan baik yang tengah dikerjakan. Maka tidak ada jalan lain di setiap kegiatan, dengan lapang dada kita harus secara sungguh-sungguh mempersiapkan dan mengutamakan dengan terperinci seluruh perangkat pendukung. Dimulai dari hal yang terkecil sampai yang kompleks, harus cermat tertata dan menjadi bagian tak terpisahkan. Adalah ironis jika dalam kegiatan revitalisasi budaya yang mengusung tema besar, tata penyelenggaraannya masih membiarkan hal-hal kecil yang berantakan dan berserakan di mana-mana.

REVITALISASI BUDAYA: PENGUATAN BUDAYA LOKAL

Salah satu cara untuk merevitalisasi kebudayaan nusantara adalah sangat jelas, yakni melalui penguatan-penguatan budaya lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Budaya nasional adalah kumpulan dari berbagai kebudayaan lokal yang tersebar di berbagai daerah di suatu negara. Oleh karena itu eksistensi suatu budaya nasional sangatlah dipengaruhi oleh eksistensi budaya lokal. Hubungan dari keduanya adalah berbanding lurus. Artinya

jika budaya-budaya lokal di suatu negara memiliki kekuatan dan eksistensi yang tinggi maka kekuatan budaya nasional di negara tersebut juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya.

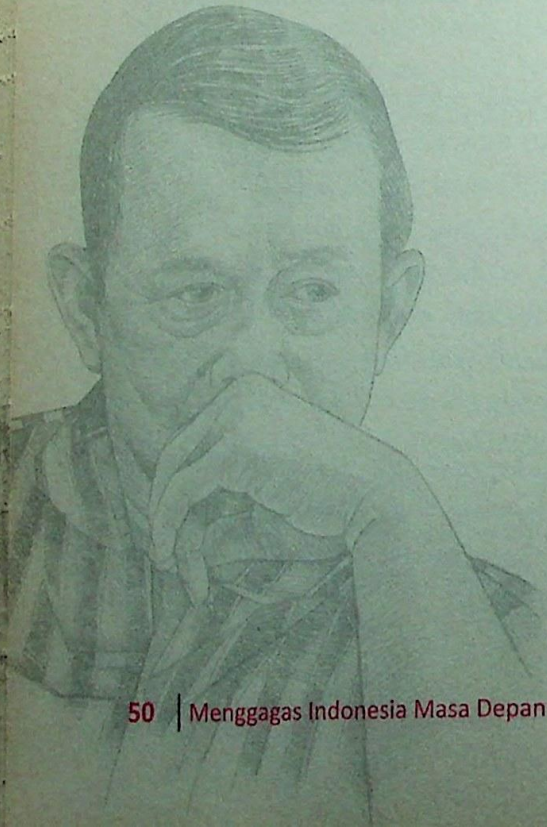
Upaya melestarikan dan menjaga kebudayaan lokal merupakan kewajiban dari seluruh warga masyarakat karena kebudayaan lokal sebagai akar lahirnya kebudayaan nasional. Kebudayaan lokal yang ada di seluruh pelosok tanah air lahir terlebih dahulu sebelum kebudayaan nasional.

Upaya-upaya yang diperlukan untuk melestarikan, menjaga, dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, dengan memupuk rasa memiliki suatu budaya. Hal ini sangatlah penting dalam upaya melestarikan budaya-budaya kita. Dengan rasa memiliki yang tinggi atas budaya, kita akan semakin berusaha untuk menjaganya dan mempertahankan agar hal itu tetap menjadi milik kita. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki rasa, mereka akan acuh terhadap budaya yang kita miliki dan tidak memiliki semangat untuk melestarikannya. Tentu saja hal ini sangatlah berbahaya.

Suatu budaya itu akan tetap hidup jika masyarakatnya tetap melestarikan, menjaga dan minimal merasa memiliki akan budaya leluhur kita. Rasa memiliki akan budaya dapat kita pupuk sejak dini, sejak usia masih anak-anak. Misalnya mereka kita perkenalkan dengan alat musik tradisional atau wayang dengan cara yang menarik, maka anak itu akan muncul benih-benih rasa senang pada budayanya dan nanti pada akhirnya mereka akan berusaha menjaga dan melestarikan.

Sementara itu menggiatkan kegiatan kebudayaan, merupakan langkah yang patut untuk kita lakukan. Setelah suatu masyarakat mempunyai rasa memiliki akan budayanya, mereka harus

mengaplikasikan rasa itu dengan melakukan kegiatan kebudayaan guna melestarikan budaya kita. *****

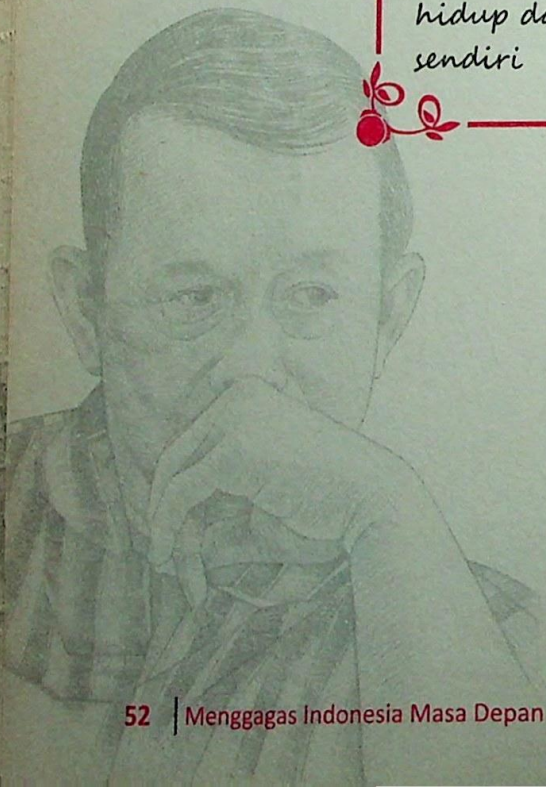


Pluralisme Kebangsaan

Bab 3

Djoko Santoso
for the People

Kondisi bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, menyebabkan beragam pula keinginan masing- masing individu. Orang-orang dari daerah yang berbeda dengan latar belakang berbeda, struktur sosial, dan karakter yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda dengan cara berpikir dalam menghadapi hidup dan masalah mereka sendiri



"Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu." (**Gus Dur**)

PENGANTAR

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beraneka ragam masyarakat, suku bangsa, etnis atau kelompok sosial, kepercayaan, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah lain.

Kondisi bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, menyebabkan beragam pula keinginan masing-masing individu. Orang-orang dari daerah yang berbeda dengan latar belakang berbeda, struktur sosial, dan karakter yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda dengan cara berpikir dalam menghadapi hidup dan masalah mereka sendiri. Namun, mereka menjadi sebuah bangsa oleh dua konsepsi kebangsaan yang disepakati, yakni konsep pluralitas dan konsep gotong royong.

Berangkat dari pemahaman keragaman itulah kemudian bangsa ini merdeka. Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 68 orang, masing-masing mewakili keragaman saat itu. Ada berbagai etnis, suku, dan agama. Bahkan Ketua BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat itu juga bukan penganut agama, dia penganut kepercayaan.

Jadi jelaslah, keragaman tidak hanya fisik tetapi juga keragaman ideologi. Hampir semua ideologi berkembang dan ada di Indonesia. Keragaman di Indonesia telah selesai dengan realitas keragaman yang berkembang. Keragaman itulah yang kemudian membentuk Indonesia yang diikat dalam Bhineka Tunggal Ika.

Rumah besar bernama Indonesia itu yang kemudian menyatukan keragaman tersebut.

Sayangnya dewasa ini, diakui atau tidak, kita telah mengabaikan konsepsi keragaman atau pluralisme itu. Pengabaian ini memunculkan miskonsepsi atas realitas keragaman bangsa ini, sehingga terjadi banyak masalah yang mengarah kepada konflik yang bisa berakibat pada disintegrasi bangsa. Untuk itulah diperlukan pemahaman kembali terhadap pluralisme dan multikulturalisme untuk mempersatukan suatu bangsa.

Bangsa Indonesia memiliki Bhineka Tunggal Ika, yang mempunyai pengertian berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mengingatkan kita betapa pentingnya pluralitas dan multikulturalitas untuk menjaga persatuan dari kebhinekaan bangsa.

Tiga kata -Bhineka Tunggal Ika- yang menjadi pegangan setiap individu yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini, oleh para pendiri negara (*founding fathers*) disadari sebagai sebuah pedoman penting bagi warga dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Pemakaian kata ini juga bukti mereka memiliki kecermatan dan ketelitian dalam merakit bangsa yang sangat majemuk ini dalam satu bingkai persatuan. Dengan Bhineka Tunggal Ika, keanekaragaman yang ada dapat bersatu menjadi kekuatan besar dalam ikatan cita-cita bersama merebut kemerdekaan, menuju satu tujuan bersama yaitu masyarakat adil dan makmur berlandaskan keadilan sosial, sebagai landasan filsafat politik kebangsaan. Puncak dari perasaan satu itu, salah satu penanda sejarahnya adalah Sumpah Pemuda, yang terjadi pada 28 Oktober 1928.

Sumpah Pemuda adalah momen bersejarah bangsa Indonesia, dimana ikrar persatuan terucap atas dasar rasa senasib dan sepenanggungan, dan demi satu cita-cita bersama. Kita senantiasa tidak boleh melupakan bahwa kesatuan bangsa Indonesia bersifat etnik historis dan bukan etnik alami. Secara alami dari sudut bahasa, budaya, letak geografis, penghayatan keagamaan, dan suku-suku di seantero nusantara tidak merupakan kesatuan.

Bahwa mereka sekarang merupakan satu kesatuan adalah karena kesatuan cita-cita kebangsaan, dan cita-cita itu tumbuh berdasarkan pengalaman sejarah bersama, suatu sejarah penuh pengalaman-pengalaman mendalam berupa pengalaman ketertindasan dan penderitaan, pengalaman perjuangan bersama, kejayaan, dan bergeloranya semangat. Kesatuan bangsa itu hidup dari realitas cita-citanya. Apabila cita-cita yang mendasari perjuangan kemerdekaan bersama tidak tercapai, dasar kesatuan itu berada dalam marabahaya.

Menilik kondisi bangsa Indonesia dewasa ini, pertanyaan yang muncul adalah, apakah jaminan toleransi di tengah pluralitas yang telah terbangun mulai punah atau hilang sama sekali? Konflik berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) mewarnai wajah Indonesia beberapa dekade belakangan ini. Sebutlah misalnya konflik Ambon, Poso, Sampit, dan daerah-daerah lain, menjadi dasar atas pertanyaan tersebut dan telah membuat kita semua prihatin. Keprihatinan dapat berangkat dari keraguan apakah keanekaragaman yang selalu dihubungkan dengan kekhasan Indonesia, masih dapat dianggap sebagai kekayaan atau sebaliknya.

PEMAHAMAN PLURALITAS KEBANGSAAN

Plural berarti jamak, dalam konteks budaya yang di dalamnya

ada ajaran atau kepercayaan. Ajaran dengan keanekaragamannya serta agama dengan berbagai sempalannya, memperkaya kemajemukan budaya di negeri ini. Plural atau jamak adalah satu realita yang tak terbantahkan dan merupakan hukum alam (*sunnatullah*) dimana manusia tidak mungkin bisa mengubahnya.

Pluralis merupakan sikap hidup manusia yang mempertahankan kondisi kemajemukan dengan apa adanya, lengkap dengan konsekuensi terjadinya gesekan-gesekan antara "isme" yang ada di dalamnya. Kaum pluralis menyikapi kemajemukan ini dengan kedewasaan, dimana setiap ajaran pasti mengandung ajaran saling menghormati satu sama lain. Sudut pandang inilah yang ingin dikembangkan oleh kaum pluralis dalam menempatkan pluralitas, konteks persatuan, dan nilai-nilai kebangsaan tanpa melakukan intervensi terhadap tiap ajaran.

Salah satu tokoh Indonesia yang mengenalkan ajaran pluralisme adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Meski seorang pluralis, Gus Dur menolak ajaran pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama benar. Konsep pluralisme yang diajarkan Gus Dur lebih dekat pada konsep yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang mengatur diri sendiri dan saling berhubungan serta berdampingan, namun masing-masing kelompok tersebut mempunyai eksistensi yang berbeda.

Konsep pluralisme Gus Dur ini sejalan dengan konsep pluralisme yang diusulkan J.S. Furnivall (1948) dan dikembangkan oleh L. Kuper dan M. G. Smith (1969). Konsep tersebut lebih terkait dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum, bukan spesifik dengan urusan agama. Dengan demikian, konsep pluralisme yang terkait secara khusus dengan masalah agama, perlu dibatasi dalam konsep yang spesifik, yaitu konsep

"pluralisme agama", sehingga konsep pluralisme tidak mengalami kerancuan makna.

Setidaknya ada tiga ayat Alquran yang selalu dikutip Gus Dur, yaitu: "Tidak ada paksaan dalam agama"; "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku"; dan "Agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam". Dari ketiga ayat yang sering disampaikan tersebut menunjukkan bahwa Gus Dur memegang teguh dan bersikap konsisten terhadap agamanya, bahkan Gus Dur bersikap "intoleransi" dalam berteologi. Namun demikian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu menghormati terhadap pilihan agama dan keyakinan orang lain sebagai realisasi prinsip kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan.

Dengan memahami konsep pluralisme tersebut, diharapkan kita tidak terjebak dalam konsep pluralisme sempit yang banyak disalahpahami masyarakat. Dengan pemahaman pluralisme yang demikian, tampak lebih mengutamakan keutuhan dan kedamaian bangsa dengan tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya. Meski meyakini kebenaran agama yang dianutnya, bukan berarti secara psikologis pergaulannya dengan semua pihak yang beragam latar belakang, baik sosial, budaya, ras, golongan, termasuk agama menjadi terhambat.

KONSEP NASIONALISME

Bila definisi nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia, maka secara politis, bangsa atau *nation* dapat diartikan sebagai sejumlah orang yang dipersatukan karena persamaan cita-cita dan kerinduan untuk bernegara sendiri.

Nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya kesadaran nasional *(national conciousness)*. Dengan kata lain, nasionalisme adalah formalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Kesadaran nasional inilah yang membentuk bangsa (*nation*) dalam arti politis, yaitu negara nasional.

Sehingga bila bangsa dalam arti politis berarti negara nasional, maka negara nasional itu sendiri merupakan suatu bentuk negara, dimana rakyatnya mempunyai kehendak yang kuat untuk hidup bersama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan latar belakang, agama, ras, etnik, ataupun golongan. Sehingga bisa dikatakan bahwa negara nasional merupakan organisasi bersama yang mengemban dan menjamin perwujudan kepentingan rakyat.

Asas pluralisme kebangsaan Indonesia berlandaskan pada salah satu pilar, yakni Bhineka Tunggal Ika. Semboyan yang jadi pilar bangsa Indonesia dalam hidup bernegara dan berbangsa ini mengandung nilai-nilai inklusif, terbuka, ko-eksistensi damai dan kebersamaan, kesetaraan, tidak merasa yang paling benar, toleran, musyawarah, disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.

RASA PLURALITAS KEBANGSAAN

Setiap manusia memerlukan manusia lain dalam berbagai tingkatan kelembagaan. Negara merupakan lembaga manusia yang paling luas, yang berfungsi untuk menjamin agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang melampaui kemampuan lingkungan-lingkungan sosial lebih kecil.

Bangsa Indonesia terdiri dari beragam latar belakang suku, bahasa, agama, budaya, dan sebagainya. Perbedaan itu berada dalam satu wadah yang diikat oleh persamaan cita-cita

masa depan bersama. Adanya berbagai macam perbedaan itu memunculkan tuntutan agar satu sama lain memiliki rasa saling menghormati dan toleransi. Jika pemahaman pluralitas bangsa Indonesia ini dihayati benar, maka kehidupan bangsa Indonesia akan lebih mudah karena untuk memenuhi kebutuhannya, warga negara Indonesia bisa saling membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pasal 29 UUD 1945 memberikan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Hak dari setiap warga negara Indonesia adalah melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kewajibannya adalah menghormati dan menghargai apa-apa yang yang diyakini dan dipedomani oleh masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka.

Keanekaragaman yang ada di bangsa ini, di satu sisi bisa menjadi sumber harmoni, namun di sisi yang lain juga bisa menjadi sumber konflik dan disintegrasi bangsa. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengelola keanekaragaman tersebut melalui pendekatan kebudayaan dan sejarah kebangsaan.

Keanekaragaman bangsa Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bhineka Tunggal Ika, yang dicetuskan oleh Mpu Tantular, salah satu pemikir yang hidup di abad ke-14 yang dimiliki bangsa Indonesia ini telah menjadi simbol dan sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dulu, mulai dari Sabang sampai Merauke, sampai hari ini. Apabila filosofi di balik semboyan tersebut dihayati benar-benar oleh setiap individu bangsa Indonesia, memungkinkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan itu akan tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia, maka

selama itu pula eksistensi NKRI akan terus ada, dulu, kini dan yang akan datang.

Kesadaran ini mengejawantah dalam bentuk perilaku toleransi setiap warga negara dengan melihat perbedaan, bukan hanya sebagai bawaan hidup manusia, melainkan sebuah kekayaan yang harus dirayakan dan dilestarikan dalam praktek kehidupan sosial masyarakat. Kesadaran tersebut juga akan memperkaya pemahaman dan keutuhan jalinan persaudaraan diantara sesama, sehingga dengan demikian, sangat jelas bahwa masyarakat Indonesia sejak dari dulu telah terbiasa dengan keanekaragaman.

Oleh karena itu, dominasi berbagai kepentingan dan klaim kebenaran yang turut campur dalam mengelola keanekaragaman, harus kita cegah dan hindari, sehingga tidak akan mengakibatkan kehidupan sosial bangsa ini semakin tercabik-cabik akibat letupan konflik sosial yang hampir terjadi di berbagai wilayah bangsa ini.

Kenyataannya memang mengelola keanekaragaman atau pluralitas dan multikulturalitas bangsa bukanlah perkara mudah, apalagi di tengah maraknya fundamentalisasi agama dan identitas. Meski demikian, patut pula untuk disyukuri karena bangsa ini masih bisa berdiri kokoh dengan simbol dan identitas keanekaragamannya, meski badai kekerasan dalam bentuk teror dan konflik komunal, datang silih berganti menerpa kehidupan sosial masyarakat bangsa ini.

Oleh karenanya, untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, sangat penting untuk mengelola keanekaragaman bangsa Indonesia melalui pendekatan kebudayaan dan sejarah kebangsaan. Sebab struktur dasar masyarakat bangsa ini adalah apa yang lahir dari rahim budaya dan tradisinya sendiri, bukan apa yang datang dari luar, seperti

budaya Barat atau Timur Tengah.

Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Sri Sultan Hamengku Buwono X, bahwa pluralisme adalah kesadaran untuk menghargai agama dan perbedaan yang ada. Bhineka Tunggal Ika merupakan gagasan pluralisme dan multikulturalisme model Indonesia yang harus diwujudkan sebagai strategi integrasi bangsa untuk semua lapisan perbedaan.

Kendati demikian, jangan berkesimpulan pendapat Sri Sultan tersebut sebagai eksklusivisme pemikiran yang menafikan gagasan yang datang dari luar. Pendapat tersebut harus dipahami sebagai upaya untuk menyelami makna kearifan lokal bangsa dengan mencoba mendialogkannya dengan berbagai gagasan yang sedang berkembang, tanpa harus tercerabut dari akar dan falsafah kebudayaan bangsa ini.

Bagaimanapun, menjadi seorang pluralis yang toleran tidak mesti harus kehilangan identitas. Sehingga dengan demikian, wacana pluralisme dalam konteks Indonesia bukan lagi sebagai wacana baru, atau cara pandang dari hasil gagasan pluralisme model Barat, melainkan betul-betul lahir dari hasil pengalaman dan refleksi kehidupan sosial masyarakat nusantara. Meskipun tanpa ajaran dari luar, perbedaan agama, budaya, dan identitas adalah sebuah skenario dan keniscayaan hidup yang berasal dari Tuhan untuk manusia, dan akan selamanya ada seiring dengan dinamika kehidupan umat manusia di dunia ini. Jadi pada hakekatnya, setiap manusia telah diajarkan tentang beragam kenyataan yang sama, yang disebut pluralitas.

Mengelola keanekaragaman sebagai kekuatan atau modal bukan perkara mudah. Apalagi jika hal tersebut sudah terkait pada persoalan politik, identitas, dan keyakinan. Oleh karenanya,

dibutuhkan kerja keras dan kesabaran dalam berjuang. Karena pluralisme sendiri adalah upaya untuk memperindah keragaman melalui sikap toleransi, bukan untuk memperkeruh perbedaan apalagi menyelesaikan perbedaan dengan tindakan kekerasan.

Dalam konteks Indonesia, toleransi menjadi kunci utama pengelolaan keanekaragaman tersebut. Kenyataannya, sikap toleran yang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat hidup berbangsa dan bernegara, saat ini justru makin melemah. Di banyak tempat, terjadi tindak kekerasan oleh sekelompok anak bangsa terhadap anak bangsa lainnya.

Lalu bagaimana untuk menumbuhkan dan memupuk kembali sikap toleransi? Ada dua pendekatan untuk mengembangkan toleransi dalam masyarakat plural, yaitu pendekatan sistem sosial dan pendekatan budaya.

Pertama, pendekatan sistem sosial dilakukan melalui *intergroup relation*, yaitu hubungan antar anggota-anggota dari berbagai kelompok (etnik dan agama) untuk meningkatkan integrasi di antara mereka. Dengan adanya hal tersebut, dapat mengurangi intensitas konflik-konflik yang sering terjadi.

Kedua, pendekatan sistem budaya, bahwa masyarakat majemuk akan dapat kembali bersatu melalui kebijakan dan pengamalan nilai-nilai atau norma-norma umum yang berlalu di tengah-tengah masyarakat.

Dengan norma-norma umum tersebut, maka masyarakat plural akan mudah menjalin hubungan yang harmonis, dan kemudian rasa persatuan akan tumbuh subur. Bagaikan tanah humus yang terkena air hujan, sehingga tumbuh beraneka macam bunga-bunga yang indah dipandang mata, semerbak wanginya. Itulah gambaran manusia yang selalu mengedepankan sikap

toleransi dalam kemajemukan. Beda dengan mereka yang intoleran. Bagaikan tanah gersang yang tidak akan pernah tumbuh apapun macam tanamannya. Tidak ada pilihan lain untuk menggalang persatuan dan kesatuan demi tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara umum, kecuali dijembatani dengan sikap toleransi yang tinggi dan penuh kesadaran.

PLURALISME UNTUK INTEGRASI BANGSA

Kemajemukan dari segi agama, merupakan kemajemukan yang paling potensial memicu konflik. Apabila pengelolaan kemajemukan dari segi keyakinan ini tidak dikelola secara arif dan bijaksana, hal ini akan memicu konflik antarmanusia yang berbeda agama.

Berbagai konflik yang dikategorikan sebagai berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) khususnya aspek agama, yang pernah terjadi di beberapa daerah, disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap realitas kemajemukan. Bagaimanapun, pluralitas merupakan suatu hal yang tidak mungkin kita hindari. Kita sebagai bangsa yang besar harus sekuat tenaga menjadikan pluralitas sebagai aset bangsa bukan sebaliknya, menjadi alat yang dapat memecah belah kehidupan masyarakat, sosial, dan keagamaan.

Peter L. Berger (1988), menggambarkan dengan jelas perbedaan antara masyarakat kuno dan masyarakat modern. Masyarakat kuno (sering dinamakan masyarakat dengan kebudayaan sederhana), dijelaskan Berger, bersifat terintegrasi tinggi dan tetap bersatu (istilah lain adalah homogen) dalam keteraturan agama karena masih sederhananya alat-alat transportasi dan komunikasi, maka hubungan antarmasyarakat kuno itu terbatas.

Sebaliknya menurut Berger, masyarakat modern mengalami proses segmentasi atau pluralisasi, sering juga dinamakan diferensiasi. Setiap segmen dari masyarakat harus berhubungan dengan segmen-segmen lain untuk mempertahankan dan mengembangkan hidupnya.

Masyarakat modern dapat tetap terintegrasi dalam pola interdependensi, bahkan multidependensi. Pluralisasi itu terjadi di dalam dunia kehidupan pribadi manusia dan juga pada lingkungan umum. Kedua-duanya harus hidup bersama dalam suasana yang selaras dan serasi.

Pluralisasi kedua bidang tersebut selalu ditemukan dalam pengalaman modern: pengalaman kehidupan kota dan pengalaman komunikasi massa modern. Sejak munculnya pada zaman kuno, kota telah menjadi tempat pertemuan orang-orang dan kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Jadi, kota merupakan pertemuan dunia-dunia yang berbeda. Sesuai dengan strukturnya, kota mendorong penduduknya menjadi "berbudi" ("*urbane*") dengan menghormati orang asing, serta "canggih" dalam pendekatan berbagai realitas yang berbeda.

Dengan demikian, urbanisasi tidak saja berarti pertumbuhan fisik komunitas tertentu dan pembangunan berbagai pranata yang khas bersifat kota. Urbanisasi juga berarti sebuah proses dalam tingkat kesadaran yang tidak terbatas pada komunitas yang dapat dengan tepat dirancang menjadi kota.

Menurut Berger, urbanisasi kesadaran ini banyak dipengaruhi oleh media, dimana akibatnya gaya hidup (termasuk gaya berpikir, perasaan, realitas pengalaman yang bersifat umum) yang sekarang ini menjadi standar di masyarakat dapat saja menjadi sifat seseorang yang tetap tinggal di kota kecil.

Dalam hubungannya dengan proses sosialisasi, dapat dilihat sebagai berikut; *Pertama*, pluralisme telah memasuki berbagai proses sosialisasi primer, yaitu dalam proses berlangsungnya pembentukan dasar kepribadian dan dunia subjektif pada masa kanak-kanak. *Kedua*, pluralisme juga terjadi pada proses sosialisasi sekunder pada masyarakat modern, yaitu sosialisasi yang berlangsung setelah awal pembentukan diri.

Namun dikhawatirkan bahwa pluralisasi dunia kehidupan itu menimbulkan rasa disorientasi dan kebingungan yang dinamakan *homeless mind* (bersedia untuk meninggalkan kenyamanan). Rasa yang demikian itu mungkin timbul dalam berbagai masyarakat yang caranya mengagungkan kehidupan ekonomi sudah sedemikian dominan dibanding dengan kehidupan di bidang lain, sehingga semangat untuk mendapatkan keuntungan uang atau benda menyingkirkan segala pertimbangan lain. Oleh karena itu individualisme berkembang dengan suburnya sehingga menutupi nilai-nilai sosial lainnya, termasuk nilai-nilai yang mengikat para anggota keluarga sebagai komunitas yang terkuat untuk menghadapi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Meskipun pluralisasi atau diversifikasi sosial sudah tampak gejalanya di kota-kota Indonesia, namun ikatan kekeluargaan, bahkan ikatan kesukuan dan kedaerahan masih dapat bertahan dengan kuat terhadap desakan individualisme dan timbulnya *homeless mind.*

Betapapun kuatnya hasrat masyarakat Indonesia untuk membangun ekonomi nasionalnya sampai taraf setinggi mungkin, namun tata hidup yang dijiwai dengan nilai-nilai kekeluargaan tidak akan mudah dilepaskan. Mungkin istilah *"the homeless mind"* yang menggambarkan pola sikap hidup tidak berakar dalam bumi sesuatu masyarakat dapat diganti dengan *"the universal mind"* yang lebih mementingkan sifat persamaan pola pikir dan pola

bersikap hidup umat manusia di seluruh dunia.

Ideologi pluralisme secara luas berfungsi melegitimasi pluralitas pengalaman sosial. Koeksistensi sosial yang berbeda secara luas dilegitimasi oleh berbagai nilai seperti "demokrasi" dan "kemajuan". Kita tidak ingin menyangkal kesungguhan kepercayaan akan ide-ide tersebut maupun kemungkinan bahwa dalam beberapa kasus ide-ide tersebut mempunyai akibat sosial yang positif.

Indonesia yang dibangun dari struktur negara bangsa *(nation state)* tak dapat menghindar dari keniscayaan kemajemukan (pluralisme). Sejarah telah menorehkan realitasnya melalui wujud kemerdekaan Indonesia sebagai hasil perjuangan dari kekuatan kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa ini.

Masyarakat plural seperti Indonesia selalu dihadapkan kepada persoalan politis dan sosial, yaitu bagaimana mencapai tingkat integritas bersifat nasional. Baik bersifat horisontal, yaitu hubungan antarwarga negara yang berbeda latar belakang budayanya, maupun secara vertikal menghadapi berbagai macam bentuk hubungan dengan pemimpinnya. Hubungan pluralistik ini tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan stratifikasi sosialnya. Masyarakat multikultural mempunyai kecenderungan beberapa karakteristik yang khas, sebagai berikut:

Pertama, masyarakat terbagi pada segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok latar budaya, subbudaya yang berbeda.

Kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.

Ketiga, kurang adanya kemauan untuk mengembangkan konsensus antaranggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang

fundamental.

Keempat, kurangnya kesadaran mengembangkan konsensus relatif sering menumbuhkan konflik antarkelompok subbudaya tersebut.

Kelima, konflik bisa dihindari dan integrasi sosial dapat terjadi, tetapi dengan jalan relatif menggunakan paksaan ditambah adanya ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi.

Keenam, adanya dominasi politik kelompok satu atas kelompok yang lain.

Keadaan masyarakat multikultur sangat rentan. Solidaritas mekanik maupun solidaritas organik sulit dikembangkan dalam masyarakat multikultur. Dua landasan terjadinya integrasi masyarakat, meskipun menjadi sangat terbatas dalam masyarakat multikultural, setidaknya ada dua:

Pertama, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus oleh sebagian besar masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental.

Kedua, adanya berbagai macam anggota masyarakat yang sekaligus menjadi anggota dari berbagai macam kesatuan sosial. Dengan adanya kesatuan sosial tersebut jika terjadi konflik dengan kesatuan sosial yang lain akan segera dinetralisir oleh adanya loyalitas ganda.

Konflik sosial dan ketegangan politik yang berlarut-larut saat ini, merupakan personifikasi fakta dan realita bahwa bangsa ini memiliki keragaman yang tidak dapat diseragamkan. Pendapat tersebut setidaknya ingin memberi gambaran, bahwa fobia terhadap ancaman disintegrasi multidimensi yang kerap terjadi saat ini, adalah wujud resistensi yang di dalamnya membawa

nilai terhadap aksi politik kooptasi dan penyeragaman yang dicontohkan pada masa Orde Baru.

Kebijakan masa lalu yang mencoba menegasi karakteristik nilai-nilai dalam unsur pembentuk pluralism, telah melahirkan pemberontakan nilai yang terwujud lewat berbagai konflik dan dinamika yang ada saat ini. Walaupun kita sangat meyakini bahwa perjuangan nilai tidaklah selalu melahirkan "pemberontakan". Di dalam "pemberontakan" selalu ada nilai yang ingin dicapai.

KULTUR BARU BANGSA INDONESIA

Bagaimana Indonesia mampu bertahan sebagai Negara Kesatuan? Integritas masyarakat Indonesia dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak lain adalah suatu kemauan para warga masyarakat untuk membangun suatu kultur yang baru, yang mungkin berbeda dengan kultur kelompoknya, yang kemudian menjadi pedoman dan kaidah dalam interaksi sosial bersama.

Kultur baru, atau nilai-nilai dan norma-norma umum yang disepakati menjadi kaidah masyarakat bukan sekadar retorika, namun haruslah benar-benar dihayati dan dijadikan sebagai milik sendiri. Untuk mencapai konsensus nasional diutamakan sosialisasi nasional pula.

Menjadi warga negara Indonesia, konsekuensinya adalah harus mempunyai kemampuan menghidupi dan bahkan menikmati sebuah kemajemukan. Sejak awal para pendiri bangsa ini menyadari realitas seperti itu. Itulah sebabnya mengapa Pancasila dijadikan dasar negara dan Bhineka Tunggal Ika menjadi sebuah semboyan yang selalu dirujuk tatkala kita menjelaskan tentang keberagaman bangsa ini.

Menyadari realitas kemajemukan itu dan adanya tugas besar bangsa kita dalam membangun masa depan, maka hubungan dan kerjasama antarumat beragama harus makin dikembangkan dan menjadi program yang berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh umat beragama maupun lembaga-lembaga keagamaan maupun atas prakarsa pemerintah. Untuk melaksanakan tugas besar tersebut dan demi menjaga agar kemajemukan dapat tetap terbebas dari virus disintegratif, selain pemantapan program-program dialog antar umat beragama, maka pengembangan wawasan yang inklusif penting dilakukan.

Wawasan inklusif adalah suatu pola pikir berciri nondiskriminatif, yang memberikan kerangka dimana semua kelompok dalam masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan golongan dapat hidup bersama, bekerja bersama untuk membangun masa depan bersama yang telah baik, dengan tetap berpijak pada visi teologis yang diyakini setiap orang. Dengan demikian pemikiran inklusif adalah pemikiran yang "mengakomodasi", "memberi tempat", "menghargai" kelompok lain dan jauh dari sikap yang meniadakan kelompok lain atau sikap membenarkan.

Saat ini bangsa Indonesia memang belum terbebas dari masalah sentimen multi kulturalisme atau multi etnisisme. Semakin nyata bahwa dalam banyak bagian masyarakat Indonesia, terjadi penegasan identitas kelompok etnis atau komunal. Semakin banyak penduduk yang memandang diri mereka sendiri sebagai suatu komunitas kultural tersendiri. Komunitas yang seringkali memiliki bahasa, agama, kekerabatan, dan ciri-ciri fisik (seperti warna kulit) sendiri, atau berbeda agama tetapi berbicara dalam bahasa yang sama. Banyak kalangan seperti ini yang cenderung memiliki penilaian negatif terhadap anggota kelompok etnik lain.

REDUPNYA PLURALISME

Indonesia dengan sekian banyak agama, berarti terdapat pluralisme agama-agama. Namun demikian, secara resmi hanya diakui 5 (lima) agama yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Belakangan, di era pemerintahan Abdurahman Wahid, Konghucu diakui sebagai agama. Agama telah menjadi pihak yang berdiri secara problematik dalam masyarakat pluralistis seperti Indonesia. Siapapun tidak ada yang menampik terhadap fakta keragaman agama di Indonesia.

Terdapat persoalan pembedaan antara agama yang diakui (resmi) dan agama yang tidak diakui (tidak resmi) di Indonesia. Persoalan ini terus mengemuka dan dipertanyakan terutama oleh kaum intelektual. Bahkan Djohan Effendi dengan Gus Dur memperjuangkan keinginan agar semua orang yang disebut "kaum minoritas" diberi hak dan kebebasan mengungkapkan keberagamaannya di muka umum. Bukan rahasia lagi, bahwa yang disebut agama-agama suku seperti Permalim di Sumatera, Marapu di Sumba, Jingitiu di Sabu, dan berbagai agama-agama suku lainnya tetap hidup sampai sekarang. Di Kalimantan, agama Kaharingan didesak untuk menggabungkan diri dengan agama Hindu Dharma.

Mengingat keragamana agama dan keyakinan itu tak sesederhana yang dibayangkan, maka alangkah baiknya kategorisasi "resmi" dan "tidak resmi", "diakui" dan "tidak diakui" terhadap agama-agama atau keyakian ditinjau kembali. Negara sendiri menentukan kriteria agama diambil dari agama-agama "samawi", yaitu harus mempunyai kitab suci, nabi, dan seterusnya. Penentuan sepihak seperti ini jelas dapat merugikan para penganut yang agamanya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan itu.

Sebab dalam pluralisme agama-agama, kita tidak bisa membatasi diri hanya pada agama-agama yang diakui negara, melainkan juga yang berada di luarnya. Untuk mengakui kenyataan ini, kepada kita dituntut kedewasaan beragama. Tercakup di dalam kedewasaan beragama adalah pengakuan bahwa orang lainpun berhak untuk menyatakan imannya di muka umum. Tentu saja apa yang diungkapkan itu tidak harus sesuai dengan iman seseorang, namun seseorang tersebut tidak boleh merasa terganggu dengan itu selama yang bersangkutan melakukannya dengan cara-cara yang beradab.

Sebagai contoh, salah satu daerah di Indonesia yang damai dan pluralis, Mopuya, sebuah dusun di Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolmong, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memiliki karakter yang damai, toleran, dan pluralis. Desa terpencil di Provinsi Sulawesi Utara ini dihuni penduduk dari berbagai agama: Islam, Hindu, Katholik, dan Kristen dari berbagai denominasi. Uniknya mereka membangun tempat ibadah bersama-sama, dan bahkan di Desa Mopuya Selatan tempat-tempat ibadah itu dibangun dalam satu komplek di sebuah lahan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Di komplek ini terdapat Masjid Jami' al-Muhajirin, Pure Puseh Umat Hindu, Gereja Katolik Santo Yusuf Mopuya, Gereja Pantekosta, Gereja KGPM Sidang Kalvari Mopuya, dan GMIBM PGI Jemaat Immanuel Mopuya.

Tidak sebatas itu, komunitas agama di desa ini juga saling merayakan hari-hari besar agama mereka dalam semangat penuh kebersamaan dan saling menghargai perbedaan dan keragaman. Para tokoh agama juga tidak mengajarkan superioritas agamanya atas yang lain. Dengan memiliki karakteristik yang unik, damai, toleran, dan pluralis, desa ini pernah menjadi "proyek percontohan" atau model toleransi dan pluralisme agama bagi masyarakat

internasional. Bahkan saat Menteri Agama dijabat Tarmizi Taher dan Gubernur Sulawesi Utara dijabat EE Mangindaan pernah diundang pemerintah Amerika Serikat untuk presentasi mengenai kehidupan keberagamaan di Indonesia, terutama komunitas Mopuya ini (Jawa Pos, 18 Maret 2008).

Bangsa ini memerlukan sebuah pandangan pluralisme sebagai langkah akomodatif terhadap pemeliharaan dan pengembangan khazanah potensi bangsa secara internal dan kontributif, bagi sebuah pandangan hubungan kemanusiaan antarpemeluk agama, baik dalam konteks nasional ataupun mondial. Untuk itu, sosialisasi pluralisme sebagai suatu proses edukasi dari proyek kebajikan harus sebisanya diterjemahkan ke dalam strategi pelembagaan kesadaran pluralism, menjadi mentalitas setiap umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Proses ini harus dimulai dengan usaha-usaha penanaman kesadaran pluralisme baik lewat lembaga-lembaga pendidikan formal, pelatihan-pelatihan advokasi, dan yang lebih penting adalah bagaimana agar ada keinginan politik (*political will*) pemerintah yang secara sungguh-sungguh mendukung proses penyadaran dimaksud secara serius dan sistematis. Misalkan saja, bagaimana agar supremasi hukum bisa menjadi garansi bagi pembangunan mentalitas pluralisme warga bangsa. Oleh karena itu harus ada kerja intelektual atau fatwa kalangan agamawan yang "mengharamkan" tindakan menegasi pluralisme oleh siapapun.

INDONESIA, MODEL PLURALISME AGAMA DUNIA

Indonesia sangat layak menjadi sebuah model ideal hubungan antaragama. Dalam dunia yang semakin multikultural, Indonesia punya prinsip Bhineka Tunggal Ika yang telah menjadi praktik dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi semakin relevan.

Sikap saling menghargai, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai di antara berbagai umat agama yang berbeda, merupakan salah satu cara terpenting dalam mengembangkan keharmonisan kehidupan dunia modern saat ini.

Tetapi meski memberikan banyak harapan, tidak berarti Indonesia bebas dari berbagai persoalan, khususnya menyangkut hubungan intra dan antaragama. Walaupun tensi dan konflik itu umumnya dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi potensi ketegangan dan konflik itu masih laten, apalagi ketika bercampur dengan masalah-masalah ekonomi dan politik.

Oleh karena itu, *unity in diversity* di Indonesia semestinya tidak dipandang sebagai sesuatu yang sudah selesai dan tidak perlu dipersoalkan lagi *(taken for granted)*. Justru sebaliknya, upaya-upaya sistematis dan terarah mestilah tetap dilakukan untuk senantiasa memperkuat keragaman dalam kesatuan dan kesatuan dalam keragaman.

MENANAMKAN PLURALITAS LEWAT PENDIDIKAN

Bagaimanapun, pembangunan sesuatu bangsa akan bisa berlangsung secara berkesinambungan apabila bangsa tersebut mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi dengan tidak mengedepankan perbedaan dan wawasan secara sempit. Semangat kebangsaan itulah yang perlu diusung, bukan semangat yang cenderung bercorak fanatisme sempit. Pilihan yang paling tepat untuk itu adalah memperkuat kesadaran pluralisme dan multikulturalisme dengan mengasah kesadaran untuk saling menghormati, mengakui, dan menghargai sebagai sesama warga bangsa.

Di sinilah fungsi semua jenis lembaga pendidikan

dapat memberikan peran maksimal bagi tumbuhnya kesadaran pluralisme dan multikulturalisme secara lebih luas. Lembaga pendidikan perlu mengajarkan tentang pentingnya menghargai dan memahami kelompok-kelompok etnik dan budaya lain, serta keragaman kultural dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, yang melahirkan peserta didik untuk memahami multikultural. Sekolah atau kampus yang juga institusi sosial mempunyai tanggung jawab dalam membentuk murid atau mahasiswa memahami multikultural dan mengkonsepsi secara sistematik, terprogram, dan kontinyu. Pluralisme dan multikulturalisme dapat dijelaskan sebagai suatu pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnik lain, bukan dalam artian menyetujui seluruh aspek kebudayaan.

Pendidikan merupakan proses pemanusiaan manusia, dan kaitan dengan hal itu hakekat kehidupan pluralistik bertumpu pada adanya "*social reproduction*", dalam arti apa yang dilaksanakan di dunia pendidikan dimasa kini, akan berbuah dimasa mendatang. Bila pendidikan mengajarkan sopan santun, kelak akan muncul anak yang sopan dan santun. Begitu pula bila pendidikan menanamkan jiwa pluralistik dan multikulturalisme, kelak akan lahir manusia saling memahami, menghormati, dan menghargai eksistensi masing-masing dalam kehidupan damai dan demokratis.

Munculnya berbagai masalah dan isu-isu lokal maupun global seperti pelanggaran HAM, fenomena kekerasan, terusiknya perdamaian antarwarga maupun etnik dengan latar belakang yang berbeda, menyadarkan dan sekaligus mengharuskan dunia pendidikan menemukan sistem dan visi yang relevan Indonesia sebagai suatu bangsa yang mempunyai keragaman budaya

yang diikat dalam semangat "Bhineka Tunggal Ika".

Pendidikan mengenai pluralisme dimaksudkan sebagai pernyataan dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan, meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari keragaman yang begitu kompleks. Dengan demikian meskipun disadari keragaman budaya yang kompleks, dalam kenyataan kehidupan bangsa Indonesia, semua itu dapat dirangkum dalam kesatuan yang kokoh dan teguh.

Pendidikan harus ditempatkan pada garda paling depan dalam mendekonstruksi teologi pluralisme dengan membuat metodologi pendidikan yang tepat untuk mendukungnya. Konstruksi pendidikan di masa lalu yang berbasiskan penyeragaman identitas budaya bangsa misalnya, harus dikaji dan mesti disesuaikan dengan paradigma pendidikan yang berbasis pluralisme bangsa.

Bagaimanapun, pendidikan adalah suatu proses sosial, sehingga pendidikan sebaiknya dipahami juga sebagai proses humanisasi; yaitu usaha agar seluruh sikap dan perilaku, serta aneka kegiatan seseorang bersifat manusiawi. Di situ pula pendidikan dikatakan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya lahir batin, dengan karakter dan watak kebangsaan yang kuat dan bersifat plural, sehingga dari situ peserta didik dapat diarahkan untuk lebih tahu dalam menghargai dan menghormati aneka macam nilai dalam masyarakat seperti nilai pluralisme.

Dengan demikian tidak ada jalan yang lebih tepat selain bahwa realitas plural-kemajemukan kita, harus mendapat perhatian yang memadai dalam dunia pendidikan kita. Sebagai contoh, pendidikan agama tidak boleh disejajarkan sebagai bagian dari usaha seseorang untuk memonopoli Tuhan dan kebenaran, dan dengan sendirinya menghakimi orang lain yang berbeda agama

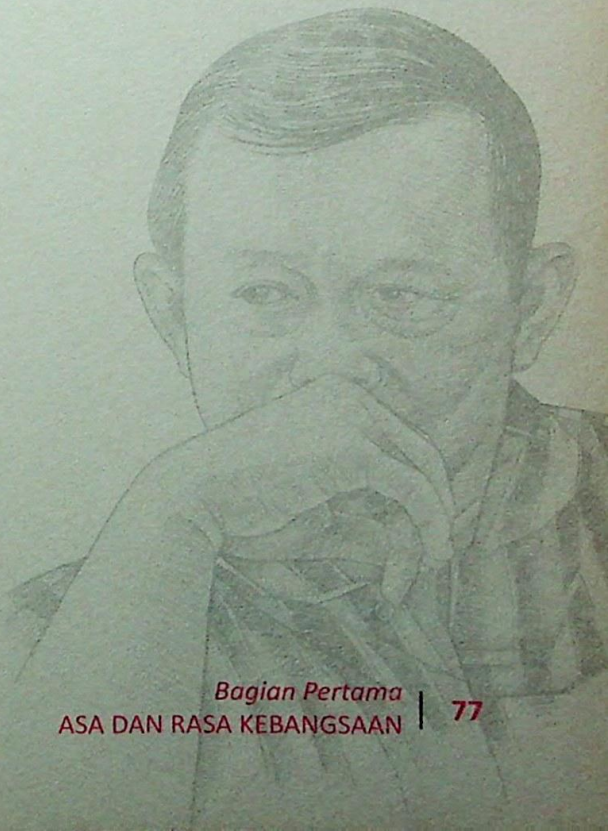
atau keyakinan dengannya. Akibatnya, realitas plural kehidupan agama kurang berfungsi sebagai tali pengikat persatuan bangsa yang berdiri berlandaskan pada Pancasila, yang memberi tempat pada pluralisme itu.

Pendidikan kita harus dikembangkan kepada ranah pluralisme untuk merangsang daya pikir dan kreativitas anak didik, serta kepada realitas dinamika masyarakat, bukannya menciptakan menara gading yang tercerabut dari akar kehidupan masyarakat yang plural. Sistem pendidikan, metode, dan cara belajar-mengajar pun harus diarahkan kepada pembentukan pola pikir dinamik, kreatif, dan pluralis bagi peserta didik agar dalam diri mereka tumbuh semangat toleransi dan saling menghormati.

Dalam hal ini, untuk mengubah paradigma dan metodologi pendidikan yang tegas bahkan radikal dari para pemegang kebijakan negara, yaitu dengan mengubah secara fundamental pendidikan sebagai subyek dinamika realitas kehidupan masyarakat, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengelola realitas pluralisme bangsa secara tepat. Harus dipahami bahwa pendidikan merupakan media pencerdasan anak-anak bangsa untuk membangun masa depan bangsa dan negara.

Pada akhirnya tujuan pendidikan pluralisme ialah, menyadarkan para peserta didik akan prasangka-prasangka yang ada dalam diri mereka masing-masing dan menanamkan dalam diri mereka benih-benih kemampuan, untuk mengendalikan prasangka-prasangka tadi. Ini dapat dicapai dengan mengenali keindahan serta potensi-potensi untuk hidup harmonis dan kreatif dalam masyarakat yang pluralistik. Jadi, dasar yang dapat dipakai untuk melandasi pendidikan pluralisme adalah realitas objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan keharusan mengelola keanekaragaman tersebut secara harmonis dan kreatif, sehingga

keanekaragaman bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang indah. Dengan demikian, tugas pendidikan pluralisme adalah *"to teach students the beauty of living harmoniously and creatively within our pluralistic setting"*. *****



Mewujudkan Kemandirian Bangsa

Bab 4

Krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Utang yang telah ditumpuk pada masa pemerintah Orba kini meledak. Cadangan devisa anjlok, nilai rupiah terjun bebas, inflasi meroket di atas 50%. Lalu Orba pun jatuh, dan Indonesia memasuki era reformasi



"Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya." (Pidato Trisakti **Bung Karno**, 1963)

PENGANTAR

Banyak negara mencapai kemajuan dan kemakmuran karena mengandalkan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif untuk dapat meningkatkan daya saing negara dan mencapai kemandirian bangsa. Salah satu contoh adalah Jepang. Dengan mengandalkan keunggulan sumber daya manusianya, negara ini menjadi produsen otomotif dan elektronika terkemuka di dunia.

Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, sepatutnya mengikuti jejak yang ditempuh oleh Jepang dan juga negara industri baru seperti Korea Selatan. Bangsa di negeri gingseng ini dengan tekad dan kerja kerasnya belakangan ini berhasil menyamai Jepang, bangsa yang pernah menjajahnya, dalam hal otomotif, produk elektronika dan telekomunikasi.

Bangsa Indonesia berpotensi mengembangkan warisan seni budaya dan juga pemanfaatan sumber daya hayati yang menjadi kekuatan utama, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan pemerintah yang tidak visioner, juga mengakibatkan ketergantungan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat menjadi tidak mampu berpikir dan bertindak mandiri. Kebijakan bantuan yang bersifat langsung (*charity*) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bisa dijadikan contoh kebijakan pemerintah yang tidak mendidik.

Langkah yang harus dilakukan masyarakat, yang terlalu terpusat di Jakarta, adalah kembali ke kampung masing-masing. Banyak hal yang bisa dilakukan agar kampung menjadi

lebih produktif. Kenyataannya, kampung-kampung di pelosok nusantara sesungguhnya menyimpan potensi ekonomi, yang bisa menyejahterakan siapa saja yang siap mengelolanya dengan kerja keras. Keberadaan ibukota dan kota-kota besar akan lebih stabil jika dikelilingi kampung-kampung yang produktif.

Kemandirian bangsa akan memacu tingkat produktivitas dan membuat negara lebih stabil secara sosial dan ekonomi. Pemerintah pun akan menjadi perantara produk dalam negeri dan bukan sebagai pemasok impor. Segala krisis yang terjadi di Indonesia, seperti krisis bawang, cabe, dan bahan pangan lainnya sebenarnya tidak perlu terjadi, karena hal itu bisa ditanggulangi bila masyarakat Indonesia sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Untuk memperkuat kemandirian bangsa, perlu memperkuat ekonomi dengan basis pengetahuan. Ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) akan mampu meningkatan produktivitas, nilai tambah, dan peningkatan keunggulan kompetitif. Inovasi dan *technopreneurship* merupakan dua kata kunci penting dalam perubahan ke ekonomi berbasis pengetahuan tersebut. Kedua hal tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Manfaat ekonominya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Manfaat sosialnya adalah menggerakkan perubahan perilaku sosial di masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif, yaitu produktif dan bijak dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal.

Penerapan inovasi teknologi dan pengembangan ekonomi

berbasis pengetahuan memerlukan kesiapan inovator dan *technopreneur*. Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan kapasitas serta keahlian inovator dan *technopreneur* muda ini, pendidikan tinggi memiliki peran yang semakin sentral.

Perguruan tinggi harus menjadi pendorong tumbuhnya inovator dan *technopreneur* baru. Untuk membantu peserta didik mencapai potensi maksimalnya sebagai inovator dan *technopreneur*, fasilitasi dan pendampingan yang sistematis melalui kegiatan kurikuler maupun kokurikuler perlu dilakukan. Partisipasi berbagai pihak, teori, dan pendekatan digunakan dalam proses pendidikan untuk menghasilkan inovator dan *technopreneur* handal. Bagaimanapun, perguruan tinggi menjadi salah satu agen perubahan yang sangat diharapkan keterlibatannya secara massif dan efektif.

KEBANGGAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN KEMANDIRIAN

Salah satu langkah penting agar rakyat Indonesia mandiri adalah memupuk kemauan masyarakat untuk bersedia memakai produk-produk lokal. Bagaimanapun, harus ada kepercayaan di benak bangsa Indonesia bahwa produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri, sehingga ada kepercayaan diri untuk menggunakan produk dalam negeri dan memasarkannya. Dengan bekal kerja keras dan ilmu pengetahuan yang memadai, bangsa Indonesia pasti mampu sejajar dengan dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu maju dalam manajemen produksi dalam negeri.

Dengan kemandirian menggunakan produk dalam negeri, maka akan semakin memacu kemajuan produk dalam negeri, dari segi kualitas dan *packaging* (pengemasan), sehingga dapat bersaing

di pasar internasional.

Kemandirian bangsa merupakan pondasi awal dari kemajuan suatu bangsa. Lihat saja Jepang, Korea Selatan, dan India. Dengan komitmen kemandirian bangsa, maka sekarang ketiga negara tersebut cukup diperhitungkan dalam produk otomotif dan entertainmentnya.

Banyak analisis mengenai kebutuhan pembangunan bangsa ini yang mengusung "membangun kemandirian serta kedaulatan bangsa". Banyak persoalan kebijakan pembangunan dari yang rumit seperti perdagangan global, hingga kelangkaan solar dan melejitnya harga-harga bahan pokok, secara kreatif oleh pakar dan peminat dihubungkan dengan isu tersebut.

Tema yang lugas ini memberikan kedekatan (*insight*) bahwa persoalan kemandirian serta kedaulatan bangsa, termasuk dalam aspek energi, sangat krusial dihadapi oleh Indonesia di dalam percaturan global yang semakin kompetitif. Kompetisi global yang semakin kompleks, secara riil hanya akan dimenangkan oleh negara-negara dan aktor internasional yang melandaskan segala aspeknya kepada pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kapasitas untuk terus melakukan inovasi kreatif, serta adanya komitmen politik yang mendukungnya.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa negara-negara yang maju, selain mereka menguasai teknologi, banyak yang tidak memiliki kekayaan alam maupun sumber energi klasik (fosil) yang melimpah, seperti; Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Ironisnya, negara-negara yang memiliki kekayaan sumber alam dan energi melimpah justru merupakan negara-negara yang tidak mengalami pembangunan secara baik dan bahkan terbelakang.

Oleh karenanya, sering disebutkan kekayaan alam atau energi

yang dimiliki itu justru menjadi sumber malapetaka (*resources curse*) dan bukannya menjadi berkah bagi pembangunan bangsa tersebut. Memang, persoalan kemajuan dan kemandirian bangsa atas kekayaan energi yang dimilikinya berkait erat dengan sejarah politik dan ekonomi masing-masing negara, dalam hal ini adalah sejarah kolonialisme yang telah melakukan penghisapan atas kekayaan alam negara jajahan.

Namun demikian, ketika dekolonisasi terjadi, dan negara-negara mengalami kemerdekaan, hubungan asimetris antara negara-negara yang baru merdeka dengan negara-negara maju tidak begitu saja berakhir. Negara-negara maju dengan kemajuan sistem bisnis internasional yang dilakukan oleh perusahan-perusahaan raksasa multinasional *(Multinational Corporations–MNCs),* secara efektif mampu melanjutkan pola-pola eksploitasi sumber-sumber alam dan energi di berbagai belahan dunia secara efektif.

Proses eksploitasi secara global tersebut dilakukan atas dukungan penuh oleh negara-negara maju untuk memastikan keamanan akan sumber alam, bahkan dalam konteks energi adalah keamanan energi dengan terjaminnya *supply* yang murah dan berkelanjutan, dan jika perlu, negara-negara besar tidak segan-segan menggunakan cara-cara militer untuk memastikan terjaminnya akses atas energi tersebut.

Para pakar ilmu sosial, terutama sosiologi pembangunan, telah sejak lama memperhatikan terhadap persoalan demikian dengan menyoroti masalah pembangunan keterbelakangan (*development of underdevelopment*). Pembangunan saat ini justru menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang atas negara-negara maju, sehingga kemandirian dan kedaulatan dalam pengertian *multi-facet* (banyak segi) sulit untuk ditegakkan.

Kondisi demikian, pada saat ini semakin sulit lagi bagi negara-negara berkembang untuk bergerak karena tatanan sistem ekonomi politik internasional yang secara hegemonik didominasi oleh sistem ekonomi pasar yang membuka kekuatan modal atas seluruh akses komoditas dan jasa di seluruh penjuru dunia.

Kondisi demikian oleh Immanuel Wallerstein disebutnya sebagai sistem ekonomi dunia yang kapitalistik yang telah dimulai sejak awal penjajahan abad ke-16 dan terus berlangsung hingga saat ini sebagai suatu sistem dunia (*world systems*). Sistem yang mengikuti sistem ekonomi liberal tersebut telah menciptakan pembangunan yang tidak merata, yang disebutkan oleh Samir Amin sebagai ketidakseimbangan pembangunan (*unequal development*).

Pada kondisi demikian, upaya penting yang perlu dilakukan adalah mengurangi, karena tidak dapat memutuskan ketergantungan negara pinggiran (*satellite* atau *pheripery*) terhadap negara-negara pusat (*metropol* atau *centre*). Salah satunya adalah melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya keberpihakan kepada bangsa sendiri yang bukan pada hanya tataran retorik, namun secara riil dilakukan oleh negara dengan segenap sistem birokrasinya. Dengan demikian, pemerintah merupakan tameng utama bagi pembelaan kepentingan dan perlindungan kedaulatan nasional.

GLOBALISASI DAN KEDAULATAN BANGSA

Perjalanan sejarah bangsa menunjukkan, bangsa kita sejak dulu telah melakukan pergaulan internasional dengan berbagai bangsa dunia. Wilayah nusantara juga menjadi pasar yang mengundang banyak pedagang bangsa lain datang.

Dengan demikian globalisasi bukanlah hal yang baru pada bangsa kita, keberagaman bahasa, suku, dan budaya kita saat ini bagian dari dampak globalisasi di masa lalu. Namun, kita sebagai bangsa memiliki pilihan untuk menjadi bangsa yang besar, merdeka, dan berdaulat. Bangsa ini telah membuktikan perbedaan dan keberagaman suku, bangsa, dan bahasa, bahkan letak geografis yang dipisahkan lautan tidak mengurungkan niat bangsa ini untuk bersatu dan memilih merdeka yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

Namun pilihan menjadi negara merdeka tersebut semakin tidak bermakna, ketika bangsa ini tidak memiliki kedaulatan yang utuh dalam mengolah hasil buminya sendiri. Dari tahun ke tahun kita semakin merasa tidak memiliki kedaulatan atas nasib kita sendiri, baik secara politik, budaya apa lagi secara ekonomi. Negara kita selalu menjadi tujuan pasar dan bangsa kita terlena menjadi bangsa yang konsumtif bukan bangsa yang produktif.

Kebijakan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) memberikan banyak dampak positif di antaranya adalah daerah-daerah dapat secara mandiri menggali dan mengelola potensi daerahnya masing-masing, namun sisi negatifnya adalah memunculkan ego sektoral yang juga dapat mengancam disintegrasi bangsa. Dengan kondisi seperti ini, perlunya seluruh elemen masyarakat terutama jajaran elit politik untuk tetap mempersatukan keragaman potensi daerah yang merupakan keunggulan bangsa kita dan secara terus-menerus menggemakan kesadaran kepada seluruh bangsa, bahwa kedaulatan bangsa adalah sesuatu yang mestinya ada dan diperjuangkan sepenuhnya bagi setiap bangsa.

Begitu banyak potensi bangsa ini yang perlu diolah, sehingga menjadi pilar-pilar kemandirian dan daya saing bangsa. Kesadaran akan kenyataan ini, bisa menjadi awal tumbuhnya nasionalisme

yang memacu semangat pembangunan bangsa yang mandiri, kuat, dan berdaulat.

GLOBALISASI DAN SIKAP NASIONAL

Globalisasi secara luas menjadikan semua bangsa-bangsa di dunia ini satu bumi dan tanpa batas negara. Dalam arti, politik ekonomi globalisasi lebih menghembuskan paham-paham liberalisasi pasar dan privatisasi perusahaan negara menjadi milik swasta publik (asing) dan tergantung pada mekanisme pasar internasional. Penguasanya adalah siapa saja yang memiliki akses tak terbatas pada sumber-sumber daya ekonomi.

Budaya global bila disikapi secara positif selalu mengedepankan isu-isu hak asasi manusia (HAM), pluralitas agama dan multikultur, perlindungan lingkungan, serta kemajuan teknologi. Semua itu adalah hak yang mestinya dapat diakses oleh seluruh umat manusia di dunia ini lewat berbagai media yang tanpa batas juga.

Kejadian di satu tempat di dunia ini dapat langsung diakses oleh individu di daerah lain tanpa kesulitan birokrasi apapun, tentu saja kecepatan mengakses informasi tadi dengan syarat kemampuan menguasai teknologinya. Bila ditanggapi secara negatif akibat dari masuknya globalisasi itu adalah terbentuknya pola ketergantungan baik ekonomi, teknologi, bahkan politik pemerintahan pun akan terpengaruh.

Di era global peran politik ekonomi memaksa setiap negara melakukan perjanjian perdagangan. Bahkan, dalam implementasinya mengharuskan ada privatisasi pada perusahaan-perusahaan milik negara. Privatisasi dilakukan terhadap seluruh aspek ekonomi, termasuk di antaranya perusahaan-perusahaan

telekomunikasi, bank, listrik, bahkan BBM yang semuanya justru merupakan badan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di bidang pertanian, ada suatu kesepakatan yang disebut AoA (*Agrement of Agriculture*).

Di dalam AoA ini diatur mengenai tidak bolehnya suatu negara melakukan proteksi perdagangan pertanian, penghapusan tentang pembatasan tarif, dan dihapuskannya kebijakan subsidi ekspor dan produksi pertanian. Kesepakatan lain dibawah WTO (*World Trade Organization*) inilah yang mengatur mengenai pertanian dalam bentuk *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIP's), yakni suatu perjanjian mengenai hak paten terhadap teknologi hasil rekayasa genetika, termasuk juga keanekaragaman hayati yang diakui sebagai penemuan oleh pihak-pihak yang menguasai modal dan teknologi.

Tujuan pertama kali WTO adalah liberalisasi perdagangan, namun pada kenyataannya WTO menyebabkan monopoli perdagangan. Saat ini hampir 97 persen perdagangan dunia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan *Multi Nasional Coorporation* (MNC) dan *Trans National Coorporation* (TNC).

Perusahaan-perusahaan internasional juga menguasai budidaya pertanian. Mulai bibit, pupuk kimia, pestisida, dan cara pengolahan pertanian dimiliki oleh perusahan tersebut. Di pelosok desa, petani telah dikenalkan, bahkan semakin tergantung dengan produk bibit, pestisida, fungisida, dan pupuknya. Secara pasti petani mengalami ketergantungan dengan produk industri teknologi pertanian yang dimonopoli perusahaan internasional tersebut.

Perusahaan-perusahaan internasional juga masuk ke Indonesia lewat pertambangan, misalnya Freeport, Inco, dan

Newmont. Selain membawa persoalan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dengan pengolahan limbah yang buruk, industri pertambangan telah menggusur pertambangan rakyat. Korban pertama kali akibat tambang yang tidak bertanggung jawab adalah masyarakat pedesaan di sekitar industri tambang tersebut. Pendapatan ekonomi masyarakat sekitar tambang dengan mata pencaharian yang mengandalkan sumber daya alam telah hilang akibat perampasan hak atas tanah dan pencemaran pada sumber-sumber kehidupannya. Munculnya konflik horisontal yang membutuhkan biaya sosial yang tinggi, perseteruan antarwarga, munculnya penyakit-penyakit sosial semakin tak terhindarkan.

Aneka ragam penyakit menimpa mereka yang disebabkan zat-zat kimia yang mengalir lewat limbah tambang dan dibuang di sungai, pantai, dan laut. Kecemasan yang sangat meresahkan adalah limbah kimia berbahaya yang telah merasuk pada proses regenerasi (fungsi reproduksi) masyarakat sekitar industri tambang yang tidak ramah lingkungan.

Lalu bagaimana nasib bangsa bila generasi penerus telah tercemari limbah beracun? Adakah produk pemimpin yang cerdas dan brilian di masa datang? Pribumi telah jauh dari alamnya, telah terjadi disharmonisasi dan keseimbangan antara jagad kecil (manusia) dan jagad besar (alam raya).

Dalam kondisi kini, globalisasi perdagangan menyebabkan investasi secara bebas masuk. Pada kepentingan tingkat pertumbuhan ekonomi negara, maka privatisasi sebagai jawaban untuk memudahkan penguasaan modal. Dalam kenyataannya penguasaan modal merupakan kekuatan intervensi yang dominan terhadap semua kebijakan negara, sehingga justru mengakibatkan pemberangusan hak-hak dasar warga negara. Nasib masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti diujung tanduk. Dari

sisi kebijakan, tidak ada perlindungan yang pasti akan hak-hak masyarakat, elite politik pun tak mampu mengadakan perlawanan atas intervensi kekuatan modal itu.

Pola-pola peniadaan kepentingan akumulasi modal skala kecil (UKM) untuk petani pada kasus pemasaran hasil produksi pertanian, nampak sekali pada produk kebijakan mengenai aturan pajak import hasil produksi pertanian dari luar negeri. Misalnya beras dan buah-buahan, jelas akan meminggirkan posisi petani. Lalu bagaimana sikap politik secara nasional menghadapi arus globalisasi yang semakin meminggirkan kepentingan rakyat ?

MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA

Salah satu agenda besar bangsa Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Masalahnya, ketergantungan yang memperluas globalisasi tersebut justru menimbulkan kepincangan dunia. Pasar bebas yang diteriakkan dunia justru semakin kuat mencengkeram negara berkembang dan memperkuat negara maju.

Globalisasi digugat di banyak negara karena ia adalah anak kandung kapitalisme. Jadi secara tidak langsung, memprotes globalisasi juga memprotes kapitalisme dunia. Kapitalisme mendasarkan diri pada pasar bebas, tanpa ada campur tangan pemerintah dalam segala urusannya. Kapitalisme hanya bisa berdiri tegak jika segala rintangan menuju pasar bebas dihilangkan. Bagi kelompok anti-globalisasi, bebasnya rintangan telah memungkinkan negara maju mengambil alih berbagai sumber daya, kekuatan, dan kekayaan dunia ketiga. Perusahaan trans-nasional menancapkan kuku-kukunya di negara maju. Masyarakat dunia ketiga diciptakan untuk menjadi pekerja, sementara kekayaan perusahaan trans-nasional itu diangkut ke

negara maju. Inilah yang menyebabkan kemiskinan.

Masalahnya sekarang, apakah kapitalisme harus dibenci sedemikian kerasnya, sehingga tidak ada sisi positif dari kapitalisme? Kita harus membedakan terlebih dahulu antara kapitalisme dengan semangat kapitalis. Kapitalisme intinya adalah paham yang menekankan pada akumulasi kapital. Dalam perkembangannya, kapitalisme berorientasi pada penciptaan modal dan keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme (melihat sejarah perkembangannya) setali tiga uang dengan liberalisme. Kapitalisme hanya akan bisa menemukan titik pertumbuhan yang baik jika didukung oleh liberalisme.

Dalam perkembangannya, karena mementingkan masalah akumulasi kapital, kapitalisme hanya berorientasi pada tujuan dan tidak mengindahkan cara mencapai tujuan. Akibatnya, kapitalime itu sendiri di satu sisi menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan, modal terkumpul, tetapi di sisi lain tidak jarang praktik kapitalisme justru merugikan khususnya mereka yang tidak mempunyai kapital.

Kelompok orang miskin adalah korban utama dari kapitalisme. Kurangnya sumber daya yang mereka miliki, ditambah dengan tiadanya kekuatan kapital yang dimiliki, membuatnya terpinggirkan atau sengaja dipinggirkan. Pada akhirnya, mereka cenderung dieksploitasi untuk kepentingan kapitalisme.

Namun sebenarnya, kapitalisme juga menyimpan semangat juang pantang mundur untuk kesejahteraan manusia. Dari sejarahnya, semangat kapitalisme menekankan adanya semangat progresif. Setidaknya ada dua sosiolog yang dikonotasikan dengan semangat kapitalis. Yang pertama, adalah Max Weber, penulis *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism.* Dalam buku itu

diceritakan semangat kapitalisme tidak saja diperbolehkan oleh etika Protestan, tetapi justru diwajibkan. Ia tidak ragu-ragu lagi mengatakan, kemajuan Eropa seperti yang kita saksikan saat ini sangat dipengaruhi oleh etika Protestan tadi.

Tokoh yang kedua adalah Peter L. Berger. Ia menunjukkan bahwa semangat kapitalis mempengaruhi dan merangsang timbulnya sistem hukum dan kebudayaan yang rasional, sistem ekonomi yang efisien dan sistem politik yang demokratis. Berdasarkan perspektif ini, semangat kapitalis memperoleh "pembenaran" sosial.

Weber mulanya mengamati doktrin teologis dari beberapa sekte Protestan, terutama ajaran Calvinis yang dianggapnya paling banyak mendukung tumbuhnya semangat kapitalis. Baginya, ajaran Calvinis mengenai takdir dan nasib manusia "di hari nanti", merupakan doktrin yang memberi motivasi utama sikap hidup duniawi para penganutnya. Hanya manusia yang sanggup menyesuaikan ajaran Tuhan akan menjadi manusia terpilih.

Melihat pemaparan di atas, jadi semakin jelas bahwa memprotes kapitalisme secara serampangan tentu bukan pada tempatnya, karena semangat kapitalis yang sebenarnya juga terkandung dalam kapitalisme, justru diperlukan untuk membangun peradaban dan kesejahteraan manusia. Sementara kapitalisme justru semakin memperburuk citra manusia.

Dari sini bisa dipahami, bahwa yang diprotes oleh para aktivis antiglobalisasi itu sebenarnya dan harus diarahkan, bukan pada semangat kapitalisnya, tetapi kapitalisme itu sendiri. Jadi, memprotes semangat kapitalis tentu salah sasaran.

Masalahnya, saat sekarang sulit dibedakan mana yang semangat kapitalis dan mana yang kapitalisme. Dalam

perkembangannya bisa jadi semangat kapitalis kemudian berubah menjadi mental kapitalis (kapitalisme). Orang yang sudah makmur yang tidak punya semangat kapitalis seperti ajaran Calvinis, tentu akan mudah terseret dalam mental kapitalis.

Kalau sudah begini, protes yang diajukan oleh pihak antiglobalisasi bisa dimengerti. Tetapi, sebagai bangsa yang juga menjadi korban kapitalisme, kita tidak perlu gegabah menolak mentah-mentah kapitalisme. Siapa tahu di balik kekejamannya masih ada semangat kapitalis yang tumbuh. Oleh karena itu, kenapa tidak segera memilih semangat kapitalis, dan bukan kapitalisme?

KEBANGKITAN KEMANDIRIAN BANGSA

Satu abad lebih sudah kesadaran berbangsa kita terbentuk dan menjadi embrio kuat bagi terbentuknya negara yang kemudian diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dasar tujuan berbangsa dan bernegara dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Awal Reformasi 21 Mei 1998 juga patut disandingkan dalam memaknai Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional dan roh reformasi bukan hal yang terpisah. Ia melengkapi satu sama lain. Kebangkitan Nasional adalah semangat yang mendasari keberadaan bangsa dan negara Indonesia, sementara reformasi adalah momentum atau jeda yang meluruskan perjalanan bangsa, yang dianggap keluar dari prinsip-prinsip UUD 1945.

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 menyatakan: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 adalah pintu

gerbang. Tugas negara selanjutnya adalah membawa Indonesia yang merdeka dan berdaulat menuju bangsa berkeadilan dan makmur. Penjabarannya tertera dalam pasal-pasal UUD 1945.

Indonesia merdeka, sudah jelas dan diakui dunia. Tak ada satu makhluk pun di dunia ini yang masih meragukan bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Namun tentang Indonesia berdaulat, hal ini yang masih menjadi persoalan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk mengatur suatu pemerintahan. Negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Tidak ada kekuasaan lain yang dapat mendikte dan mengontrol negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menjadi dasar dan tujuan negara. Keluar dari acuan UUD 1945 berarti kehidupan bernegara kita patut direformasi, dikembalikan ke bentuk awal (*reform*).

Berdaulat dalam konteks menuju bangsa berkeadilan dan makmur, kini masih menjadi pertanyaan. Dalam perjalanannya sebagai bangsa merdeka masih banyak persoalan yang belum menunjukkan kedaulatan dan kemandirian kita. Sekarang dan di sini, perjalanan kemandirian bangsa masih berlangsung. Bentuk kemandirian dan kedaulatan yang kasat mata adalah potret industri kita. Apakah industri kita sudah mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya, seperti amanat UUD 1945? Potensi sumber alam dan manusia yang berlimpah belum juga membuat Indonesia berdaulat dan mandiri.

Seorang ekonom, Thee Kian Wie yang meneliti sejarah ekonomi Indonesia sejak 1950 hingga 1990-an mengungkap: "sejak merdeka, ekonomi Indonesia selalu dipenuhi langkah kebijakan yang merupakan coba-coba, ketimbang langkah yang didasarkan pada analisis dan rancangan yang cermat. Ada yang

lebih memprihatinkan lagi, langkah coba-coba di masa lalu itu amat sering dilupakan. Padahal, seperti kata peribahasa "barang siapa gagal belajar dari sejarah, ia akan dikutuk mengulangi sejarah". Katakanlah, reformasi 1998 lalu kita dikutuk untuk mengulangi sejarah. Persoalannya, apakah kita sudah benar-benar belajar? Banyak yang menyangsikan hal itu. Malah dikatakan, reformasi kita dibajak kaum bermodal (kapitalis). Penguasaan sumber daya alam contohnya. Masih banyak sumber daya alam kita yang dikelola asing. Negara, dengan berbagai alasan, malah menyerahkan kepada asing. Industri kita belum beranjak menjadi kekuatan yang memenuhi kebutuhan rakyatnya. Mandiri dan berdaulat secara ekonomi masih jauh dari kenyataan. Kita makin tergantung impor.

Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan merdeka hampir bersamaan waktunya. Korea Selatan merdeka 15 Agustus 1945. Kini negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia. Kebijakan industri Korea Selatan berkesinambungan, tahun demi tahun, walau kekuasaan politik berganti, berjalan sesuai target tetap, bukan coba-coba. Sadar dengan kekayaan alam yang sangat terbatas, pemimpin Korea Selatan merancang industri yang mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dan bersaing dengan produk asing. Kini di usia yang sama dengan Republik Indonesia, industri Korea Selatan mampu menguasai dunia.

Pada 1950 Korea Selatan adalah salah satu negara termiskin di dunia. Sama miskinnya dengan negara-negara termiskin di Afrika dan Asia. Ekonominya hanya bersandar pada pertanian, belum lagi sempat hancur gara-gara pendudukan Jepang dan perang Korea. Selama empat dekade, Korea Selatan berubah cepat dari negara termiskin, menjadi salah satu negara paling

kaya dan tercanggih di dunia dengan nilai ekonomi trilyunan dollar. Pada 1963, GDP perkapitanya hanya USD 100. Tahun 1995 sudah mencapai USD10.000. Dan pada 2007, USD25.000. Goldman Sachs meramalkan 2050 Korea Selatan akan jadi negara terkaya nomor dua di dunia, mengalahkan semua bangsa lainnya kecuali Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita mencapai USD81.000. Korea Selatan juga tercatat sebagai bangsa dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah.

Apa yang mengubah Korea Selatan? Pemerintahnya berpikir soal industri baja itu sendiri secara matang dan terencana. Mereka merancang strategi jangka panjang dan konsisten dalam melaksanakan program itu. Walau kekuasaan politik berganti, kebijakan strategis tetap dijalankan.

Hampir semua negara di dunia ini mendambakan memiliki industri baja yang kuat dan tangguh. Industri baja adalah *mother industry* (ibu segala industri). Kemajuan industri baja pasti memicu penguatan sektor industri lainnya di suatu negara. Kenapa demikian? Karena semua industri, apalagi industri berat, bertumpu pada baja. Bagaimana suatu negara bisa membangun industri alat rumah tangga, mesin jahit, elektronik, mobil, pesawat, kapal laut, senjata, perakitan mesin, konstruksi dan lainnya, jika tidak dipasok dengan baja berkualitas.

Jerman bisa menjadi raksasa menakutkan dalam Perang Dunia I dan II karena memiliki industri baja yang tangguh untuk memproduksi tank, pesawat, kapal laut, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Jepang. Meski industri bajanya tangguh, namun kedua negara tersebut miskin bahan baku, sehingga perlu mencaplok negeri lain.

Logikanya Indonesia bisa jadi superpower baja karena

deposit biji besi yang kita miliki 320,43 juta ton. Industri baja pun sudah kita rintis sejak 1970 dengan PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Sayangnya kita belum mampu mengeksplorasi maksimal ratusan juta ton biji besi itu. Jika dibandingkan dengan industri baja Korea Selatan, Posco, yang sama-sama berdiri pada 1970. Posco rata-rata mampu memproduksi baja 28 juta ton per tahun, sementara Krakatau Steel hanya 2,5 juta ton per tahun. Setelah 30 tahun industri baja Korea Selatan tumbuh, merek-merek seperti Hyundai, KIA, Samsung, dan sebagainya membanjiri dunia. Sementara Indonesia kini malah kewalahan menghadapi berbagai produk asing termasuk produk baja, khususnya dari China.

Pelajaran dari Korea Selatan adalah bukti *political will* (keinginan politik) pemerintahnya yang tinggi dan konsisten terhadap pembangunan bangsanya. Bukti strategi kebijakan industri yang terus menerus berkesinambungan. Mentalitas rakyat akan terbentuk dengan bangga dan cinta menggunakan produk lokal.

UKURAN KEMANDIRIAN

Kemandirian sebuah bangsa bisa diukur dari 3 (tiga) aspek:

Pertama, kemampuan dalam menetapkan ideologi kebangsaan secara lugas dan tegas. Lugas sehingga bisa dipahami bangsa-bangsa lain bahwa kita memiliki, meyakini, dan menerapkan pandangan atau falsafah hidup kita sendiri. Tegas dalam arti tidak terpengaruh berbagai tantangan dan pendiktean ideologi bangsa lain yang tidak sejalan dengan milik kita.

Ideologi yang diyakini bersama secara mantap bisa mencegah bangsa ini terombang-ambing, tidak berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), dalam pergulatan antarbangsa yang semakin keras ini.

Kita meyakini bahwa nilai, norma yang terkandung dalam lima sila Pancasila kita itulah falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa kita. Kelugasan dan ketegasan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah keharusan, apabila yang kita tuju adalah kemandirian bangsa yang hakiki.

Kedua, kemandirian bangsa juga bisa dilihat dari kecakapannya dalam merumuskan, memutuskan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan negara tanpa campur tangan pihak-pihak lain secara berlebihan. Kebijakan negara yang mandiri adalah simbol kemampuan bangsa dalam menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri. Kebijakan negara di bidang ekonomi yang terlalu banyak didikte oleh pihak lain akan menemui kegagalan ketika diterapkan. Itu karena kepentingan pihak lain dalam membantu menyelesaikan persoalan ekonomi kita tidaklah selalu sama dengan kebutuhan kita.

Ketika IMF (*International Monetary Fund*) menyarankan untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang, kita sepatutnya tidak serta merta mengikutinya tanpa reserve. Keperluan kita akan anggaran yang memadai di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial seharusnya cukup menjadi alasan untuk menelurkan kebijakan-kebijakan negara di kedua bidang itu yang pro-rakyat atau memihak kepada publik kebanyakan. Efisiensi anggaran dengan demikian tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Keputusan yang kerap dipilih, atas nama efisiensi, negara mengeluarkan kebijakan yang merugikan kepentingan publik dan justru membiarkan praktik-praktik salah alokasi anggaran, korupsi, kebocoran anggaran, dan salah manajemen birokrasi negara.

Ketiga, kemandirian bangsa tentu saja diukur dari kemampuannya dalam menjaga dan mempraktikkan kedaulatan

atas wilayah, penduduk, dan segenap sumberdaya yang ada di dalamnya. Kemampuan negara dalam menjaga keutuhan wilayah dari ancaman eksternal maupun ancaman separatisme internal adalah kebutuhan esensial dalam kemandirian bangsa. Kemampuan negara dalam menjaga aset atau sumberdaya yang ada di dalamnya juga merupakan keharusan.

Dengan 3 (tiga) tolok ukur di atas, kita sepatutnya memahami bahwa kemandirian bangsa ini masih menghadapi persoalan-persoalan mendasar. Yaitu persoalan yang lebih banyak sumbernya dari diri kita sendiri sebagai bangsa. Kita memaklumi bahwa konstelasi politik dan ekonomi internasional memang belum adil. Ada jarak yang selama ini belum terjembatani antara negara-negara kaya dan miskin. Ada tren globalisasi di segenap ranah kehidupan yang terus menerus menerpa.

Gejala yang disebut terakhir ini memang banyak menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial yang membuat perilaku sebagian warga menjadi amat pragmatis. Dapat dikaji kembali misalnya, fenomena *human trafficking* (perdagangan manusia) yang tidak saja melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan bahkan bayi yang diperjualbelikan. Juga fenomena pemakaian NAPZA (Narkotik, Psikotropika dan Obat-Obat atau Zat-Zat Adiktif lainnya) yang secara langsung mengancam proses regenerasi bangsa ini.

TRISAKTI DAN KEMANDIRIAN BANGSA

Ajaran Trisakti Bung Karno berbicara tentang kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam sosial budaya, yang diambil dari pidato Soekarno. Berbicara ajaran ini tidak dapat dipisahkan dengan sejarah panjang kontemplasi yang dilakukan Bung Karno. Trisakti yang dikemukakan Bung Karno

pada pidato ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 1964, kemudian setahun berikutnya, yakni 1965, dengan judul pidato "Berdikari", Bung Karno mendeklarasikan ajarannya dengan "Panca Azimat Revolusi".

Dalam Pidato 17 Agustus 1965 Bung Karno mengemukakan: *".....Panca Azimat adalah pengejawantahan daripada seluruh jiwa nasional kita, konsepsi nasional kita yang terbentuk di sepanjang sejarah 40 tahun lamanya. Azimat Nasakomlah yang lahir lebih dahulu dalam tahun 1926.....Azimat kedua adalah Azimat Pancasila yang lahir bulan Juni 1945....Azimat ketiga adalah Azimat Manipol/ Usdek, yang baru lahir setelah 14 tahun lamanya mengalami masa Republik Merdeka.....Azimat keempat adalah azimat Trisakti yang baru lahir tahun yang lalu .....Azimat kelima adalah Azimat Berdikari, yang terutama tahun ini kucanangkan (1965)."*

Trisakti yang dimaksudkan Bung Karno adalah; *Pertama*, berdaulat dalam politik. Pemikiran Bung Karno ini bukan lahir dari ruang hampa, Bung Karno telah lama melakukan analisa terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Melalui kontemplasi disimpulkan, bahwa penderitaan rakyat Indonesia disebabkan sistem menindas dan memeras dari kolonialisme dan imperialisme yang lahir dari rahim kapitalisme dan feodalisme bangsa sendiri.

Sebagai antitesis kolonialisme dan imperialisme, Bung Karno menekankan nasionalisme, yakni nasionalisme yang hidup di taman sarinya internasionalisme. Nasionalisme yang ingin mengangkat harkat dan derajat hidup manusia. Nasionalisme yang berperikemanusiaan, tidak menginginkan terjadinya *l'exploitation de nation par nation* (penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain), maupun *l'exploitation de l'homme par l'homme* (penindasan manusia terhadap manusia lain). Dengan demikian maka dapatlah dipahami bahwa watak dari nasionalisme Indonesia

bukanlah nasionalisme yang chauvinistik, melainkan nasionalisme yang berperikemanusiaan, nasionalisme yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan bersama, atau sosio nasionalisme.

Di atas negara bangsa merdeka itu dibangun demokrasi yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bukan mengabdi kepada kelas borjuasi dan kapitalis. Demokrasi bukanlah sekadar kebebasan, melainkan "tegaknya keberdayaan dan kedaulatan rakyat". Rakyatlah yang harus berdaulat dan kedaulatan itu dipergunakan untuk melahirkan kesejahteraan rakyat, mendatangkan keadilan sosial. Demokrasi yang ingin ditegakkan adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Berdikari di bidang ekonomi, sebagai konsep *kedua* Trisakti (demokrasi ekonomi), tidak dapat dipisahkan dengan konsep pertama "berdaulat di bidang politik" (demokrasi politik). Melalui demokrasi ekonomi, bangsa Indonesia anti terhadap kolonialisme dan imperialisme, berarti secara implisit anti terhadap kapitalisme yang melahirkan eksploitasi terhadap manusia (imperialisme).

Kapitalisme dalam pandangan Bung Karno adalah sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi, yang memisahkan kaum buruh dengan alat produksi. Kapitalisme timbul dari cara produksi, yang menjadi sebab nilai lebih tidak jatuh ke tangan kaum buruh, melainkan ke tangan pengusaha. Kapitalisme menyebabkan akumulasi kapital, konsentrasi kapital, sentralisai kapital, dan *industrieel reserve-armee* (barisan penganggur). Kapitalisme mempunyai arah kepada *verelendung* (memelaratkan kaum buruh).

Bung Karno dalam Pledoinya "Indonesia Menggugat"di hadapan pemerintah Belanda 18 Agustus 1930 mengatakan, terjadi sekarang ini fase imperialisme modern lewat kapitalisme sudah

kita hadapi. Cengkeraman kuku-kuku imperialisme dan bujuk rayu kaum imperialis sudah mulai kita rasakan. Sebagian besar dari bangsa ini menikmatinya sebagai upaya untuk menumpuk kekayaan dengan cara menjadi boneka kaum imperialis, dan sebagiannya lagi merasakan ketertindasan. Oleh karena itu Bung Karno menekankan, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat.

Ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Aspek budaya bagi Bung Karno sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bangsa Indonesia harus menghormati budaya warisan nenek moyang dan menghargai nilai-nilai luhur kebudayaan di masyarakat. Karakter dan kepribadian budaya nusantara haruslah dijaga dan dilestarikan. Misalnya, budaya gotong royong yang melambangkan kolektifitas sebuah komunitas yang guyub dan berbagai karya budaya, yang mewarnai dunia seni. Ini membuktikan keyakinan Bung Karno bahwa budaya kita adalah budaya yang luhur dan mendukung kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Bung Karno, *nation building* dan *character building* harus diteruskan sehebat-hebatnya demi menunjang kedaulatan politik kita.

Ajaran ini masih sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Semangat Trisakti Bung Karno sangat layak diangkat untuk merevitalisasi cara pandang generasi muda kita, yang kini banyak terkontaminasi nilai-nilai liberalis kapitalis berbungkus demokrasi.

Dalam konteks kekinian, fakta menunjukkan bahwa Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan karena kerap didikte oleh pihak asing. Begitu pula dalam bidang ekonomi yang tidak lagi mandiri. Sementara, dari sisi sosial generasi muda sudah nyaris kehilangan jati diri, oleh desakan budaya yang serba berbau asing dan mencampakkan budayanya sendiri.

Oleh karena itu, membangkitkan semangat perjuangan Bung Karno sangat pantas diangkat kembali demi meneruskan cita-cita Sang Proklamator untuk menjadikan bangsa ini berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sebagaimana tujuan ideologi Pancasila. Reformasi 1998 yang diperjuangkan kaum muda dengan keringat dan darah memang berhasil menjungkirbalikkan kekuasaan otoriter yang berlangsung 32 tahun. Namun, segera setelah itu kita menyaksikan tiada perubahan berarti yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks kekinian, Pidato Trisakti Bung Karno pada 1963 tentang; berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya, adalah butir-butir gagasan yang layak dihidupkan dan ditumbuhkembangkan kembali oleh generasi muda kita. Kita kini hidup di era globalisasi yang penuh dengan kompetisi yang sangat ketat. Namun, sebagai bangsa kita tidak boleh kehilangan jati diri. Kita hidup di tengah era globalisasi, tetapi kita tak boleh terbawa arus globalisasi itu sendiri.

Dalam hal berdaulat secara politik, Indonesia adalah negara merdeka dengan ideologinya sendiri, yaitu Pancasila. Sebagai negara berdaulat, RI tidak boleh didikte oleh negara manapun di dunia, termasuk negara-negara adi kuasa. Dengan menganut politik bebas aktif, posisi kita justru harus bisa ikut mewarnai kehidupan bangsa-bangsa di dunia dan ikut pula menciptakan perdamaian dunia.

Terkait kemandirian ekonomi, Bung Karno telah mewariskan kepada anak-anak bangsa ini sebuah konsep yang disebut berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Ini bukan berarti kita menolak investasi asing ataupun barang-barang impor yang kita butuhkan. Kita butuh investasi asing ataupun barang impor, tetapi itu hanya

boleh menjadi pelengkap. Sebaliknya, kita justru harus bisa mengolah dan mengembangkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dengan tenaga-tenaga terdidik yang kita miliki. Kita harus bisa ciptakan pasar sendiri, bukan menjadi pasar bagi produk asing.

Soal kemandirian sosial-budaya, ini penting kita tumbuh-kembangkan agar kita tidak terombang-ambing oleh semua hal yang berbau asing. Kita mempunyai kekayaan sosial dan budaya yang luar biasa kaya dan beragam, dan ini harus kita kembangkan dalam rangka mewujudkan kepribadian bangsa. Kita harus menjadi bangsa besar dan kuat, dengan terus mengembangkan kekayaan sosial-budaya yang kita miliki.

Imperialisme telah membuat bangsa kita mengalami kemunduran budidaya, yaitu dengan salah satu caranya menghancurkaan pikiran (akal-budi) rakyat. Politik kolonial mengubah rakyat Indonesia (nusantara) menjadi rakyat yang serba "*nrima*", rendah pengetahuan, lemah kemauan, rendah antusiasme, hilang keberanian, dan sebagainya. Dengan bahasa sekarang bisa disebut *powerless* atau kehilangan kualitas sumber dayanya. Kehancuran atau terkikisnya kebudayaan mengakibatkan pribumi kehilangan perekat, kehilangan identitas, mengalami disorientasi yang pada gilirannya ia akan menjadi penurut dan mudah dikuasai.

Sistem imperialisme telah membangun keyakinan bahwa bangsa penjajah lebih superior dibanding bangsa terjajah. Itu diusahakan dengan mempersempit peluang rakyat untuk mengakses berbagai pengetahuan. Membiarkan dalam kebodohan atau dibuat lebih bodoh. Menurut Bung Karno, rakyat nusantara distigma sebagai "inlander bodoh". Stigma itu berlangsung secara turun-temurun.

KUBA ADOPSI TRI SAKTI

Satu hal yang sebenarnya cukup membanggakan bagi bangsa Indonesia bahwa ajaran Soekarno -Tri Sakti- telah diadopsi oleh Fidel Castro dalam konteks Kuba, yang membuat rakyat negeri itu makmur dan sejahtera. Castro mengatakan dengan tegas, dirinya adalah murid Bung Karno. Itu dikemukakannya sendiri kepada Bung Karno, ketika dua tokoh Gerakan Non-Blok ini bertemu dan kepada Adam Malik ketika ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Secara terbuka Castro menegaskan bahwa dirinya telah mengadopsi ajaran-ajaran Tri Sakti Presiden RI pertama itu, untuk dijadikan acuan guna memimpin negaranya.

Fidel Castro yang dikenal sebagai tukang ekspor revolusi ini ternyata juga telah mengimpor teori revolusi ajaran Bung Karno. Kuba sebagai negara yang luasnya tidak lebih dari Pulau Jawa ini, tampak bahwa pemerintahan di bawah Fidel Castro konsisten mempraktikkan dua ajaran tersebut yang tentu saja sudah diolah menjadi Trisakti dan Resopim model Kuba.

Tentu saja dalam versi Kuba, sosialisme Indonesia juga diolah menjadi sosialisme Kuba yang secara filosofis berbeda dengan Indonesia. Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila, sedangkan sosialisme Kuba berdasarkan teori Marxis. Namun, secara substansial keduanya mengusung cita-cita sama, yakni sosialisme yang antikapitalisme. Kuba tidak mau didikte dan dijajah oleh negara-negara Barat di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu Kuba menolak campur tangan IMF.

Bahkan Fidel Castro menyerukan agar IMF sebagai lembaga pendanaan kapitalis yang sifatnya menindas negara-negara sedang berkembang dibubarkan saja. Sikap kemandirian itu berbeda dengan Indonesia yang selama Orde Baru justru pembangunan

ekonominya dalam bayang-bayang IMF, sehingga terpuruk dalam krisis moneter yang berkepanjangan dan menimbulkan beban utang yang terus membengkak hingga hari ini.

Kuba membangun negara dan rakyatnya dengan mengandalkan kekuatan ekonominya sendiri, bukan mengandalkan utang luar negeri. Inilah prinsip berdikari di bidang ekonomi yang diajarkan Bung Karno, yang justru dipraktikkan secara konsisten oleh Castro. Dengan berdikari di bidang ekonomi, Kuba dapat mempertahankan kedaulatan politiknya dan juga kebudayaan nasionalnya.

Dengan program pembangunan yang berbasis ajaran Bung Karno itu, Kuba kini merupakan negara kecil yang berpotensi besar. Di bidang kesehatan, Kuba mendapat pengakuan dari WHO sebagai salah satu negara dengan tingkat pemeliharaan kesehatan terbaik di dunia. Tingkat kematian bayi hanya 6,2 per 1.000 kelahiran dan usia harapan hidup mencapai rata-rata 76 tahun.

Rakyat Kuba mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan secara cuma-cuma dan telah mendapat pengakuan UNESCO. Pada tahun 2000, Kuba merupakan negara dengan fasilitas pendidikan terbaik di kawasan Amerika Latin. Setiap diselenggarakan Olimpiade Matematika Dunia, Kuba selalu memborong medali emas. Keunggulan Kuba terlihat pada 1961. Mereka sudah menampung 40.000 pelajar dari 120 negara untuk mengikuti pendidikan di negeri kecil ini, khususnya di bidang kedokteran.

Kemudian sampai akhir 2001, Kuba telah memiliki 67.000 orang dokter dan di antara mereka bekerja sebagai tenaga ahli di 58 negara kawasan Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di samping

sebagai pencetak dokter, Kuba juga penghasil obat-obatan yang sudah diakui PBB. Kuba merupakan produsen vaksin Hepatitis B terbesar di dunia. Jumlah ilmuwan Kuba menduduki persentase tertinggi kelima di dunia sesudah Jepang, Israel, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Negeri kecil ini memiliki keunggulan SDM yang berkualitas tinggi. Lebih dari 95% penduduk Kuba sudah bisa mengenyam pendidikan dasar hingga menengah. Alokasi anggaran belanja pendidikan di Kuba menduduki peringkat kedua terbesar sesudah belanja untuk tunjangan sosial.

INTEGRITAS SEBAGAI ASPEK KEMANDIRIAN BANGSA

Dalam kehidupan bernegara, integritas dapat diartikan sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa. Melemahnya kedudukan Pancasila dan sanksi hukum yang merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara, menyebabkan salah satu musuh besar bangsa ini, yakni korupsi, sulit untuk diberantas.

Setiap orang Indonesia harus menjaga sikap integritas. Integritas dapat mengubah bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Pendekatan sistem pemerintahan tanpa peningkatan integritas tiap individu bangsa Indonesia hanya pepesan kosong. Integritas yang merupakan suatu hal kecil yang sering diabaikan oleh orang banyak, namun di dalamnya terdapat satu kekuatan besar yang dapat merubah bangsa ini.

Integritas bukan harus dalam pemerintahan saja, melainkan dimulai dari hal kecil seperti dalam lingkungan pendidikan. Apakah kita masih bisa menjaga integritas kita dalam setiap kegiatan belajar-mengajar atau tidak. Integritas sudah bisa

dilakukan ketika kita berada di bangku sekolah. Saat kita ujian, kegiatan menyontek bisa menjadi ukuran apakah kita mempunyai pribadi yang berintegritas atau tidak. Bila kita sudah terbiasa dari hal kecil untuk berintegritas, kita akan terbiasa juga ketika kita menghadapi hal yang besar.

Negara kita adalah negara hukum, karena itu semua orang memahaminya. Sayangnya hal itu baru sebatas jargon, karena dalam prakteknyabukan penegakan keadilan yang dilakukan, namun hukum dipakai untuk menegakkan kekuasaan. Itulah sebabnya masyarakat kerap harus menelan pil pahit dan merasakan kekecewaan luar biasa saat mengharap para hamba hukum menegakkan keadilan seadil-adilnya.

Hukum yang tidak berfungsi bersumber pada para penegak hukum yang mengalami krisis integritas. Integritas yang hilang pada diri penegak hukum tersebut, menyebabkan adanya peluang bagi para pelanggar hukum lolos dari hukuman. Praktek jual beli vonis, penyisipan klausul dalam suatu RUU demi kepentingan kelompok tertentu, suap polisi lalu lintas, uang terima kasih untuk aparat birokrasi, dan lain-lain adalah fakta yang tak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Budaya yang sangat buruk ini bersumber pada integritas para penegak hukum yang memprihatinkan.

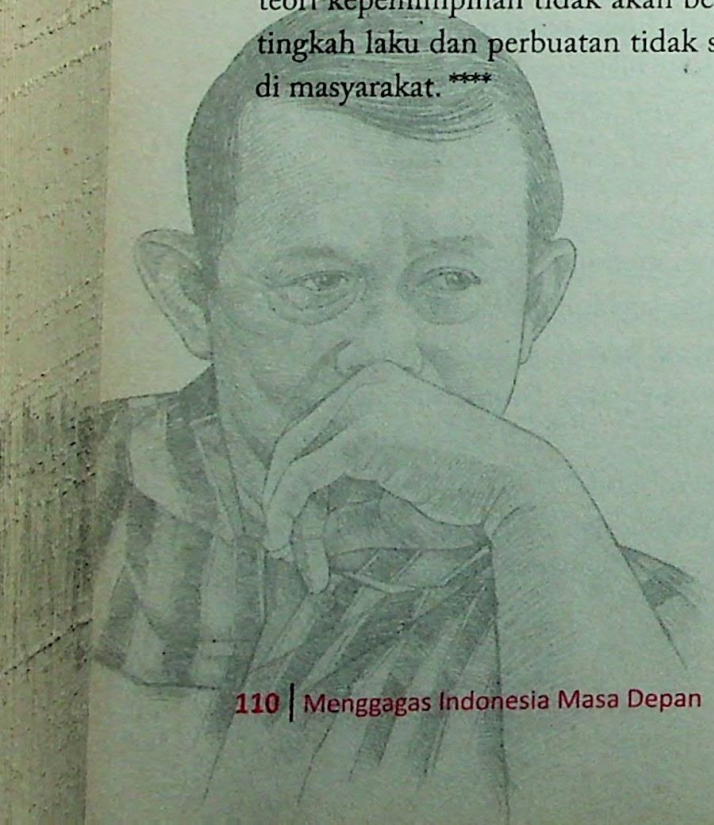
Pembangunan kepribadian bangsa yang berintegritas menjadi sangat urgen, yang akan membantu dan mengiringi kita kepada penataan hukum yang murni. Hal ini akan dapat memutus rantai menuju pemerintahan yang selama ini hanya dicapai oleh sebagian besar orang tidak berintegritas. Bukan merupakan hal yang mustahil nantinya pemerintahan dapat diisi oleh generasi dengan integritas tinggi. Ini membutuhkan tekad baja dari setiap pemimpin dan rakyat, supaya Indonesia bisa keluar dari himpitan persoalan-persoalan bangsa, yang nyaris tak bisa lagi dicari

solusinya.

Indonesia tidak membutuhkan orang yang hanya tahu hukum dan minus dalam pelaksanaan, melainkan Indonesia butuh keduanya. Jiwa muda yang segar dan siap dipupuk dengan sikap integritas, dan membungkus hidupnya dengan nilai–nilai agama, diharapkan dapat membersihkan negara ini dari tindak korupsi dan memurnikan kedudukan hukum, serta menjunjung tinggi demokrasi yang telah kita bina sejak dahulu.

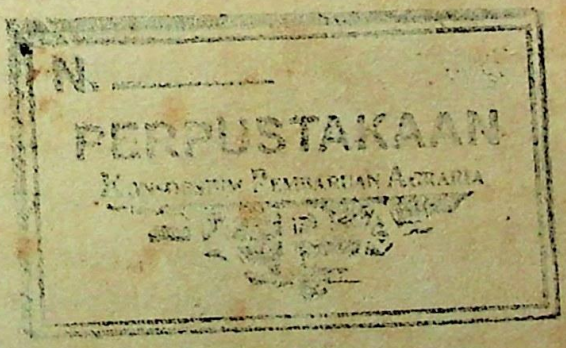
Tidak mudah dan sangat mustahil bangsa ini akan maju dan berkembang tanpa adanya peran andil, dan keikutsertaan masyarakat dalam membangun bangsa. Semua cita-cita dan tujuan mustahil dapat terlaksana apabila antarmasyarakat itu sendiri tidak bersatu atau bahkan terpecah-belah.

Disinilah integritas pemuda harus dilatih, dikembangkan, dan dipraktekkan. Tanpa teori mengenai integritas, maka praktik pun tidak akan berjalan dan sebaliknya, praktik tanpa teori kepemimpinan tidak akan berarti dan sia-sia, karena segala tingkah laku dan perbuatan tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. ****



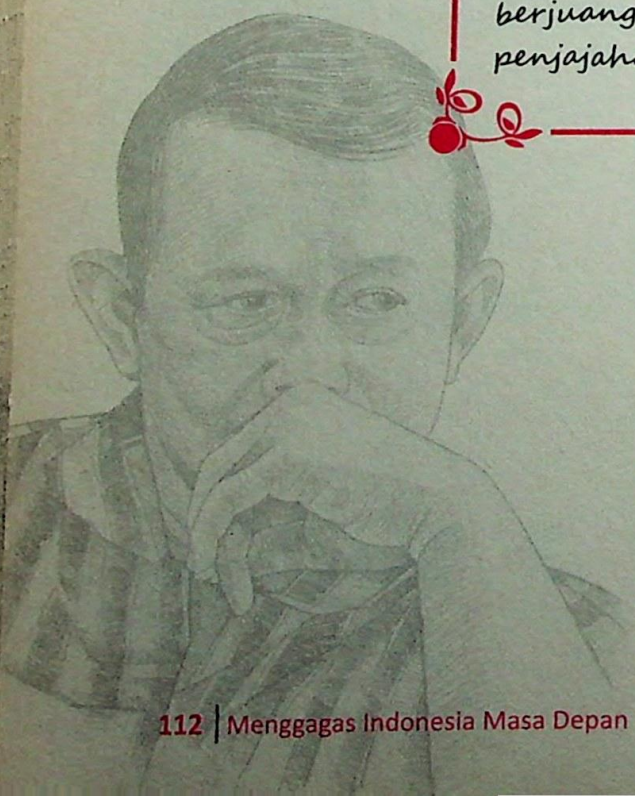
Nasionalisme sebagai Identitas Bangsa

Bab 5



Djoko Santoso
for the People

Kesadaran anti penjajahan di Indonesia diawali dengan munculnya golongan cendekiawan baik hasil dari pendidikan Barat maupun pendidikan Indonesia. Mereka menjadi pelopor pembentukan organisasi pergerakan nasional Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan penjajahan.



"Masalah nasionalisme Indonesia telah selesai karena sudah tercantum dalam UUD 1945. Yang perlu diresapi adalah pemahaman baru nasionalisme agar disesuaikan dengan sejarah yang makin berubah." (**Taufik Abdullah**, Sejarawan)

PENGANTAR

Nasionalisme Indonesia merupakan suatu gerakan yang muncul sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan ini bertujuan mewujudkan manusia Indonesia menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Gerakan ini juga terjadi di seluruh negara-negara terjajah di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika seperti India, Mesir, dan Persia serta Indonesia, sudah pernah mengalami masa kejayaan sebelum masuk dan berkembangnya imperialisme dan kolonialisme Barat.

Kejayaan masa lampau mendorong semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bagi Indonesia sendiri, kejayaan pada masa Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menjadi faktor pendorong kuat untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Kerajaan Majapahit yang menjadi pemegang pengaruh daerah seluruh nusantara, serta Sriwijaya yang punya kekusaan luas di laut karena armada maritimnya yang digdaya, menjadi alasan bangsa Indonesia meraih kembali kejayaan masa lampau.

Perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan, menjadikan bangsa terjajah di Asia dan Afrika bersatu untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa.

Kesadaran anti penjajahan di Indonesia diawali dengan munculnya golongan cendekiawan, baik hasil dari pendidikan Barat maupun pendidikan Indonesia. Mereka menjadi pelopor

pembentukan organisasi pergerakan nasional Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan penjajahan. Saat itulah muncul paham nasionalis yang berkembang dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Dalam bidang politik, tampak dengan upaya gerakan nasionalis menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan penyelewengan hak asasi manusia.

Dalam bidang ekonomi, tampak dengan adanya usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Dalam bidang budaya, tampak dengan upaya untuk melindungi, memperbaiki dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah, karena masuknya budaya asing di Indonesia. Para nasionalis berusaha untuk memperhatikan dan menjaga, serta menumbuhkan kebudayaan asli bangsa Indonesia.

Munculnya paham-paham baru di luar negeri seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-Islamisme juga menjadi dasar berkembangnya paham-paham yang serupa di Indonesia. Perkembangan paham-paham itu terlihat pada penggunaan ideologi-ideologi (paham) pada organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia.

Karena adanya faktor pendukung di atas, menjadikan bangsa Indonesia mulai memunculkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini digunakan sebagai ideologi bagi organisasi pergerakan nasional yang ada. Ideologi nasional di Indonesia diperkenalkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. PNI berdiri dengan misi membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan menjadi bangsa yang

merdeka dan berdaulat.

Sejak itu nasionalisme menjadi paham yang berfungsi sebagai perekat beragam perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nasionalisme saat itu memunculkan rasa kesetiakawanan bangsa Indonesia, sehingga mereka bahu membahu berusaha mengusir penjajah dari bumi nusantara.

Sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, diawali dengan pembentukan identitas nasional, yaitu dengan adanya penggunaan nama "Indonesia" untuk negara kita. "Indonesia" selanjutnya menjadi identitas nasional, lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan. Kata ini terbukti mampu mempersatukan suku-suku bangsa yang ada untuk bersatu melakukan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan. Walhasil, segala bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia bukan atas nama daerah lagi.

MEMAHAMI NASIONALISME

Nasionalisme berasal dari kata *"nation"* yang berarti bangsa. Adapun bangsa memiliki dua pengertian.

Pertama, bangsa dimaknai sebagai suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan-hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan-hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Sedangkan dalam pengertian *kedua*, bangsa dimaknai sebagai suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya, sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.

Adapun definisi nasionalisme adalah sebagai berikut: menurut Huszer dan Stevenson, nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya.

Sementara menurut L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia perseorangan sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan, atau dengan kata lain nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa. Sedangkan Hans Kohn menyatakan, bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik, dan bahwa bangsa adalah sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi. Soekarno sendiri mendefinisikan nasionalisme sebagai kombinasi dari rasa ingin bersatu, persatuan perangai, dan nasib, serta persatuan antara orang dan tempat.

Di lain pihak, nasionalisme didefinisikan sebagai sebuah ideologi yang menyatakan suatu afinitas kelompok yang didasarkan atas bahasa, budaya, keturunan bersama; dan terkadang pada agama dan wilayah yang bersama pula; terhadap semua pengakuan lain atas loyalitas seseorang.

Adapun menurut Frank Dhont, nasionalisme adalah sebuah paham dan proses di dalam sejarah ketika sekelompok orang merasa menjadi anggota dari suatu bangsa *(nation)* dan mereka secara bersama-sama ingin mendirikan sebuah negara *(state)*, yang mencakup semua anggota kelompok tersebut. Definisi lain menyatakan *"Nationalism recognized the crucial importance of education in the making of modern person – i.e. an individual skilled to function in industrial society."*

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa nasionalisme atau sering disebut sebagai wawasan kebangsaaan, adalah rasa cinta yang dimiliki oleh sekelompok besar orang yang berada pada suatu wilayah tertentu, terhadap tanah airnya dan mereka memiliki cita-cita dan tujuan yang ingin diraih bersama sebagai suatu bangsa. Rasa kecintaan ini merupakan sebuah kesadaran yang ditandai

dengan kesetiaan dan upaya memuliakan, dan mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Nasionalisme bernilai spiritual, artinya sesuatu yang sangat berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Nasionalisme akan mampu mendorong seseorang untuk mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk bangsa. Hal ini sebagaimana yang telah dibuktikan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat nasionalisme mereka rela mengorbankan segala yang dimilikinya tanpa pamrih, untuk membebaskan tanah airnya dari belenggu penjajahan. Fenomena bom bunuh diri yang banyak terjadi di Palestina juga dinilai lebih didasari oleh semangat nasionalisme atas tanah kelahirannya yang diklaim dan dikuasai bangsa Israel.

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara -dalam bahasa Inggris "*nation*"- dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia (Wikipedia, 2008). Dalam zaman modern ini, nasionalisme lebih merujuk kepada amalan politik maupun kesatriaan dan ketentaraan, yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan. Secara teori, nasionalisme dapat dilihat sebagai sebagian paham negara atau gerakan yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan, dan ideologi dengan terminologinya masing-masing. Pengkategorian tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan beberapa atau semua elemen tersebut.

Selain itu nasionalisme juga disebutkan sebagai prinsip, rasa, dan usaha yang patriotik serta dengan segala daya siap pula untuk mempertahankannya. Sedangkan semangat nasionalisme diartikan sebagai suasana batin yang melekat dalam diri setiap

individu sebagai pribadi, maupun sebagai bagian dari bangsa dan negara, yang diimplementasikan dalam bentuk kesadaran dan perilaku yang cinta tanah air, kerja keras untuk membangun, membina dan memelihara kehidupan yang harmonis, dalam rangka memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban harta, benda bahkan raga dan jiwa dalam membela bangsa dan negara.

Dengan demikian, untuk memahami pergerakan nasional perlu menekankan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan kesatuan di antara pluralisme atau keanekaragaman, toleransi dan saling menghargai. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan. Tuhan telah menciptakan ini semua sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa diciptakan-Nya manusia bersuku-suku dan golongan-golongan agar kita saling mengenal dan menjalin tali silaturrahmi. Kalau sudah demikian maka dengan didorongkan oleh keinginan luhur yakni cita-cita ingin merdeka, maka terwujudlah persatuan dan kebersamaan.

Usaha untuk mewujudkan persatuan ini berhasil dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda yang menyatakan Satu Tanah Air, Satu Bangsa: Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yakni Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi simbol kebersamaan dalam keanekaragaman dan sekaligus memberikan semangat untuk menggalang persatuan, demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Sumpah Pemuda adalah wujud nyata dari silaturahmi nasional, "dan barang siapa yang mau menghidup-hidupkan silaturahmi, maka akan dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya." Inilah konsep nasionalisme yang dibimbing oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan yang oleh Toynbee dikatakan sebagai nasionalisme yang dibimbing oleh nilai-nilai

universal agama-agama atas (*higher religions*) (A. Syafii Maarif, 1989).

Nasionalisme yang tidak dibimbing oleh nilai-nilai moral keagamaan, dapat terjebak pada dua kecenderungan.

Pertama, nasionalisme yang sekuler, ekstrim berlebihan yang dapat melahirkan *chauvinisme*. Bentuk nasionalisme inilah yang dikritik oleh Toynbee, karena telah menyebabkan berkobarnya PD II yang menghancurkan peradaban manusia.

Kedua, nasionalisme yang lemah, sehingga menjadikan pendukungnya tidak memiliki kebanggaan nasional dan jati diri bangsa.

Menurut Benedict Anderson, *"nation"* atau bangsa adalah hasil dari imajinasi orang-orang yang membayangkan mereka berada dalam satu negara dan merasakan persamaan nasib, serta mitos tentang masa lampau bersama yang jaya. Rasa kebangsaan atau nasionalisme berkembang dengan adanya langkah penyebaran kesadaran nasionalisme atau kebangsaan itu.

Bagi Nurcholis Madjid, nasionalisme sejati dalam artian suatu paham yang memperhatikan kepentingan seluruh warga bangsa tanpa kecuali, adalah bagian integral konsep Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Berkenaan dengan konsep Madinah itu, Robert N. Bellah menyebutkan bahwa contoh pertama nasionalisme modern ialah sistem masyarakat Madinah masa Nabi Muhammad dan para khalifah yang menggantikannya.

Dalam bukunya, Bellah mengatakan bahwa sistem yang dibangun Nabi Muhammad itu, yang kemudian diteruskan oleh para khalifah, adalah suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat dibayangkan.

Komunitas itu disebut "modern" karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat dan karena adanya kesediaan pemimpin untuk diadakan penilaian berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan pertimbangan *kenisbatan* atau *ascriptive* seperti perkawanan, kedaerahan, kesukuan, keturunan, kekerabatan, dan sebagainya.

Menurut Bellah, pencopotan nilai kesucian atau kesakralan dalam memandang kepada suku atau kabilah, sehingga dengan pencopotan itu tidak dibenarkan untuk menjadikan suku atau kabilah sebagai tujuan pengkudusan atau pengabdian adalah tindakan devaluasi radikal atau secara sah, dapat disebut sebagai sekularisasi. Itu semua adalah konsekuensi dari adanya kewajiban memusatkan pengkudusan dan pengabdian mutlak hanya kepada Tuhan Yang Maha Tinggi (Allah Ta'ala).

Menurut Robert Bellah, devaluasi radikal, sekularisasi atau desakralisasi berdasarkan paham Ketuhanan Yang Maha Esa atau Tauhid itu, merupakan unsur ketiga mengapa prinsip organisasi sosial Madinah dianggap modern. Dengan paham dan semangat Tauhid, manusia memperoleh kemerdekaannya yang hakiki, karena terbebaskan dari segala bentuk penghambaan oleh sesama makhluk, khususnya sesama manusia sendiri.

Atas dasar paham dan semangat Tauhid itu pula, manusia harus menentang setiap kekuasaan tiranik, kekuasaan yang merampas kebebasan, seperti Nabi Musa A.S. menentang Fir'aun, seorang tiran dari Mesir Kuno. Lebih jauh, Bellah juga menyebutkan pandangan bahwa sistem Madinah adalah suatu bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif dan merupakan perwujudan yang sangat nyata dari nilai-nilai demokrasi. Hal ini berbeda sekali dengan sistem negara republik negara kota (city state) Yunani Kuno yang membuka partisipasi hanya kepada kaum

lelaki merdeka, yang merupakan hanya lima persen penduduk, tidak memiliki hak apa-apa dari ataupun terhadap negara. Konsep Madinah, menurut Bellah sebagaimana dikutip di atas, sesungguhnya adalah suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat dibayangkan.

MEMBANGKITKAN NASIONALISME

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme, yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat. Kehendak bangsa untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan sarat utama dalam mewujudkan nasionalisme. Dengan demikian, tidak pada tempatnya untuk mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan.

Kehendak untuk bersatu sebagai suatu bangsa memiliki konsekuensi siap mengorbankan kepentingan pribadi, demi menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya pengorbanan, mustahil persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Malah sebaliknya akan dapat menimbulkan perpecahan. Inilah yang telah dibuktikan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Di samping itu, perlu dikembangkan semangat kebanggaan dan kebangsaan dalam tiap individu rakyat Indonesia. Kebanggaan yang harus dikembangkan adalah kebanggaan yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa, sehingga kehendak untuk bersatu masih tetap berakar di dalam hati sanubari.

Di sisi lain, semangat kebangsaan dalam suatu bangsa yang

terbangun sejak jaman kemerdekaan lalu masih tetap relevan dengan dunia masa kini. Bagi Indonesia, rumusan paham kebangsaan telah tercantum dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membangun sebuah negara kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, membina persahabatan dalam pergaulan antarbangsa, menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan keadilan, serta menolak penjajahan dan segala bentuk eksploitasi, yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Upaya mengembangkan paham kebangsaan itu, dengan sendirinya akan menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan zaman. Namun, esensinya sama sekali tidak berubah. Nasionalisme harus memperkuat posisi ke dalam, dengan memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Esensinya adalah berjuang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, menegakkan hukum, dan membangun ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Esensi ini tidak akan berubah untuk selama-lamanya.

Nasionalisme yang harus dibangkitkan kembali adalah nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi semua permasalahan bangsa, bagaimana bisa bersikap jujur, adil, disiplin, berani melawan kesewenang-wenangan, tidak korup, toleran, dan lain-lain. Bila tidak bisa, artinya kita tidak bisa lagi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran total.

Negara melalui pemerintahan yang ada harus pula mampu tetap menjaga dan menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat, yang amat diperlukan dalam upaya mewujudkan cita-cita memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Dengan nasionalisme dimungkinkan adanya ikatan erat di antara rakyat dalam sebuah

nilai universal, bebas dari kepentingan atau nilai kelompok atau etnis dan agama.

NASIONALISME BARU

Nasionalisme mengalami proses sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk juga pengaruh internasional. Setiap generasi mempunyai pandangan sendiri mengenai nasionalisme dan mengenai Indonesia. Secara populer dapat kita katakan bahwa nasionalisme dalam pandangan kakek (angkatan 45) berbeda dengan nasionalisme menurut cucunya (angkatan 98). Nasionalisme banal (kibarkan bendera, lagu kebangsaan, hapal Pancasila) sudah tidak begitu populer di mata mereka. Nasionalisme bagi anak muda yang peduli terhadap masa depan bangsa dan Negara, berarti memperhatikan hak dasar rakyat, bekerja keras, antikorupsi, dan menjaga lingkungan.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam sistem global internasional, tentu terjadi perdebatan menarik tentang nasionalisme. Satu pihak masih menggunakan definisi nasionalisme yang hanya menekankan pada aspek antiasing. Tetapi bagi pihak lain definisi ini sudah dianggap sempit dan tidak sesuai tuntutan zaman. Pihak pertama yang mendukung nasionalisme ekonomi menuduh kalangan yang meliberalkan ekonomi Indonesia dan menjual BUMN strategis kepada pihak LN, sebagai tidak punya nasionalisme dan akan membuat Indonesia didominasi asing. Bagian demi bagian dari negeri ini akan menjadi milik asing.

Sementara itu kalangan lain, terutama para ahli ekonomi yang mengelola kebijakan ekonomi di pemerintahan pasca reformasi, memandang liberalisasi ekonomi Indonesia adalah bagian tidak terelakkan dari globalisasi ekonomi yang tidak ada hubungannya dengan nasionalisme, dalam pengertian pihak pertama. Dalam

hal ini Indonesia harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar internasional dan harus siap bersaing menghadapinya.

China, Korea Selatan, Taiwan, dan India mampu melakukan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi, bukan dengan menutup diri atau memutuskan kontak dengan dunia luar, tetapi dengan strategi industrialisasi berorientasi keluar dengan penguatan ekonomi domestik, yang disertai dengan pemanfaatan peluang-peluang yang ada di pasar global. Sebaliknya, negara-negara komunis di Eropa Timur yang menutup diri dari ekonomi global dan secara ekstrim mengabaikan mekanisme pasar, justru ambruk pada akhir 1980-an.

Seorang ahli ekonomi Dudley Seers (1981) mengatakan bahwa ketergantungan ekonomi tidak dengan sendirinya menutup ruang bagi negara untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang harus dipastikan ialah terjaganya otonomi untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. guna meletakkan fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan tahan uji. Ketergantungan pada utang dan modal asing harus diimbangi dengan kemampuan memperkokoh, memperdalam, dan mengintegrasikan struktur ekonomi dan industri bangsa kita. Indonesia harus dapat mengubah tantangan dalam sistem ekonomi kapitalisme global menjadi peluang yang dimanfaatkan secara realistis dan kreatif, sehingga kita tidak terus-menerus menjadi negara yang tidak berdaya di dalam kancah persaingan antarbangsa. Harus diupayakan suatu strategi pembangunan yang secara sistematis dapat menggeser keunggulan komparatif Indonesia, dari tenaga kerja murah dan SDA menuju kepada sebuah ekonomi yang didominasi oleh SDM yang trampil dan profesional, produksi manufaktur yang berdaya saing tinggi.

Tidak mungkin bagi Indonesia mengikuti solusi menutup

diri, tetapi sebaliknya juga tidak mudah bagi Indonesia untuk meniru apa yang dilakukan Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, China, dan lain-lain. Negara-negara itu melakukan liberalisasi ekonomi saat struktur ekonomi dan industri mereka sudah cukup kuat. Selain itu mereka juga sudah mempunyai kelas menengah (industriawan dan profesional) yang mampu menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Saat ekonomi mengalami krisis, kelas menengah itu menjadi pihak yang menopang daya tahan ekonomi negara-negara itu. Di Indonesia, saat mengalami krisis, pihak yang menjadi penyelamat adalah sektor informal, yang selama puluhan tahun sebelum krisis praktis terabaikan.

ANTIKORUPSI, SIMBOL NASIONALISME BARU

Di republik ini, semangat nasionalisme sangat terasa saat bulan Agustus menjelang. Semangat itu tidak cukup bila hanya diperingati lewat puncaknya, yakni upacara bendera, tetapi mendesak untuk direnungkan lebih mendalam agar tidak kehilangan makna. Apalagi jika hanya kita peringati dengan karnaval, pawai seni, atau lomba-lomba ketangkasan, dikhawatirkan yang akan dipahami generasi mendatang mengenai nasionalisme proklamasi kemerdekaan hanya terbatas pada lomba dan karnaval saja.

Nasionalisme selalu saja diidentikkan dengan pengertian cinta tanah air dan semangat melawan penjajahan asing. Singkatnya, nasionalisme adalah sikap menolak nasonalisme asing. Pemahaman itu tidak salah karena memang bangsa ini dulu merdeka berkat kegigihannya melawan penjajah Belanda. Namun dengan bergulirnya zaman, terjadinya regenerasi anak bangsa, serta berubahnya sifat dan bentuk penjajahan, kiranya nasionalisme itu perlu dikontekstualisasi terus-menerus.

Sebelum tahun 1945, musuh utama bangsa Indonesia adalah penjajah Belanda. Kerajaan Belandalah yang membuat bangsa ini miskin, tertindas, terbelakang, dan sengsara. Karena itu, sudah selayaknya bangsa ini bahu-membahu tanpa kenal menyerah dan lelah, untuk bangkit melawan penjajah Belanda. Merdeka atau mati adalah semboyan yang pas dipekikkan waktu itu.

Kini musuh kita bukan lagi bangsa asing semata yang menciptakan kita miskin, terbelakang, tertindas, kemakmuran tidak merata, pengangguran terus meningkat jumlahnya, dan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Musuh besar yang harus diperangi sekarang ini diantaranya korupsi.

Semua pihak tentu sudah sadar, betapa besar ancaman korupsi terhadap masa depan bangsa, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Namun, belum ada kesadaran yang sama untuk mencegah dan memberantasnya. Kerja keras dan bahu-membahu untuk memberantas korupsi belum lahir sebagai semangat bersama.

Di tengah persoalan korupsi yang begitu besar bahayanya serta minimnya kesadaran untuk meninggalkan perilaku korupsi, maka tidak salah kalau kemerdekaan yang kental dengan jiwa nasionalisme, kita bangun dengan paradigma baru. Paradigma baru itu adalah bagaimana semua elemen bangsa tanpa terkecuali, memiliki kesadaran bahwa korupsi adalah musuh kita bersama dan harus diperangi bersama. Mewujudkan cita-cita Indonesia tanpa korupsi harus menjadi semangat nasionalisme baru kita.

Perilaku korupsi yang kini sudah melampaui batas dan tanpa ada rasa malu, merupakan ancaman bangsa Indonesia saat ini. Korupsi yang merajalela adalah wujud pengkhianatan terhadap cita-cita didirikannya negara. Perilaku korup juga mengkhianati

Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan 17 Agustus 1945.

Korupsi yang sudah melewati batas ambang sadar seperti saat ini sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada penjajahan bangsa asing. Sebab, para koruptor adalah bangsa sendiri, yang memiliki kedudukan terhormat dan pengaruhnya besar. Mereka bisa leluasa menggunakan uang, kekayaan, dan aset negara semaunya tanpa kontrol. Ini berbeda dengan penjajah asing yang terlihat secara fisik dan mudah diperangi.

Melihat besar, berurat berakar, dan membeludaknya perilaku korupsi di tanah air ini, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro Semarang Prof. Satjipto Rahardjo mengistilahkannya dengan darurat korupsi. Bangsa ini sudah dalam kondisi sangat bahaya dan tidak mungkin bisa diselamatkan lagi tanpa adanya paradigma baru dalam memberantas korupsi. Dalam konteks inilah perlu ditawarkan agar semangat memberantas korupsi saat ini disejajarkan dengan semangat melawan penjajahan Belanda sebelum tahun 1945. Atau bahkan, kalau perlu, lebih dari semangat nasionalisme tahun 1945.

Mengapa demikian? Karena yang kita hadapi adalah bangsa kita sendiri. Kita tidak akan mungkin membebaskan bangsa ini dari perilaku korupsi kalau tidak memiliki ketegasan sikap dan semangat di atas semangat memerangi penjajah asing. Kalau masih ada budaya *ewuh pakewuh*, sikap ambivalen, mafia peradilan tak terbendung, koruptor dihukum ringan, dan sebagainya, jelas korupsi akan terus melenggang menggerogoti sendi-sendi kehidupan kita. Koruptor akan terus menghisap darah rakyat tanpa ada penyikapan yang tegas.

Di sinilah perlunya menumbuhkan semangat nasionalisme

baru berupa terwujudnya Indonesia tanpa korupsi. Semangat melawan korupsi harus dimaknai sebagai bentuk nasionalisme baru. Stop korupsi harus bisa menjadi semangat bersama semua elemen bangsa untuk bisa menyelamatkan bangsa ini dari cengkeraman penjajahan para koruptor. Tanpa semangat dan nasionalisme baru berupa sikap antikorupsi, omong kosong korupsi akan bisa dikurangi.

SIKAP INKLUSIF SEBAGAI NASIONALISME BARU

Nasionalisme masih menghadapi persoalan pelik akibat kurangnya pengintegrasian dari ketiga unsur pembentuk kadar nasionalisme itu sendiri yaitu rasa aman, kesejahteraan, dan kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Maka hal yang terpenting bagi bangsa Indonesia ke depan adalah bagaimana membangun Nasionalisme Baru yang tepat dan hanya diabdikan untuk kepentingan segenap bangsa dan negara.

Nasionalisme kita kedepan bukanlah nasionalisme yang eksklusif maupun sempit, tapi nasionalisme yang inklusif yang memegang teguh fatsun serta persamaan hak, transparansi, keadilan, dan harga diri sebagai prinsip dasar pergaulan internasional. Nasionalisme kita juga bukan nasionalisme yang borjuistik tapi nasionalisme untuk segenap warga bangsa. Baik dalam hubungan individu, kelompok, maupun dalam kaitan bangsa secara keseluruhan.

Untuk mendukung proses menuju nasionalisme baru tersebut bangsa ini perlu merumuskan kembali sejarahnya secara jujur dan lengkap, dari semua aspek yang nyata telah melingkupi perjalanan bangsa kita di masa lalu. Sedang hal yang perlu diwaspadai dalam proses membangun nasionalisme baru ke depan ini adalah banyaknya pihak-pihak yang menggunakan slogan nasionalisme,

yang sebenarnya hanyalah demi kepentingan pribadi dan juga golongannya sendiri saja.

Inklusif dalam menjiwai nasionalisme sesungguhnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Orisinalitas bangsa Indonesia adalah jiwa keragaman yang terbuka terhadap pengaruh luar. Sebagai bangsa yang secara geografis hidup di jajaran kepulauan, tempat lalu lalang armada perdagangan internasional, bangsa kita sebenarnya sangat terbuka terhadap pengaruh dari luar. Ragam agama dan budaya yang sampai hari ini masih hidup dalam masyarakat Indonesia, rata-rata juga berasal dari luar negeri. Maka, sangat menggelikan jika terjadi eksklusivisme dalam pergaulan budaya internasional karena kita bisa seperti ini juga sebab dari luar. Bahkan, nama "Indonesia" sendiri juga bukan julukan yang dibuat oleh orang Indonesia tapi oleh James Richardson Logan dan George Samuel Windson Earl, yang ditulis dalam tulisannya *Journal Of The Indian Archipelago and Eastern Asia.*

MEMPERKUAT IDENTITAS BANGSA DENGAN PENGUASAAN SEJARAH

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembelajaran sejarah sebenarnya memiliki makna yang strategis. Pembelajaran sejarah adalah suatu proses untuk membantu mengembangkan potensi dan kepribadian peserta didik melalui pesan-pesan sejarah, agar menjadi warga bangsa yang arif dan bermartabat. Sejarah dalam hal ini merupakan totalitas dari aktivitas manusia di masa lampau (Walsh, 1967) dan sifatnya dinamis. Maksudnya, bahwa masa lampau itu bukan sesuatu yang final, tetapi bersifat terbuka dan terus berkesinambungan dengan masa kini dan yang akan datang. Karena itu sejarah dapat diartikan sebagai ilmu yang meneliti dan mengkaji secara sistematis dari

keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lampau dengan segala aspek kejadiannya, untuk kemudian dapat memberikan penilaian sebagai pedoman penentuan keadaan sekarang, serta cermin untuk masa yang akan datang.

Lebih jauh pengertian sejarah juga berkait dengan persoalan kemanusiaan dan sebuah teater dimana manusia menjadi pemain watak, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sudah ada. Sejarah akan mendidik manusia untuk memahami *"sangkan paran"* dan keberadaan dirinya (Soedjatmoko, 1986) sehingga dapat memperkuat identitas diri dan identitas nasional, atau identitas sebagai suatu bangsa.

Dalam kaitan ini maka pembelajaran sejarah berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah adalah suatu orientasi intelektual, dan suatu sikap jiwa untuk memahami keberadaan dirinya sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai suatu bangsa (Soedjatmoko, 1986). Taufik Abdullah (1974) menegaskan bahwa kesadaran sejarah tidak lain adalah kesadaran diri. Kesadaran diri dapat dimaknai sadar akan keberadaan dirinya sebagai individu, sebagai makhluk sosial termasuk sadar sebagai bangsa dan sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Sardiman A.M., 2005). Dalam konteks ini pada diri manusia sebenarnya ada dua dimensi, yakni dimensi kekhalifahan dan dimensi kehambaan.

Dengan pemahaman tersebut, pembelajaran sejarah dituntut paling tidak dapat mengaktualisasikan dua hal yakni: *pertama*, pendidikan dan pembelajaran intelektual, *kedua*, pendidikan dan pembelajaran moral bangsa, *civil society* yang demokratis dan bertanggungjawab kepada masa depan bangsa (Djoko Suryo, 1991).

Hal yang pertama menuntut pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan pengetahuan faktual, namun dituntut untuk memberikan latihan berpikir kritis, mampu menarik kesimpulan, memahami makna dari suatu peristiwa sejarah menurut kaidah dan norma keilmuan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana, penting untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran sejarah.

Sementara itu hal yang kedua, menunjuk pada pembelajaran sejarah yang berorientasi pada pendidikan kemanusiaan yang memperhatikan nilai-nilai luhur, norma-norma, dan aspek kemanusiaan lainnya.

Dengan mengembangkan dua hal: pendidikan intelektual dan pendidikan moral atau pendidikan kemanusiaan, maka arah pembelajaran sejarah diharapkan dapat mencapai tujuan yang menopang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pembelajaran sejarah akan dapat melandasi pendidikan kecerdasan intelektual, sekaligus ikut mendasari pendidikan yang berorientasi pada kecerdasan emosional, bahkan kecerdasan spiritual dalam rangka meningkatkan martabat manusia Indonesia.

Dalam pelaksanaan di sekolah, tujuan pembelajaran sejarah tersebut terkait dengan adanya tujuan yang dikenal dengan istilah *instructional effects* dan tujuan yang "mengikuti" atau tujuan lebih lanjut yang disebut *nurturant effects*. Mencermati rumusan tersebut, nampak jelas bahwa di samping aspek kognitif, dimensi afektif menempati porsi yang cukup penting dalam tujuan pembelajaran sejarah. Namun, dalam kenyataannya timbul kritik bahwa pendidikan kita cenderung intelektualistik dan lebih banyak bersifat kognitif.

Akibat aspek-aspek kognitif yang terlalu dominan dalam

pembelajaran sejarah, ketidakmampuan sejarah menjangkau aspek-aspek moralitas, menyangkut kecerdasan emosional, dan spiritual. Pembelajaran sejarah kita masih jarang yang mampu memasuki wilayah ranah afektif, seperti sikap arif, menumbuhkan semangat kebangsaan, bangga terhadap bangsa dan negerinya, apalagi sampai memahami hakikat dirinya sebagai manifestasi kesadaran sejarah yang paling tinggi, sehingga memunculkan sikap dan tindakan sebagaimana dicontohkan oleh para pejuang dan pahlawan kita.

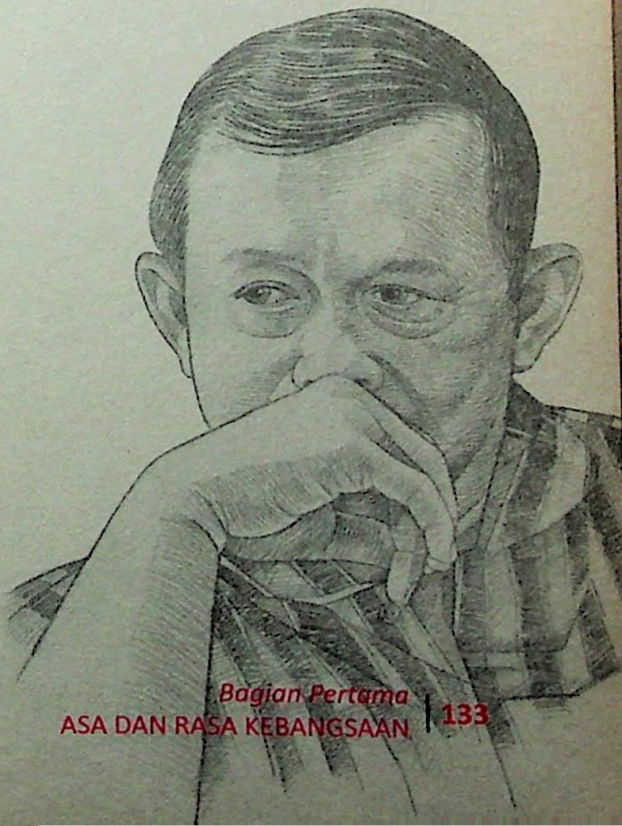
Sejarah seharusnya mampu mengembangkan aktivitas peserta didik untuk melakukan telaah berbagai peristiwa, untuk kemudian dipahami dan diinternalisasikan kepada dirinya, sehingga melahirkan contoh untuk bersikap dan bertindak.

Sejarah harus mampu meninggalkan kesan dan pesan-pesan yang terkait dengan nilai nilai kepahlawanan seperti keteladanan, rela berkorban, cinta tanah air, kebersamaan, kemerdekaan, kesetaraan, nasionalisme, dan patriotisme. Beberapa nilai ini dapat digali dan dikembangkan melalui pembelajaran sejarah yang bermakna. Untuk itu memang sangat dituntut adanya kreativitas dari para guru sejarah. Para guru sejarah harus menggali dan mampu mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik.

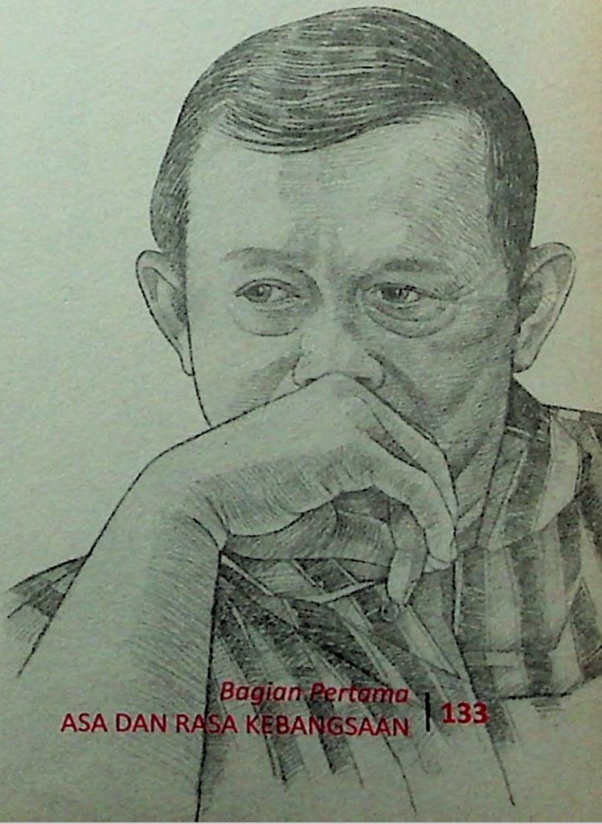
Pembahasan topik-topik yang berkenaan dengan periode pergerakan nasional, perlu menekankan nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan, di antara pluralisme atau keanekaragaman, toleransi dan saling menghargai, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan.

Tuhan telah menciptakan perbedaan di antara bangsa Indonesia, dimaksudkan agar semua perbedaan itu sebagai

kekayaan dan kekuatan bangsa. Apabila maksud Tuhan menciptakan perbedaan itu dipahami secara tidak benar, maka yang terjadi adalah seperti saat ini. Beragam konflik yang sulit diurai solusinya. Sebagai anak bangsa yang melihat fenomena ini dengan kesadaran akan sejarah dibentuknya republik ini, serta bagaimana cita-cita bangsa dibangun, tentu sedih yang mendalam bagi yang menyaksikan. Inilah saatnya kesadaran tersebut bergerak menuju ide-ide solutif terhadap permasalahan-permasalahan bangsa hari ini. ****

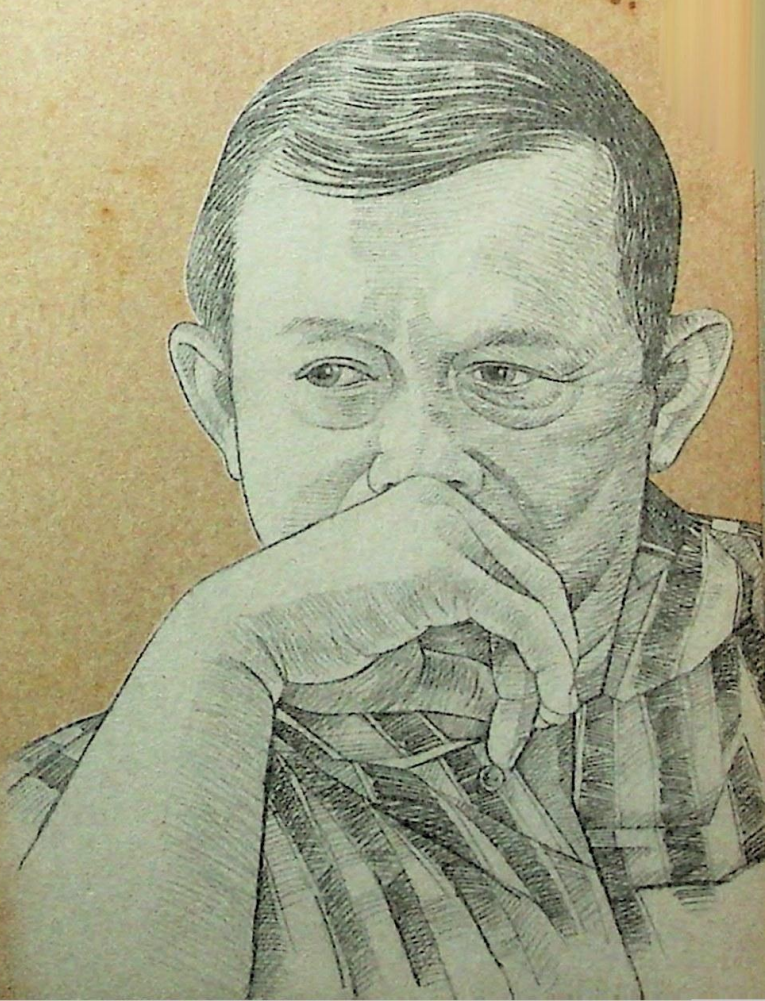


kekayaan dan kekuatan bangsa. Apabila maksud Tuhan menciptakan perbedaan itu dipahami secara tidak benar, maka yang terjadi adalah seperti saat ini. Beragam konflik yang sulit diurai solusinya. Sebagai anak bangsa yang melihat fenomena ini dengan kesadaran akan sejarah dibentuknya republik ini, serta bagaimana cita-cita bangsa dibangun, tentu sedih yang mendalam bagi yang menyaksikan. Inilah saatnya kesadaran tersebut bergerak menuju ide-ide solutif terhadap permasalahan-permasalahan bangsa hari ini. ****



Bagian Kedua

SOSOK KEPEMIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN

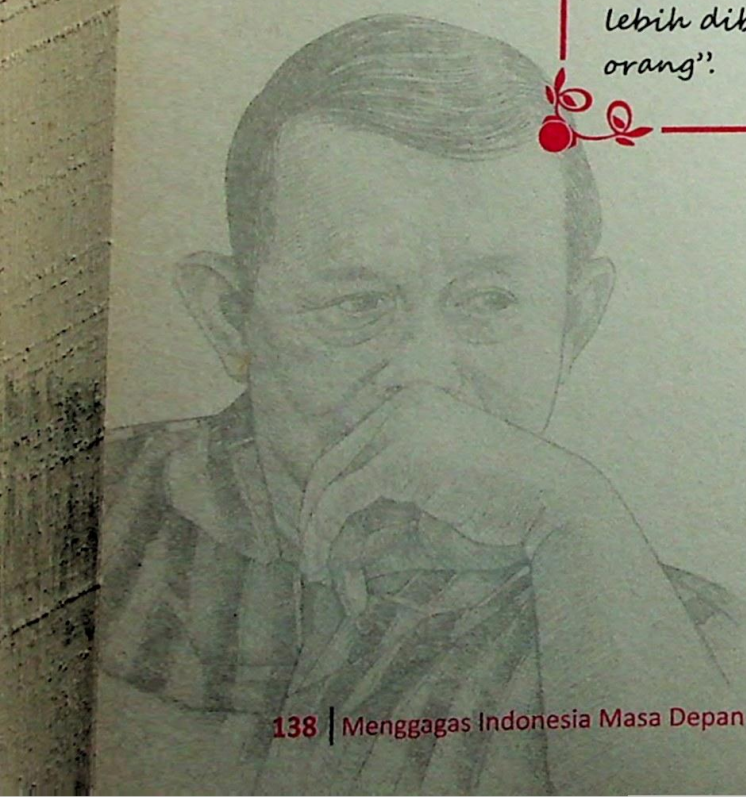


Masalah Kepemimpinan Nasional Ke Depan

Bab 6

Djoko Santoso
for the People

"Sampai detik ini sejumlah masalah masih mengidap di tubuh bangsa ini, baik di bidang politik, hukum dan keamanan".
"Pemimpin pada dasarnya adalah orang yang terpilih, ia dianggap memiliki kemampuan lebih dibanding kebanyakan orang".



"Jika kita melihat jauh ke depan, di beberapa abad mendatang, pemimpin adalah mereka yang memberdayakan orang lain." (**William Henry "Bill" Gates,** pemilik Microsoft)

PENGANTAR

Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Beberapa waktu terakhir ini, banyak dikemukakan data positif dan prediksi optimistik tentang perekonomian Indonesia. Angka-angka makro ekonomi kita positif, pertumbuhan ekonomi terus meningkat secara positif, begitu juga indeks harga saham terus meningkat, dan jumlah orang kaya bertumbuh dengan cepat.

Banyak lembaga internasional yang memprediksi bahwa Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi seperti saat ini, diprediksi Indonesia bersama negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China) akan mendominasi PDB dunia dengan *share* lebih dari 50% pada tahun 2025. Pada saat itu Indonesia diperkirakan mempunyai PDB perkapita sekitar US$15.000.

Begitu juga menurut Buku *Megachange 50* yang diterbitkan oleh majalah *The Economist* tahun 2012 bahwa Indonesia diramalkan di era globalisasi ini akan menjadi salah satu negara maju dengan pendapatan perkapita sekitar US$ 24.000 pada tahun 2050. *McKinsey Global Institute* memprediksi Indonesia akan masuk dalam 7 (tujuh) besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030 mengalahkan Jerman dan Inggris. Akan tumbuh kelas menengah Indonesia dari 45 juta orang pada tahun 2010 menjadi 135 juta orang di tahun 2030, atau tumbuh sekitar 90 juta, dimana pertambahan kelas menengah akan mendorong peningkatan

pertumbuhan ekonomi.

Apakah kemudian potensi Indonesia dalam dinamika ekonomi global akan mengantarkan Indonesia pada kondisi masyarakat sejahtera? Potensi yang besar tersebut bukanlah jaminan. Karena masih ada faktor-faktor lain yang menentukan, yang saling terkait erat satu sama lain seperti politik, demokrasi, dan hukum. Hal itu dapat dilihat, ternyata pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini telah melahirkan kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam *Global Wealth Report* yang dilansir *Credit Suisse*, tanggal 11 Oktober 2012, Indonesia tercatat memiliki 104 ribu orang kaya. Pada 2017, jumlah tersebut diperkirakan naik menjadi 207 ribu orang kaya, alias tumbuh 99%, sehingga Indonesia diestimasi menjadi satu dari lima negara dengan laju pertumbuhan orang kaya tertinggi di dunia bersama Brazil, Rusia, Malaysia, dan Polandia.

Global Wealth juga melaporkan, selama setahun terakhir, jumlah orang kaya dengan nilai harta lebih dari US$30 juta di Indonesia, meningkat 4,7 persen menjadi 785 orang. Dari populasi itu, jumlah miliarder dengan rata-rata kekayaan minimal US$2 miliar tercatat 25 orang. Sedangkan kalangan super kaya Indonesia dengan kekayaan minimal US$30-49 juta berjumlah 380 orang. Total 405 orang super kaya Indonesia itu menguasai total kekayaaan mencapai US$120 miliar (Rp1.150 triliun atau sekitar 80 persen dari APBN tahun 2012).

Sebaliknya, pertumbuhan jumlah orang kaya paradok dengan jumlah orang miskin di Indonesia. BPS telah merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 tercatat mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen). Jumlah penduduk miskin itu telah berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan

jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta orang (12,49 persen).

Ini menunjukan bahwa ada kelemahan manajemen Sumber Daya Alam, paradigma ekonomi yang terlalu neoliberal, politik desentralisasi, dan otonomi belum berjalan secara tepat karena masih adanya kecenderungan sentralisme ekonomi di tangan pemerintah pusat, sehingga konsentrasi investasi dan peredaran uang di Pulau Jawa telah melupakan potensi-potensi ekonomi yang ada, seperti potensi ekonomi maritim.

Kesenjangan antar wilayah juga telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi di luar Pulau Jawa karena tingginya biaya logistik dan transportasi. Bahkan tidak terbantahkan bahwa nafsu pembangunan juga telah mengakibatkan terjadinya pengikisan lahan, kerusakan hutan, yang akhirnya membuat kebijakan pembangunan belum berorientasi kesejahteraan rakyat.

Dalam kondisi yang demikian, dibutuhkan pemimpin yang mampu melihat potensi-potensi bangsa Indonesia secara menyeluruh dan problem-problem yang akan menghalangi berkembangnya potensi tersebut.

MASALAH KEPEMIMPINAN MASA DEPAN

Tahun berganti semenjak Proklamasi Kemerdekaan, namun masa yang telah lewat itu belum mendekatkan nasib bangsa Indonesia kepada negara yang dicita-citakan, seperti yang tercantum dalam alinea terakhir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: *"Negara yang pemerintahannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan*

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Sampai detik ini sejumlah masalah masih mengidap di tubuh bangsa ini, baik di bidang politik, hukum, dan keamanan. Rumah bangsa ini bagaikan tak berpagar. Kapal-kapal asing bebas keluar masuk menjarah ikan di perut laut pedalaman. Bahkan, negara tetangga tanpa rasa takut memindahkan patok-patok batas negara. Hal ini dikarenakan peralatan perang tentara kita tertinggal jauh dari negara-negara lain.

Di sektor Kesra, menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan, mahalnya pendidikan dan kesehatan, anak-anak busung lapar belum hilang dari angka statistik, dan masih lambannya urusan bencana. Belum lagi konflik vertikal dan horizontal, baik yang bermotif SARA ataupun bermotif ekonomi, berpotensi terhadap instabilitas bangsa.

Di bidang ekuin, kita tidak berdaulat atas nasib ekonomi kita sendiri. Bahkan kalah nyali dengan pemodal asing dalam setiap negosiasi membagi kue hasil usaha. Akibatnya, kita krisis energi. Antri minyak menjadi pemandangan sehari-hari, antri bensin, dan pemadaman listrik.

Karena itu, bangsa ini memerlukan pemimpin baru. Pemimpin yang menjadi *problem solver* (pemecah masalah). Pemimpin seperti ini tentu lahir dari generasi baru. Bukan dari generasi lawas pewaris kepemimpinan pola lama. Bukan juga dari individu yang terlibat dan menyangga kepemimpinan masa lalu.

Itulah hukum besi suatu perubahan. Sesuatu berubah dan menjadi baru karena memang diganti dengan yang baru. Banyak cara melakukan perubahan. Ada yang mengambil jalan radikal revolusioner, perubahannya cepat, dan mengejutkan. Terbuka juga model persuasif gradual. Hanya saja cara terakhir

ini ternuansa kompromi. Di tahun 1998 bangsa ini memilih cara kompromi. Reformasi adalah buah kompromi rezim Orde Baru yang membuka ruang bagi kaum reformis untuk tampil di tingkat nasional. Yang terjadi kemudian menjadi paradok gerakan reformasi. Tak jelas lagi siapa yang reformis dan siapa yang anti-reformasi.

Perubahan yang signifikan baru akan terjadi jika terjadi perubahan kepemimpinan yang cukup radikal. Pemimpin yang menjadi antitesis karakteristik kepemimpinan gaya lama. Tentu saja kepemimpinan baru itu tidak berpola pikir nihilis. Pasti ada sisi-sisi positif yang dihasilkan dari kerja kepemimpinan masa lalu. Hal-hal positif itu tentu saja bisa menjadi batu pijakan yang bagus untuk memulai langkah baru bagi perjalanan bangsa ini ke depan.

Proses kelahiran kepemimpinan baru saat ini sangat memungkinkan. Syarat yang ada, baik berupa kondisi sosial, ekonomi, dan politik sudah lengkap. Tinggal satu faktor penting yang belum ada: munculnya aktor yang berinisiatif menjadi penggerak perubahan. Perlu orang yang berani, jujur dengan cita-cita perjuangan, memiliki komitmen dan keteguhan terhadap ideologi dan cita-cita perjuangan, serta sabar dalam berjuang. Aktor pengubah berkarakter seperti itulah yang dibutuhkan sebagai pemimpin di hari ini.

ORANG TERPILIH

Pemimpin pada dasarnya adalah orang yang terpilih, ia dianggap memiliki kemampuan lebih dibanding kebanyakan orang. Sehingga dengan kemampuan di atas rata-rata itulah dia kemudian dipercaya untuk menjadi pemimpin. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, karena tidak semua orang memiliki

kemampuan memimpin. Itulah sebabnya, ada banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin.

Tentu saja syarat itu berbeda-beda dalam setiap jenis kepemimpinan. Makin tinggi tanggung jawab yang harus diemban seorang pemimpin, makin tinggi pula persyaratannya. Demikian pula, makin rendah tanggung jawabnya, makin rendah pula persyaratan yang dibutuhkan. Presiden, karena sebagai orang nomor satu di sebuah negara tentu memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan seorang camat, lurah atau pemimpin agama misalnya. Sehingga persyaratan antara jenis kempemimpinan yang satu dengan kepemimpinan yang lain dengan sendirinya berbeda pula. Namun demikian, ada beberapa syarat umum yang tidak bisa ditawar dalam setiap jenis kepemimpinan, baik pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin organisasi maupun lembaga tertentu.

Syarat umum itu, dalam teori politik modern, dirumuskan dalam tiga hal, yakni akseptabilitas, kapabilitas, dan integritas. Akseptabilitas mengandaikan adanya dukungan riil dari sekelompok masyarakat yang menghendaki orang tersebut menjadi pemimpin. Seseorang baru dianggap sah sebagai pemimpin jika ada yang menginginkan dan memilihnya menjadi pemimpin.

Aspek ini, dalam teori politik disebut sebagai legitimasi, yakni kelayakan seorang pemimpin untuk diakui dan diterima oleh orang-orang yang dipimpinnya melalui proses pemilihan yang berlangsung secara jujur dan adil. Hanya orang yang dipilih melalui proses pemilihan itulah yang dianggap memiliki legitimasi sebagai pemimpin. Syarat ini memang khas kepemimpinan politik. Tidak semua pemimpin harus dipilih. Namun dipastikan kepemimpinan di luar politik juga akan memiliki legitimasi yang sangat kuat jika melalui proses pemilihan, bukan sekadar ditunjuk oleh orang tertentu.

Syarat kedua adalah kapabilitas. Jika akseptabilitas menyangkut keabsahan seorang sebagai pemimpin, maka kapabilitas menyangkut kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin tidak hanya cukup karena ada yang menghendaki menjadi pemimpin dan kemudian memilihnya sebagai pemimpin, tetapi harus dilengkapi dengan dengan kemampuan yang memadai untuk mengelola berbagai sumber daya dari orang-orang yang dipimpinnya, agar tidak sampai terjadi konflik satu sama lain. Kalaupun nantinya ada konflik, maka pemimpin itu harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengelola konflik itu, bukan hanya agar konflik itu mereda dan tidak meluas menjadi konflik fisik apalagi sampai berdarah, tetapi juga agar dari pengelolaan konflik itu lahir sebuah konsensus yang disepakati bersama.

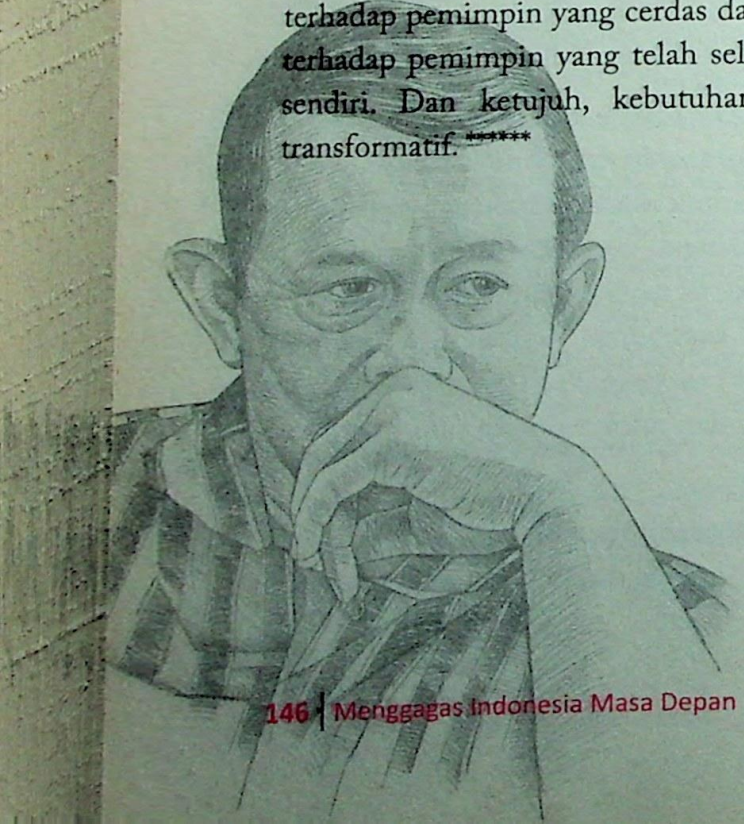
Syarat ketiga, integritas. Akseptabilitas dan kapabilitas hanya mungkin bisa menghasilkan produk yang dirasakan orang-orang yang dipimpinnya jika dilengkapi oleh integritas. Kemampuan memimpin dan keabsahan menjalankan kepemimpinan tidak cukup berarti jika pimpinan itu tidak memiliki integritas.

Secara sederhana, integritas adalah komitmen moral untuk berpegang teguh dan mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama, sekaligus kesediaan untuk tidak melakukan pelanggaran baik terhadap aturan perundangan maupun terhadap norma-norma tak tertulis yang berlaku di masyarakat. Jika akseptabilitas menyangkut legitimasi dan kapabilitas berhubungan dengan kompetensi, maka integritas menyangkut konsistensi dalam memegang teguh aturan main dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Tanpa akseptabilitas, seorang pemimpin akan mudah dipertanyakan keabsahannya karena tidak memiliki legitimasi

yang kuat. Sebaliknya, tanpa kapabilitas, seorang pemimpin tidak mungkin bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik karena dia tidak dilengkapi dengan kompetensi. Namun akseptabilitas dan kapabilitas menjadi tidak ada gunanya jika tidak didukung oleh integritas. Tanpa integritas, seorang pemimpin akan mudah terjerumus dalam sikap sewenang-wenang, dan cenderung mengabaikan aturan main serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan sendirinya berbagai bentuk penyelewengan moral akan mudah terjadi.

Dari syarat umum kepemimpinan nasional masa depan yang dirumuskan dalam teori politik modern itu, dapat kita rinci mengenai kebutuhan terhadap pemimpin nasional secara operasional sebagai berikut. Pertama, kebutuhan terhadap pemimpin yang mau mendengar. Kedua, kebutuhan terhadap pemimpin yang jujur dan bersih. Ketiga, kebutuhan terhadap pemimpin yang kapabel dan berkualitas. Keempat, kebutuhan terhadap pemimpin yang kuat dan berani. Kelima, kebutuhan terhadap pemimpin yang cerdas dan efisien. Keenam, kebutuhan terhadap pemimpin yang telah selesai dengan permasalahannya sendiri. Dan ketujuh, kebutuhan terhadap pemimpin yang transformatif. *****



Pemimpin Yang Mau Mendengar

Bab 7

Djoko Santoso
for the People

"Seorang pemimpin harus pula mempunyai kemampuan mendengar, dengan kemampuan mendengar maka apa yang menjadi aspirasi yang dipimpin dan penilaian atasan akan menjadi nilai yang berarti bagi seorang pemimpin. Bagi seorang pemimpin (negara) satu aset yang paling mahal adalah kepercayaan dari yang ia pimpin (rakyat).



"Anda tidak akan pernah belajar apa-apa jika Anda terus bicara." (**Lyndon B. Johnson**, Presiden AS ke-36 (1908-1973))

PENGANTAR

Kepemimpinan yang baik bukan berarti tanpa cela. Manusia secara umum bukanlah yang selalu benar dalam menjalani kehidupannya, tetapi manusia yang terbuka ketika ia berbuat salah, segera melakukan introspeksi diri. Hal itu berarti, pemimpin yang baik bukan berarti selalu benar, apalagi merasa benar sendiri. Maka, mendengarkan masukan dari yang dipimpin adalah mutlak diperlukan. Karena pemimpin tidak kebal dari kesalahan. Masih ada celah untuk lupa, termasuk berbuat keburukan. Jadi mendengarkan masukan, saran, bahkan mungkin juga keluhan dan harapan dari bawah.

Komunikasi kepemimpinan atau *leadership communication*, adalah sebuah model komunikasi bagi para pemimpin, dimana bentuk komunikasi disesuaikan dengan posisinya sebagai pemimpin. Dr. John A. Kline mengatakan, seorang pemimpin haruslah selalu berusaha meningkatkan efektifitas komunikasinya. Yang perlu dilakukan, harus dapat memancing umpan balik. Umpan balik adalah hal penting bagi seorang pemimpin. Dengan umpan balik, seorang pemimpin akan mengambil keputusan dan menentukan langkah selanjutnya.

Seorang pemimpin harus pula mempunyai kemampuan mendengar, dengan kemampuan mendengar maka apa yang menjadi aspirasi yang dipimpin dan penilaian atasan akan menjadi nilai yang berarti bagi seorang pemimpin. Karena itu Presiden AS ke-36 Lyndon B. Johnson (1908-1973) pernah mengingatkan, "Anda tidak akan pernah belajar apa-apa jika Anda terus bicara." Ungkapan tersebut penting untuk kita simak.

Watak kepemimpinan seperti ini sering muncul di setiap generasi sebuah negara. Kemauan dan kemampuan seorang pemimpin (negara) mendengar suara atau kritikan rakyat merupakan cermin dari pemimpin sejati. Pemimpin yang selalu didambakan kehadirannya oleh rakyat. Pemimpin yang tidak miskin komitmen. Pemimpin yang lebih mengedepankan etika dan moral dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Pemimpin seperti inilah yang sejatinya akan menyejahterakan negara yang ia pimpin. Hal itu telah dicontohkan oleh pemimpin terdahulu, seperti: Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Panglima Besar Soedirman.

Bagi seorang pemimpin (negara) satu aset yang paling mahal adalah kepercayaan dari yang ia pimpin (rakyat). Kepercayaan ini akan sulit diraih tanpa adanya kesadaran internal untuk memposisikan diri sebagai pendengar yang baik dan bijaksana, dan terus menjadi pendengar yang baik ketika kepercayaan sudah didapat.

Mendengar merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan tersebut. Begitu juga dengan seorang pemimpin negara. Menerima masukan dari rakyat adalah sebuah keniscayaan yang mesti dipegang erat, agar negara yang ia pimpin bisa berjalan maju dalam keadaan seimbang.

Maka mencari pemimpin yang mau mendengar merupakan salah satu kunci melepaskan negara ini dari belenggu keterbelakangan. Bagi rakyat, menjaga komitmen dalam berdoa dan berikhtiar merupakan langkah tepat untuk dilakukan saat ini daripada sibuk mengutuk keadaaan, tanpa adanya pengaruh langsung bagi kehidupan nyata. Sedang bagi para pemimpin, membaca ulang sejarah tentang bagaimana pemimpin bangsa terdahulu bersikap bijaksana dalam menjalankan tampuk

kepemimpinan sehingga mereka mampu mengangkat derajat bangsa adalah keharusan yang tidak dapat ditinggalkan.

BUDAYA KRITIK TERHADAP PEMIMPIN

Untuk dapat menjadi seseorang pemimpin, merupakan hasil dari dialetika sosial dan politik masyarakat yang terikat dalam kontrak sosial. Pemimpin yang memegang otoritas atau kekuasaan, sejatinya harus menempatkan kekuasaanya secara tepat, karena kekuasaan cenderung menjelma menjadi tiran yang telah melingkupi dirinya dengan kebohongan, sehingga kebenaran telah hilang sirna dari lingkungannya. Proses *check and balances* harus selalu dilakukan guna membangun budaya dialektika politik yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi. Untuk memperbaiki keadaan seperti itu diperlukan keberanian mengkritik dari pihak rakyat yang dipimpin.

Dalam sejarah, melakukan kritik kepada seorang penguasa yang lalim adalah suatu yang amat sulit dilakukan, karena memerlukan perasaan keadilan yang mendalam serta keberanian moral yang luar biasa. Memberikan kritik menyangkut bahaya yang dapat mengancam ketentraman dan mungkin juga jiwa si pengkritik itu sendiri. Penguasa yang telah dimabuk kekuasaan sering menganggap kritik ini sebagai tindakan pengkhianatan, karena dalam bayang diri penguasa itu telah menjadi personifikasi dari kebenaran itu sendiri.

Dalam khasanah budaya Jawa kuno, Hasta Brata merupakan yang (relatif) paling lengkap dan sangat ideal, sehingga menarik untuk dikaji dan sangat kontekstual. Dalam Ilmu Hasta Brata ini pulalah Arjuna mampu melakukan koreksi terhadap

kepemimpinan Prabu Dasamuka, yang dikenal arogan dan angkara murka. Hasta Brata adalah ilmu tentang delapan (hasta) sifat alam yang agung. Pemimpin yang menguasai ilmu Hasta Brata ini akan mampu melakukan internalisasi diri (pengejawantahan) ke dalam delapan sifat agung tersebut. Dalam beberapa literatur juga disebutkan bahwa delapan sifat alam ini mewakili simbol kearifan dan kebesaran Sang Pencipta, yaitu; sifat Bumi, sifat Matahari, sifat Bulan, sifat Samudra, sifat Bintang, sifat Angin, sifat Api, dan sifat Air.

Dalam hal pemimpin harus terbuka dan mau mendengar, relevan untuk melihat sifat samudra. Sifat samudra adalah luas dan lapang sebagai simbol dari kelapangan dada dan keluasan hati. Dalam konteks kekinian, seorang pemimpin yang menguasai sifat samudra akan mampu menerima kritikan dengan lapang dada, siap diberi saran, sekalipun itu oleh bawahannya. Ia tidak akan melihat siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan. Ia akan menyediakan waktu dan selalu terbuka untuk menampung keluhan rakyatnya. Sifat samudra ini juga tercermin dalam praktek kepemimpinan raja-raja Mataram, dengan memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk mengajukan protes kepada Raja melalui budaya *pepe*, yaitu berjemur di alun-alun sampai Raja menemui dan mendengarkan keluhan mereka. Samudra yang memiliki hamparan luas dan menampung air dari segala sumber, menyimbolkan kebesaran jiwa dan kelapangan dada. Tidak semua air bersih, namun ia tetap bersedia menampungnya.

Karakteristik pertama dari seorang pemimpin yang kompeten adalah kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Banyak pemimpin terlalu banyak bicara dan kadang-kadang mengabaikan kebutuhan orang lain, dari apa yang mereka katakan, yang mengarah ke negatif dan ketidakmampuan. Seorang

pemimpin harus berdiri dan berbicara, tapi terlalu banyak bicara dan tidak cukup mendengarkan, akan mendorong para pemimpin lalai terhadap tugasnya. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk semua orang dan pemimpin yang sukses tahu bagaimana mendengarkan dan mengurus masalah rakyat.

PERAN BAWAHAN

Meskipun nilai-nilai kepemimpinan ada di setiap budaya suku bangsa, tetapi nilai-nilai kepemimpinan Jawa memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada pada suku bangsa lain, yaitu nilai-nilai kepemimpinan tersebut diajarkan dan dipegang teguh di semua lapisan mayarakat, mulai dari orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, bangsawan, dan rakyat jelata. Ajaran kepemimpinan ini terlihat jelas dalam berbagai bentuk ungkapan *paribasan* (peribahasa) yang muncul dalam banyak interaksi sosial.

Di bawah ini terdapat beberapa peribahasa Jawa yang menunjukkan sikap positif seorang pemimpin. Peribahasa tersebut dipaparkan di sini untuk menunjukkan betapa tingginya perhatian budaya Jawa terhadap kepemimpinan. Banyak peribasa yang menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik. Dalam hal ini dapat dicontohkan beberapa *paribasan* (peribahasa) yang cukup penting dan sangat aplikatif.

Pertama, menjaga kata-kata. Sikap ini terdapat pada peribahasa *"aja waton ngomong, nanging ngomongo nganggo waton"*. Paribasan ini merupakan ajakan untuk berbicara dengan hati-hati, tidak "ngawur," serta tidak melontarkan yang dapat memicu pertikaian. Isi pembicaraan harus "berisi," memiliki landasan kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. Peribahasa ini dipakai untuk memberi nasehat pada orang-orang yang suka menyebarkan

kebohongan, menganggap salah hal-hal yang masih samar, dan menjelekkan orang lain.

Kedua, jangan jumawa dan merasa serba bisa. Sikap ini terdapat pada peribahasa *"aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa"*. Merasa dapat melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, dianggap sebagai sebuah sikap yang ceroboh. Merasa dapat berbuat sesuatu, tidaklah cukup membuktikan bahwa seseorang dapat berbuat sesuatu. Idealnya seseorang harus punya pengalaman melakukan sesuatu hal dan berhasil, baru ia boleh menyatakan dirinya "bisa" melakukan hal tersebut. Orang-orang yang merasa bisa melakukan sesuatu, kemudian menyatakan bisa melakukan itu dan berani mengatakan "bisa", dapat dikatakan memiliki sifat buruk karena andaikata orang tersebut dipercaya melakukan sesuatu dan kemudian gagal karena ternyata ia tidak bisa, maka hal ini akan memalukan dan tentu saja merugikan banyak pihak.

Ketiga, gemar menyantuni rakyat. Sikap ini terdapat dalam peribahasa *"curiga manjing warangka, warangka manjing curiga"*. Paribasan ini merupakan gambaran dari sikap ideal hubungan pemimpin dengan bawahan. Sikap ideal ini ditandai dengan kondisi dimana pemimpin memahami aspirasi bawahan, mengenal dengan baik kondisi bawahan, dan mau menyantuni mereka dengan baik. Sikap pimpinan yang seperti inilah yang dapat menyebabkan bawahan bersedia berbakti dengan ikhlas kepada sang pemimpin tersebut.

Keempat, mencintai kehidupan yang harmonis dan penuh kerukunan. Sikap ini terdapat dalam peribahasa *"rukun agawe santosa, crah agawe bubrah"*. Ungkapan ini mengisyaratkan bagaimana sesungguhnya cita-cita hidup orang Jawa adalah dapat hidup secara damai dan rukun. Masyarakat Jawa tidak menyukai konflik, karena pada dasarnya konflik membawa

banyak kemudharatan. Filsafah ini kontradiktif sekali dengan fakta yang terjadi di negeri ini. Banyak berita di media massa yang mengekspose perseteruan para pemimpin Jawa negeri ini dan menciptakan idiom baru dalam masyarakat, seperti idiom perseteruan.

PEMIMPIN NASIONAL KE DEPAN

Pemimpin kedepan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang telah menjadi tujuan bernegara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: (1) *melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,* (2) *memajukan kesejahteraan umum*, (3) *mencerdaskan kehidupan bangsa, dan* (4) *ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.*

Pemimpin kedepan harus membangun pondasi demokrasi yang substantif; ekonomi yang kuat, yang tidak sekedar berorientasi pada pertumbuhan, tetapi yang penting adalah keadilan dan pemerataan agar pertumbuhan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat; penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi; serta menciptakan dukungan sistem sosial kemasyarakatan berupa keharmonisan, toleransi, dan ketertiban sosial.

Kepemimpinan, baik di pusat maupun daerah adalah kunci penentu, karena kepemimpinan yang lahir dari sistem demokrasi akan menentukan kemana arah kebijakan dan pembangunan bangsa ini. Biasanya dalam sebuah negara yang sedang menjalani proses demokrasi, terkadang terjebak pada pilihan dilematis: apakah membangun sistem terlebih dahulu, ataukah melahirkan pemimpin yang unggul lebih dulu. Pertanyaan ini sama rumitnya dengan: apakah ayam berasal dari telur ataukah telur yang berasal

dari ayam.

Tentu saja sistem dan kepemimpinan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi. Sistem yang demokratis, bersih, dan pro rakyat akan memberikan pijakan yang kuat bagi kepemimpinan. Sama halnya juga kepemimpinan yang demokratis, cakap, bertanggung jawab, peduli, bersih, visioner, akan memberikan pengaruh yang kuat pada bekerjanya sistem.

Karena itu, dalam konteks kepemimpinan, *"There are no underdeveloped countries, but there are undermanaged countries"*, dimana hal penting yang harus kita perbaiki adalah cara kita mengelola negara lewat kepemimpinan nasional yang handal. Dibutuhkan juga pemimpin yang dapat membawa pada perubahan yang kita percaya, *Change We Can Trust.*

KEPEMIMPINAN DEMOKRASI: MENDENGAR

Salah satu pondasi dasar dari pandangan dan pemikiran demokrasi adalah kemajemukan dan menghargai perbedaan. Selain itu, demokrasi juga dipandang sebagai nilai bersama suatu bangsa dalam membangun sistem pemerintahan negara yang bersumber dari rakyat. Dengan kata lain, demokrasi menjadi sebuah pre-skripsi yang bermuatan nilai moral dan menjadi sebuah norma. Keberhasilan suatu bangsa dan suatu negara tidak hanya diukur dari neraca perekonomian, tingkat kesejahteraan, dan pendidikan, tetapi juga diukur melalui seberapa jauh suatu bangsa dan negara melaksanakan demokrasi dengan bentuk tertentu dari demokrasi yang dianggap sebagai bentuk ideal, sebagai patokan ukuran keberhasilan pelaksanaan demokrasi.

Untuk memahami demokrasi, ada dua pendekatan yang sering digunakan para ilmuwan politik. *Pertama*, secara normatif

dimana demokrasi dipahami sebagai sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan, atau diselenggarakan oleh suatu negara (demokrasi diartikan sebagai tujuan atau resep tentang bagaimana demokrasi itu seharusnya). Pengertian umum ini dapat dilihat dari ungkapan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Kedua, secara empiris dimana demokrasi berkenaan dengan perwujudannya dalam kehidupan politik praktis dan sistem politik yang ada. Banyak teori tentang demokrasi itu berada pada tingkat normatif, sementara literatur tentang demokrasi dicirikan oleh pendekatan empiris. Kriteria-kriteria untuk melihat sebuah bentuk pemerintahan demokratis atau tidak bersumber pada pendekatan empiris. Walaupun penerapan demokrasi di beberapa tempat melahirkan bentuk demokrasi yang beragam, akan tetapi ada kriteria universal yang berlaku bagi semua tempat yang melaksanakan demokrasi.

Dalam segala bentuk pemerintahan, demokrasi tentunya merupakan suatu bentuk yang paling baik, atau paling tidak ia memiliki kelemahan paling sedikit dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Bentuk pemerintahan yang demokratislah yang menjadi substansi dari reformasi dan menjadi kehendak segenap rakyat Indonesia, termasuk pula model kepemimpinan yang hendak diselenggarakan di dalamnya. Persoalannya, di tengah derasnya arus demokratisasi ala Barat saat ini, bagaimana sebetulnya konsep kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, yang bersumber dari nilai dan norma yang dianut oleh bangsa Indonesia? Penjabaran dari konsep ini nantinya diharapkan akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kepemimpinan Indonesia di era demokrasi.

Lima belas tahun reformasi telah bergulir di semua

lini kehidupan berbangsa dan bernegara, pasang surut nilai kepercayaan masyarakat terhadap tatanan politik dan kepemimpinan yang diselenggarakan terus terjadi. Salah satu sumbernya adalah konstelasi sosial politik yang dilahirkan selama ini, dirasakan masih jauh dari harapan masyarakat secara luas. Malah tidak jarang masyarakat dihadapkan pada suatu kondisi yang serba sulit. Infrastruktur dan regulasi yang masih semrawut, degradasi moral, sistem politik yang tidak stabil, adalah kondisi-kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, wajar apabila kemudian masyarakat menuntut perlunya perbaikan dan perubahan yang lebih mendasar dan berkepentingan bagi semua orang.

Harus dipahami bahwa pemimpin berarti seseorang yang dipercaya oleh para pengikutnya (konstituen), untuk mengatasi persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, memiliki tanggung jawab yang tinggi, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, bermoral, tangguh dan berani menghadapi tantangan apapun, disayangi dan disenangi oleh para pengikutnya, dan mampu membawa lembaga atau institusi yang dia pimpin menuju perubahan yang konstruktif. Manifestasi dari seorang pemimpin adalah dia tidak hanya seorang manajer yang handal, namun juga seorang perencana yang baik, melakukan proses kerja secara maksimal, dan mampu menunjukkan hasil yang memuaskan banyak pihak. Dan yang terpenting adalah memiliki banyak cara untuk menghadapi persoalan yang timbul. Karena itu, bila dihubungkan dengan sosok pemimpin Indonesia saat ini, kemampuan-kemampuan seperti di atas sepenuhnya belum dimiliki.

Konsepsi dan logika kepemimpinan di era demokrasi Indonesia sekarang mungkin sangat beragam. Hal ini disebabkan

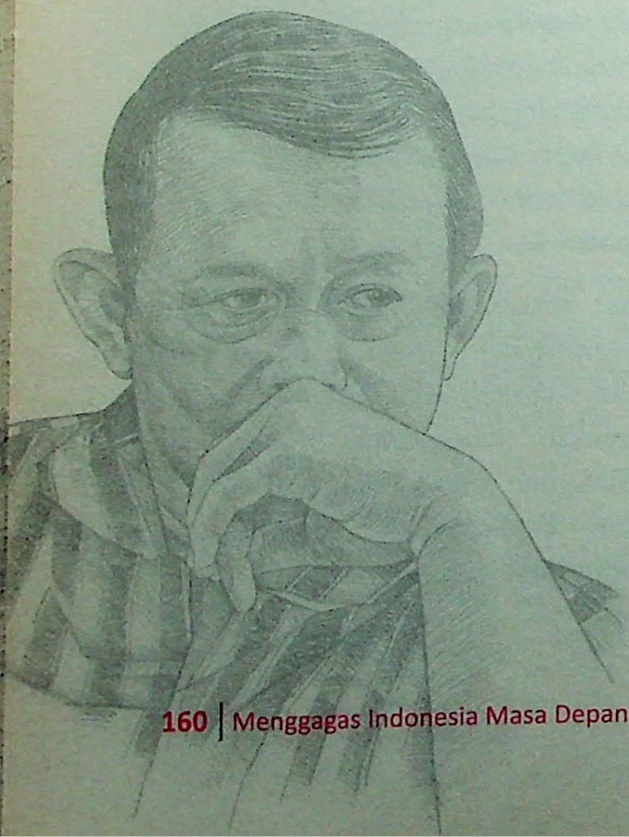
konstruksi pemikiran (logika) tentang pemimpin yang dibangun selama ini juga bervariasi antara satu dengan lainnya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh budaya dari masyarakat, atas model kepemimpinan yang mereka pandang. Model kepemimpinan masyarakat Jawa berbeda dengan model kepemimpin masyarakat Sumatera, juga berbeda dengan model kepemimpin masyarakat di daerah lainnya. Di Jawa misalnya, mereka menganggap kepemimpinan merupakan proses yang sakral dan tunggal. Karena itu, model yang dibentuk lebih didasarkan pada trah dan hubungan keluarga. Anggapan bahwa pemimpin dilahirkan oleh keluarga pemimpin tetap mendominasi ranah berpikir masyarakat. Namun konsepsi seperti demikian hanya dilihat parsial dan disalahgunakan, tanpa memberikan keseimbangan dengan menerapkan sifat-sifat kepemimpinan yang mulia, yang lebih memperhatikan pada rakyatnya.

Kesan yang timbul kemudian adalah hal ini bertentangan dengan konsepsi model kepemimpinan demokrasi yang mensyaratkan adanya sirkulasi kepemimpinan. Setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin. Dalam konsepsi kepemimpinan demokrasi, logika yang dipakai sebagian besar adalah pengetahuan dan keluasaan wawasan, dan bukan berdasarkan trah dan hubungan kekeluargaan, karena hal itu justru akan menumbuhkan nepotisme.

Sayangnya, kecenderungan masyarakat Indonesia masih menganggap persoalan kepemimpinan merupakan ranah yang hanya bisa dimasuki oleh sebagian kecil orang. Dalam kepercayaannya, mereka merupakan orang-orang pilihan dari Sang Maha Pencipta, dan dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat. Persoalan simbolisasi juga merupakan satu hal yang penting bagi kepercayaan yang dianut

masyarakat. Simbol-simbol yang dibawa oleh seorang pemimpin sangat berbeda dengan simbol yang dibawa masyarakat awam.

*****

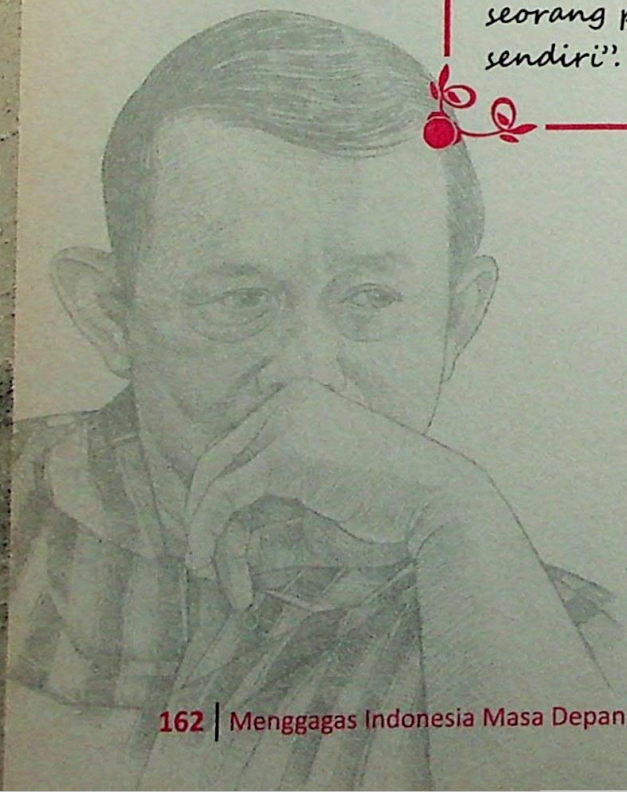


Pemimpin Yang Jujur dan Bersih

Bab 8

Djoko Santoso
for the People

"Setiap manusia yang terlahir di bumi, dari yang pertama hingga yang terakhir adalah seorang pemimpin. Setidaknya ia adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri".



*"Saudara-saudara, Aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku. Sifat jujur itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan." (**Khalifah Abu Bakar Assiddiq r.a.**)*

PENGANTAR

Waktu-waktu terakhir ini sejumlah media massa memberitakan seputar krisis kepemimpinan yang diakibatkan oleh sepinya sikap kejujuran di tingkat elit politik. Krisis kepemimpinan yang diakibatkan oleh lunturnya nilai kejujuran semakin menggema, ketika tidak sedikit petinggi partai politik yang terjerat dalam kasus hukum. Tentu sebagai rakyat kita merasa prihatin akan kondisi saat ini. Kejujuran sepertinya menjadi barang mahal di negeri ini. Rakyat sepertinya merasa kesulitan mencari pemimpin yang benar-benar memegang teguh sikap kejujuran. Sementara negeri ini butuh pemimpin yang jujur.

Mayoritas masyarakat Indonesia berharap pemimpin yang jujur dan berpihak pada rakyat kecil, memimpin negeri ini. Dari berbagai survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga didapatkan data bahwa, sifat kepemimpinan yang diharapkan adalah yang jujur dan berpihak pada rakyat.

PEMIMPIN YANG AMANAH

Setiap manusia yang terlahir di bumi dari yang pertama hingga yang terakhir adalah seorang pemimpin, setidaknya ia adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagus tidaknya seorang pemimpin akan berdampak terhadap yang dipimpinnya. Karena itu menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dilaksanakan

dan dijalankan dengan baik oleh pemimpin tersebut.

Sekarang masalahnya, apakah idealisasi pemimpin amanah itu tertancap di kalbu para pemimpin kita? Rasanya masih sedikit pemimpin di negeri ini yang memiliki kemampuan moral menjadi pemimpin amanah. Barangkali publik menyaksikan pemimpin yang seharusnya membela dan melindungi kepentingan rakyat, justru menzalimi rakyat. Ini dibuktikan tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang tersandung korupsi untuk menggelembungkan rekening pribadi.

Sama halnya dengan pejabat publik lain di jajaran eksekutif dari daerah sampai pusat, pidato politik yang disampaikan saat kampanye ternyata hanya menjadi slogan kosong. Sebagian di antara mereka telah bertindak tidak jujur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak kecurangan pemimpin eksekutif dengan menyelewengkan uang negara untuk menumpuk kekayaan sendiri. Perilaku politik mereka juga jauh dari ciri-ciri sebagai pemimpin amanah. Sepak terjang mereka untuk meraih posisi kadang meninggalkan etika dan nilai moral. Akibatnya rakyat hanya sebagai objek dan program-program yang dijalankan, sebatas menjadi komoditas yang digunakan sebagai batu loncatan untuk meraih tujuan sempit, sekadar mempertahankan jabatan.

Akibatnya ketika ada pemimpin baru yang menduduki posisi tertentu, keadaan di lapangan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal. Biaya pendidikan tidak terjangkau. Lapangan pekerjaan semakin sempit. Kondisi ini membuat rakyat tetap didera kesulitan hidup. Sehingga, ada pemimpin atau tidak ada pemimpin sama saja, rakyat tetap sengsara. Kondisi memprihatinkan masih minimnya pemimpin amanah tak boleh dibiarkan. Segenap elemen bangsa perlu mencari formulasi untuk menumbuhkan pemimpin amanah.

Hal itu dapat dilakukan dengan upaya kaderisasi untuk menyemai bibit unggul pemimpin yang amanah.

Sejarah menceritakan berulang-ulang kepada kita begitu banyak para penguasa yang jujur, yang dimuliakan, dan diagung-agungkan. Nama mereka disebut-sebut sekalipun telah lama mangkat. Mereka dirindukan dalam kenangan-kenangan indah. Kita semua mempunyai peluang dan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Semua orang adalah pemimpin, ada yang menjadi pemimpin negara atau sebuah bangsa, ada pula di antaranya yang akan memimpin wilayah, daerah, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Ada di antara kita yang sudah, atau bakal menjadi pemimpin organisasi, ada pula yang memimpin instansi, atau memimpin unit-unit kecil lainnya seperti keluarga dan rumah tangga.

LANGKANYA PEMIMPIN YANG JUJUR

Kejujuran adalah barang langka di negeri ini, dan untuk menemukan orang jujur ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Karena itu, ketika bertemu orang jujur, bisa kita kategorikan sebagai manusia langka yang layak dilestarikan.

Kita sudah sama memahami bahwa negeri ini kekurangan orang jujur. Dan entah mengapa, ibu pertiwi tampak begitu sedikit melahirkan pemimpin, pejabat, pengusaha, hingga pegawai yang jujur. Padahal kita tahu bahwa ketidakjujuran akan menciptakan derita jiwa, ketidakbahagiaan, dan ketidaknyamanan, bukan hanya kepada orang lain tapi juga pada diri kita sendiri.

Sulitnya menemukan manusia-manusia jujur di negeri ini, mungkin karena kita juga kesulitan menyaksikan pemimpin yang bisa dijadikan sebagai model atau panutan yang kejujurannya dapat diteladani. Orang-orang besar yang pernah dimiliki negeri

ini dan dikenal dengan kejujurannya, telah banyak yang kembali ke haribaan Pencipta dan begitu sulit menemukan sosok lain sebagai penggantinya.

Salah satu tokoh yang dikenal dengan kejujurannya adalah Wakil Presiden Pertama RI, Bung Hatta. Dalam buku *"Mengenang Bung Hatta"* ditulis I Wangsa Widjaya, Bung Hatta selalu mengembalikan kelebihan uang negara yang diberikan padanya sebagai anggaran perjalanan.

Ada kisah menarik ketika pada 1970 setelah Bung Hatta tidak lagi menjadi Wapres, ketika itu ia diundang berkunjung ke Irian Jaya (Papua), sekaligus meninjau tempatnya pernah dibuang pada masa kolonial Belanda. Bung Hatta dengan tegas menolak ketika disodori amplop sebagai uang saku setelah ia dan rombongan tiba di Papua.

Ketika amplop itu disodorkan kepadanya, ia dengan spontan bertanya, "Surat apa ini?" Dijawab oleh Sumarno yang mengatur kunjungannya, "Bukan surat, Bung. Uang... uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini." "Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah harus bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?"

"Lho, Bung... ini uang dari pemerintah, termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongan." Sumarno coba meyakinkan Bung Hatta. "Tidak, itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Kembalikan," kata Bung Hatta menolak amplop yang disodorkan kepadanya. Rupanya Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongan ke Irian dianggap sebagai pejabat dan menurut kebiasaan diberikan anggaran perjalanan, termasuk uang saku. Tidak mungkin dikembalikan lagi. Setelah

terdiam sebentar Bung Hatta berkata, "Maaf, Saudara, saya tidak mau menerima uang itu. Sekali lagi saya tegaskan, bagaimanapun itu uang rakyat, harus dikembalikan pada rakyat."

Peristiwa lain ditunjukkan oleh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, beliau bisa meletakkan dan menggunakan fasilitas negara secara semestinya. Pada suatu malam, Khalifah Umar Bin Abdul Aziz sedang sibuk di sebuah kamar khusus sedang memeriksa berkas-berkas dan arsip negara. Kemudian datanglah putra beliau mengetuk pintu. "Assalamu'alaikum wahai Ayahku, 'amirul mukminin." Sang khalifah menjawab salam sambil bertanya, "Wa'alaikum salam, ada apa Anakku?" "Ada masalah yang harus saya musyawarahkan," jawab sang putra. Lalu sang khalifah bertanya, "Masalah rakyat atau masalah keluarga?". "Masalah keluarga," jawab sang putra. Lalu sang Khalifah meniup lampu hingga ruangan tampak gelap. Sang khalifah bergegas membuka pintu dan mempersilahkan sang putra masuk. Karena gelap gulita maka sang putra bertanya, "Wahai Ayahku, kenapa kamar atau ruangan ini gelap gulita, apakah tidak ada lampu di dalam atau minyak tanahnya sudah habis?" Sang khalifah dengan tersenyum menjawab, "Lampu ada dan minyaknya juga ada. Tapi karena kamu tadi mau berbicara masalah keluarga dengan saya, maka lampu ini saya matikan karena lampu itu milik negara dan minyak tanahnya juga milik negara. Jadi saya takut kepada Allah kalau nanti saya di akhirat ditanya pertanggungjawaban saya kepada-Nya. Jadi saya tidak mau membicarakan masalah keluarga dengan memanfaatkan barang-barang milik negara."

Model pemimpin yang jujur, bersih dan bersahaja dapat juga kita lihat pada sosok Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Kesederhanaan hidupnya sudah diketahui banyak orang, pemimpin yang dapat menyentuh nurani kita. Kerendahan hati, kepandaian

berdiplomasi, kesantunan budi pekerti, kesederhanaan, ketegasan, dan kedermawanan. Tidak terlalu berlebihan jika untuk saat ini sosok beliau merupakan figur seorang pemimpin yang ideal.

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat ditauladani dari Mahmoud Ahmadinejad. *Pertama*, tetap hidup sederhana walaupun negara memberikan fasilitas yang baik kepadanya. *Kedua*, tidak memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, kerabat, maupun golongannya, semua sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. *Ketiga*, melakukan penghematan semata-mata untuk kesejateraan rakyat. *Keempat*, melakukan kebijakan secara religius. *Kelima*, sadar sebagai pemimpin adalah melayani rakyat bukan ingin dilayani rakyat. Kalau diuraikan sebenarnya masih banyak lagi yang menjadi contoh tauladan beliau, seorang yang cukup langka di dunia ini.

Adakah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini seperti tokoh-tokoh di atas? Padahal kita sangat merindukan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Tentu saja sifat jujur dan rasa tanggung jawab bersumber dari hati yang bersih. Lekat menjadi perilaku yang diperoleh melalui pendidikan, lingkungan, dan pengetahuan terhadap nilai-nilai kebenarannya. Kejujuran tidak hanya sebagai pemanis bibir, tapi ia menyatu dalam perilaku disertai perasaan selalu diawasi oleh Yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui segala yang dilakukan. Itulah yang menanamkan sifat jujur dalam kata dan perbuatan. Memang tidak mudah menjadi pejabat, pengusaha dan atau pegawai jujur ditengah komunitas yang lebih mencintai materi dibandingkan memegang komitmen untuk tugas dan amanah yang diberikan padanya. Namun di balik itulah kebahagiaan jiwa itu berada, saat mampu mengalahkan berbagai macam godaan dan tipu daya untuk tidak bersikap jujur.

Negeri ini butuh pemimpin yang jujur dan pejabat yang

amanah. Karena dari merekalah nilai-nilai kebaikan itu ditiru dan diteladani oleh rakyat. Rakyat terkadang tidak butuh pejabat yang orator ulung atau pemimpin yang artikulator handal. Hal yang lebih dibutuhkan dari mereka adalah keteladanan sebagai pemimpin, jujur dan amanah, dan begitulah seharusnya kita mengartikulasi dan mengekspresikan cinta dan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia! Atau, apakah memang sulit menemukan pemimpin dan pejabat yang jujur di negeri ini?

Selain jujur, pemimpin yang bersihlah yang pantas dipilih dan menjadi pemimpin kita. Salah satu syarat untuk menghilangkan korupsi dalam kehidupan masyarakat adalah memilih seorang pemimpin dengan kekuasaan yang dimiliki, sangat menentukan baik buruknya kehidupan suatu bangsa. Pemimpin bersih dan berwibawa akan menjadi panutan masyarakat. Dengan memilih pemimpin yang bersih akan mewujudkan kehidupan yang makmur dan sejahtera.

INDONESIA BUTUH PEMIMPIN JUJUR

Setelah lepas dari masa penjajahan fisik, bukan berarti masyarakat sudah mendapatkan kemerdekaan secara sepenuhnya. Pasalnya, sampai sejauh ini masih ada sebagian masyarakat yang belum mampu keluar dari masalah kesewenang-wenangan, kemiskinan, kesengsaraan, serta kebodohan. Dibutuhkan pemimpin yang jujur, bersih, dan adil untuk merdeka secara sepenuhnya. Merdeka tak sebatas terlepas dari kekuasaan penjajah menuju kebebasan bangsa.

Kemerdekaan itu harusnya dimaknai sebagai momentum pembebasan dari kesewenang-wenangan menuju keadilan, pembebasan rakyat dari kemiskinan dan kesengsaraan menuju kesejahteraan, serta pembebasan masyarakat dari kebodohan

menuju kecerdasan. Kemerdekaan dari kesewenang-wenangan itu dapat diraih bila pemerintah benar-benar bisa melaksanakan *good and clean government* (pemerintahan yang baik dan bersih). Artinya, tiap aparat negara harus memberikan pelayanan yang adil dan jujur. Dengan begitu, diharapkan sikap tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif pula terhadap perwujudan kesejahteraan, serta kecerdasan rakyat.

Bersih, adil, dan jujur, dalam banyak hal sebenarnya hanya berada pada tataran idealisme, cita-cita, bayangan atau khayalan. Semua orang bercita-cita dan berkhayal agar sifat-sifat mulia itu bisa dilaksanakan dalam semua wilayah kehidupan. Tetapi dalam praktek, ternyata dimanapun dan kapanpun sangat sulit dilakukan. Orang seringkali mendua, membenci sesuatu tetapi sekaligus secara diam-diam juga menjalaninya. Inilah sebabnya kemudian, seolah-olah kejujuran dan keadilan hanya sebatas khayalan, cita-cita atau berada pada tataran idealisme itu.

Jujur, bersih, dan adil seharusnya bukan hanya slogan, dan memang betul dimaknai dan dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab kepada jabatannya dan amanah terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur untuk mengatasi berbagai problematika bangsa yang makin kronis, seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Pemimpin yang jujur, bijaksana, dan cerdas yang kemudian dibantu oleh figur-figur yang menguasai di bidangnya, niscaya akan mampu melakukan perubahan yang sesungguhnya ke arah kemajuan.

Kejujuran pemimpin harus ditempatkan pada posisi yang utama, baru kemudian kemampuan memimpin, kecerdasan, dan kebijakan, serta ketegasannya. Pemimpin yang jujur akan meletakkan dasar-dasar kemajuan suatu bangsa. Pemimpin yang

jujur akan seoptimal mungkin mendayagunakan kepemimpinan untuk membangun negeri ini. Dia akan semakin berhasil, apabila didukung oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Sinergi pemimpin yang jujur, cerdas, dan tegas dengan sejumlah ahli yang menopang kepemimpinnya, akan melahirkan budaya kepemimpinan yang jujur.

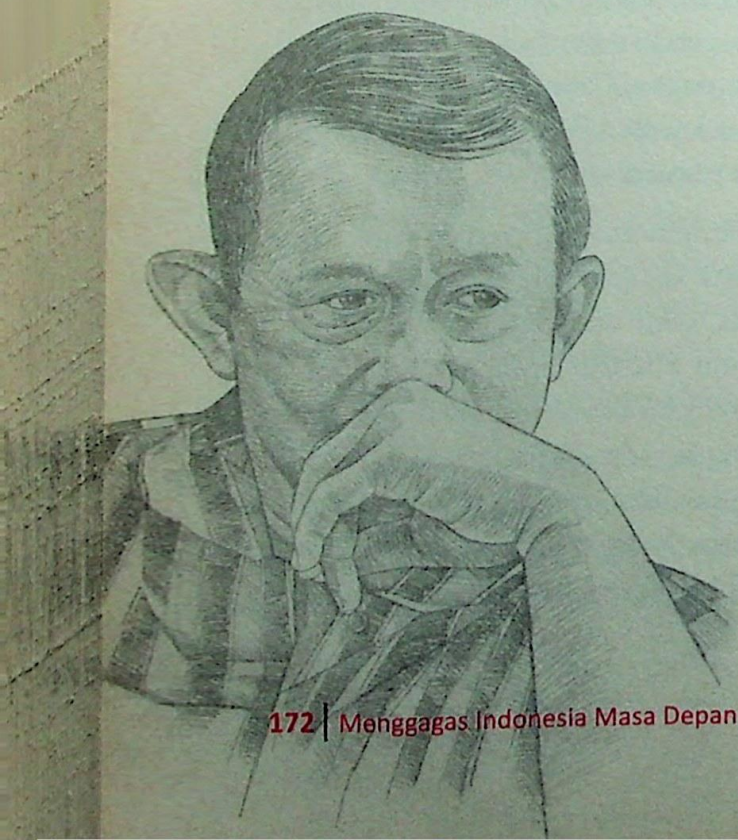
Karena itu yang diperlukan oleh Indonesia saat ini adalah tampilnya kekuatan kolektif sosial yang menampilkan kejujuran dalam memimpin negeri. Pemimpin yang jujur, juga akan mampu membendung kekuatan oligarkhi yang kini menguasai politik dan berbagai akses ekonomi. Kepemimpinan menjadi faktor penentu kemajuan sebuah bangsa. Sedangkan pemimpin yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan bangsa adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas dan bijaksana, namun juga jujur. Bangsa kita butuh pemimpin yang jujur, cerdas, dan bijaksana. Kita harus mencari pemimpin dengan kualifikasi dan bukan dengan emosi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri masih sebatas retorik dan tidak konsistennya gerakan pemberantasan tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan negara China yang sangat serius dan berkelanjutan memberantas korupsi. Bahkan negara ini tidak segan-segan menghukum mati para koruptor.

Dibutuhkan seorang pemimpin yang jujur dan sosok yang bisa memberi contoh bagaimana kejujuran itu ditegakkan lewat perbuatan dan sikapnya, maka akan ada virus kejujuran yang bakal tertular ke bawah. Namun bila dipimpin oleh pemimpin yang tidak jujur, sangat mungkin ke bawahnya akan ikut tidak jujur. Misalnya, dalam soal korupsi yang sekarang sudah menjadi penyakit berbahaya bagi negeri ini. Di negeri ini kejujuran nyaris langka ditegakkan. Banyak kasus korupsi yang justru menyeret para elit yang dipersepsikan publik sebagai pemimpin. Alhasil, tak

ada contoh baik yang bisa diteladani.

Contohnya, China menjadi naga Asia, bahkan menggeliat sebagai salah satu kekuatan dunia karena dipimpin oleh sosok yang keras, tegas, dan jujur. Sosok seperti Deng Xiaoping, atau Hu Jintao, yang keras terhadap praktik korupsi, akhirnya bisa membawa China mencapai masa keemasannya. Dengan demikian, jika kejujuran menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan negara, maka penyakit yang namanya korupsi bisa diberantas. Untuk menghadirkan kejujuran sebagai *way of life* (cara hidup), menjadi suatu kemutlakan jika rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang jujur. *****



Pemimpin Yang Kapabel dan Berkualitas

Bab 9

Djoko Santoso
for the People

"Seorang pemimpin visioner dalam prakteknya harus memiliki kapabilitas untuk mengeksekusi visi-visi yang dirancangnya.
Selama ini kecenderungan kebijakan dibuat oleh para elit politik dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demokrasi sebenarnya hanya sebuah cara yang saat ini dianggap paling fair untuk melahirkan kepemimpinan".



"Yang diikuti dari seorang pemimpin bukan hanya apa yang ia lakukan, tapi juga apa yang tidak ia lakukan." (**Nelson Mandela**, tokoh anti rasial & mantan Presiden Afsel)

PENGANTAR

Sejatinya tidak ada seorang manusiapun yang dapat melakukan semua hal. Memang ada manusia yang bisa melakukan banyak hal, tetapi apakah kita yakin jika dia melakukannya dengan sama baiknya untuk hal lain? Tidak ada salah satu hal yang dia lakukan secara lebih baik dibanding yang lainnya. Hal yang dia lakukan dengan lebih baik itu bisa saja merupakan identifikasi dari kapabilitasnya.

Kapabilitas yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan al-quwwah, merupakan kemampuan seseorang untuk menjalani atau melaksanakan hal-hal yang telah dibebankan kepadanya. Seorang pemimpin mutlak harus memiliki kapabilitas dalam bidang yang dipimpinnya. Bila seseorang yang tidak tahu menahu tentang kenegaraan diminta menjadi pemimpin negara, negara tersebut akan kacau balau. Dengan demikian, kapabel di sini bukan hanya menyangkut pengetahuan dalam arti keilmuan, namun juga menyangkut pengalaman dan pengetahuan tentang tugas-tugas yang diembannya sebagai seorang pemimpin, serta arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Sebenarnya kapabilitas bukan sesuatu yang diperoleh secara genetik, melainkan sesuatu yang dapat dipelajari, dikembangkan dan dilatih. Oleh sebab itu peningkatan kapabilitas hampir sepenuhnya tergantung pada personil yang bersangkutan. Semakin besar keinginan dan *effort* (upaya) untuk meningkatkan kapabilitas, maka akan semakin tinggi tingkat kapabilitas yang bisa dicapai. Apakah seorang pemimpin bisa meningkatkan

kemampuan leadership-nya? Tentu saja dapat. Tetapi mengapa banyak pemimpin yang kemampuan leadership-nya rendah?

Hal itu bisa jadi karena merasa punya kuasa dan merasa paling bisa. Bisa juga karena belum paham tentang ilmu *leadership,* sehingga tidak merasa butuh dan tidak juga peduli. Bisa juga seorang pemimpin diangkat karena mereka merupakan bagian dari lingkaran *owner,* dan sebagainya. Upaya terus-menerus terhadap seorang pemimpin perlu dilakukan untuk memetakan tingkat kapabilitasnya. Tentu saja upaya yang dilakukan berhubungan dengan bidang kepemimpinan mulai dari *knowledge* (kemampuan), *skill* (ketrampilan), dan *attitude* (sikap) sebagai seorang pemimpin.

Ketika *passion* (sesuatu yang menyenangkan bagi kita) dan kapabilitas telah teridentifikasi dengan jelas, dan telah dilakukan pengujian personal terhadap keduanya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengembangan terhadap kapabilitas yang ditunjang dengan *passion* yang ada, sehingga akan bisa melejitkan sebuah *personality value* (nilai kepribadian) yang dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pemimpin dengan kapabilitas dan *passion* yang mantap, akan membawanya menjadi pemimpin yang dicintai dan mampu mengkader bawahannya menjadi calon-calon pemimpin baru yang berkualitas

Seorang pemimpin yang baik tidak pernah menginginkan memiliki bawahan yang setia, dalam arti akan terus-menerus menjadi bawahannya dan *enjoy* dengan kondisi itu, akan tetapi pemimpin yang baik akan sangat senang jika memiliki bawahan yang berganti-ganti karena bawahan terdahulunya telah terkader menjadi seorang pemimpin baru. Jika ini terjadi, secara otomatis seorang pemimpin telah menunjukkan kapabilitasnya secara maksimal.

KAPABILITAS SEORANG PEMIMPIN

Seorang pemimpin haruslah orang yang kredibel (memiliki moral sebagai seorang pemimpin) dan kapabel (memiliki kemampuan untuk memimpin). Beberapa hal yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah kreativitas, sensitivitas, visi, dan kesabaran. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menghasilkan pemimpin pada generasi berikutnya, bukan pengikut. Karena situasi yang dihadapi berikutnya belum tentu sama dengan situasi saat ini. Seorang pemimpin yang kredibel dan kapabel juga tidak boleh hanya berorientasi jangka pendek, ia harus berpikir jangka panjang, memikirkan bagaimana kondisi rakyat untuk puluhan tahun mendatang.

Jika akseptabilitas menyangkut keabsahan seorang sebagai pemimpin, maka kapabilitas menyangkut kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin tidak hanya cukup karena ada yang menghendaki menjadi pemimpin dan kemudian memilihnya sebagai pemimpin, tetapi harus dilengkapi dengan dengan kemampuan yang memadai untuk mengelola berbagai sumber daya dari orang-orang yang dipimpinnya, agar tidak sampai terjadi konflik satu sama lain. Kalaupun nantinya muncul konflik, maka pemimpin itu harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengelola konflik tersebut. Bukan hanya agar konflik mereda dan tidak meluas menjadi konflik fisik, tetapi juga agar dari pengelolaan konflik itu lahir sebuah konsensus yang disepakati bersama.

Seorang pemimpin visioner dalam prakteknya harus memiliki kapabilitas untuk mengeksekusi visi-visi yang dirancangnya. Kapabilitas tersebut dapat berupa kapabilitas intelektual, pemimpin bersangkutan idealnya cerdas, berpengetahuan luas, dan berpikiran terbuka *(open minded)*.

Selain kapabilitas intelektual, seorang pemimpin harus memiliki kapabilitas manajerial, yaitu kemampuan untuk mendelegasikan tugas dan wewenang kepada para staff di dalam struktur kerja secara proporsional dan menyeluruh.

DUKUNGAN KAPABILITAS SISTEM POLITIK

Untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kapabilitas, perlu adanya dukungan dari sistem politik yang kapabel. Sebab dengan sistem politik yang baik dan kapabel, akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan kapabel.

Kapabilitas sistem politik dapat diartikan sebagai kemampuan sistem politik yang dapat digunakan untuk mematangkan pembangunan politik di suatu negara. Kapabilitas sistem politik mencakup 6 bidang, yakni:

Pertama, ekstraktif, yaitu kemampuan pemerintah untuk melakukan pengolahan terhadap SDA dan SDM di lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Gabriel Almond mengemukakan bahwa kapabilitas ekstraktif, yaitu kemampuan mengumpulkan dan mengelola sumber daya alam, serta sumber daya manusia dari lingkungan dalam negeri dan internasional.

Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah, seperti bagaimana pemerintah mengelola pertambangan berhadapan dengan modal domestik maupun asing, dan kepentingan kemakmuran rakyat di sisi yang lain. Sementara kemampuan pengelolaan SDM akan berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan, peningkatan sumber daya, pengalokasian SDM, dan lain-lain. Tentu saja, pada akhirnya kedua dimensi kemampuan

pengelolaan potensi SDA dan SDM harus dipadukan ke dalam satu tujuan, yakni kemaslahatan bangsa dimana sistem politik itu bekerja.

Dalam konteks kekinian, kemampuan ekstraktif, sistem politik dalam hal pengelolaan sumber-sumber material belum mampu mengolah sumber daya alam untuk menyejahterakan rakyatnya, meskipun eksplorasi bahkan eksploitasi terjadi dimana-mana, tetapi masyarakat tetap saja bergumul dengan kemelaratan dan kemiskinan. Dalam kemampuan ekstraktif ini juga memiliki fungsi untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Namun masih banyak tenaga kerja handal yang belum dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena proses rekruitmen politik yang tidak profesional, bahkan emosional.

Kedua, regulatif, yaitu kemampuan pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang dapat mengontrol dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok, agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Gabriel Almond beranggapan, bahwa kapabilitas regulatif sama dengan pengaturan yang merujuk kepada aliran kontrol atas perilaku individu dan relasi-relasi kelompok di dalam sistem politik. Dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok, maka dibutuhkan adanya pengaturan, dimana negara memainkan peranan penting di dalam mengatur dan menjamin hak-hak individu dan kelompok.

Hal itu dapat ditunjukkan pada kemampuan regulatif untuk mengatasi masalah kritis yang terjadi di negara ini. Regulasi sesungguhnya hadir sebagai pengontrol dan pengendali tingkah laku dalam berjalannya sistem politik. Menjadi ironi ketika para pembuat regulasi justru melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, bahkan cenderung "membentengi" diri lewat peraturan

yang dibuatnya. Telah banyak peristiwa besar yang terjadi di negara kita saat ini, seperti DPR yang merupakan pembuat undang-undang, justru mereka sendiri yang banyak melanggarnya. Selain itu, maraknya kasus mafia hukum yang notabene dilakukan penegak hukum itu sendiri.

Ketiga, distributif merupakan kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan SDA dan SDM, berupa barang dan jasa yang dimiliki oleh masyarakat dan negara secara merata. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas distributif merujuk kepada kemampuan melakukan alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi, penghargaan, status, dan kesempatan untuk semua lapisan masyarakat. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, dalam rangka penciptaan keadilan sosial. Pada saat yang sama distribusi sumber-sumber penghidupan dan pekerjaan, serta mobilitas sosial juga penting diperlihatkan oleh kapabilitas distributif ini. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara, itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sistem dan struktur perpajakan dengan demikian akan memengaruhi corak kenegaraan, apakah bisa dikatakan lebih adil atau kurang adil, lebih mampu menjalankan kapabilitas distributif atau malah gagal.

Secara konkret kemampuan distributif berkaitan dengan alokasi barang dan jasa, kemampuan sistem politik dalam mendistribusikan barang dan jasa belum maksimal, karena masih banyak kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat di pedesaan. Banyak kita temui ketidakmerataan distribusi barang dan jasa bagi daerah yang mudah dijangkau dan yang tidak terjangkau. Contoh kecilnya, ketersediaan gedung sekolah dan kesehatan bagi masyarakat, serta tenaga pengajar dan medis.

Selain itu, berkaitan dengan alokasi kehormatan, status dan kesempatan, aktor-aktor politik di Indonesia belum bersedia mengalokasikan kehormatannya kepada pihak lain, sehingga yang terjadi hanya oligarkhi kekuasaan, yang juga ditengarai adanya sistem dinasti dalam kancah politik. Kesempatan kerja juga masih minim diciptakan oleh sistem politik, sehingga menimbulkan banyak pengangguran.

Keempat, simbolik, merupakan kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas simbolik berarti kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sebuah sistem politik.

Secara nyata, sistem politik di Indonesia saat ini tidak melahirkan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, karismatik, dan religius. Seperti kita ketahui sosok pemimpin seperti Ir. Soekarno yang karismatik dan Gus Dur sebagai tokoh agama. Tepuk tangan yang diberikan kepada pidato seorang tokoh politik merupakan dukungan moral dan tanda penghormatan atas dirinya sebagai pemimpin. Namun sekarang yang kita lihat tidak lagi terdapat pemimpin yang memiliki simbol tertentu, sehingga hanya melahirkan kepala pemerintahan yang memimpin dengan sistem kerja struktural belaka.

Kelima, responsif, merupakan kemampuan daya tanggap yang diciptakan oleh pemerintah terhadap tuntutan atau tekanan. Gabriel Almond berpendapat tentang kapabilitas responsif, bahwa dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output. Output berupa kebijakan pemerintah dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dipengaruhi oleh masukan atau adanya

partisipasi masyarakat (sebagai inputnya). Disini agak sedikit berbeda dengan kapabilitas simbolik, yang paling pokok bukanlah didapatkannya benang merah antara kebijakan dengan tuntutan/ aspirasi masyarakat, tetapi lebih kepada bagaimana proses pembuatan kebijakan itu sendiri, yakni pelembagaan mekanisme agregasi dan artikulasi politik kepentingan masyarakat ke dalam sebuah kebijakan politik. Jadi bukan sekedar melihat apakah output kebijakan paralel dengan aspirasi/tuntutan masyarakat (kemampuan menangkap wacana aspirasi), tetapi apakah di dalam sistem politik tersebut telah terlembagakan suatu mekanisme dimana rakyat dapat lebih mudah dan lebih mungkin, untuk terlibat di dalam tahapan-tahapan pembuatan kebijakan.

Mengenai responsivitas, sistem politik kurang mengakomodasi segala kepentingan masyarakat di lingkungan sistem politik itu sendiri karena selama ini kecenderungan kebijakan dibuat oleh para elite politik, dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tuntutan masyarakatpun kurang direspon dengan baik, meskipun ditekan dengan berbagai aksi demonstrasi.

Keenam, domestik dan internasional, merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah, dalam hal bagaimana ia berinteraksi di lingkungan domestik maupun luar negeri. Kemampuan domestik sistem politik masih lemah, sehingga relasi antara pemerintah dan masyarakat kurang harmonis. Hal ini tergambar dari berbagai aksi ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah selama ini. Mengenai kemampuan internasional, sistem politik Indonesia sangat terbuka terhadap kebijakan internasional dan membentuk relasi yang baik dengan dunia internasional. Namun menjadi ironi ketika sistem politik Indonesia yang memberikan kebebasan pada dunia internasional untuk berinvestasi, justru mengorbankan masyarakatnya sendiri. Contoh riil yang terjadi saat ini, adanya

perjanjian perdagangan bebas yang justru mematikan industri lokal. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa, kemampuan sistem politik dalam mengelola potensi yang ada kurang maksimal. Akibatnya, Indonesia masih terus bergumul dengan permasalahan klasik yang urung diselesaikan.

PEMIMPIN BERKUALITAS

Setelah reformasi, bangsa Indonesia terlihat semakin demokratis. Namun muncul pertanyaan, apakah dengan semakin demokratisnya Indonesia juga semakin berkualitas hasil demokrasinya? Pertanyaan ini muncul karena kita sering dihadapkan pada realitas proses demokrasi yang ternyata tidak selalu melahirkan kepemimpinan yang baik dan memuaskan rakyat.

Saat ini Indonesia memiliki dua persoalan mendasar, yaitu minimnya calon pemimpin yang berkualitas dan kurangnya kekritisan pemilih. Dengan demikian saat ini Indonesia justru sedang menghadapi tantangan besar, apakah demokrasi dapat membawa bangsa ini pada kemajuan dan kejayaan, ataukah sebaliknya justru menjerumuskan pada pertikaian dan keterpurukan. Demokrasi sebenarnya hanya sebuah cara yang saat ini dianggap paling *fair* untuk melahirkan kepemimpinan.

Situasi yang terjadi saat ini, demokrasi di Indonesia justru masih hanya sekedar sebuah prosedur. Sementara dari segi kualitas masih belum terlalu menjanjikan. Kepemimpinan yang dilahirkan proses demokrasinya masih belum berkualitas dan tidak menjamin lahirnya kepemimpinan ideal. Namun demikian, bukan berarti proses demokrasi harus dihentikan. Kita tidak boleh putus asa untuk mencobanya dengan penuh kesabaran, sebab kualitas demokrasi akan sangat ditentukan oleh seberapa besar

kedewasaan masyarakat yang terlibat.

Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia wajib mengawal demokrasi agar semakin dewasa dan berkualitas. Ada dua referensi yang dapat selalu dijadikan rujukan dalam melihat motivasi kepemimpinan. *Pertama*, model Abu Dzar Al-Ghifari yang oleh Rasulullah SAW ditolak ketika meminta jabatan, karena Rasulullah tahu bahwa Abu Dzar tidak akan mampu mengemban amanah itu. *Kedua*, model Nabi Yusuf AS yang menawarkan diri untuk menjadi bendaharawan negeri Mesir, karena menyadari kemampuan dirinya untuk menyelamatkan Mesir dari paceklik panjang dan kebangkrutan (krisis multidimensi).

Dari sini jelaslah, motivasi kepemimpinan harus selalu dikembangkan atas dasar "sikap bisa merasa", bukan "sekedar merasa bisa". Oleh karena itu siapa saja anak bangsa yang ingin tampil dalam kepemimpinan nasional, di manapun dan apapun levelnya, harus menyadari bahwa memimpin adalah untuk berkhidmat demi kepentingan rakyat, sebab kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Dua referensi inilah yang menunjukkan bahwa dengan cara yang demokratis, juga harus menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

MODEL PEMIMPIN BERKUALITAS

Seorang pemimpin yang berkualitas dapat kita contohkan dari perjuangan pemimpin anti apartheid yang sekaligus Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Kisah Mandela merupakan sebuah kisah perjuangan melawan apartheid. Hampir 27 tahun ia dipenjara di Robben Island. Mandela, seorang aktivis gerakan demonstrasi yang menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan

Sebelum terbit fajar demokrasi itu, Mandela hidup dalam dua jenis kegelapan, yaitu main kucing-kucingan dengan aparat di alam gerakan bawah tanah dan pengapnya penjara Robben Island. "Saya menjadi makhluk malam," tulis Mandela dalam otobiografinya *Long Walk to Freedom*, yang mengisahkan tentang masa pelariannya.

Pada akhirnya perjuangannya mencapai hasil ketika dalam pidato di parlemen tahun 1990 Presiden De Klerk mengumumkan reformasi, serta berakhirnya pengasingan para aktivis. Nelson Mandela dibebaskan 11 Februari 1990 dalam usia 74 tahun, setelah ditahan 27 tahun. Ia berhasil melalui masa penahanan tersebut karena tidak ragu akan misinya. Ia lalu menerima Nobel Perdamaian bersama dengan De Klerk. Tahun 1994 berlangsung pemilu yang bebas dan adil untuk pertama kalinya di Afrika Selatan. Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama. Pemerintahnya mengakhiri sistem apartheid dan merintis rekonsiliasi nasional.

Perjuangan mantan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Nelson Mandela menjadi insipirasi banyak tokoh dunia. Setidaknya ada delapan pelajaran yang dapat dipetik dari perjuangan Mandela. *Pertama, Courage is not the absence of fear, it's inspiring others to move beyond it*. Mandela sering merasa gentar, tapi menurutnya itu wajar dialami seorang pemimpin. Akan tetapi, ia tidak ingin menunjukkan rasa takut itu di hadapan orang lain. Keberanian yang ia tampilkan, meski kadang hanya pura-pura, mampu menenangkan kekhawatiran dan menyemangati orang di saat-saat sulit.

Kedua, lead from the front, but don't leave your base behind. Ketika Mandela memutuskan untuk memulai dialog dengan pemerintah apartheid, teman-temannya mengira ia sudah

"menjual diri". Padahal Mandela dengan sabar membujuk mereka pelan-pelan.

Ketiga, lead from the back, and let others believe they are in front. Tugas seorang pemimpin bukan untuk menyuruh-nyuruh orang lain, tapi untuk menciptakan sebuah kesepakatan. Dalam rapat-rapat, Mandela biasanya mendengarkan pendapat teman-temannya terlebih dahulu. Ketika tiba giliran, ia akan merangkum semua pendapat itu, baru mengutarakan pendapatnya sendiri, dan pelan-pelan mengarahkan hasil diskusi tanpa nada memaksa atau memerintah.

Keempat, know your enemy, and learn about his favorite sport. Di awal perjuangannya, Mandela bersikeras belajar bahasa Afrikaan, bahasa orang kulit putih Afrika Selatan, *dus* sejarah kolonialisasi mereka. Ia bahkan berusaha mendalami rugby, olahraga favorit mereka. Walhasil ia dihormati lawan, mulai dari sipir penjara, hingga P.W. Botha (Presiden kulit putih Afsel di masa apartheid). Dialog dengan mereka juga menjadi lancar.

Kelima, keep your friends close, and your rivals even closer. Orang-orang dekat Mandela tak selalu orang yang ia sukai. Tak jarang mereka justru rival, atau orang-orang yang digosipkan berusaha menggulingkannya. Tapi Mandela percaya, dekat dengan rival adalah satu cara untuk mengendalikan mereka.

Keenam, appearances matter, and remember to smile. Mandela percaya, apa yang tampak di luar sama pentingnya dengan apa yang ada di dalam diri. Karenanya ia benar-benar menggunakan penampilan fisik untuk membantu perjuangannya.

Ketujuh, nothing is black or white. Meski Mandela jelas-jelas menentang apartheid, ia juga sadar bahwa apartheid memiliki penyebab historis, sosiologis, dan psikologis yang kompleks, karena

itu ia tak pernah terpaku pada satu jalan untuk memecahkan masalah. Ia adalah politikus yang pragmatis. Ia tak akan segan-segan mengubah ideologi atau taktik, seperti menghentikan perjuangan bersenjata, jika memang itu cara paling praktis untuk mencapai tujuan akhir.

Kedelapan, *quitting is leading too*. Berhenti menjabat bukan berarti berhenti memimpin. Jasa-jasa Mandela cukup signifikan untuk membuatnya menjadi presiden seumur hidup. Namun dengan sukarela ia tak ingin dipilih lagi. Baginya, yang diikuti dari seorang pemimpin bukan hanya apa yang ia lakukan, tapi juga apa yang tidak ia lakukan.

MENCARI PEMIMPIN BERKUALITAS

Untuk mendapatkan pemimpin berkualitas, harus ada gerakan bersama untuk mencari sosok pemimpin berkualitas berdasar kriteria yang jelas. Momentum ini harus digunakan civitas akademika dan lembaga-lembaga sosial untuk membuat gerakan bersama menyadarkan masyarakat, agar mereka memilih calon pemimpin berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Ada tiga indikator untuk menakar kualitas seorang calon pemimpin. *Pertama*, memiliki integritas seperti jujur dan bisa dipercaya. *Kedua*, mampu memimpin, dan *ketiga*, mau berdiri di atas semua golongan. Untuk sampai pada tiga indikator itu, lembaga-lembaga survei sebaiknya memandu para pemilih. Meski calon pimpinan populer, yang bersangkutan belum tentu berkualitas. Sebaliknya, calon yang berkualitas juga belum tentu terpilih apabila tidak populer. Semua calon pemimpin harus memenuhi dua kriteria, yaitu populer dan berkualitas.*****

PERPUSTAKAAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN ASET NEGARA

Pemimpin Yang Kuat dan Berani

Bab 10

Djoko Santoso
for the People

"Rakyat membutuhkan kualitas perbuatan nyata. Pimpinan nasional, memang harus didorong untuk melakukan tindakan tegas, cepat, tepat, terukur, tanpa meninggalkan aturan perundang-undangan".



"Sebuah negara seperti Indonesia, perlu pemimpin yang kuat. Kalau pemimpin lemah, dia akan ditarik ke arah berbeda dan tidak akan menjadi pemimpin berkesan." (**Tun Mahathir Bin Mohamad,** Mantan Perdana Menteri Malaysia)

PENGANTAR

Indonesia kini dan ke depan memerlukan pemimpin dan kepemimpinan yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang paling rendah resistensinya dalam masyarakat. Pemimpin yang kuat berarti juga memiliki konsistensi, yaitu satya wacana: satunya kata dengan perbuatan, tegas, dan tidak ambivalen sebagai wujud kontrak sosial (*social contract*) dengan rakyat.

Gagasan tentang kontrak sosial pertama kali dikemukakan oleh Plato, seorang filsuf Yunani, lebih 25 abad yang lalu dalam tulisannya *"Republic"*. Konsep ini kemudian didukung oleh para filsuf seperti J.J. Rousseau dan Thomas Hobbes, wujudnya berupa kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat. Ide kontrak sosial itu berdasarkan premis, bahwa kekuasaan sesungguhnya terletak di tangan rakyat.

Sejarah mencatat bahwa Daud bukan saja nabi, tetapi juga penguasa kerajaan. Tuhan mengisyaratkan, Daud bukan hanya dipilih oleh-Nya, tetapi juga diangkat oleh masyarakat. Jikalau saja kita bisa menemukan seorang pemimpin kuat yang akan memimpin bangsa dan negara ini, niscaya ia akan menjadi orang besar setelah krisis mampu diatasinya. Jenis orang kuat ini harus sejalan dengan impian masyarakat Indonesia sekarang. Kita tidak bisa meniru orang kuat bangsa-bangsa lain. Orang kuat itu kontekstual. Orang kuat kita di masa lampau, belum tentu cocok dengan konteks kebutuhan sekarang. Orang kuat yang kita cari

kini, belum tentu akan menjadi kuat sepuluh atau dua puluh tahun mendatang. Apalagi menjiplak orang kuat dalam sejarah bangsa-bangsa lain, karena mereka memiliki orang kuatnya masing-masing. Setiap zaman melahirkan dan membutuhkan orang kuatnya sendiri.

Sesungguhnya rakyat menginginkan pemimpin yang tegas, berani karena benar, benar karena menurut hukum, dan berani tidak populer demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Para pemimpin ini berdiri tegak di depan dengan panji-panjinya dan di belakang ada ribuan massa pendukungnya.

Tokoh pemimpin yang bisa diterima oleh seluruh golongan dan masyarakat bangsa adalah tokoh yang tidak memiliki massa golongan. Massanya adalah seluruh rakyat. Tokoh semacam itu barangkali memang berasal dari suatu golongan massa, tetapi memiliki kualitas di luar massa golongannya. Tokoh ini tidak berbendera, dan dengan demikian justru mewakili semua bendera, karena semua bendera yang ada bisa dikibarkannya. Ia tidak memiliki kepentingan kelompok, dan karenanya ia memenuhi semua kepentingan kelompok. Tokoh yang mungkin bisa dipercaya adalah tokoh yang kepentingannya tidak-berkepentingan, yang massanya tidak bermassa, yang suaranya bukan suara sekarang ini.

Bila kualitas pemimpin yang demikian itu terpilih menjadi orang kuat, maka kebesarannya akan diuji. Kualitas pemimpin yang demikian itu akan ada di tengah-tengah dualisme yang plural ini. Ia akan "terjepit" antara yang kanan dan kiri, antara mayoritas dan minoritas, antara yang keras dan yang lunak. Kreativitas dan kepekaannya diuji. Di saat-saat inilah keberanian dan ketegasannya terhadap kebenaran mendapatkan tantangan.

NEGARA YANG KUAT

Kerinduan hadirnya negara yang kuat bukanlah negara otoriter dan totaliter, tetapi sebuah negara yang efektif dalam menjalankan pemerintahannya, mempunyai legitimasi yang kuat dan akuntabel, agar demokrasi bisa ditegakkan dan berkembang baik. Termasuk konsolidasi negara adalah konsolidasi sistem dan kelembagaan hukum yang memungkinkan negara berjalan berdasarkan *rule of law*. Penegakan hukum harus didukung lembaga penegak hukum yang kredibel, akuntabel, dan profesional pula, tidak tercemar oleh tindak suap-menyuap yang marak akhir-akhir ini, yang menunjukkan mafia pengadilan itu benar-benar ada.

Kerinduan hadirnya negara yang kuat memang terasa menggelisahkan, karena masyarakat baru saja berhenti sejenak, setelah menumbangkan rezim otoriter. Memang akan ada dilema besar ketika kita ingin mendambakan sebuah otoritas pemerintahan yang *legitimate*, padahal yang kita hadapi adalah sebuah birokrasi pemerintahan yang korup.

Sebuah negara yang kuat, dibutuhkan untuk mengawal proses konsolidasi demokrasi. Namun, ide negara kuat bukan berarti *civil society* harus lemah. *Civil society* yang kuat akan mampu menjalankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah agar otoritas negara tidak memasuki domain *society* secara berlebihan, serta mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen negara.

Kebebasan pers dan bangkitnya *civil society* dengan segala persoalannya harus dimanfaatkan untuk melakukan penyadaran tentang apa arti hidup berbangsa dan bernegara, yang bertolak dari pemikiran demokratis yang otentik. Rakyat harus cerdas

memilih sosok pemimpin yang betul-betul memiliki komitmen untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

KEPEMIMPINAN YANG KUAT

Banyak berkesempatan memandang Indonesia dari bawah dengan seksama. Melalui cara ini, kita memperhatikan keadaan Indonesia yang selalu dirundung berbagai masalah. Salah satu yang paling disoroti adalah pergulatan Indonesia sebagai negara produsen dan konsumen di tengah globalisasi yang penuh kompetisi.

Mengatasi berbagai kompleksitas yang merundung Indonesia, diperlukan penanaman rasa kebanggaan, kepercayaan diri, serta harga diri kepada generasi bangsa. Kebanggaan atas diri bukan dimaknai sebagai eksistensi buta yang lantas menerima paham *chauvinisme* dengan menganggap diri superior, tapi lebih pada keyakinan diri untuk eksis, sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Bila mental seperti ini telah dimiliki, langkah awal untuk merenda Indonesia yang mandiri tinggal dilanjutkan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan perencanaan terukur, serta komitmen yang tinggi.

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat dalam *Als Ik eens Nederlander was* (*Jika Aku Seorang Belanda*) menyatakan, jika proses emansipasi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, maka sudah bisa dipikirkan kemungkinan bahwa rakyat itu yang kini masih terjajah, pada suatu saat nanti akan melampaui tuannya.

Pernyataan tersebut menggambarkan kesulitan seorang Indonesia yang berkeinginan menegaskan eksistensinya di zaman Hindia Belanda. Soewardi mengandaikan diri sebagai seorang

Belanda agar sejajar dengan penguasa ketika menyampaikan pemikiran tentang kemerdekaan. Kalau ia menempatkan diri sebagai *inlander*, bicara seperti itu sangat berbahaya. Dengan mengandaikan diri sebagai seorang Belanda, tentunya ia akan bisa memberikan suatu rangsangan atau *impuls* tertentu kepada si penjajah bahwa begitulah keadaannya. Pernyataan Soewardi menyiratkan keberanian untuk sejajar dengan penguasa, meskipun rakyat Indonesia berstatus terjajah.

Untuk melepaskan diri dari status terjajah dan menegaskan eksistensi di zaman merdeka, rakyat Indonesia membutuhkan kebanggaan sebagai bangsa, harga diri, dan martabat. Akan kesulitan menata kembali republik, yang entah berbentuk apa saat ini, jika kita tidak mempercayai diri sendiri. Keyakinan untuk melepaskan diri dan menegaskan eksistensi, merupakan langkah awal untuk mewujudkan kemandirian Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Dari sana akan bergulir suatu semangat yang luar biasa agar terbebas dari kesulitan.

Sekarang pemimpin bangsa menghadapi keadaan yang bagaimana? Kriteria pemimpin bangsa mendatang seperti apa? Perkembangan global dan nasional dewasa ini menuntut kepemimpinan yang kuat, bukan perorangan, melainkan kekuatan berlegitimasi konstitusi untuk menata kembali pembangunan hukum, demokrasi, dan ekonomi. Pemimpin Indonesia nanti harus melampaui ujian-ujian.

Ujian-ujian yang dimaksud adalah perkembangan global yang menunjukkan kecenderungan semakin melemahkan Indonesia sebagai bangsa. Tanda-tandanya :

Pertama, negara berpenduduk terbesar nomor empat di

dunia ini merupakan pasar yang sangat potensial, jika menjadi konsumen yang makin tergantung negara-negara produsen. Terjadi pergulatan antara negara konsumen dan negara produsen. Kalau kita menjadi negara produsen, kita menang. Kalau kita menjadi negara konsumen, kita kalah.

Persaingan global, walaupun secara formal ditandai dengan kerjasama bilateral dan multilateral terutama di bidang ekonomi, esensinya secara nonformal adalah pertandingan yang sangat ketat bahkan saling menekan dan menjatuhkan. Secara kondrati pun, akan terjadi perebutan pasar antarnegara yang lebih kuat terhadap negara-negara yang lebih lemah. Kita sekarang sedang dibanjiri produk-produk asing yang tak terbendung.

Kedua, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dengan jumlah terbesar di dunia juga dipecah belah. Apabila pemeluk Islam bersatu, akan sangat sulit dikendalikan kekuatan adidaya. Saat ini belum terbentuk persatuan yang solid, menjadikan negeri kita belum mampu membuat kesepakatan kolektif bangsa, termasuk pemahaman yang sama menyikapi masalah demokrasi.

Ketiga, keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar di antara dua samudera dan dua benua merupakan faktor penentu dalam konteks geo politik dan geo ekonomi. Kalau kita mandiri, geo politik dan geo ekonomi dimanfaatkan, kita akan menjadi negara yang diperhitungkan.

Keempat, sumber daya alam Indonesia yang kaya raya masih dikuasai dan dikuras perusahaan asing dengan kepemilikan saham hingga 100% sebelum kita memproteksinya. Beroperasinya perusahaan asing di Indonesia seperti Freeport Mc. Moran (FM), Newmont, ExxonMobil Corporation, dan British Petroleum Company mengisyaratkan pembenaran hipotesis tersebut.

Kita telah melibatkan mereka mengambil kekayaan kita untuk keuntungan mereka.

Belum lagi perkembangan nasional dengan seabrek persoalan sebagai ujian-ujian, di samping ujian-ujian perkembangan global. Demokrasi yang dipraktekkan menjauh dari nilai-nilai asli masih sebatas prosedural, belum substansial. Bahkan saat ini kita merasakan bahwa demokrasi sudah menjadi komoditas. Di mana-mana euforia kebebasan tanpa mengindahkan konstitusi. Hasilnya, *chaos* menjadi rutinitas di negeri yang dulu sangat menjujung toleransi.

Ketimpangan ekonomi juga sangat kental mewarnai perjalanan sejarah. Bahkan berkelindan dengan kekuasaan yang menghasilkan oligarkhi untuk memperalat rakyat dan penguasa, demi kepentingan individu dan kelompok.

Masalah-masalah yang dihadapi Indonesia itu tidak dengan sendirinya terpecahkan jika pemimpin yang terpilih hanya asal-asalan. Oleh karena itu diperlukan persiapan memasuki proses kepemimpinan yang kuat bukan saja perorangan namun berlegitimasi konstitusi, untuk menata kembali pembangunan hukum, demokrasi, dan ekonomi, yang berarti bagaimana sang pemimpin seperti dirigen mengharmoniskan irama.

Transformasi yang dialami dalam beberapa tahun ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar. Proses demokrasi itu sudah sampai kepada *point of no return* atau tidak bisa kembali lagi ke masa dulu. Akan tetapi demokrasi yang bagaimana yang harus kita bangun? *The workable democracy*, demokrasi yang bisa bekerja.

Caranya, memunculkan satu kekuatan politik besar yang mampu mengungguli kekuatan politik lainnya sebagai *the single*

majority. Kekuatan tersebut selain unggul dalam suara, berarti kuat dalam bargaining, serta menguasai pemerintahan dalam jangka waktu cukup lama.

Namun harus disadari, kiranya amat sulit memunculkan segera suatu kekuatan politik besar beranjak dari konfigurasi perpolitikan dewasa ini. Kalaupun bukan mayoritas tunggal, menggabungkan beberapa kekuatan politik yang memiliki kesamaan *platform* perjuangan, dapat dimunculkan untuk menciptakan mayoritas koalisi.

KEPEMIMPINAN KUAT BUKAN OTORITER

Rakyat memimpikan pemimpin yang tegas, berani mengambil kebijakan yang membahayakan popularitasnya, tapi membawa kebaikan untuk seluruh rakyat. Kita memerlukan tokoh kuat, tegas, dan berani ambil keputusan. Pemimpin bukan orang yang cari aman, itu hakikat pemimpin.

Oleh karena itu, tidak tepat jika tokoh yang dipersepsikan publik sebagai *strongman* potensial membahayakan kehidupan demokrasi, yang sedang dibangun bangsa Indonesia. Kemudian muncul persepsi, *strongman* bisa menindas rakyat dengan dalih untuk kepentingan nasional, karena itu kalangan ini lebih menganjurkan memperkuat sistem dan institusi demokrasi daripada memimpikan pemimpin yang kuat. Dengan sistem dan institusi yang kuat, maka demokrasi akan terjaga dengan baik.

Hal itu bisa dikatakan benar dan juga ada tidak benarnya. Pemimpin yang kuat yang dibutuhkan dalam konteks Republik Indonesia kekinian adalah dia yang berani pertaruhkan segalanya untuk kepentingan publik, bukan tokoh yang hanya memikirkan popularitas. Untuk itu tidak mungkin tokoh yang dimaksud

lemah.

Karakter kepemimpinan yang kuat harus tegas dipisahkan dari sifat kepemimpinan otoriter. Dalam psikologi politik, kepribadian yang otoriter bisa diakibatkan oleh gangguan kejiwaan yang membuat seseorang itu tidak mau dikritik atau anti demokrasi. Karena itu tidak bisa disamakan kepemimpinan yang kuat dengan kepemimpinan yang otoriter. Kita perlu pemimpin tegas, kuat, dan berani ambil risiko demi rakyat, tapi tidak untuk yang otoriter.

PEMIMPIN YANG ASKETIS DAN BERANI

Menyikapi berbagai permasalahan bangsa akhir-akhir ini, kita semua perlu berpikir jernih. Carut marutnya masalah penegakan hukum, terganggunya kerukunan antarumat beragama, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai masalah mendasar lainnya, telah menimbulkan riak-riak kecil di masyarakat, karena faktor ketidakpuasan atas pemerintahan yang ada. Ketidakpuasan juga ditujukan kepada lembaga wakil rakyat dan lembaga penegak hukum. Pada situasi politik yang kurang kondusif inilah, kita perlu membangun sinergi dan kerjasama dengan semua komponen bangsa, dalam rangka memperoleh pemahaman yang sama untuk mengatasi persoalan bangsa.

Kegundahan hati kelompok-kelompok masyarakat dalam melihat perjalanan bangsa dan kepemimpinan nasional, tidak harus disikapi dengan ajakan melakukan perubahan melalui revolusi, sebagaimana yang telah dideklarasikan oleh sementara tokoh. Usulan ini bertentangan dengan demokrasi yang sedang kita kembangkan. Dinamika politik yang terjadi, tidak perlu gaduh, agar kita tidak kehilangan momentum dalam rangka percepatan mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil,

sejahtera, dan aman dengan tetap menegakkan hak asasi manusia.

Ketidakpuasan terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga peradilan, perlu direspon dengan baik, agar tidak memunculkan sikap "saling menyandera", yang hanya didorong oleh keinginan berkuasa tanpa melalui etika dan kesantunan politik.

Pimpinan nasional memang harus didorong untuk melakukan tindakan tegas, cepat, tepat, terukur, tanpa meninggalkan aturan perundang-undangan. Pra kondisinya perlu peningkatan kinerja melalui penguatan kelembagaan dan mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu ke depan, perlu dicari pemimpin-pemimpin terpilih untuk lembaga legistalif maupun eksekutif yang berkarakter dan memiliki beberapa kriteria. Dalam kaitan ini, perlu mencari pemimpin yang memiliki sifat asketis dan berani.

Istilah asketis sepadan dengan istilah *zuhud* dalam khasanah sufisme atau tasawuf. Asketis berarti sikap sederhana, bersahaja, jauh dari sikap hidup berfoya-foya. Menurut istilah, asketisme berarti sebuah paham atau sikap mental yang mencerminkan kesederhanaan, kejujuran, dan rela berkorban. Jika diletakkan dalam konteks kehidupan bernegara, asketisme berarti cerminan dari seorang negarawan yang sederhana, jujur, dan rela berkorban bagi bangsa dan negaranya. Dalam makna yang sempit, pemimpin asketis adalah pemimpin yang senantiasa menguatkan jiwanya dalam melawan tarikan kecintaan kepada dunia yang melebihi batas. Sementara, dalam makna yang lebih luas, pemimpin asketis selalu menempatkan hak dan kewajiban rakyatnya secara proporsional.

Karakter asketis menjadi bagian penting yang harus dimiliki

oleh seorang pemimpin, sebab pemimpin adalah petunjuk bagi para rakyatnya, kompas dalam sebuah negara. Pemimpin seperti inilah yang sangat didambakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu pemimpin yang berkarakter kuat, cerdas, disiplin, tegas, terbuka, dan jujur. Bangsa Indonesia memiliki banyak calon pemimpin yang berkarakter kuat. Hanya saja kadangkala karakter yang seharusnya dimiliki menjadi lenyap, manakala dihadapkan pada karakter kehidupan duniawi, bilamana kedudukan dan kekuasaan menjadi tujuan utama. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang kehilangan petunjuk Allah sehingga tidak sabar dengan kedudukan dan kekuasaan duniawi. Di samping itu, dari karakter pemimpin yang harus dimiliki oleh bangsa ini adalah berani. Berani karena memiliki dasar keyakinan dan kebenaran yang kokoh. Pemimpin pemberani pasti mempunyai ketegasan sikap, keputusan, dan tindakan yang dilandasi oleh suara hati nurani, serta pemahaman yang mantap terhadap berbagai persoalan. Keberanian boleh dikata adalah sebuah ketenangan hati untuk menampilkan ketegasan sikap, dalam menghadapi sebuah kondisi, kapanpun dan di manapun, dan dalam skala apapun. Sifat ini hanya dimiliki oleh orang yang kuat iman, ilmu, dan amal.

Setidaknya, ada beberapa kategori keberanian yang harus dimiliki seorang pemimpin.

Pertama, menegakkan *amar makruf nahi mungkar*. Pemimpin harus berani menginstruksikan kebaikan, memimpin langsung pencegahan kemungkaran dan penghentian kemaksiatan, termasuk korupsi.

Kedua, mengambil kebijakan dan menegakkan keadilan. Keberanian ini mengharuskan pemimpin tidak boleh bersikap ragu, tetapi harus tegas, dan cerdas dalam mengambil kebijakan yang pro pada kemaslahatan masyarakat dan bangsa.

Ketiga, belajar dan mengembangkan ilmu. Keberanian ini sangat penting, agar ada kebebasan dalam mengembangkan ilmu dan menyuarakan hasil penelitian secara objektif tanpa intervensi kekuasaan. Keberanian ini mengantarkan pemimpin untuk tidak mengabdi kepada kekuasaan atau kepentingan politik, tetapi dia harus tunduk kepada kebenaran dan otoritas keilmuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia senantiasa perlu memfokuskan upayanya untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang asketis dan berani. Pemimpin yang berani karena didasari pada iman, ilmu, dan amal saleh, serta keteladanan yang baik adalah pemimpin yang mampu mengubah masa depan bangsa menjadi lebih baik.

KEPEMIMPINAN KUAT BANGKITKAN MARTABAT BANGSA

Pakar transformasi budaya organisasi John P. Kotter berpendapat bahwa transformasi merupakan tugas pimpinan puncak, karena berkaitan dengan perubahan *mindset* dan perilaku yang berkaitan dengan determinan budaya, sehingga lebih kultural dan mendasar, dibandingkan dengan reformasi birokrasi yang bersifat struktural. Namun demikian, keduanya, reformasi, apalagi transformasi, harus didorong dari atas (*top-down*) dengan *political will* (kehendak politik) yang kuat disertai keteladanan. Demikian juga terhadap apa yang sering disebut "reformasi administrasi publik".

Transformasi berwujud suatu perubahan besar dan radikal yang terjadi di suatu organisasi, seperti layaknya perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu. Suatu perubahan yang tidak cukup hanya dilakukan secara perlahan-lahan, selangkah demi selangkah (*incremental*), tetapi serentak secara simultan, apalagi menghadapi dinamika perubahan yang demikian cepat. Sehingga

jangan berharap reformasi birokrasi bisa terjadi bila pimpinan puncak tidak memiliki visi dan keinginan kuat untuk suatu perubahan.

Dalam hubungan itu, sepenggal frasa John Kotter di awal tulisan ini telah menjelaskannya secara gamblang, yang selengkapnya adalah sebagai berikut: *Karena manajemen kebanyakan berurusan dengan status quo dan kepemimpinan kebanyakan berurusan dengan perubahan, maka pada masa mendatang kita harus lebih mampu mencetak pemimpin-pemimpin. Tanpa pemimpin yang cukup jumlahnya, visi, komunikasi, dan pemberdayaan yang menjadi jantung perubahan, secara sederhana dapat dikatakan tidak akan cukup cepat untuk memuaskan kebutuhan dan harapan. Artinya, seorang pemimpin puncak harus mampu "mencetak" pemimpin-pemimpin pada level di bawahnya dalam jumlah yang cukup. Tetapi tidak seperti di perusahaan, di tingkat pemerintahan dalam sistem pemilu sekarang ini, tidaklah mungkin seorang Presiden, misalnya, bisa "mencetak" gubernur dan bupati/walikota yang benar-benar mau dan mampu menjalankan visi misinya. Apalagi jika ia ingin membuat gebrakan perubahan, akan banyak menghadapi ranjau-ranjau resistensi terhadap perubahan.*

Padahal mengelola perubahan saat ini dianggap isu utama dalam agenda kepemimpinan nasional ke depan. Sadar akan misi pembaharuan itu, seharusnya bangsa ini berperan dalam "kafilah masa depan" dengan menerima tantangannya. Jangan hanya disibukkan oleh ruang masa lalu seraya membiarkan kafilah masa depan berlalu. Tanpa perlu kehilangan roh masa lalu, kita harus mengambil bagian dalam kebangkitan masa depan itu, karena kuku jejaringnya sebagian telah menancap di dalam diri, masyarakat, dan tubuh bangsa ini.

Mengapa selama ini reformasi birokrasi, termasuk reformasi

administrasi publik, belum menampakkan hasil seperti yang kita harapkan, karena baru menyangkut *hard side of change*, seperti perubahan pada aspek kelembagaan, sistem dan prosedur yang lebih mudah diidentifikasi. Sementara *soft side of change* yang berbasis budaya untuk merubah mindset dan perilaku, belum cukup disentuh.

Bisa dibayangkan, meski kita semua maklum bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, jika ada gagasan untuk mengubah konsep pembangunan yang berbasis kontinental menjadi berbasis maritim, bisa diduga akan banyak menghadapi rintangan yang tidak ringan. Meski kita juga paham, bahwa agar kita menjadi "tuan di negeri sendiri" perlu adanya usaha renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan, bahkan jika mungkin ke arah nasionalisasi, seperti yang dilakukan oleh kelompok negara-negara Amerika Latin yang bermazab neososialisme, malah bisa dipastikan belum tentu semua elite negeri ini sepakat. Paradigma baru, pemerintahan baru, ilmu dan teknologi baru, informasi baru, pendekatan baru, silih berganti membawa perubahan dalam sejarah peradaban bangsa kita. Perubahan semakin besar terasa, ketika perputarannya semakin cepat seperti sekarang ini.

Di era yang diwarnai dengan gejolak perubahan, mempertahankan status quo bukanlah keputusan yang bijak. Ketika segala sesuatu di sekitar kita berubah: keinginan dan kebutuhan masyarakat, produk-produk hukum berubah, negara-negara lain menerapkan strategi bersaing yang selalu diperbaharui, serta seluruh infrastruktur ekonomi juga menggandeng teknologi yang terus berubah, maka perubahan bukan lagi satu pilihan, melainkan keharusan.

Karakter pemimpin yang demikian itu mungkin banyak kita miliki. Ia tidak bisa memunculkan dirinya dengan usahanya

sendiri. Orang yang terlalu percaya pada kerja rasionya, bahwa pemimpin itu dapat diperjuangkan, patut dicurigai kejujuran dan otentitas kepemimpinannya. Orang kuat adalah orang panggilan. Siapa yang memanggil? Hati nurani dan jeritan kebutuhan rakyat sendiri. Pemimpin sejati tidak berambisi menjadi pemimpin. Bila kualitas pemimpin yang demikian itu terpilih menjadi orang kuat, maka kebesarannya akan diuji. Kualitas pemimpin yang demikian itu akan ada di tengah-tengah dualisme yang plural ini. Ia akan "terjepit" antara yang kanan dan kiri, antara mayoritas dan minoritas, antara yang keras dan yang lunak. Kreativitas dan kepekaannya diuji. Di saat-saat inilah keberanian dan ketegasannya terhadap kebenaran mendapatkan tantangan.

Tarik-menarik kepentingan dualistik yang plural inilah ciri khas konteks Indonesia. Orang kuat Amerika mungkin hanya menghadapi dualisme dua partai, tidak ada lagi dualisme rasial. Tetapi, di Indonesia masih menggejala bagaikan api dalam sekam, dualisme partai-partai, dualisme kepercayaan, dualisme rasial, dualisme bagian Barat dan Timur, dualisme anak emas dan anak tiri, dan sebagainya.

Sesungguhnya yang dualistik itu bisa menjadi pasangan komplementer. Karena itu, api di bawah sekam ini akan mudah dipadamkan bila tidak datang tiupan. Belajar dari pengalaman sejarah, orang Indonesia dasarnya terbuka, toleran, mudah diatur, mudah patuh, tidak banyak menuntut, suka mengakurkan hal-hal dualistik, siap menerima yang asing, tidak menyukai sesuatu yang ekstrem.

Orang kuat Indonesia adalah pemimpin yang memenuhi kebutuhan "dunia tengah" manusia Indonesia. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang kuat, yang berkarakter sederhana, jujur, tulus, memikirkan rakyat kecil, seperti Bung Hatta. Kharismatik

dan patriotik seperti Bung Karno. Kosmopolit seperti Syahrir.

KASUS NEGARA LAIN

Ada banyak rujukan jika kita menginginkan sebuah kepemimpinan yang kuat utuk menghadirkan negara yang juga kuat. Margaret Thatcher, yang dijuluki "Wanita Besi", adalah salah satu contoh pemimpin yang kuat. Ia tidak pernah putus asa jika tanda-tanda kemenangan belum dilihatnya dan terus berjuang sampai sukses berhasil diraih. Beberapa kali Thatcher harus menelan kekalahan, tetapi terus maju sampai akhirnya dipercaya memegang jabatan Menteri Pendidikan di usianya yang ke-44, dan akhirnya menjadi Perdana Menteri sepuluh tahun kemudian, sampai menjabat tiga periode.

Dengan keinginannya yang kuat untuk berhasil, semua hal yang dilakukan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mendengar pandangan dari banyak pihak, dan memikirkan alternatif hasil yang mungkin diperoleh, baik yang terbaik maupun yang terburuk. *"You may have to fight a battle more than once in order to win it"*, adalah pernyataannya yang menunjukkan kemauan kuat Thatcher.

Di bawah asuhan Lee Kuan Yew, Singapura berkembang dari sebuah pulau kecil yang miskin sumber daya hingga menjadi negara makmur. Profesor Charles Schell dari Manchester Business School, Singapura menyebutkan, bahwa kunci keberhasilan Lee adalah kepiawaiannya dalam mengelola *Arms of Leadership*, yakni "kepanjangan tangan" sehingga memungkinkan pemimpin secara efektif menjalankan sebuah organisasi. Tidak peduli sebagus apa pun pemimpinnya, tanpa adanya *"arms"* atau "lengan" kepemimpinan, organisasi tidak akan dapat berkembang secara *sustainable.*

Charles Schell menyebutkan dua alternatif lengan kepemimpinan. Tipe I, melalui penciptaan pemimpin-pemimpin baru (*leader creates leaders*) yang mempunyai visi dan kemampuan menyamai pemimpin puncak. Tipe II, menciptakan sistem dan prosedur yang dikontrol dengan ketat dan dikompensasi melalui *reward and punishment* yang konsisten. Sebuah organisasi yang efektif biasanya memiliki salah satu atau keduanya.

Profesor Schell, menyebutkan adanya perbedaan yang mendasar dalam gaya pengelolaan *Arms of Leadership* model Lee Kuan Yew dengan Pak Harto, walaupun mereka sama-sama keras dalam sikap politiknya. Seperti Indonesia pada waktu itu, partai oposisi di Singapura juga relatif lemah. Meski orang berani mempertanyakan kebijakan pemerintah, tetap saja mereka tidak bisa berbuat banyak. Lee Kuan Yew pernah menuntut lawan politiknya sampai bangkrut, karena menyebut dirinya sebagai orang yang korup dan tidak jujur. Perbedaannya terletak pada bagaimana pemerintahan tangan besi Lee juga diimbangi dengan sistem yang kuat dan penegakan hukum yang baik.

Etika dan cara hidup parlemen ditetapkan dengan standar yang tinggi. Anggota parlemen dilarang mengunjungi bar untuk minum atau pun sekadar bersosialisasi, apalagi berani menerima "gratifikasi". Standar yang sama diberlakukan di jajaran pemerintahan, tanpa ampun bagi mereka yang ketahuan berjudi, korupsi, atau pun main wanita. Selain itu, sistem birokrasi yang ketat tetapi tetap terkontrol, sehingga bagi mereka yang mengikuti prosedur dengan benar akan dapat menyelesaikan kepentingannya secara cepat dan efisien.

Kemudian jika merujuk pengalaman negara Afrika Selatan, kita pasti harus menyebut dengan rasa kagum dan hormat kepada Presiden pertama kulit hitam, Nelson Mandela. Seorang pemimpin

besar Afrika Selatan, yang membawa bangsanya dari negara yang rasialis, menjadi negara yang demokratis dan merdeka.

Dalam sebuah acara talk show TV yang dipandu oleh presenter terkenal Oprah Winfrey, Nelson Mandela menceritakan bahwa selama penderitaan 27 tahun dalam penjara Pemerintah Apartheid, justru mengalami perubahan karakter dan memperoleh kedamaian dalam dirinya. Sehingga dia menjadi manusia yang rendah hati dan mau memaafkan mereka yang telah membuatnya menderita melalui rekonsiliasi nasional. Pelajaran mengenai kerendahan hati dan kepemimpinan sejati dapat kita peroleh dari kisah hidup Nelson Mandela.

Karakter kepemimpinan Nelson Mandel itu sejalan dengan pendapat Kenneth Blanchard, bahwa kepemimpinan dimulai dari dalam hati dan keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Perubahan karakter adalah segala-galanya bagi seorang pemimpin sejati. Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya integritas yang kokoh, daya tahan menghadapi kesulitan dan tantangan, didukung visi serta misi yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati. Setiap kita sesungguhnya, memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin.

Karakter itu juga dimunculkan oleh Hugo Chavez adalah Presiden Venezuela yang kini gaungnya semakin kuat dalam kepolitikan global. Sang presiden pernah dicoba dikudeta olah kelompok "kaum" pemodal. Karena mereka merasa, jika Hugo Chavez memimpin terus dengan ide-ide sosialis maka kehidupan mereka akan terancam. Sepak terjang sang presiden sangat memihak kaum miskin, terbukti banyak perusahaan negara yang dulu di kuasai oleh pihak asing kini dinasionalisasikan. Selain itu, peraturan dan undang-undang yang di jalankan di sana

berdasarkan sistem referendum.

Hugo Chavez, memiliki program di televisi nasional (baca: Indonesia semacam TVRI) *Hallo President*. Dalam acara ini, rakyat bisa menyampaikan pendapatnya "masalah" kepada presiden. Acara ini juga mengabarkan aktivitas sang presiden selama satu minggu. Selain itu, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka dibuatlah misi-misi khusus yang bertugas menangani bidang-bidang publik yang bertujuan untuk memfokuskan kerja pada bidang masing-masing. Misalnya: *Mission Robinson I*, yaitu pemberantasan buta huruf bagi mereka yang terpaksa *drop out* karena miskin mampu untuk dijalankan. Program ini adalah program pemerantasan buta huruf pertama kali dalam 102 tahun dan selesai Juni tahun lalu setelah 1.230.000 orang diajarkan membaca. Dilanjutkan dengan *Mission Robinson II* mengajarkan 900.000 orang dewasa yang buta huruf hingga tingkat enam.

Program pembangunan sekolah dan beasiswa bagi anak-anak orang miskin adalah *Mission Ribas* dan *Sucre*, program pembangunan pusat-pusat kesehatan di tiap *barrio* (kampung-kampung kumuh dan miskin) *Mission Bario Adentro I*, program kredit bagi petani kecil tak bertanah dan bertanah kecil *Mission Vuelvan Caras*, program pemastian makanan/sembako murah bagi rakyat miskin *Mission Mercal*, program pembuatan tanda identitas (*cedullas*) gratis bagi orang-orang yang sudah tinggal di Venezuela 20-30 tahun namun tak memperoleh hak perlindungan sebagai warga negara *Mission Identidad*, hingga saat ini menurut informasi yang diperoleh bahwa *Mission Bario Adentro II* ditetapkan untuk melanjutkan pembangunan pusat-pusat diagnosa kesehatan guna semakin mengintensifkan misi yang pertama.

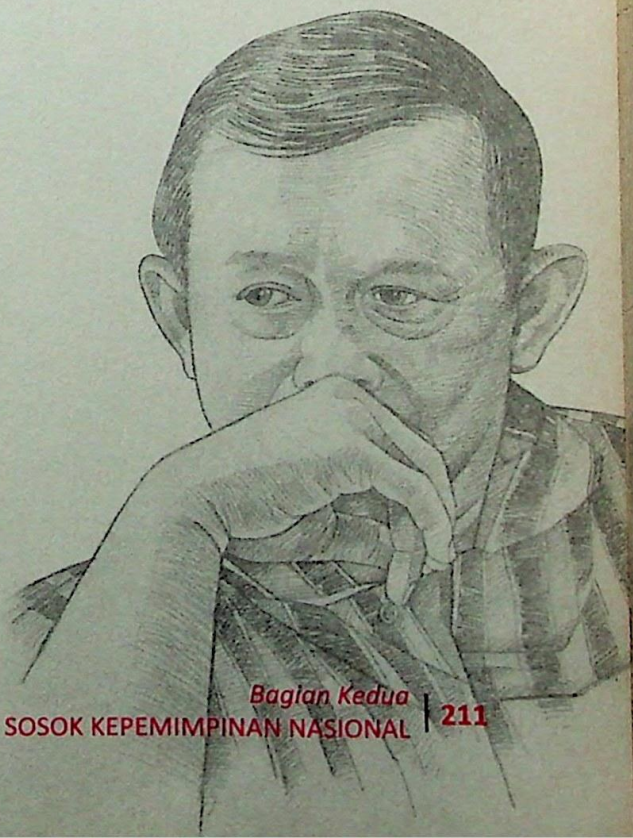
Misi Robinson berhasil membebaskan Venezuela dari buta huruf di tahun 2005 (data UNICEF) dan meluluskan 900.000

orang yang *drop out* sekolah dasar di tahun 2004. *Mission Ribas* menyekolahkan orang-orang yang *drop out* SLTA, dan *Sucre* memberi beasiswa untuk orang miskin masuk ke perguruan tinggi. Secara simultan juga membangun 200 Universitas Simon Bolivar di kota-kota. Selama 102 tahun rakyat tak pernah membayangkan program-program sosial ini dapat dinikmati dengan gratis. *Mission Science* diluncurkan pada bulan Maret 2006 dengan investasi lebih dari US$400 juta, untuk menciptakan jaringan-jaringan penelitian baru di universitas-universitas Venezuela. Salah satu tujuannya adalah "mendemokratiskan" ilmu pengetahuan, dalam rangka untuk dapat dijangkau sekaligus untuk melayani masyarakat.

Program, kebijakan, dan tindakan Chavez tentunya bukan tanpa hambatan. Sebagaimana digambarkan dalam buku ini, gerakan kontra revolusi berulangkali dilakukan oleh kaum oposisi. Kudeta yang dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh Chavez, bahkan telah berhasil merebut kekuasaan selama 48 jam. Akan tetapi karena Chavez telah membangun fondasi yang kuat pada gerakan rakyat, yang secara mandiri mengorganisir diri dalam lingkaran-lingkaran Bolivarian sebagai basis pertahanan revolusi demokratis, maka perebutan kekuasaan tersebut dapat digagalkan.

Kebijakan dan sepak terjang Chavez memberikan pelajaran terbaik bukan saja dalam hal bagaimana kebijakan alternatif selain kapitalisme dijalankan, tetapi juga bagi mereka yang ingin membangun sebuah gerakan yang berkarakter kerakyatan. Menjalankan kekuasaan rakyat tidak perlu dilakukan dengan gerakan bersenjata seperti banyak dijalankan oleh gerakan "Kiri" klasik yang ada di Amerika Latin dan kawasan-kawasan lainnya. Dengan jalur parlementer, Chavez juga bisa mengubah rakyat dan nasibnya, dengan keberanian dan keberpihakan, suatu yang

diperolehnya dari interaksinya dengan gerakan rakyat. *****

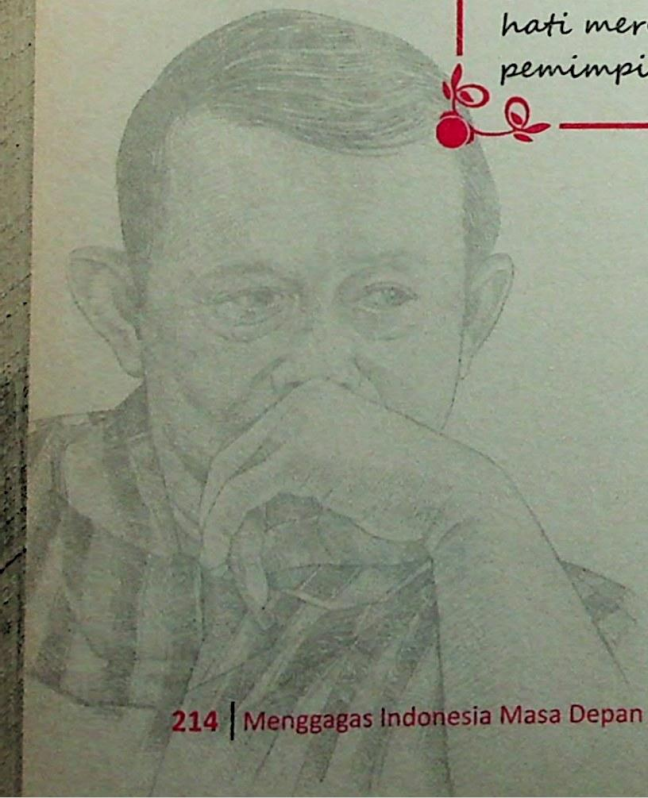


Pemimpin Yang Cerdas dan Efisien

Bab 11

Djoko Santoso
for the People

"Salah satu konsep kepemimpinan yang merupakan warisan kebudayaan bangsa adalah Hastha Brata, atau delapan ajaran keutamaan, seperti yang ditunjukkan oleh sifat-sifat alam. Tidak ada seorangpun yang mau mengikuti orang yang bodoh dan tidak ada seorang pun yang bersedia melakukan perintah seorang yang tidak diyakini dalam hati mereka bahwa inilah sang pemimpin yang handal".



"Seorang pemimpin harus berada di depan yang dipimpinnya untuk menjadi teladan, di tengah-tengah untuk membangun semangat (kemauan), dan mengikuti dari belakang untuk memberi kekuatan (daya)." (**Ki Hadjar Dewantara**)

PENGANTAR

Secara nasional memang kita memerlukan pemimpin untuk meneruskan jalannya sejarah republik kita ini. Tentu saja yang dimaksud adalah pemimpin yang mampu membawa masyarakat kita kepada cita-cita nasional, yang telah digariskan oleh falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Faktor kepemimpinan teramat penting dan menentukan dalam kehidupan setiap bangsa, karena maju mundurnya masyarakat, jatuh bangunnya bangsa, ditentukan oleh pemimpinnya. Pemimpinlah yang merancang masa depan serta menggerakkan masyarakat untuk mencapai cita-cita tertentu. Apa yang dikemukakan itu tidak hanya berlaku untuk pemimpin politik, tetapi untuk pemimpin pada semua tingkatan dan semua lingkungan.

Pada waktu berbicara tentang konsep kepemimpinan masa depan, haruslah yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan modern, yakni memiliki semangat, nilai-nilai, dan pikiran-pikiran modern. Kita tidak boleh lupa pula bahwa bangsa Indonesia memiliki warisan dari para leluhur mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan. Banyak di antaranya yang relevan sepanjang masa dan sekarang pun masih digunakan.

Salah satu konsep kepemimpinan yang merupakan warisan kebudayaan bangsa adalah Hasta Brata, atau delapan ajaran keutamaan, seperti yang ditunjukkan oleh sifat-sifat alam. Ki Hadjar Dewantara merumuskan kepemimpinan sosial dengan tiga ungkapan yang sangat dalam maknanya: *ing ngarso sung*

tulodho, ing madyo mangunkarso, dan tut wuri handayani. Apabila ditelaah secara dalam, pesan-pesan leluhur serta asas-asas kepemimpinan yang telah kita miliki itu mengandung nilai-nilai kepemimpinan yang berlaku di segala jaman. Ini merupakan contoh dari nilai-nilai tradisional yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai modern, dan tidak lapuk dan lekang oleh gelombang perubahan apapun. Ini merupakan sifat-sifat kepemimpinan yang universal, yang berintikan suatu nilai bahwa sang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberikan keyakinan kepada yang dipimpinnya. Pihak yang dipimpin harus merasakan kemanfaatan Hasta Brata, ajaran tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang disampaikan oleh Sri Rama kepada Bharata, adiknya, yang akan menjadi Raja Ayodhya.

Dalam Kakawin Ramayana (cerita berbentuk puisi dalam bahasa Jawa Kuno dari abad ke-10), yaitu ketika Rama harus meninggalkan istana untuk mengembara di hutan bersama Laksmana, adiknya, dan Dewi Shinta, istrinya. Atas permintaan ayahnya, Dastharata Raja Ayodhya, Rama harus mengembara di hutan dahulu sebelum menggantikannya. Di hutan itulah ia kehilangan Dewi Shinta karena mengejar kijang kencana, alat tipuan Prabu Dasamuka. Seorang pemimpin harus berwatak matahari, artinya memberi semangat, memberi kehidupan, dan memberi kekuatan bagi yang dipimpinnya. Harus mempunyai watak bulan, dapat menyenangkan dan memberi terang dalam kegelapan. Memiliki watak bintang, dapat menjadi pedoman.

Berwatak angin, dapat melakukan tindakan secara teliti dan cermat. Harus berwatak mendung, artinya bahwa pemimpin harus berwibawa, setiap tindakannya harus bermanfaat. Pemimpin harus berwatak api, yaitu bertindak adil, mempunyai prinsip, tegas, tanpa pandang bulu. Ia juga harus berwatak samudera, yaitu

mempunyai pandangan luas, berisi, dan rata. Akhirnya seorang pemimpin harus memiliki watak bumi, yaitu budinya sentosa dan suci. Ini diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam berbagai kesempatan berpidato kepada anak-anak didiknya, serta para pengasuh di Perguruan Taman Siswa yang dibangunnya pada masa penjajahan Belanda. Tiga prinsip kepemimpinan itu bermakna bahwa "seorang pemimpin harus berada di depan yang dipimpinnya untuk menjadi teladan, di tengah-tengah untuk membangun semangat (kemauan), dan mengikuti dari belakang untuk memberi kekuatan (daya)." Kata-kata itu dikutip oleh Ki Hadjar dari Drs. Raden Mas Sostrokartono (saudara kandung Raden Adjeng Kartini). Dengan demikian kepemimpinannya akan efektif dan yang dipimpin dapat menerimanya dengan taat dan ikhlas.

Berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan seperti itu pada dasarnya bagi bangsa Indonesia seorang pemimpin harus memiliki tiga sifat.

Pertama, ia harus memiliki idealisme, artinya jelas kemana atau ke arah mana ia ingin membawa yang dipimpinnya. Dalam hal ini wawasan kebangsaan harus menjadi pedoman baginya. Pemimpin harus memahami apa yang menjadi tujuan perjuangan, dan menempatkan kepentingan perjuangan dan masyarakat yang dipimpinnya di atas kepentingannya sendiri. Ia harus memiliki komitmen kepada tujuan perjuangan itu dan senantiasa berupaya mencapainya. Bagi bangsa Indonesia tujuan perjuangan itu jelas. Ia lahir bersama kemerdekaannya dan seluruh sejarahnya.

Sifat bangsa Indonesia yang majemuk membuat pemimpin harus mampu menjadi pemersatu. Dalam hal kepemimpinan kebangsaan, seorang pemimpin harus menjadi pemimpin bangsa, bukan hanya mementingkan kelompok yang dipimpinnya atau

suatu bagian dari bangsa. Seorang pemimpin di Indonesia harus memiliki wawasan kebangsaan dalam pengertian yang lahir pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Kedua, ia harus memiliki pengetahuan, untuk dapat secara efektif membawa yang dipimpin ke arah tujuan yang "diidealkannya". Ia harus mengetahui cara memimpin dan menguasai bidang atau tugas dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan demikian, ia harus seorang profesional. Ini berarti bahwa seorang pemimpin, bukan hanya mengerti teknik kepemimpinan, tetapi juga menguasai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga, seorang pemimpin harus menjadi teladan, dan sumber inspirasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin diharapkan manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa, karena hanya di atas iman dan taqwa, pembangunan yang berakhlak dapat diselenggarakan. Pemimpin juga harus memahami dan menghayati kebudayaan bangsanya.

Ajaran leluhur dan doktrin kepemimpinan yang telah diungkapkan di atas mencakup sifat pertama dan ketiga, bahkan juga sebagian sifat kedua, yaitu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus memimpin. Dengan demikian, masalahnya menjadi lebih sederhana. Bukan doktrin atau asasnya yang masih harus dicari tetapi kualitas pemimpin dan kepemimpinan itu yang perlu dikembangkan, agar mampu menjawab tantangan-tantangan masa depan.

Masa depan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan masa kini dan masa lampau. Begitu pula pemimpin masa depan, ia harus dapat berpikir secara menyeluruh melacak sejarah, menapakkan kakinya pada kekinian, serta sekaligus "bertualang" menjelajahi masa depan. Ia harus memperhatikan berbagai kendala masa

lalu dan masa kini, tetapi ia pun harus memiliki daya cipta untuk membawa yang dipimpinnya ke dalam kehidupan yang lebih sejahtera lahir batin di masa depan. Ia harus dapat melihat ke belakang, ke dalam masanya, dan ke masa depan, dan memahami semua yang dilihatnya dalam rangka aspirasi bangsanya.

Bangsa Indonesia tidak dapat mengharapkan selalu dapat memperoleh pemimpin yang besar seperti Bung Karno, yang mempunyai kapasitas individual dan kualitas kepemimpinan yang luar biasa, dan tampil bersama dengan peran yang historis dan teramat menentukan dalam perjalanan bangsa. Dari beliau itu, kita dapat belajar mengenai bagaimana sosok pemimpin bangsa yang tepat untuk masanya.

Dari sudut pandang ini, maka pertama-tama pemimpin masa depan tidak mungkin bersandar semata-mata kepada kharisma, baik dari pembawaan, karena peran sejarah, atau dibuat secara sintetis. Kelebihan seorang pemimpin akan diukur dari prestasi nyata dan kualitas pemikirannya oleh masyarakat dan orang-orang yang setara (*equal*) dengannya. Para pemimpin nantinya mungkin tidak berbeda terlalu lebih dari yang lain.

Namun, pemimpin yang dituntut adalah yang berjiwa kerakyatan dan sadar, bahwa kepemimpinannya adalah mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh yang dipimpin dan harus dipertanggungjawabkannya. Tidak mungkin lagi seorang pemimpin pada masa kini dan masa mendatang merasa kepemimpinannya itu sebagai haknya, entah karena keturunan, kekayaan, atau kepintarannya.

Para pemimpin masa depan akan memimpin rakyat yang makin luas dan dalam pengetahuannya, yang makin paham akan hak-haknya dan makin menjaga martabat, dan kepentingannya.

Maka pemimpin tidak lagi bisa mengandalkan kepada kekuatan fisik, seperti di masa awal di banyak negara berkembang, tetapi harus lebih kepada kekuatan moral dan intelektual.

Pemimpin masyarakat modern harus siap memimpin secara demokratis, karena kehidupan demokrasi adalah senafas dengan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian pemimpin yang diperlukan dan yang paling akan berhasil memimpin adalah pemimpin yang berjiwa demokrat, bukan yang otoriter. Pemimpin yang tegas bukan harus pemimpin yang otoriter, tetapi justru yang mampu meyakinkan yang dipimpinnya akan kebenaran arah yang akan ditempuh.

Masyarakat akan makin canggih dan tuntutan kepada pemimpinnya akan makin canggih pula. Masyarakat memilih pemimpin yang punya wawasan ke masa depan. Karena masa depan sangat padat pada teknologi, maka seorang pemimpin tidak boleh merasa asing terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Hal ini tidak berarti seorang pemimpin harus seorang ilmuwan (*scientist*), tapi yang lebih penting adalah seorang pemimpin harus memiliki apresiasi terhadap ilmu pengetahuan dan peran teknologi, sebagai unsur yang sangat pokok dalam membentuk kehidupan masa depan.

Dalam suasana kehidupan yang makin rumit, untuk menentukan pilihan yang paling baik menjadi makin sulit. Oleh karena itu, kearifan sangat diperlukan, lebih daripada di masa lalu, untuk menentukan mana yang terbaik, atau mana yang paling kurang buruk di antara alternatif-alternatif yang buruk. Di samping kearifan, diperlukan pula suatu tingkat pemahaman teknis, agar keputusan yang menyangkut implikasi yang kompleks tidak diambil semata-mata atas dasar intuisi, seperti dalam banyak masyarakat tradisional, tetapi dengan dasar pengetahuan dan

perhitungan yang matang.

Karena masyarakat akan lebih terbuka dan kebebasan diperlukan untuk mengembangkan kreativitas, maka untuk mencapai konsensus akan makin pelik. Kembali diperlukan kearifan dari pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat yang tidak selalu mendapat dukungan orang banyak. Perkembangan ekonomi dunia serta persaingan yang makin tajam, membuat pemimpin bangsa di masa depan harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata hubungan internasional dan mengenai bekerjanya mekanisme ekonomi dunia.

Para pemimpin bangsa harus memiliki kemampuan untuk membawa bangsa ini memenangkan persaingan, yang sangat diperlukan untuk kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Tidak ada bangsa yang dapat mengisolasikan diri dan tidak tergantung kepada hubungan internasional. Pemimpin modern dengan demikian harus mempunyai minat dan pengetahuan yang cukup, mengenai hal ikhwal yang terjadi di luar batas kepentingan bangsanya sendiri. Ia harus memiliki jiwa kemanusiaan dan perhatian (*concern*) terhadap masalah-masalah kemanusiaan.

Dengan berbekal wawasan kebangsaan, para pemimpin masa depan harus mampu memelihara kedaulatan dan kehormatan bangsa di antara masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Selain kekuatan yang dimiliki suatu negara baik dalam bidang politik, ekonomi, atau militer, kualitas kepemimpinan dalam suatu bangsa juga mempengaruhi martabat bangsa itu dalam pergaulan internasional.

Secara keseluruhan pemimpin masa depan adalah pemimpin yang harus membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan mandiri. Kemajuan dan kemandirian ini harus menjadi landasan

serta modal untuk membangun bangsa yang adil dan makmur, yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Bagaimana bisa menemukan pemimpin serupa itu, suatu persoalan yang harus bisa dijawab. Tentu saja di sini kita berbicara tentang pemimpin pada berbagai tingkat dan bidang dalam masyarakat, yang semuanya membentuk struktur yang kukuh beralaskan wawasan kebangsaan yang disebutkan di atas. Seperti dikatakan tadi, pemimpin bisa dibuat. Bahkan acapkali dikatakan pemimpin adalah cerminan masyarakatnya (*you deserve your leader*), atau pemimpin adalah "produk budaya" masyarakatnya. Maka sungguh penting menanami lahan yang subur dari sejak sekarang untuk menumbuhkan bibit-bibit kepemimpinan seperti yang dikehendaki. Di sini peran pendidikan nasional teramat penting, baik yang diselenggarakan di sekolah, dalam masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Melalui sistem pendidikan akan tampil dan ditempa pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan menentukan pula kualitas pemimpin masa depan.

KEMAMPUAN BERPIKIR

Tak bisa dipungkiri, seorang pemimpin tidak hanya cukup dengan akhlak yang baik saja, tapi ia juga harus memiliki kemampuan berpikir yang cerdas. Sifat-sifat yang baik hanya sebatas menjadikan seseorang pemimpin sebagai sosok yang berwibawa, namun kemampuan berpikirlah yang menjadikan seorang pemimpin dapat dikatakan sukses. Ketika dihadapkan pada suatu masalah, seorang pemimpin secara tidak langsung akan memperlihatkan kemampuan berpikirnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berpikir secara analitis akan membantu dalam memilah

permasalahan menjadi bagian yang lebih kecil dan mengetahui penyebab utama suatu masalah, berpikir secara sintesis membantu dalam hal menggabungkan berbagai informasi dan pemahaman guna menentukan solusi bagi masalah yang dihadapi. Kemampuan berpikir tersebut diperlukan agar setiap ujian kepemimpinan yang dihadapi, dapat diselesaikan secara sistematis dengan metode yang jelas, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Permasalahan bangsa kita sudah terlalu kompleks, mulai dari masalah sosial, ekonomi, pertahanan-keamanan, politik, dan lain sebagainya. Ini semua hanya dapat diselesaikan apabila pemimpin-pemimpin kita terbiasa dengan budaya berpikir secara analitis dan sintesis.

Seorang pemimpin memang dituntut terlihat cerdas. Sadar atau tidak sadar, kecerdasan dalam memimpin merupakan sesuatu yang dituntut oleh para pengikut. Tidak ada seorangpun yang mau mengikuti orang yang bodoh dan tidak ada seorang pun yang bersedia melakukan perintah seorang yang tidak diyakini dalam hati mereka bahwa inilah sang pemimpin yang handal.

Setiap pengikut pastilah sangat menginginkan pemimpin cerdas dan idealis. Apakah artinya cerdas? Banyak orang salah kaprah dengan cerdas. Cerdas dalam hal apakah seorang pemimpin terlihat? Cerdas tidak sama dengan pintar. Bagi seorang pemimpin yang paling utama yang menjadi sorotan adalah cerdas dalam pengambilan keputusan, gaya bicara, dan dalam mengatur kebijakan strategis.

Dalam hal pengambilan keputusan seorang pemimpin: *Pertama*, tidak berlambat-lambat dalam pengambilan keputusan. Cepat atau lambat suatu keputusan tetaplah harus diambil. Jika Anda bisa mengambil keputusan lebih cepat mengapa harus berlambat-lambat? Menggantung sebuah keputusan merupakan hal yang paling tidak disukai oleh bawahan. Semua orang

menantikan Sang Pemimpin mengambil keputusan. Setiap gerakan pemimpin merupakan sesuatu yang bagaikan ikan di aquarium, sangat diperhatikan oleh semua orang. Keputusan yang lambat membuat pemimpin terlihat bodoh.

Kedua, kemampuan menjelaskan alasan pengambilan keputusan yang logis. Melalui penjelasan yang dapat diterima oleh logika semua orang, maka akan dicapai kesepakatan dan persamaan tujuan. Pada saat seorang pemimpin mampu memenangkan pikiran para anggota *team*-nya, sehingga semua menyetujui apa yang diputuskan pemimpin, maka semua *team* Anda akan berpikir Anda mengambil keputusan yang cerdas, keputusan yang tepat. Dalam hal ini maka kemampuan Anda berkomunikasi dengan bawahan sangat menentukan, kemampuan Anda mensosialisasikan kebijakan dan keputusan perlu dikembangkan.

Berbeda dengan orang yang pintar. Orang pintar bisa memiliki *image* pendiam, berkacamata seperti kutu buku dan tidak banyak bicara. Tetapi orang cerdas terlihat cerdas dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Perbedaan antara pintar dan cerdas sangat besar. Dalam dunia kepemimpinan, kepintaran tidak menjamin Anda cerdas dalam pengambilan keputusan. Pada masa sekarang ini diperlukan pemimpin yang juga bisa bicara. Kemampuan berkomunikasi dengan baik menjadi salah satu tuntutan ketrampilan pemimpin. Jika Anda memiliki masalah di sini, Anda dapat melatih mengembangkan diri Anda. Saat ini cukup banyak lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan "*Communication Skill*" yang dapat melatih Anda mengembangkan kemampuan berbicara dengan lebih percaya diri.

Dalam kebijakan-kebijakan pemimpin tersirat kecerdasannya.

Dalam penentuan kebijakan yang akan diambil maka pemimpin memerlukan suatu wawasan yang luas dan menyeluruh yang meliputi keseluruhan organisasi. Walaupun tidak secara mendalam, namun pemimpin cerdas haruslah menguasai bidang-bidang terkait dibawahnya. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan yang dibuat tidak memberatkan salah satu bagian melainkan semua bagian merasakan manfaat atas kebijakan yang dibuat. Jika pemimpin mampu menciptakan kebijakan yang adil dan bernanfaat, semua orang akan memuji kecerdasan pemimpin.

PEMIMPIN CERDAS EMOSIONAL DAN SPIRITUAL

Permasalahan bangsa Indonesia hanya akan teratasi apabila pemimpin yang dipilih bukan hanya sebagai seorang kepala pemerintahan atau kepala negara, tetapi adalah seorang pemimpin dari bangsa yang sangat heterogen ini. Sebagaimana dipahami dalam konsep-konsep teoritis, secara formal dan material, kapasitas dan kualitas seorang pemimpin sangat berbeda dengan kualitas dan kapasitas seorang kepala.

Berbeda dengan "Kepala" yang dapat dibuat, diangkat atau diatur, maka "Pemimpin" adalah representasi dari orang yang dipimpinnya. Kepala negara atau kepala pemerintahan bisa dibuat dan diatur oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam negara (pemimpin partai, pemilik modal, pemimpin militer, tokoh karismatik dan pihak-pihak yang mampu mewarnai dan mendominasi jalannya negara ini). Lebih lanjut dalam pandangannya pemimpin harus merupakan representasi dari semua orang yang disebut rakyat atau warga negara dari negara yang bersangkutan. Sejarah menunjukan bahwa kemunculan seorang pemimpin bermula dari ketokohannya yang dapat diterima semua pihak. Dengan kata lain, seorang pemimpin bukan hanya muncul dari tengah-tengah

orang yang dipimpinnya tetapi juga harus dapat diterima oleh semua pihak.

Dari banyak indikator, seorang presiden yang memiliki kualifikasi seorang pemimpin, salah satu di antaranya adalah: adakah kemampuannya dalam mengelola emosi dirinya dan emosi orang yang dipimpinnya atau dikenal dengan *Emotional Intelligence (EQ)*, sehingga seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional dituntut mampu memahami emosi dirinya, emosi orang yang dipimpinnya, serta mampu mengelola emosi-emosi tersebut dalam hubungan sosial untuk mewujudkan tujuan bersama. Kemampuan tersebut diperlukan dalam merespon kondisi bangsa, yang bagai buih ombak di lautan dan kondisi bangsa yang mengalami kelelahan batin dalam menjalani hidup ini. Hanya pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi yang akan diterima dan memberi harapan kepada orang yang dipimpinnya.

Tugas utama pemimpin adalah pada kemampuannya secara cerdas mengelola emosi, karena setiap orang memiliki perasaan berbeda-beda dan dapat berubah setiap saat. Selaku pemimpin mampukah kita untuk memerintahkan kepada anggota atau rakyat kita untuk meninggalkan perasaannya yang tidak tenteram di rumah atau melepaskan berbagai perasaan yang tidak nyaman?

Dalam pandangan lama, seorang pemimpin yang terlalu banyak mempertimbangkan faktor-faktor perasaan bawahannya, ia dianggap sebagai pemimpin yang lemah, tetapi saat ini hal tersebut sudah merupakan suatu kebutuhan. Belajar dari masalah tersebut, maka tugas utama presiden selaku pemimpin adalah mampukah mengelola perasaan bangsa Indonesia yang sedang gelisah, emosional, putus harapan menjadi lebih baik, dan memiliki optimism, yang selanjutnya akan mewujudkan

komitmen bersama untuk menggapai harapan, dengan tidak menjadikan orang yang dipimpinnya sebagai instrumen bagi kesuksesan tugas kepemimpinannya.

Seorang presiden yang sekaligus seorang pemimpin, semestinya memiliki kecerdasan emosional (EQ) tinggi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi orang yang dipimpinnya. Dalam pandangan para ahli, IQ dikatakan relatif tetap, maka EQ untungnya masih dapat untuk ditingkatkan. Sejak dahulu ada perdebatan abadi apakah seorang pemimpin dilahirkan atau dibentuk oleh waktu dan keadaan. Begitu juga dengan kecerdasan emosional, ada yang sudah dimiliki sejak ia lahir sehingga ia memiliki kepekaan memahami emosi dirinya dan emosi orang lain dengan baik, ataukah hal tersebut merupakan akumulasi dari hasil gemblengan hidup dari mulai kecil hingga dewasa. Penelitian menunjukan bahwa ada komponen genetik yang dimiliki orang tertentu, memungkinkan sejak lahir memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Akan tetapi juga dengan pengalaman hidupnya, jika mau setiap orang dapat meningkatkan kecerdasan emosi mereka. Disamping itu, perjalanan waktu juga membentuk seseorang menjadi lebih matang dan bijaksana.

Seorang pemimpin yang efektif adalah yang selain memiliki kapabilitas, karakter dan integritas, juga memililiki ketulusan hati untuk memperhatikan rakyatnya. Seseorang yang mampu membuat rakyat merasa nyaman, walau dalam keadaan sulit sekalipun. Ia mampu membangkitkan semangat warganya untuk bersama-sama bekerja keras sebagai wujud komitmen kebangsaannya. Untuk itu, ia harus mampu menjadi panutan, pemimpin yang *leading by examples* menjadi sumber inspirasi dan menjadi seorang pemimpin yang mampu menciptakan resonansi

pada orang yang dipimpinnya.

Sejarah mencatat dalam revolusi fisik tahun 1945-1949, kondisi bangsa Indonesia secara lahiriah dan batiniah saat itu lebih susah dibandingkan kondisi saat ini. Namun, mengapa semangat hidup dan daya juang bangsa Indonesia begitu tinggi? Dibandingkan kondisi saat ini meski secara lahiriah lebih baik, namun secara batiniah kondisinya cukup memprihatinkan yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa dan maraknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Motifnya juga beragam, meski kebanyakan adalah hilangnya harapan akan masa depan yang lebih baik.

Beragam jawaban, mengapa pada masa revolusi fisik lebih baik, salah satu jawabannya adalah karena saat itu rakyat dipimpin oleh pemimpin bangsa yang memiliki integritas tinggi dan berkarakter kuat, pemimpin yang beresonansi tinggi dan mampu menggugah emosi rakyat untuk bersatu dan berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemimpin seperti Soekarno, Hatta, Jenderal Sudirman, Agoes Salim, Hamengkubuwono IX, dan yang lainnya. Mereka adalah motivator yang memiliki kemampuan membangkitkan semangat kebersamaan. Dalam suka dan duka, serta semangat gotongroyong yang sekarang mulai memudar, kalau tak ingin dikatakan menghilang.

Secara faktual pemimpin adalah orang yang harus berjuang lebih dahulu dari pada masyarakat yang dipimpinnya dan menjadi orang terakhir ketika menikmati hasilnya. Dengan kata lain kepentingan masyarakat di atas segalanya. Esensinya aktualisasi diri dan pengabdian, dan ketika dia sudah bekerja serta memperlihatkan hasil yang signifikan adalah sesuatu yang wajar,

kemudian dia menikmati dan merasakan dari hasil dan buah kerjanya.

Beberapa kriteria kepemimpinan secara umum, yaitu seorang pemimpin harus menjadi orang yang cerdas dan amanah. Selanjutnya ia harus memiliki kecerdasan, agar ia bisa menempatkan sesuatu dengan sangat tepat dan disenangi rakyatnya. Pemimpin demikian sangat dibutuhkan, tetapi tidak akan sempurna jika tidak didampingi dengan kecerdasan. Paling tidak ada empat hal yang harus dimiliki pemimpin masa depan.

Pertama, pemimpin yang cerdas, dia harus bisa berpikir jauh ke depan. Artinya seorang pemimpin yang cerdas dapat dilihat dari apakah ia memiliki visi atau tidak, juga sejauh mana visi yang dicita-citakannya itu. Dia tidak hanya berpikir untuk hari ini saja, tapi harus mampu membuat perencanaan, misalnya sampai 5-10 tahun ke depan, juga strategi jangka panjang dan jangka pendek.

Kedua, pemimpin yang cerdas itu harus mampu membuat strategi, merencanakan dan menentukan mana yang harus didahulukan. Jangankan memimpin sesuatu yang besar, untuk mengatur hal yang sederhana saja memerlukan kemampuan berpikir. Membuat sesuatu yang sederhana saja jika tidak memakai strategi tentu akan gagal, apalagi untuk memimpin sesuatu yang besar. Jika seseorang tidak mampu menentukan mana yang harus didahulukan dan tidak mampu merencanakan, itu ciri orang yang lemah kepemimpinannya

Ketiga, pemimpin yang cerdas harus terampil membaca, menggali, dan menyinergikan potensi. Pemimpin yang tidak pernah membaca potensi dan menyinergikannya, dia tidak akan sukses karena tidak ada sukses tunggal, tidak pernah bisa sukses hanya dengan sendirian.

Keempat, pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang sa memotivasi. Setelah potensi dibaca dan digali, lalu mereka dorong agar bisa berbuat sesuatu. Seorang pemimpin tidak kup hanya pandai merencanakan dan bercita-cita, tetapi harus ampu memotivasi agar masyarakat bisa bergerak, anak bisa lajar, istri bisa menghemat, tetangga bisa saling menghargai, asana di kantor bisa menjadi produktif, bahkan bangsa bisa rubah menjadi lebih baik akhlaknya.

Sekarang di Indonesia ini orang yang cerdas banyak, setiap mpus melahirkan sarjana setiap tahun, tetapi mengapa Indonesia asih menjadi negara yang belum mampu menyejahterakan kyatnya? Cerdas yang baik adalah cerdas yang dibimbing oleh oral, karena kecerdasan yang tidak tertuntun akan berpeluang erusak. Kebatilan yang dilakukan oleh orang yang cerdas lebih rbahaya dibandingkan oleh orang yang bodoh.

EMIMPIN YANG EFISIEN

Pemimpin yang akan datang ada baiknya belajar dari Tony rnandes, ahli akuntansi tamatan Inggris. Pendiri dan CEO irAsia, perusahaan penerbangan Malaysia yang dikenal dengan sesinya "membuat setiap orang bisa terbang". Tony Fernandes laku pendiri dan CEO AirAsia telah mampu menghidupkan mbali AirAsia milik pemerintah Malaysia yang diambang bangkrutan, dengan dua pesawat Boeing 737-300 dan hutang juta dollar AS. Ia berhasil membelinya dari pemerintah alaysia, setelah terlebih dahulu meyakinkan PM Malaysia saat Mahathir Mohamad, dengan idenya "Penerbangan tarif murah ng akan merevolusi perjalanan udara di Asia Tenggara dan ndorong turisme, hotel, restoran, dan semakin meningkatkan satuan Asia pada saat dunia penerbangan "mati suri" menyusul

serangan teroris 11 September 2001". Ahirnya Mahatir pun setuju melepas dengan harga murah AirAsia kepada Tony Fernandes

AirAsia kini memiliki 18 pesawat Boeing 737-300, dan sudah enam juta diangkut dari dan ke Malaysia. Keuntungannya kini mencapai 16 Juta Dollar AS. Semua orang kini bisa terbang dengan tarif murah namun kualitas tetap terjaga. "Pokoknya setiap orang bisa gembira dua kali lipat dengan tarif setengah harga" ujar Tony yang meraih CEO terbaik Malaysia tahun 2003.

Kiat kesuksesannya terletak pada penekanan ekstra ketat pada efisiensi, meskipun tidak berarti kesejahteraan karyawan dikorbankan. Efisiensi misalnya pada tidak disediakannya makanan dan minuman pada penerbangan yang kurang dari dua jam, efisiensi juga ditekankan pada pilot agar tidak tancap gas pada landas pacu yang panjang, yang bisa menghemat 20 persen bahan bakar. AirAsia juga memperbaiki dan memelihara sendiri pesawatnya sehingga bisa menekan biaya. Pesawat AirAsia hanya sekitar 25 menit berada di landasan. Dengan tarif murah maka 80 persen pesawat-pesawat AirAsia terisi penumpang.

Pemahaman akan efisiensi, penting dimiliki bagi pemimpin Indonesia, dalam kondisi Indonesia yang terbelit hutang hutang luar negri yang cukup besar dan skala prioritas anggaran pembangunan yang belum memihak bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Kalau saja mampu melakukan efisiensi bagi anggaran yang bersifat pemborosan dan tidak terlampau penting, barangkali anggaran pendidikan yang seyogyanya menjadi beban pemerintah dapat dicukupi dan menjadikan setiap orang tua pelajar dan mahasiswa di Indonesia menjadi gembira. Efisiensi bagi peningkatan anggaran pendidikan yang memadai merupakan kunci bagi peningkatan kualitas bangsa untuk keluar dari keterpurukan. Dan presiden terpilih kelak adakah obsesinya

membuat bangsa Indonesia dapat terbang, menggapai impian, *not imposible dreams* seperti AirAsia.

Ahmad Syafii Maarif menyatakan bahwa musuh yang harus dienyahkan dari lingkungn publik adalah sikap hidup pemimpin yang feodal, yang hingga saat ini masih bertahan. Sikap feodalisme yang bertentangan dengan sikap egalitarianisme menganggap bahwa harus ada sekat hierarkis dalam kehidupan sosial. Bahwa, bawahan harus hormat pada atasan adalah hal yang lumrah sejak ribuan tahun yang lalu. Namun yang tidak sah dalam sistem demokrasi adalah jika atasan tidak mau mendengar suara bawahan, padahal suara itu boleh jadi mengandung kebenaran dan kejujuran.

Pemimpin Indonesia sebaiknya memilih pembantu-pembantunya yang setia tetapi tetap kritikal, loyal tetapi kritis dan bukan pembantu yang menyampaikan yang manis-manis saja, sementara yang pahit bagi penyelamatan bangsa dan negara disimpan dalam hati. Nasib pemimpin kita, yang terekam dalam memori kolektif kita, betapa tragisnya pada akhir masa jabatannya dihujat bertahun tahun. Kekuasaannya digoyang, kemudian kekuasaannya diruntuhkan dengan cara tidak jarang di luar koridor "kemanusiaan yang adil dan beradab", antara lain karena yang bersangkutan membiarkan dikelilingi oleh pengelilingnya yang mabuk kekuasaan, dengan mengakomodasi nilai feodal dan semi feodal yang membunuh demokrasi.

Belajar dari pengalaman para pendahulunya agar tragedi getir tidak terulang kembali, ongkosnya terlalu mahal di samping terlalu pedih untuk dikenang. Pemimpin masa depan adalah ia yang bisa memaksimalkan kecerdasan spiritual serta memaknai amanah kepemimpinan yang diemban, merupakan tugas mulia sebagai seorang pemimpin, selain tanggung jawabnya kepada

rakyat. *****



Pemimpin Yang Transformatif

Bab 12

Djoko Santoso
for the People

"Saat ini kita memerlukan seorang pemimpin transformatif. Sosok pemimpin yang menjalankan tugas kepemimpinannya terus menerus diikuti semangat memperjuangkan perubahan. Pemimpin yang transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para bawahannya".



"Kepemimpinan yang transformatif adalah proses dimana para pemimpin dan para pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi." (**John Gregorius Burns**, 1978)

PENGANTAR

Habitat merupakan praktik sosial yang direproduksi melalui interaksi dinamis, antara pengetahuan subyektif dan konteks struktur. Terkait kepemimpinan politik, pengetahuan subyektif merujuk pada ideologi yang berisi konsep tentang apa yang baik dan buruk. Konsep itulah yang mendefinisikan kepentingan-kepentingan para elite terhadap otoritas kekuasaannya.

Secara diametrikal ada dua konsep kepentingan berseberangan yaitu kepentingan umum dan kepentingan sempit. Konteks struktur kepemimpinan politik merupakan sistem, desain kelembagaan politik dan birokrasi. Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem politiknya daripada otoritarianisme, sehingga tatanan politik merupakan susunan kelembagaan yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara.

Habitat kepemimpinan transformatif merupakan praktik ideal dari interaksi dinamis, antara kepentingan umum dan konteks struktur yang demokratis. Dengan begitu, elite kekuasaan dalam habitat kepemimpinan transformatif memilih praktik komunikasi dialog dengan publik, secara transparan dan partisipatif. Praktik komunikasi dialog tersebut mengelola konflik secara negosiatif dan inklusif antara konsep kekuasaan dan aspirasi publik. Interaksi ideal konsep kepentingan publik dengan konteks struktur demokratis, menciptakan praktik-praktik kepemimpinan

yang bekerja menciptakan perubahan progresif.

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF

John Gregorius Burns pada tahun 1978 pernah menggulirkan gagasan tentang kepemimpinan yang transformatif. Kepemimpinan yang transformatif menurut Burns adalah sebuah proses dimana para pemimpin dan para pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Kesadaran para pengikut dibangkitkan dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai moral seperti kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan, bukan didasarkan pada emosi seperti kecemburuan, keserakahan, dan kebencian.

Dari definisi tentang kepemimpinan transformatif yang coba dibangun oleh Burns, kita bisa melihat bahwa ada pra syarat yang sangat mendasar sebelum pemimpin yang transformatif itu lahir, yaitu tidak berdasarkan pada kecemburuan, keserakahan, dan kebencian. Kita dapat menambah lagi pra syarat, yaitu jujur dan amanah. Hanya dengan kejujuran dan sifat amanah (dapat dipercaya atau bertanggung jawab) yang akan mengantarkan seorang manusia menjadi seorang pemimpin yang transformatif.

Saat ini kita memerlukan seorang pemimpin transformatif. Sosok pemimpin yang menjalankan tugas kepemimpinannya terus-menerus diikuti semangat memperjuangkan perubahan. Inti perubahan adalah bangkitnya bangsa dari berjuta himpitan, terletak pada eksisnya pemimpin transformatif yang melakukan upaya transformasi. Pemimpin yang mampu mengubah sisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa, dari tidak baik hingga jadi lebih baik. Pemimpin seperti ini adalah sosok yang bisa mengubah bangsa ke arah yang lebih baik secara terarah, bertahap, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pembaruan politik di Indonesia memang perlu diupayakan terus-menerus. Konflik di tubuh masyarakat bakal menggejala, apabila ketidakadilan yang diperoleh warga untuk memperoleh haknya, seperti mendapatkan kesejahteraan hidup, pelayanan publik seperti ketidakmudahan mengakses pendidikan, kesehatan, dan sulitnya sisi perekonomian, disinyalir dapat memercikkan konflik horisontal.

Masalah bangsa yang makin kompleks dan fenomena kebijakan pemerintahan pusat dan daerah yang tidak sehati dengan aspirasi rakyat, merupakan akibat dari elite kekuasaan yang memupuk habitat kepemimpinan pencitraan. Sedangkan habitat kepemimpinan transformatif pada kenyataannya belum cukup kuat terbangun di republik ini. Perubahan progresif yang diharapkan oleh rakyat masih berada di jalan terjal.

Kecuali para pemimpin nasional dan daerah tergerak secara kolektif menanggalkan habitat kepemimpinan pencitraan dan membangun habitat kepemimpinan transformatif. Proses tersebut tidak mustahil apabila para elite kekuasaan yang telah membangun habitat kepemimpinan transformatif secara aktif melakukan internalisasi, yaitu proses mempengaruhi lingkungan politik untuk mempraktikkan kepemimpinan transformatif yang berbasis pada nilai dan prinsip demokrasi.

Sebagian elite kekuasaan dalam pemerintahan, terutama di tingkat daerah, sebenarnya telah membangun habitat kepemimpinan transformatif. Pada konsistensi para elite kekuasaan tersebut disematkan harapan proses internalisasi habitat kepemimpinan transformatif.

Ada dua arah internalisasi habitat kepemimpinan transformatif;

Pertama, internalisasi khusus yang mempengaruhi jajaran kepemimpinan di dalam wilayah otoritas politik, seperti wali kota terhadap pejabat birokrasi, camat, dan lurah. Internalisasi spesifik ditandai oleh kemauan dan intensitas pemimpin turun ke lapangan untuk mendorong kepemimpinan di bawahnya menjalankan tugas kepemerintahan, sesuai mandat konstitusi dan demokrasi.

Kedua, internalisasi umum yang ditujukan kepada semua pemimpin dalam struktur kekuasaan daerah dan nasional. Internalisasi umum cenderung lebih sulit dilakukan karena pluralitas kepentingan dan jejaring politik lebih kompleks.

Kendati demikian, praktik habitat kepemimpinan transformatif yang saat ini mulai mendapatkan dukungan publik luas memiliki pengaruh kuat. Jika para pemimpin dalam struktur kekuasaan tetap memelihara habitat kepemimpinan pencitraan, mereka akan ditinggalkan oleh publik. Jejaring elite yang membangun habitat kepemimpinan transformatif merupakan urgensi demokrasi Indonesia, agar cita-cita konstitusi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk bangsa bisa terwujud.

Kepemimpinan yang transformatif karena pemimpin membuat pengikut lebih mengutamakan pentingnya nilai kerja dan bersedia mengorbankan minat pribadi demi kepentingan organisasi, pemimpin mengembangkan keterampilan dan keyakinan pengikut untuk mempersiapkan mereka mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memberdayakan organisasi, pemimpin mendorong dan membantu pengikut bila diperlukan untuk memelihara keantusiasan dan berupaya sekuat tenaga apabila menghadapi hambatan atau kesulitan, dan oleh karena itu pengikut menjadi percaya dan menaruh hormat kepada

pemimpin, serta lebih termotivasi melakukan setiap kegiatan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Munculnya sosok pemimpin yang transformasional adalah hal yang kita harapkan. Sosok pemimpin tipe ini adalah pemimpin yang mampu menggerakkan harapan rakyat untuk senantiasa melakukan perbaikan perbaikan. Dalam perspektif ini, syarat-syarat pemimpin transformasional itu sebagai berikut :

Pertama, memiliki kemampuan refleksivitas yang memadai. Refleksivitas pada dasarnya merujuk pada kemampuan aktor untuk memonitor tindakan-tindakan dan perilaku yang dipimpin. Sebagian besar refleksivitas didasarkan pada pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Dengan membaca masa lalu dan memperbaikinya, maka sesungguhnya bisa menatap masa depan yang jauh lebih baik.

Kedua, pemimpin transformasional harus memiliki basis asketisme politik yang memadai. Asketisme politik secara umum bisa kita pahami sebagai upaya menjalankan aktivitas berpolitik, berdasarkan pada prinsip kesederhanaan dan etika, serta memproyeksikan tindakannya demi kemaslahatan rakyat banyak. Artinya, asketisme politik tidak sekadar moralitas melainkan juga tindakan sosial. Dalam konstruksi berpikir Jurgen Habermas, tindakan sosial ini biasanya melibatkan dua dimensi praksis yakni kerja dan interaksi.

Ketiga, memiliki sumberdaya politik (*political resources*) yang memadai untuk mendukung performa komunikasinya. Pemimpin terpilih harus mengantongi kekuasaan yang sah (*legitimate power*) sebagai contoh, produk dari pemilu presiden langsung. Dalam menjaga performa, tentu saja terkait dengan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan, yakni citra dan agenda kerja. Citra terkait dengan

cara pandang masyarakat atas sosok pemimpin dengan segala macam atributnya, sementara agenda terkait dengan program kerja nyata pemimpin ke depan.

MENGGALI PEMIMPIN TRANSFORMATIF

Kepemimpinan transformatif didefinisikan sebagai kepemimpinan dimana para pemimpin menggunakan karisma mereka untuk melakukan transformasi dan merevitalisasi organisasinya (Gerald Greenberg dan Robert A Baron, *Behavior in Organization*, Ohio State University, 2003).

Akan tetapi, kepemimpinan transformatif berbeda dengan kepemimpinan karismatik. Soekarno dan Soeharto boleh jadi memiliki karisma yang luar biasa, sehingga dapat mempengaruhi pengikut-pengikutnya untuk melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan.

Di pihak lain, para pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi para pengikut dan organisasinya secara menyeluruh daripada memberikan instruksi-instruksi yang bersifat *top down* (dari atas ke bawah). Pemimpin yang transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para bawahannya.

Pemimpin yang transformatif lebih menekankan pada bagaimana merevitalisasi institusinya, baik dalam level organisasi maupun negara. Secara lebih detail, para pemimpin yang transformatif memiliki ciri-ciri berikut.

Pertama, mereka memiliki karisma yang dapat menghadirkan sebuah visi yang kuat dan memiliki kepekaan terhadap misi kelembagaannya. Hal ini menegaskan bahwa setiap gerak dan aktivitasnya senantiasa disesuaikan dengan visi dan misi

organisasinya. Inilah yang dijadikan sebagai acuan untuk tetap konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya.

Kedua, mereka senantiasa menghadirkan stimulasi intelektual. Artinya, mereka selalu membantu dan mendorong para pengikutnya untuk mengenali ragam persoalan dan cara-cara untuk memecahkannya. Ini berarti para pengikutnya diberi kesempatan untuk berpartisipasi mengidentifikasi persoalan dan secara bersama-sama mencari cara penyelesaian yang terbaik. Dalam karakteristik ini, pemimpin transformatif lebih banyak mendengar ketimbang memberikan instruksi.

Ketiga, pemimpin transformatif memiliki perhatian dan kepedulian terhadap setiap individu pengikutnya. Mereka memberikan dorongan, perhatian, dukungan kepada pengikutnya untuk melakukan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri dan komunitasnya.

Keempat, pemimpin transformatif senantiasa memberikan motivasi yang menginspirasi bagi pengikutnya dengan cara melakukan komunikasi secara efektif dengan menggunakan simbol-simbol, tidak hanya menggunakan bahasa verbal.

Kelima, mereka berupaya meningkatkan kapasitas para pengikutnya agar bisa mandiri, tidak selamanya tergantung pada sang pemimpin. Ini berarti pemimpin transformatif menyadari pentingnya proses kaderisasi dalam transformasi kepemimpinan berikutnya. Tentu saja hal ini sangat berbeda jauh dengan model kepemimpinan karismatik, yang memposisikan para pengikutnya tetap lemah dan tergantung pada dirinya tanpa memikirkan peningkatan kapasitas dari para pengikutnya.

Keenam, para pemimpin transformatif lebih banyak memberikan contoh daripada banyak berbicara. Artinya, ada sisi

keteladanan yang dihadirkan kepada para pengikutnya dengan lebih banyak bekerja, dibandingkan banyak berpidato yang berapi-api tanpa disertai tindakan yang konkret.

Dalam perspektif kepemimpinan transformatif tersebut, sekat yang membatasi antara peran kaum muda dan golongan tua sejatinya justru menjadi jembatan dalam melakukan proses transformasi kepemimpinan. Persoalan sesungguhnya bukan terletak pada kutub perbedaan cara pandang antara kaum muda versus kaum tua, antara pro kemapanan versus pro perubahan.

Persoalan sesungguhnya justru terletak pada bagaimana membangun mekanisme dan sistem transformasi kepemimpinan. Hal itu hanya bisa berjalan jika ada visi dan konsistensi yang kuat dalam jiwa seorang pemimpin, dan masalah itu bukan monopoli kaum tua atau kaum muda saja.

Sebab sejarah tidaklah berhenti pada satu generasi, sejarah akan terus menghadirkan tokoh dan pemimpinnya. Sejarah pula yang akan membuktikan apakah seorang pemimpin akan tercatat dengan tinta emas atau tinta hitam penuh bercak. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang berhasil melahirkan pemimpin yang melebihi kemampuannya.

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF: INTEGRITAS MORAL ETIK

Tujuan dari kepemimpinan adalah terwujudnya kesejahteraan orang yang dipimpin (*bonum comunae*). Berdasarkan pada tujuan dan fungsi luhur kepemimpinan tersebut maka Plato menegaskan bahwa menjadi seorang pemimpin haruslah memenuhi "kriteria etis". Pemimpin yang memiliki kriteria etis, mengandalkan daya nalar dalam menjalankan tugas kepemimpinannya dan

berpijak pada nilai dan norma-norma moral, khususnya keadilan dan kebenaran, serta kepedulian yang tinggi terhadap kondisi rakyatnya. Pemimpin yang diidamkan Plato adalah orang yang mempunyai empati yang besar terhadap kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Dasar filosofis penentuan kriteria di atas adalah nilai kehidupan dari rakyat. Hal yang diurus oleh seorang pemimpin bukanlah benda-benda, tetapi manusia. Pemimpin harus mempunyai kepekaan terhadap kehidupan orang-orang yang diurusnya.

Catatan historis-filosofis Plato di atas dapat menjadi cermin untuk meneropong realitas kepemimpinan di Indonesia saat ini. Ada fenomena yang kurang menggembirakan saat ini, yakni banyaknya pemimpin pusat dan daerah yang tersandung masalah hukum, karena korupsi dan sebagainya. Atau fenomena lain yakni masuknya begitu banyak artis ke lembaga legislatif dan eksekutif. Tidak bermaksud untuk mengecilkan kualitas mereka, tetapi apakan kapasitas keartisan sanggup menjawab setiap tantangan bangsa yang menuntut konsentrasi dan pemberian diri secara total dan moralitas yang tinggi? Tantangan global dalam bidang ekonomi dan politik menuntut kualitas kepemimpinan yang sanggup bertarung di tingkat yang lebih luas. Ketika bangsa ini berhenti memikirkan, apalagi menyiapkan kader-kader bangsanya, maka eksistensi bangsa ini akan terancam. Bangsa ini akan hanya menjadi penonton dan bulan-bulanan arus globalisasi, karena tidak mempunyai pemimpin yang dapat diandalkan.

Realitas ini mendorong bangsa ini untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas moral, pemimpin yang memiliki etos, dan berkemampuan melakukan transformasi fundamental bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam bukunya *Leadership in Organization* (1989), Gary Yulk menunjukan lima etos

kepemimpinan transformatif.

Pertama, keberpihakan kepada rakyat (*sosial utilitarianistik*).

Kedua, menempatkan nilai-nilai etis sebagai pijakan.

Ketiga, memberikan ruang bagi kreativitas.

Keempat, stimulasi daya intelektual, untuk lahirnya calon-calon pemimpin yang berbobot.

Kelima, mengembangkan kultur dialogis.

Konsepsi etos kepemimpinan trasformatif ini merupakan basis moral-etik yang sifatnya integral, tidak terpisahkan dari kepemimpinan. Etika adalah perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang baik-baik. Etika difungsikan sebagai penuntun dalam bersikap dan bertindak menjalankan kehidupan, menuju ke tingkat keadaan yang lebih baik. Etika adalah determinasi pedoman untuk menjalankan apa-apa yang benar dan tidak melakukan apa-apa yang tidak benar. Dengan demikian menjalankan suatu kehidupan yang penuh etika diyakini akan membawa kehidupan pada suatu kondisi yang tidak menimbulkan efek negatif yang merugikan orang lain.

Upaya menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinan bukanlah suatu hal yang mudah. Sangat diperlukan suatu kesamaan persepsi untuk apa organisasi dijalankan. Untuk itu diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Demi penegakan etika, dibutuhkan kode etik, alat pengendalian atau pengawasan organisasi. Harus ada sanksi yang berlaku sama kepada setiap pelaku organisasi. Kode etik memuat beberapa faktor: peraturan dan ketentuan yang disepakati; sinergitas; persaingan yang sehat; tanggung jawab atau integritas; hubungan kerja dan aspirasi. *****

Pemimpin yang Telah Selesai dengan Persoalan Dirinya Sendiri

Bab 13

Djoko Santoso
for the People

"Sejatinya seorang pemimpin adalah orang yang secara berani mengambil alih masalah orang lain menjadi tanggung jawab dirinya. Ia problem solver masalah lingkungannya dan menjadi harapan publik, rakyatnya. Pemimpin itu adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri".

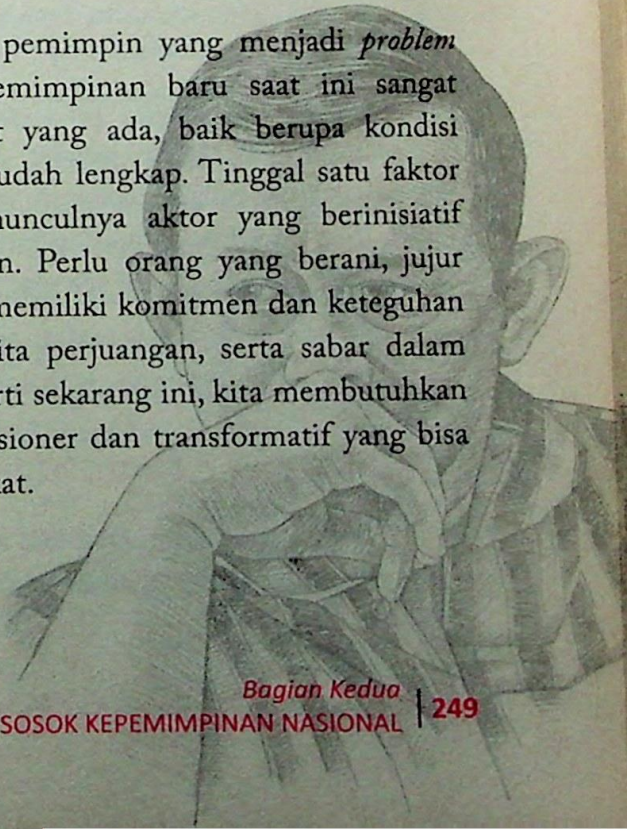


"Pemimpin hendaknya siang dan malam mengendalikan diri sekuat tenaga, karena ia telah menundukkan inderanya sendiri, dapat menguasai diri, pasti mengendalikan rakyatnya." (**Kitab Manawa Dharma Sastra,** VI,7,52)

PENGANTAR

Bertambah lagi usia bangsa ini. Namun masa yang telah lewat itu belum mendekatkan nasib bangsa ini kepada negara yang dicita-cita seperti yang termaktub dalam alinea terakhir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: *"Negara yang pemerintahannya melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."* Sampai detik ini sejumlah masalah masih mengidap di tubuh bangsa ini baik di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Bangsa ini memerlukan pemimpin yang menjadi *problem solver.* Proses kelahiran kepemimpinan baru saat ini sangat memungkinkan. Syarat-syarat yang ada, baik berupa kondisi sosial, ekonomi, dan politik sudah lengkap. Tinggal satu faktor penting yang belum ada: munculnya aktor yang berinisiatif menjadi penggerak perubahan. Perlu orang yang berani, jujur dengan cita-cita perjuangan, memiliki komitmen dan keteguhan terhadap ideologi dan cita-cita perjuangan, serta sabar dalam berjuang. Di era transisi seperti sekarang ini, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang visioner dan transformatif yang bisa menjadi suri teladan masyarakat.



TIPE KEPEMIMPINAN BARU

Tiga karakter pemimpin yang diharapkan masyarakat, yakni:

Pertama, perencana. Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual memadai dan menguasai kondisi makro nasional dari berbagai aspek, sehingga dapat menjaga visi perubahan yang dicitakan bersama.

Kedua, pelayanan. Masyarakat rindu figur pemimpin yang seorang pekerja tekun dan taat pada proses perencanaan yang sudah disepakati sebagai konsensus nasional, menguasai detil masalah kunci kebangsaan, dan mampu melibatkan semua elemen yang kompeten dalam tim kerja yang solid.

Ketiga, pembina. Masyarakat berharap pemimpin menjadi tonggak pemikiran yang kokoh dan menjadi rujukan semua pihak dalam pemecahan masalah bangsa, yang setia dengan nilai-nilai dasar bangsa, dan menjadi teladan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif.

Untuk menumbuhkan tipe kepemimpinan baru, dibutuhkan proses belajar yang berkelanjutan dalam berbagai dimensi.

Pertama, dimensi belajar untuk menginternalisasi dan mempraktikan nilai-nilai baru yang sangat dibutuhkan bagi perubahan kondisi bangsa, sehingga membentuk karakter dan pola perilaku yang positif sebagai penggerak perubahan.

Kedua, belajar menyaring dan menolak nilai-nilai buruk yang diwarisi dari sejarah lama maupun yang datang dari dunia kontemporer, agar tetap terjaga karakter yang otentik dan perilaku yang *genuine.*

Ketiga, belajar menggali dan menemukan serta merevitalisasi nilai-nilai lama yang masih tetap relevan dengan tantangan masa

kini, bahkan menjadi nilai dasar bagi pengembangan masa depan.

Namun kepemimpinan baru bukanlah proyek *trial and error*. Melainkan upaya pengembangan potensi dengan dihadapkan pada kenyataan aktual. Krisis ekonomi-politik yang masih terus berlanjut menuntut tokoh yang kompeten di bidangnya dan memiliki visi yang jauh untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan. Bencana alam dan sosial yang terjadi silih berganti menegaskan perlu hadir tokoh yang peka dan cepat tanggap terhadap penderitaan rakyat, serta berempati dengan nasib mayoritas korban.

Keempat, tantangan lintas negara di era informasi membutuhkan kesadaran pada masalah-masalah dunia, yang mempengaruhi kondisi nasional dan jaringan yang luas dalam memanfaatkan sumber daya.

Kelima, goncangan dalam kehidupan pribadi dan sosial mensyaratkan adanya kemantapan emosional dan spiritual dari setiap pemimpin dalam mengatasi problem diri, keluarga, dan bangsanya.

Tipe pemimpin baru seperti ini bukan hanya dibutuhkan segera di pentas nasional. Tapi, juga di tingkat lokal. Karena itu, bangsa ini membutuhkan secara masif proses pengkaderan (baca: sekolah kepemimpinan) yang outputnya bisa diuji di tingkat regional bahkan global. Indonesia tidak mungkin memainkan peranan di arena antarbangsa tanpa anak-anak bangsa yang memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni.

TANTANGAN INDONESIA MASA DEPAN

Tantangan lingkungan Indonesia masa depan sangat beragam. Namun, kata kuncinya adalah dinamika perubahan

yang begitu cepat. Dinamika perubahan itu tercipta dari isu-isu seperti globalisasi, regionalisasi, *knowledge economy*, dan *borderless world*. Dalam menghadapi situasi dunia yang dinamis seperti itu, bangsa ini harus punya perspektif yang berbeda tentang tipe kepemimpinannya.

Pemimpin di masa mendatang bukan hanya pemimpin yang berkarateristik seperti diinginkan oleh para pengikutnya. Tapi, terdapat harapan-harapan bahwa pemimpin di masa depan mampu memenuhi dan memiliki kondisi-kondisi seperti berikut ini.

Pertama, *the meaning of direction* (memberikan visi, arah, dan tujuan). Seorang pemimpin yang efektif membawa kedalaman (*passion*), perspektif, dan arti dalam proses menentukan maksud dan tujuan dari kepemimpinannya. Setiap pemimpin yang efektif adalah menghayati apa yang dilakukannya. Waktu dan upaya yang dicurahkan untuk bekerja menuntut komitmen dan penghayatan.

Kedua, *trust in and from the leader* (menimbulkan kepercayaan). Keterbukaan merupakan komponen penting dari kepercayaan. Saat kita jujur mengenai keterbatasan pengetahuan yang tidak ada seluruh jawabannya, kita memperoleh pemahaman dan penghargaan dari orang lain. Seorang pemimpin yang menciptakan iklim keterbukaan dalam kepemimpinannya adalah pemimpin yang mampu menghilangkan penghalang berupa kecemasan, yang menyebabkan masyarakat yang dipimpinnya menyimpan sesuatu yang buruk atas kepemimpinnya. Bila pemimpin membagi informasi mengenai apa yang menjadi kebijakannya, pemimpin tersebut memberlakukan keterbukaan sebagai salah satu tolok ukur dari "*performance*" kepemimpinannya.

Ketiga, *a sense of hope* (memberikan harapan dan optimisme).

Harapan merupakan kombinasi dari penentuan pencapaian tujuan dan kemampuan mengartikan apa yang harus dilakukan.

Keempat, *result* (memberikan hasil melalui tindakan, resiko, keingintahuan, dan keberanian). Pemimpin masa depan adalah pemimpin yang berorientasi pada hasil, melihat dirinya sebagai katalis yang berharap mendapatkan hasil besar, tapi menyadari dapat melakukan sedikit saja jika tanpa usaha dari orang lain. Pemimpin yang seperti ini membawa antusiasme, sumber daya, tolerasi terhadap resiko, disiplin dari seorang "entrepreneur".

Selain empat kondisi di atas, terdapat pula beberapa falsafah pemimpin yang harus dipegang teguh pemimpin masa depan Indonesia.

Pertama, pemimpin harus punya integritas.

Kedua, pemimpin harus mengakui akan adanya perbedaan dan keanekaragaman bangsa kita. Dengan demikian, pemimpin masa depan negeri ini mampu mengelola segala perbedaan budaya, latar belakang suku dan agama, serta kepentingan seluruh elemen bangsa ini, lalu mengubahnya menjadi peluang dan kelebihan. Jadi pemimpin masa depan adalah pemimpin yang berpikiran terbuka (*open minded*).

Selain itu, pemimpin masa depan adalah pemimpin yang sadar betul bahwa segala tindakan dan keputusannya akan berpengaruh terhadap orang lain atau sekelompok masyarakat. Hal ini juga yang melandasi kepemimpinannya menjadi begitu empati dengan nasib dan derita rakyatnya.

UPAYA MEMIMPIN DIRI SENDIRI

Pemimpin yang memimpin harus memastikan hal terpenting,

yaitu bahwa ia kompeten bagi upaya memimpin dimulai dari memimpin dirinya sendiri. Pemimpin kompeten dalam upaya memimpin berarti ia memenuhi kriteria baik secara formal maupun professional, serta kepribadian yang olehnya ia dapat bekerja sebagai pemimpin. Bagaimana pemimpin mewujudkan upaya memimpin dengan bekerja sebagai pemimpin itu? Dalam kaitan ini, pemimpin yang bekerja sebagai pemimpin harus mengawali dengan berpikir sebagai pemimpin, bersikap sebagai pemimpin, berkata dan bertindak sebagai pemimpin yang membedakannya dari para bawahan.

Berpikir sebagai pemimpin menjelaskan bahwa sang pemimpin harus memikirkan hal besar dan inklusif bagi kepemimpinannya. Bersikap sebagai pemimpin menjelaskan bahwa ia memahami siapa dirinya dan apa perannya. Di sini sang pemimpin tahu sejauh mana serta sebesar apa kuasa kepemimpinan yang ada padanya, serta bagaimana menerapkannya secara bijak dalam kepemimpinan. Berkata sebagai pemimpin berarti pemimpin berbicara sebagai pemimpin dengan berbijak hati, berbijak sikap, serta berbijak cara bicara. Bertindak sebagai pemimpin berarti ia melakukan apa pun berdasarkan pertimbangan matang dan keputusan teguh.

Dalam mewujudkan upaya memimpin, langkah utama yang harus diambil di sini adalah sang pemimpin secara sadar mengelola perilaku (*behavior*) dan pola (*style*) kepemimpinannya. Di sini pemimpin menggelola *behavior* dan *style*-nya yang khas guna memastikan bagaimana ia mempengaruhi, sehingga orang yang dipimpin bergerak secara terencana dengan melaksanakan tugas (*task/ duty*) berdasarkan kewenangan (*authority*), hak (*privilege*), kewajiban (*obligation*), tanggung jawab (*responsibility*), dan pertanggungjawaban (*accountability*) yang melekat pada

setiap tugas yang dipercayakan kepada bawahannya pada semua jenjang dalam struktur organisasi. Pemimpin secara khusus harus mematutkan kuasa kepemimpinan lengkap (*complete leadership power*, yaitu kemampuan seutuhnya untuk menyebabkan sesuatu terjadi) yang ada padanya sehingga ia dapat melaksanakan upaya memimpin secara pasti dan bertanggung jawab.

Dalam kaitan ini, pemimpin haruslah memastikan kompetensi (karakter – integritas tinggi; pengetahuan – kapasitas teguh dan kecakapan – kapabilitas handal) dirinya yang terus berkembang. Pemastian kompetensi dirinya ini bertujuan meneguhkan sang pemimpin, sehingga ia terbukti mampu dan dapat melaksanakan upaya memimpin secara efektif (berkualitas – *"do the right thing"* – mengerjakan hal benar), efisien (berkuantitas – *"do the right thing rightly"* – mengerjakan hal benar secara baik), sehat (*healthy relations* – mewujudkan hubungan sehat yang organisasional dan personal), dan produktif (*optimum productivity*), sehingga upaya memimpinnya dapat berjalan dengan berhasil, langgeng, dan *well finished* dalam seluruh proses kepemimpinannya.

PEMIMPIN DAMBAAN RAKYAT

"Di dalam diriku terdapat kerinduan abadi". Demikianlah William Shakespeare mencoba menjelaskan hakekat atau makna kehidupannya yang selalu dia dambakan sebagai makhluk Tuhan (David K. Hatch, 2011). Stephen R. Covey (2011) pun sepakat dengan pernyataan Shakespeare tersebut. Di setiap diri seseorang pasti ada yang didambakan atau diinginkan. Suatu tujuan atau misi kehidupan yang ingin dicapainya untuk mencari makna kerinduan untuk dianggap berharga. Demikian juga dengan almarhum Steve Jobs yang menghabiskan kehidupannya untuk berkarya bagi kehidupan melalui *Apple Inc.* Steve Jobs merupakan

seorang yang jenius, pendiri Apple ini ikut andil dalam menjadikan Apple sebagai perusahaan termahal di dunia. Beliau sudah meninggalkan dunia ini, namun seperti pepatah "gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama". Berkat kejeniusannya, internet sekarang ada dalam genggaman kita.

Dambaan akan tujuan hidup ini memacu kita membuat sejumlah pilihan untuk mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan bagi kehidupan. Akan tetapi di dunia yang serba kreatif ini, amatlah mudah bagi kita dibelokkan oleh pilihan yang kurang baik atau tidak bermakna apa-apa, baik bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat.

Pembelokan arah pilihan kita sering terjadi karena penyimpangan terhadap kontrak manusia dengan Tuhannya di alam roh (*primodial covenant*). Perjanjian dengan Tuhan tersebut sebagai dasar dari *spiritual accountability*. *Spiritual accountability* inilah yang melahirkan niat baik, visi dan misi (dambaan) yang baik, usaha terbaik, dan hasil terbaik. Penyimpangan terhadap arah pilihan kita adalah awal kerusakan kehidupan. Niat baik, misi dan visi yang baik, dan telah dikenal oleh khalayak, bahkan mimpi itu telah menghipnotis semangat orang untuk bersimpati dan akhirnya menentukan pilihan untuk memilih kembali menjadi seorang pemimpin nasional, akhirnya dalam sekejap berubah menjadi ketidakpercayaan masyarakat karena penyimpangan dan inkonsistensi seorang pemimpin. Buah ketidakpercayaan tersebut berdampak pada ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam.

Perubahan niat, visi sesorang umumnya disebabkan oleh godaan kekuasaan. Kekuasaan berada pada zona nyaman (*comfort zone*) menjadi penyebab utama kenapa seseorang berpaling dari sebuah janji kepada rakyatnya, karena didalamnya ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Robert Klitgaard, seorang

pakar kebijakan publik dari Harvard University menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

Klitgaard sadar bahwa kepemimpinan seperti ini perlu segera diakhiri dan digantikan sosok kepemimpinan yang selalu memikirkan perubahan nasib rakyat. Rakyat sangat ingin keluar dan segera membebaskan diri dari lilitan 'kepengapan sosial' yang membelenggu mereka, hidup dalam perangkap kemiskinan, ketidakberdayaan di mata hukum, bencana yang selalu menemani mereka karena rusaknya alam akibat eksploitasi, pelayanan publik yang tidak adil, dan lain sebagainya.

Kepemimpinan nasional baru diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang pemimpinnya. Tentu pemimpin yang tidak hanya kuat dalam bermimpi tentang Indonesia di masa depan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kita membutuhkan pemimpin yang konsisten dalam memperjuangkan mimpi yang didambakan bukan oleh dirinya saja, tetapi juga menjadi harapan publik, rakyatnya. Karisma merupakan kekuatan pemimpin yang besar untuk memotivasi pembantunya (bawahannya) dalam melaksanakan tugas. Para menterinya mempercayai pemimpin karena pemimpin dianggap mempunyai pandangan, nilai dan tujuan yang dianggapnya benar. Oleh sebab itu pemimpin yang mempunyai karisma lebih besar dapat lebih mudah mempengaruhi dan mengarahkan bawahan agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Tentu kita berharap kepemimpinan mendatang adalah kepemimpinan yang karismatik, konsisten, dan berintegritas baik.

Sosok pemimpin yang seperti ini adalah sosok pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Sosok pemimpin yang memiliki *spiritual accountability*, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Sosok pemimpin yang selalu istiqamah dan amanah karena selalu menepati janji.

Rakyat mendambakan kehadiran sosok pemimpin yang bersih, tegas, dan berintegritas. Selain itu, sosok tersebut diharapkan juga pluralis, berani mengambil risiko, serta dekat dan mampu menggerakkan rakyat. Pemimpin yang benar-benar mau mengurus rakyat sangat diperlukan, mengingat Indonesia memiliki seabrek masalah dan tantangan.

Dalam konsep sosok yang bersih, seorang pemimpin diharapkan lahir sebagai sosok yang tidak mempunyai dosa politik dan tidak tersangkut korupsi. Pemimpin harus bisa menjadi panutan masyarakat, dapat memotivasi rakyat untuk memiliki etos kerja tinggi, dan dapat meningkatkan daya saing bangsa. Secara konsisten dan sistematis dapat melenyapkan budaya korupsi. Rakyat mengharapkan presiden yang amanah dan punya kompetensi pemimpin yang unggul.

Diperlukan pemimpin berintegritas, yang berarti penegakan hukum di Indonesia saat ini lemah karena banyak kepentingan yang tidak bisa dihindari akibat tidak adanya integritas. Integritas mutlak karena ketegasan tidak akan bermakna tanpa integritas. Integritas penting karena saat mengambil keputusan, ia tidak khawatir meski banyak kepentingan yang masuk.

Karakter pemimpin yang sanggup menggerakkan orang lain untuk mau turun tangan juga sangat penting. Kehadirannya sebagai pemimpin bukan untuk menyelesaikan semua masalah, melainkan dia harus bisa menggerakkan orang lain untuk mau

terlibat.

Saat ini pemimpin berintegritas dan mampu menggerakkan orang lain sulit ditemukan. Partai politik tidak membuka peluang karena lebih mengutamakan siapa yang bisa memfasilitasi mereka secara finansial. Parpol belum mampu menyeleksi kadernya karena dibajak berbagai kepentingan. Rakyat merindukan sosok pemimpin yang bisa menjawab persoalan fundamental, seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan kesenjangan. Pemimpin alternatif harus memiliki integritas moral, serta multi-kecerdasan yaitu intelektual, spiritual, dan emosional.

Karena itu sosok pemimpin bisa dimunculkan apabila Indonesia memiliki sosok yang memiliki jiwa kenegarawanan, untuk membangun negara dan mampu mengatasi segala permasalahan. Pemimpin Indonesia ke depan harus berani ambil risiko. Seorang pemimpin nasional harus berjiwa *nothing to loose* dalam melayani rakyat dan berani melawan preman-preman politik demi membela rakyat.

PEMIMPIN HARUS MENGENDALIKAN DIRI

Dari manakah pemimpin itu harus memulai untuk mencapai kesempurnaan? Adalah dari diri sendiri. Setiap orang jadi pemimpin dirinya sendiri. Jika sudah mampu memimpin diri sendiri, barulah ia menjadi pemimpin orang lain. Seorang pemimpin masyarakat tidak lepas dari kepemimpinan handal yang ada pada dirinya sendiri. Tak bisa lepas dari pengendalian diri atau kontrol panca inderanya sendiri, baik jasmani maupun rohani. Betapa pun pandainya, jika tanpa pengendalian diri, tanpa keseimbangan jiwa, maka dipastikan berdampak merosotnya kehidupan masyarakat yang dipimpin.

Kita bisa belajar menjadi pemimpin dari tokoh terdahulu yang diuraikan dalam kitab-kitab agama atau pun naskah-naskah kuno. Sebut saja Yudhistira dalam Mahabharata, merupakan pemimpin yang menjalankan dharma, sesuai ajaran Agama Hindu yang dianutnya. Yudhistira seorang raja yang baik, terbukti kehidupan rakyat Negeri Indra Prasta yang makmur. Benteng pertahanan Indra Prasta yang kuat dan ia memiliki para pendamping yang siap membantu jalannya pemerintahan, seperti Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan para Resi Bhagawan sebagai penasehat.

Suatu ketika Yudhistira pernah kehilangan kontrol diri, ia kehilangan pengendalian diri dan keseimbangan jiwa. Pada saat ia diundang untuk bermain dadu, melawan raja Gandhara Sakuni, Yudhistira menerimanya dengan cepat. Sudah beberapa kali ia kalah, dan harta yang dipertaruhkan sudah banyak pula. Itu sudah cukup menjadi petunjuk. Namun semakin menjadi-jadi, sampai-sampai ia mempertaruhkan kerajaannya. Hanya karena kontrol dan pengendalian diri, terburu nafsu menggebu dan hilangnya keseimbangan jiwa, maka Yudhistira kehilangan Indra Prasta di meja judi, atas akal bulus raja Gandhara Sakuni.

Menjadi pemimpin memang tidak mudah, perlu pengendalian diri. Pengendalian diri memegang kontrol segala kegiatan untuk mencapai kinerja yang baik dan berhasil. Pemimpin hendaknya menjadi panutan bagi yang dipimpin dalam hal pengendalian diri. Jika sudah saling mengendalikan diri, semua akan terkontrol, tidak ada kesimpang siuran, tumpang tindih, dan kekacauan. Itulah mengapa dalam sloka-sloka mengenai kepemimpinan sangat banyak memuat tentang pengendalian diri, seperti berikut: "Pemimpin hendaknya siang dan malam seharusnya mengendalikan diri sekuat tenaga, karena ia telah menundukkan inderanya sendiri, dapat menguasai diri, pasti mengendalikan

rakyatnya."

Begitu pentingnya pengendalian diri, maka seorang pemimpin pastilah muncul sebuah taksu atau karisma, yang mampu mempengaruhi masyarakat. Namun untuk mengendalikan diri inilah yang sulit apalagi mau membuat karisma diri dan mengendalikan rakyat. Untuk itulah seorang pemimpin berpedoman pada sifat kedewataan dan menerapkannya pada kepemimpinannya. Sifat-sifat kedewataannya itu tersurat dalam sloka: "Indra nilaya markanam, Agni ca waruna sya ca, Candra wite ca yo caiva, Matra nir hertya cacwatih." Artinya: Untuk memenuhi maksud tujuan itu, pemimpin harus memiliki sifat kekal seperti Indra, Vayu, Yama, Surya, Agni, Varuna, Chandra dan Kuwera (Manawa Dharmasastra VII, 4)

TELAH SELESAI DENGAN DIRI SENDIRI

Pemimpin itu adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kompetensi, kemampuan komunikasi, pengalaman atau kualifikasi tidak lebih penting dari apakah dia telah selesai dengan dirinya sendiri apa belum? Yang dimaksud selesai dengan diri sendiri adalah apakah dia masih sibuk dengan masalah-masalahnya sendiri. Tak ada lagi yang lebih dibutuhkan di sana, selain ketangguhan. Dan, ketangguhan selalu berhubungan dengan *leadership*.

Seorang yang dipilih sebagai pemimpin, seorang yang ditunjuk untuk memegang jabatan, harus sudah selesai urusan dengan diri sendiri. Jika tidak, selama dia memimpin, selama dia menjabat, dia sibuk untuk urusan diri dan urusan kepemimpinannya. Orang yang belum selesai dengan dirinya juga bisa dilihat dari betapa hausnya dia dengan penghargaan. Dia merasa tidak cukup dengan penghargaan atas harga diri selama ini, dan karena itu dia ingin

menambahnya.

Seringkali orang yang terbuai oleh keinginan untuk menjadi pemimpin karena dia melihat kesempatan untuk itu. Indikasi ini bisa dilihat di sekeliling kita: banyak orang yang berebut jabatan. Seperti kata pepatah Melayu: "Idung tak mancong, pipi disorong-sorong". Kala rebutan seperti itu, orang berlomba-lomba. Orang saling menyalip. Kadang menyalip di tanjakan dan tikungan. Kadang juga menggunting dalam lipatan. Orang saling sikut dan bermusuhan. *****



Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, Makalah dan Artikel :

Adam, Cindy, *Sukarno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Masagung, 1966, terj.

Agung, Ida Anak Agung Gde, *Renville*, Jakarta: SH, 1991, terj.

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia: Kumpulan Karangan*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Alfian, "Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian" dalam Taufik Abdullah dkk., *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta: LP3ES, 1994).

AlGadri, Hamid, *Islam dan Keturunan Arab: Dalam Pemberontakan Melawan Belanda*, Bandung: Mizan, 1996.

Almond, Gabriel A. & Sidney Verba, *An Analytic Study The Civic Culture, Political Attitudes an Democracy in Five Nations*, Little, Brown and Company, 1965.

Ambardi, Kuskrido, *Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia & LSI, 2009.

Anderson, Benedict Ricard O'Gorman (ROG), *Myithology and Tolerance of the Javanese*, Jakarta: SH, 1965.

Arroisi, Abdurrahman, *Pengembaraan Batin Bung Karno*,

Bandung: Rosdakarya, 1993.

Atmakusuma,(ed. Dkk.), *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: Gramedia, 1982.

Attamimy, H.M., *Djoko Santoso Merajut Harmoni di Bumi Raja-raja, Peran, Kontribusi dan Pemikiran Pangdam XVI Pattimura 2002-2003*, Yogyakarta: Aynat Publishing, 2013.

Barton, Greg, *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, diterjemahkan Biografi Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Baudet, H. & IJ. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*,Jakarta: YOI, 19..), terj.

Benda, HJ, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, Jakarta: P Jaya, 1980, terj.

Budiardjo, Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1986.

Budiardjo, Miriam, "Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik," dalam *Jurnal Ilmu Politik* 1, 1986.

Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 1986.

Chauvel, Richard, "Ambon: Bukan Revolusi Melainkan Kontrarevolusi", dalam *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Grafiti, 1989.

Cribb, Robert Bidson, "Bangsa: Menciptakan Indonesia" dalam

Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Jakarta: Gramedia, 2001.

Dahl, Robert, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Dahl, Robert, "Kepemimpinan dan Reaksi Massa di Jawa, Birma dan di Vietnam," dalam Sartono Kartodirdjo, ed., *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Dahm, Bernhard, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta:LP3ES, 1987.

Dale, Robert D., *Pelayanan sebagai Pemimpin (Ministers as Leaders)*, Malang: Gandum Mas, 1992.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, *Soedirman, Patriotisme, Gerilya dan Martabat Bangsa*, Jakarta, 2008.

Djoko Moeljono, *More About Beyond Leadership - 12 Konsep Kepemimpinan*, Jakarta: Elex Media, 2008.

Dont, Frank, *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (GMUP), 2005.

Effendi, Djohan, "Agama, Ideologi dan Politik dalam Negara Pancasila," T.B. Simatupang et al., *Peranan Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang Membangun*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.

Emmerson, Donald K. (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Jakarta: Gramedia, 2001, terj.

Fatah, R. Eep Saefulloh, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Fattah, Abdoel, *Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Feith, Herbert and Daniel S. Lev, "The End of Indonesian Rebellion," *Pacific Affairs*, 36, No. 1, Spring 1963.

Feith, Herbert & Lance Castles (eds.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca and London: Cornel University Press, 1970.

Feith, Herbert & Lance Castles (eds.), *Pemikiran Politik Indonesia, 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Feith, Herbert, *Sukarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: SH, 1996.

Foulcher, Keith, *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan*, Depok: Komunitas Bambu, 2008.

Fukuyama, Francis, *Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta: Qalam, 2002.

Geertz, Clifford, *The Social History of an Indonesian Town*, Cambridge: MIT, 1965.

Geertz, Clifford, *Religion of Java*, Chicago and London: University of Chicago Press, 1976.

Geertz, Clifford, "Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-Negara Baru," dalam Juwono Sudarsono, ed., *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Gellner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1995.

Global Wealth Report yang dilansir Credit Suisse, tanggal 11 Oktober 2012.

Gonzalez, Mike, Che Guevara dan Revolusi Kuba, Jakarta: Bookmarks, 2004.

Green, Marshall, *Dari Sukarno ke Suharto: G 30 S-PKI dari Kacamata Seorang Dubes*, Jakarta: Grafiti, 1992.

Guevara, Che, *Diary of a Combatant; Ernesto Che Guevara, Sierra Maestra-Santa Clara 1956-1958* , Havana, 2011.

Gunadi, Tom, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD'45*, Bandung: Angkasa, 1990.

Gurr, Ted Robert, ed., *Handbook of Political Conflict*, New York: The Free Press, 1980.

Hadiz, Vedi R., "Negara Orde Baru dalam Perspektif Kelas," dalam *Ilmu dan Budaya*, No. 6, Th. VIII, Maret, 1986.

Hamad, Ibnu (ed), *Membangun Kemandirian Indonesia, Dari Penggalian Nilai Menuju Penataan Kelembagaan*, Jakarta: Forum Dialog Indonesia, 1995.

Hering, Bob, *Soekarno: Arsitek Bangsa*, Jakarta: Kompas, 2012.

Hoesein, Rushdy, *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*, Jakarta: Kompas, 2010.

Huntington, Samuel P., & Joan L. Nelson, *Partisipasi Partai Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Ingelson, John, *Jalan ke Pengasingan: Gerakan Nasionalis Indonesia 1927-1934*, Jakarta: LP3ES, 1988.

Israr, Hikmat, *Meninggalkan Ambon Dengan Kepala Tegak, Sekilas Pengabdian Mayjen TNI Djoko Santoso Selaku Pangkoopslihkam Dalam Memulihkan Konflik Ambon*, Jakarta: Budaya Media, 2013.

Jun, Wang Xiang, *Soekarno Uncensored*, Jakarta: Pustaka Radja, 2008.

Kahin, George McTurnan (1952), *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Kahin, George McTurnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (Nationalism and Revolution in Indonesia), Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980.

Kohn, Hans, *Nasionalisme Arti Dan Sedjarahnja*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1958.

Kutoyo, Sutrisno, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: BP, 1998.

Legge, John D, *Sukarno, Sebuah Biografi Politik*, Jakarta: SH, 1996.

Lev, Daniel S., *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959* (2009), Ithaca: Modern Indonesian Project, southeast Asia Program, Cornel University, 1966.

Liddle, R. William, "Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions," *Paific Affairs*, Vol. 58, No. 1, spring 1985.

Lipset, Seymour Martin, *Political Man, The Social Bases of Politics*, Anchor Books, 1963.

Lubis, Mochtar & James C. Scott (eds.), *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.

Misrawi, Zuhairi, *Hadratussaikh Hasyim Ays'ari*, Jakarta: Kompas, 2010.

Moedjanto, G, *Konsep Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kiai*, Jakarta: Lkis, 2007.

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.

Musa, Ali Masykur, *Nasionalisme di Persimpangan, Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Nagazumi, Akira, *Indonesia Minzoku-ishikino Keisei* (Pembentukan Konsep Nasionalisme Indonesia yang Menyeluruh, 1980.

Nainggolan, Poltak Partogi, *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping*, Jakarta; Sinar Harapan, 1995.

Naisbitt, John, *Megatrends Asia, Eight Asian Megatrends That Are Reshaping Our World*, Simon & Schuster, 1996.

Nasution, Abdul Haris, *Memenuhi Panggilan Tugas, 8 Jilid*, Jakarta: Masagung, 1987.

Nasution, Adnan Buyung, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Niel, Robert van, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Noer, Deliar, *Muhammad Hatta, Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Pope, Jeremy (ed), *Pengembangan Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Puar, Yusuf Abdullah, *Jenderal Sudirman Patriot Teladan*, Jakarta: Antara, 1981.

Purwadi, *Filsafat Jawa dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

Rachbini, Didik J., *Risiko Pembangunan Yang Dibimbing Utang*, Jakarta: Grasindo, 1995.

Ridwan, M. Deden & Asep Gunawan (eds.), *Demokratisasi Kekuasaan, Wacana Ekonomi dan Moral untuk Membangun Indonesia Baru*, Jakarta: LSAF & The Asia Foundation, 1999.

Roeder, OG, *Soeharto, Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto*, Jakarta: Gunung Agung, 1976.

Roem, Mohamad. "Memimpin adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim" dalam Taufik Abdullah dkk., *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Salim, Islam, *Terobosan PDRI dan Peranan TNI: Dalam Perjuangan Politik dan Militer Kemerdekaan RI*, Jakarta: SH, 1995.

Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, Jakarta: LP3ES, 1988.

Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Soetan, Mohamad Noor Angkat, *Generasi Soekarno-Hatta*, Jakarta: UI Press & Lembaga Studi Pembangunan (LSP), 1990.

Russel, Bertrand, *Cita-cita Politik*, Bandung: Armico, 1983.

Safaat, Aat Surya & Edi Utama, *Jenderal TNI (Purn) H. Djoko Santoso, Bukan Jenderal Kancil*, Jakarta: Pustaka Spirit, 2013.

Salisbury, Harrison E., *The New Emperors: China in the Era of Mao and Deng*, New York: Avon Books, 1992.

Santoso, Djoko, *Trisula TNI AD*, Jakarta, 2007.

Santoso, Djoko, "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Perspektif Geopolitik dan Sistem Pertahanan," ceramah Panglima TNI kepada peserta Pusat Pendidikan Ketahanan Nasional-Pemuda (DIKTANAS) Angkatan I Tahun 2008, 4 Pebruari 2009.

Santoso, Djoko, "Membangun Sinergitas Kepemimpinan Nasional Menuju Terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Nasional," disampaikan dalam Diklatpim TNI, 25 Mei 2009.

Santoso, Djoko, "Peningkatan Kualitas Nilai Juang Kepemudaan Dalam Mensuskseskan Pembangunan Demokrasi dan Reformasi TNI", Jakarta 24 Juni 2009.

Santoso, Djoko, "Meningkatkan Kualitas Nilai Juang Kepemudaan Dalam Mensukseskan Pembangunan Demokrasi dan Reformasi TNI," disampaikan dalam Takornas FKPPI, 4 Desember 2009.

Santoso, Djoko, "Memantapkan Nilai-Nilai Kebangsaan Memperkuat Karakter Bangsa,"disampaikan pada Acara Sarasehan Nasionalisme dan Pendidikan Karakter Bangsa, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 Mei 2010.

Santoso, Djoko, "*Penguatan Generasi Muda Bangsa Dalam Strategi Pertahanan Nasional RI,*" Ceramah Panglima TNI di depan Peserta "Rapat Komando Nasional Kongres II Resimen Mahasiswa Indonnesia", 3 Juni 2010.

Santoso, Djoko, "Perspektif Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Kepentingan Nasional," makalah Panglima TNI, Juni 2010.

Santoso, Djoko, "Memimpin Perubahan Dalam Keragaman," disampaikan pada Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terpadu 2010, BEM UI, Jakarta, 29 Oktober 2010.

Santoso, Djoko, "Sambutan Deklarasi Gerakan Indonesia ASA (Adil Sejahtera dan Aman)," Jakarta, 20 Mei 2013.

Santoso, Djoko, "Pengarahan Ketua Dewan Pembina PP-IPHI Dalam Harlah IPHI Tahun 2013," Jakarta, 16 Juni 2013.

Santoso, Djoko, "Peranan Ulama Dalam Memelihara NKRI."

Sarjadi, Soegeng & Sukardi Rinakit (ed.), *Memahami Indonesia*, Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), 2006.

Sartono Kartodirdjo, ed., *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Schuettinger, Robert Lindsay, *Lord Acton: Historian of Liberty*, Open Court Publishing Company, 1976.

Skocpol, Theda, *Negara dan Revolusi Sosial, Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia, dan Cina*. Jakart: Erlangga, 1991.

Soekarno, *The Birth of Pancasila: An Outline of the Five Principles of the Indonesian State*, Jakarta: Ministry of Information, 1958.

Soekarno, 1965, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Jakarta: Panitya Di Bawah Bender Revolusi.

Soekarno, *Pantja Azimat Revolusi*, Surabaya: Fa. Penerbitan "GRIP", Tjetakan Pertama, 1965.

Soekarno, *Nationalism, Islam and Marxism*, Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornel University, 1984.

Stiglitz, Joseph, *Making Globalization Work: The Step to Global Justice*, New York dan London: W. W. Norton & Company, 2006.

Subhan, Arief (peny), *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: LSAF,1999.

Sunstein, Cass R., *Designing Democracy What Constitutions Do?*, New York: Oxford University, 2001.

Surono (ed.), *Nasionalisme & Pembangunan Karakter Bangsa*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2012.

Suryadinata, Leo, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2010.

Suyami, *Konsep Kepemimpinan Jawa [Dalam Ajaran Sastra Cetha dan Astha Brata]*, Yogyakarta: Kepel Press, 2008.

The Economist, *Megachange: The world in 2050*, Economist Books, 2012.

Tim Penulis, *Jenderal TNI Djoko Santoso Mengabdi untuk Negeri*, Jakarta: Dinas Sejarah Angkatan Darat, 2013.

Toynbee, Arnold J., *A Study of History*, London: Oxford University Press.

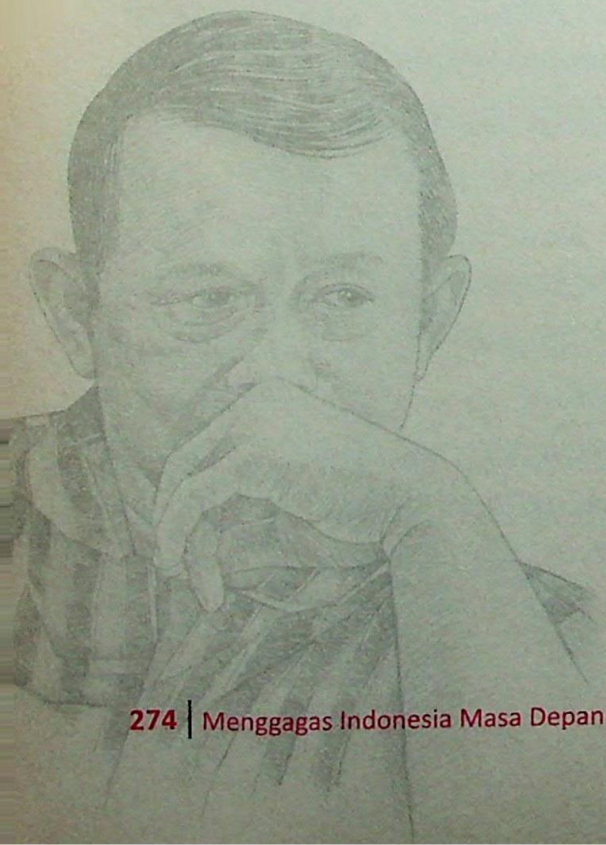
Toynbee, Arnold J., 1953. *Civilization on Trial*, London: Oxford University Press, 1987.

Van der Kroef, Justus Maria, *Indonesia after Sukarno*, Vancouver: University of British Columbia Press, 1971.

Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Leppenas, 1981.

Wahid, Abdurrahman, "Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa," *Prisma*, edisi ekstra, 1984.

Wahid, Abdurrahman, "Pribumisasi Islam," Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (eds), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989.



Tentang Penulis



Djoko Santoso atau lengkapnya **Jenderal (Purn) H. Djoko Santoso** lahir di Kampung Baru Kota Solo, Jawa Tengah 61 tahun yang lalu. Anak seorang guru yang sederhana dan hidup dalam lingkungan keluarga besar dengan 9 bersaudara ini mengalami penempaan hidup di kota yang dijuluki kota budaya, wisata dan batik. Djoko Santoso juga menyimpan cita-cita besar, yaitu ingin menjadi pengabdi bagi nusa dan bangsa.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Djoko Santoso mengikuti pendidikan militer dan lulus Akademi Militer Indonesia (AMI) pada tahun 1975. Setelah itu mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan militer, seperti : Suslapa Infantri, SusDasar Para, SusPengamanan dan Penyelidikan, Seskoad dan Lemhanas.

Untuk menambah wawasan yang lebih luas lagi, Djoko Santoso mengikuti kuliah di Universitas Terbuka dan berhasil menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Selanjutnya Djoko Santoso juga memperoleh gelar master di bidang manajemen (MM).

Pengalaman dalam penugasan militer dialami dengan berbagai jabatan di lingkungan Komando dan Staf, seperti Danyon Inf 330 Kostrad, Danrem 072 Kodam IV Diponegoro, Kasdam

IV Diponegoro, Panglima Divisi Inf II Kostrad, Pangdam XVI Pattimura, Pangdam Jaya, Wakasad, dan Kasad.

Posisi pucuk pimpinan di TNI dipegang Jenderal (Purn) Djoko Santoso saat dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden RI pada tanggal 28 Desember 2007 dan pensiun pada tanggal 30 September 2010.

Jenderal berbintang empat ini telah dianugerahi berbagai bintang dan medali dari TNI dan Polri, yaitu : Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Mahaputra Adipradana.

Selanjutnya Djoko Santoso juga menerima Bintang Pingit Jasa Gemilang dari Angkatan Bersenjata Singapura, The Knight Grand Cross of the Most Noble Order of the Crown of Thailand, Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang Darjah Pertama (Brunei Darussalam), Pahlawan gagah Angkatan Tentera (Malaysia).

Suami dari Angky Retno Yudianti ini sejak memasuki masa pensiun, waktu sehari-harinya digunakan untuk melanjutkan pengabdiannya di Persatuan Bulu Tangkis se-Indonesia (PBSI) yang berakhir pada Desember 2012. Pada periode Kepengurusan 2012-2016 masih dipercaya sebagi Ketua Dewan Penasihat.

Selain itu, ayah dari Andika Pandu Puragabaya dan Ardhya Pratiwi Setyowati ini juga aktif di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) sebagai Ketua Dewan Pembina, Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi), Lembaga Insan Indonesia Sejahtera (LIIS), Pandu Petani Indonesia (PATANI), Federasi Pekerja Informal Indonesia (FPII), mendirikan Strategic Study Center (SSC), Lembaga Indonesia Adil Sejahtera dan Aman

(ASA) sebagai Penasehat dan Pembina. Dan mendirikan Gerakan Kebangsaan sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dalam bidang pendidikan mendapat kepercayaan dari pemerintah bertugas sebagai Anggota Dewan Pengarah Lemhanas RI. Di Universitas Presiden dipercaya sebagai Anggota Dewan Penyantun, selain itu juga memberi kuliah, ceramah di berbagai Perguruan Tinggi maupun di berbagai forum.

Meskipun berjiwa prajurit tulen dan kenyang dengan pengalaman perang di medan-medan tempur, nilai-nilai kemanusiaan dan budaya tetap menjadi pola pendekatan dalam penugasan di berbagai wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadikan modal sekaligus cikal bakal dari keberhasilan pada setiap penugasannya.****



N. _____
PERPUSTAKAAN
KONSERVATORIUM KARAWITAN

Rumusan syarat kepemimpinan yang mencakup akseptabilitas, kapabilitas, dan integritas terletak pada pemimpin yang telah selesai dengan persoalan dirinya sendiri, artinya yang bersangkutan tidak sedang menghadapi persoalan pribadinya. Sebab jika masalahnya belum selesai maka ketiga hal tersebut tentunya akan menjadi penghambat dan menyulitkan kepemimpinannya.

Dalam buku "Menggagas Indonesia Masa Depan", saya mencoba untuk memberikan pemikiran dan analisis tentang kepemimpinan nasional dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa besar di masa mendatang. Harapan saya buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dan upaya membayar hutang sejarah saya sebagai rakyat yang merintis karir militer mulai dari bawah hingga saya menduduki posisi yang tertinggi di TNI, sebagai Panglima TNI.